



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 300 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2016-2021 dalam rangka penilaian terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Banjar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 – 2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016

Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi :
 - a. Bab I Pendahuluan.
 - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah.
 - c. Bab III Gambaran Keuangan Daerah.
 - d. Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah.
 - e. Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.
 - f. Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah.
 - g. Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
 - h. Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 - i. Bab IX Penutup.
- (2) RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 – 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

TTD

NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (156 /2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2016 - 2021

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 300 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah melakukan evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2016-2021 dalam rangka penilaian terhadap hasil pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dimaksud.

Berdasarkan hasil evaluasi maka dipandang perlu dilakukan perubahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 10

BAB I

PENDAHULUAN

Bab pertama dalam dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ini menjelaskan secara komprehensif mengenai urgensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Penyampaian pada bab ini dibagi atas beberapa sub-bab antara lain adalah latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan penyusunan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Banjar terus tumbuh dan berkembang menjadi salah satu pusat layanan dan pusat pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kemajuan Kabupaten Banjar tidak terlepas dari perkembangan lingkungan global, pelaksanaan demokrasi, dan penyelenggaraan otonomi daerah. Perubahan lingkungan global yang ditandai oleh semakin luasnya investasi dan perdagangan internasional menuntut Kabupaten Banjar berkembang menjadi kabupaten yang mempunyai lingkungan kondusif untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas; serta memiliki daya tarik dan daya saing yang kuat. Pelaksanaan demokrasi mendorong proses penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Banjar menjadi lebih baik, partisipatif, transparan dan akuntabel yang memberikan peluang lebih luas bagi terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut tata kelola pemerintahan Kabupaten Banjar yang lebih maju dan modern dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih bermutu, cepat, mudah, adil, dan tanpa diskriminasi bagi

sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah.

Penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016-2021 menjadi sangat penting dan mendesak untuk dilakukan karena dokumen Perubahan RPJMD ini akan menjadi acuan dasar bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dalam melaksanakan kebijakan pembangunan daerah di sisa masa jabatan bupati dan wakil bupati terpilih. Kabupaten Banjar telah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung pada bulan Desember 2015 dan telah terpilih H. Khalilurrahman sebagai Bupati dan H. Saidi Mansyur sebagai Wakil Bupati Kabupaten Banjar masa jabatan 2016-2021. Pelaksanaan Pilkada tersebut merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kemajuan Kabupaten Banjar. Rangkaian dari penyelenggaraan Pilkada adalah penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2016-2021. Dokumen RPJMD menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar terpilih ke dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Banjar dan didukung oleh seluruh Pemerintah Desa di Kabupaten Banjar. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas.

Tahap awal dari penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah menyusun Rancangan RPJMD dengan menganalisis capaian kinerja pembangunan, merumuskan isu strategis, dan menyusun skenario pembangunan untuk dua tahun tahun mendatang termasuk penyusunan perkiraan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan analisis kerangka ekonomi dan investasi daerah. Rancangan Perubahan RPJMD semakin penting karena berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap kewenangan pemerintah

kabupaten/kota. Beberapa kewenangan yang dulu menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota dialihkan menjadi menjadi kewenangan provinsi maupun nasional.

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 juga dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi, koordinasi dan integrasi dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh sebab itu, penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 disusun dengan mengacu pada berbagai dokumen perencanaan antara lain Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, serta berbagai kebijakan nasional lainnya yang berkaitan dengan komitmen internasional seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*).

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar ini disusun dengan berpedoman pada Pancasila sebagai landasan ideologis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta beberapa landasan operasional antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

- Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); dan
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459).
 21. Peraturan Daerah Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2025; (24) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2032.
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Prinsip hirarki perencanaan menjadi acuan penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal tersebut secara eksplisit diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dokumen perencanaan pemerintah pusat menjadi pedoman bagi perumusan dokumen perencanaan pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku dalam penetapan periode perencanaan. Dokumen perencanaan jangka panjang (RPJP) menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan dengan jangka menengah dan tahunan. Oleh karena itu, dokumen perencanaan pembangunan harus dapat memastikan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga evaluasi.

Dokumen Perubahan RPJMD ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal tersebut dirumuskan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan di level pusat seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Renstra Kementerian serta dokumen perencanaan di level daerah seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar serta Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar. Hubungan antar dokumen tersebut juga menjadi acuan dalam proses penganggaran. Hubungan antar dokumen perencanaan tersebut diilustrasikan pada gambar 1.1.

Gambar 1. 1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran



Hubungan antar dokumen perencanaan pembangunan juga erat kaitannya dengan keselarasan antar jangka waktu perencanaan. Setiap dokumen perencanaan yang disusun harus memastikan adanya sinergi dengan dokumen lain pada skala waktu berbeda. Oleh karena itu, penyusunan dokumen jangka menengah harus memperhatikan pedoman yang tercantum dalam dokumen perencanaan jangka panjang. Pada level yang lebih mikro, dokumen perencanaan tahunan mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang telah dirumuskan sebelumnya.

Dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) mencakup RPJP dan RTRW menjadi pedoman dalam perumusan perencanaan jangka menengah (5 tahunan), yaitu RPJM, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten/kota serta dokumen perencanaan sektoral yaitu Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah). Pada level yang lebih operasional, dokumen jangka menengah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen Perubahan RPJMD menjadi arahan bagi perencanaan lima tahunan di tingkat OPD dan perencanaan tahunan lainnya. Maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dijabarkan sebagai berikut:

1.4.1. Maksud

Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menyesuaikan berbagai kebijakan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 dengan peraturan perundangan - undangan yang berlaku, perkembangan pembangunan dan capaiannya, permasalahan/isu strategis pembangunan paling mutakhir serta untuk menyelaraskan antara visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan dengan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan. Dokumen ini juga dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Kabupaten Banjar untuk merumuskan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa, serta sekaligus merupakan acuan penentuan program dan kegiatan pembangunan yang akan dibahas dalam rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Banjar secara berjenjang dan selanjutnya digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dokumen ini juga sebagai acuan dalam menilai kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir masa jabatan.

1.4.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

1. Menyelaraskan visi dan misi serta agenda pembangunan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dengan rumusan strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan;
2. Menjadi pedoman resmi bagi Perangkat Daerah untuk menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Banjar, APBD Provinsi Kalimantan Selatan, APBN dan sumber pendanaan lainnya;
3. Mengintegrasikan pembangunan pemerintahan di semua sektor dan semua level;
4. Menjadi acuan untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
5. Menciptakan tata pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
6. Mengintegrasikan seluruh sumber daya dalam pembangunan Kabupaten Banjar.
7. Mempertajam indikator ukuran pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banjar.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 disusun dengan mengacu pada pedoman operasional dalam Permendagri No.86 Tahun 2017. Adapun detil sistematika penulisan dokumen RPJMD ini untuk setiap bab adalah sebagai berikut:

BAB IPENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan awal RPJMD yang memuat sub-bab mengenai latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran mengenai kondisi daerah yang meliputi geografi dan demografi, serta indikator kerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari sub – bab mengenai kinerja keuangan masa lalu, kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Menyajikan sub-bab mengenai permasalahan pembangunan pada penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang relevan berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD dan isu strategis yang berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat uraian mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah disepakati.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat uraian strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat uraian program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat uraian mengenai tujuan penetapan indikator kinerja yaitu untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

Memuat penjelasan dukungan yang diperlukan untuk menyempurnakan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 dan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran kondisi umum daerah Kabupaten Banjar pada bab dua dianalisis melalui empat aspek yaitu: (1) aspek geografi dan demografi, (2) aspek kesejahteraan masyarakat, (3) aspek pelayanan umum, dan (4) aspek daya saing daerah. Penjelasan empat aspek tersebut penting dijabarkan sebagai input penunjang perencanaan pembangunan daerah. Deskripsi gambaran umum kondisi daerah dalam dokumen ini menggunakan rujukan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, ukuran capaian disajikan secara umum dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pada sub-bagian ini disajikan gambaran umum Kabupaten Banjar dilihat dari aspek geografi dan demografi. Kedua aspek tersebut penting untuk disajikan sebagai input perencanaan daerah. Kedua aspek tersebut disampaikan secara sistematis dari karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, wilayah rawan bencana, dan aspek demografi.

2.1.1. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah dimasukkan dalam aspek geografi. Karakteristik lokasi dan wilayah di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: letak dan kondisi geografis, kondisi kawasan, topografi, klimatologi, hidrologi, dan tutupan lahan. Penyampaian kondisi tersebut dilengkapi analisis terhadap data sekunder serta narasi kualitatif yang relevan.

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Banjar merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Kabupaten Banjar adalah 4.668,50 kilo meter persegi (km²) atau sekitar 12,20 persen dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Ibukota Kabupaten Banjar berada di Martapura. Secara administratif, Kabupaten Banjar terdiri dari 19 kecamatan dengan 277 desa/13 kelurahan. Kabupaten Banjar berbatasan dengan beberapa kabupaten lainnya, antara lain:

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Kecamatan

Kecamatan	Luas (km2)	
Aluh-Aluh	82,48	• Sebelah Utara : Kabupaten Tapin dan HSS
Beruntung Baru	61,42	
Gambut	129,30	• Sebelah Timur : Kabupaten Kotabaru & Tanah Bambu
Kertak Hanyar	45,83	
Tatah Makmur	35,47	
Sungai Tabuk	147,30	
Martapura	42,03	• Sebelah Selatan : Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru
Martapura Timur	29,99	
Martapura Barat	149,38	
Astambul	216,50	
Karang Intan	215,35	• Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin
Aranio	1.166,35	
Sungai Pinang	458,65	
Paramasan	560,85	
Pengaron	433,25	
Sambung Makmur	134,65	
Mataraman	148,40	
Simpang Empat	453,30	
Telaga Bauntung	158,00	
Kabupaten Banjar	4.668,50	

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka,
2016

Tabel 2. 2 Pembagian wilayah Administratif Kabupaten Banjar

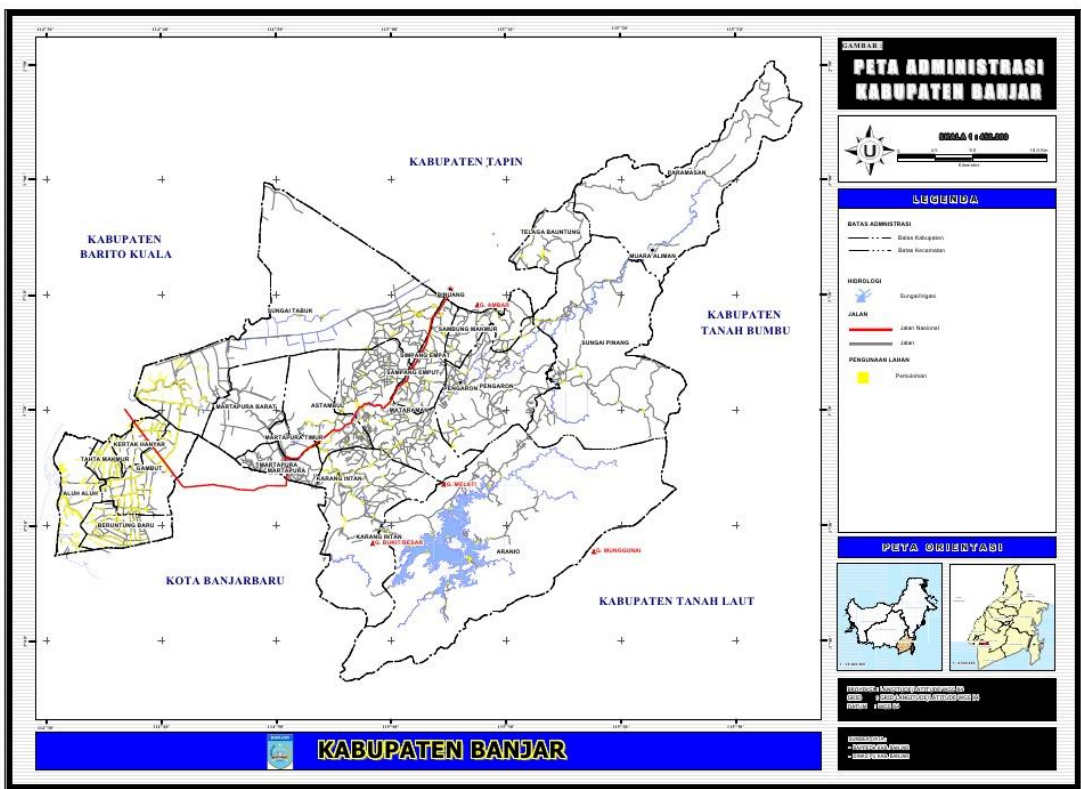
Kecamatan	Desa	Kelurahan	Nama Desa/Kelurahan
Aluh-Aluh	19	-	Aluh Aluh Kecil, Aluh Aluh Kecil Muara, Aluh Aluh Besar, Bakambat, Balimau, Bunipah, Handil Baru, Handil Bujur, Kuin Besar, Kuin Kecil, Labat Muara, Pemurus, Podok, Pulantan, Sei (Sungai Musang, Simpang Warga, Simpang Warga Dalam, Tanipah, Terapu
Beruntung Baru	12	-	Babirik, Handil Purai, Haur Kuning, Jambu Burung, Jambu Raya, Kampung Baru, Lawahan, Muara Halayung, Pindahan Baru, Ruimpiang, Selat Makmur, Tambak Padi
Gambut	12	2	Banyu Hirang, Gambut, Guntung Papuyu, Guntung Ujung, Kayu Bawang, Keladan Baru, Makmur, Malintang, Malintang Baru, Sungai Kupang, Tambak Sirang Baru, Tambak Sirang Darat, Tambak Sirang Laut
Kertak Hanyar	10	3	Banua Hanyar, Jaruju Laut, Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar II, Manarap Baru, Manarap Lama, Manarap Tengah, Mandar Sari, Mekar Raya, Mekar Sari, Pandan Sari, Pasar Kemis, Pemangkih Baru, Sungai Lakum, Simpang Empat
Tatah Makmur	13	-	Layap Baru, Tampang Awang, Tatah Bangkal, Tatah Bangkal Tengah, Tatah Belayung Baru, Tatah Jaruju, Tatah Layap, Tatah Pemangkih Darat, Tatah Pemangkih Laut, Tatah Pemangkih Tengah, Taybah Raya
Sungai Tabuk	20	1	Abumbun Jaya, Gudang Hirang, Gudang Tengah, Keliling Benteng Ilir, Lok Baintan, Lok Baintan Dalam, Lokbuntar, Paku Alam, Pejambuan, Pemakuan, Pematang Panjang, Pembantanan, Sungai Bakung, Sungai Bangkal, Sungai Lulut, Sungai Pinang Baru, Sungai Pinang Lama, Sungai Tabuk Keramat, Sungai Tabuk Kota, Sungai Tandipah, Tajau Landung
Martapura	19	7	Keraton, Cindai Alus, Sungai Sipai, Tanjung Rema, Tanjung Rema Darat, Jawa, Jawa Laut, Tunggul Irang, Tunggul Irang Ilir, Tunggul Irang Ulu, Murung Keraton, Murung Kenanga, Bincau, Bincau Muara, Indra Sari, Labuan Tabu, Pasayangan Barat, Pasayangan Selatan, Pasayangan Utara, Pesayangan, Tambak Baru, Tambak Baru Ilir, Tambak Baru Ulu, Tungkaran, Sungai Paring
Martapura Timur	20	-	Akara Bagantung, Akar Baru, Antasan Senior, Antasan Senior Ilir, Dalam Pagar, Dalam Pagar Ulu, Keramat, Keramat Baru, Mekar, Melayu Ilir, Melayu Ulu, Melayu Tengah, Pekauman, Pekauman Dalam, Pekauman Ulu, Pematang Baru, Sungai Kitano, Tambak Anyar, Tambak Anyar Ilir, Tambak Anyar Ulu
Martapura Barat	13	-	Antasan Sutun, Keliling Benteng Tengah, Keliling Benteng Ulu, Penggalaman, Sungai Batang, Sungai Batang Ilir, Sungai Rangas, Sungai Rangas Hambuku, Sungai Tengah, Sungai Rangas Ulu, Tangkas, Telok Selong, Telok Selong Ulu

Astambul	22	-	Astambul, Astambul Seberang, Banua Anyar I, Banua Anyar II, Danau Salak, Jati, Kalampayan, Kalampayan Ulu, Kaliukan, Kelampaian Ilir, Limamar, Lokgapang, Munggu Raya, Pasar Jati, Pematang Hambawang, Pingaran Ilir, Pingaran Ulu, Sungai Alat, Sungai Tuan Ilir, Sungai Tuan Ulu, Tambak Danau, Tambangan
Karang Intan	26	-	Abirau, Awang Bangkal Barat, Awang Bangkal Timur, Balau, Biih, Jingah Habang Ilir, Jingah Habang Ulu, Karang Intan, Kiram, Lihung, Loktangga, Mali Mali, Mandi Angin Barat, Mandi Angin Timur, Mandi Kapau Barat, Mandi Kapau Timur, Padang Panjang, Pandak Daun, Pasar Lama, Penyambaran, Pulau Nyiur, Sungai Aalang, Sungai Arfat, Sungai Asam, Sungai Besar, Sungai Landas
Aranio	12	-	Apuai, Aranio, Artain, Belangian, Benua Riam, Bunglai, Kalaan, Paau, Rantai Balai, Rantai Bujur, Tiwingan Baru, Tiwingan Lama
Sungai Pinang	11	-	Belimbing Baru, Belimbing Lama, Hakim Makmur, Kahelaan, Kupang Rejo, Pakutik, Rantau Bakula, Rantau Nangka, Sungai Pinang, Sumber Baru, Sumber Harapan
Paramasan	4	-	Angkipih, Peramasan Atas, Peramasan Bawah, Remo
Pengaron	12	-	Alimukim, Antaraku, Ati Im, Benteng, Kertak Empat, Lobang Baru, Loktunggul, Lumpangi, Mangkauk, Maniapan, Panyiuran, Pengaron
Sambung Makmur	7	-	Baliangin, Batang Banyu, Batu Tanam, Gunung Batu, Madurejo, Pasar Baru, Sungai Lurus
Mataraman	15	-	Baru, Bawahan Pasar, Bawahan Seberang, Bawahan Selan, Gunung Ulin, Lok Tamu, Mangka Lawat, Mataraman, Pasiraman, Pematang Danau, Sungai Jati, Simpang Tiga, Surian, Takuti, Tanah Abang
Simpang Empat	26	-	Sungai Tabuk, Alalak Padang, Batu Balian, Benua Anyar, Berkat Mulya, Cabi, Cinta Puri, Garis Hanyar, Karya Makmur, Keramat Mina, Lawiran, Lokcantung, Makmur Karya, Paku, Paring Tali, Pasar Lama, Sungai Langsung, Sungai Raya, Simpang Empat, Simpang Lima, Sindang Jaya, Sumber Sari, Sungkai, Sungkai Baru, Surian Hanyar, Tanah Intan
Telaga Bauntung	4	-	Loktanah, Rampah, Rantau Banjar, Telaga Baru

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013-2032

Kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak di Kabupaten Banjar adalah Simpang Empat dan Karang Intan. Kota Martapura sebagai pusat administrasi juga memiliki perpaduan desa/kelurahan yang paling banyak yaitu 26 (dengan 17 desa dan 7 kelurahan). Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit di Kabupaten Banjar adalah Kecamatan Telaga Bauntung dan Kecamatan Paramasan dengan masing-masing berjumlah 4 desa, serta Kecamatan Sambung Makmur dengan jumlah 7 desa.

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Banjar



Sumber : Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar 2013-2032

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Secara astronomis lokasi Kabupaten Banjar berada pada 114°30'20" dan 115°35'37" Bujur Timur serta 2°49'55" dan 3°43'38" Lintang Selatan. Secara geografis Kabupaten Banjar terletak antara 2°49'55 - 3°43'38 LS dan 114°30'20" - 115°35'37" BT di jalur transportasi antar Provinsi Kalimantan Selatan – Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menyebabkan Kabupaten Banjar memiliki posisi strategis sebagai lintas ekonomi dan sebagai daerah penyangga bagi wilayah sekitarnya. Selain itu, Kota Martapura berperan sebagai penyangga Kota Banjarmasin dan

lokasi dekat dengan Bandara, sehingga secara ekonomi sangat menguntungkan bagi perkembangan Kabupaten Banjar.

2.1.1.3. Topografi

Tabel 2. 3 Ketinggian Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Banjar 2016

Kecamatan	Tinggi (mdpl)
Aluh-Aluh	5
Beruntung Baru	9
Gambut	11
Kertak Hanyar	5
Tatah Makmur	5
Sungai Tabuk	5
Martapura	14
Martapura Timur	6
Martapura Barat	5
Astambul	10
Karang Intan	23
Aranio	123
Sungai Pinang	69
Paramasan	269
Pengaron	43
Sambung Makmur	93
Mataraman	28
Simpang Empat	29
Telaga Bauntung	120

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

300 mdpl. Kondisi topografi di wilayah Kabupaten Banjar beraneka ragam, tidak sepenuhnya dataran. Perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Bagian sebelah barat dan selatan terdapat dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa.

Wilayah Kabupaten Banjar merupakan wilayah perbukitan dan pegunungan di bagian sebelah utara dan timur. Sementara itu bagian sebelah barat dan selatan merupakan dataran rendah berupa tanah biasa dan tanah rawa. Wilayah Kabupaten Banjar secara keseluruhan berada pada ketinggian antara 0-1.878 meter di atas permukaan laut (mdpl). Ketinggian ini merupakan salah satu faktor yang menentukan letak kegiatan penduduk. Ketinggian juga dipakai sebagai penentuan batas wilayah tanah usaha, dimana 35 persen (%) berada di ketinggian 0–7 mdpl, 55,54 % ada pada ketinggian 50–300 mdpl, sisanya 9,45% lebih dari

Posisi topografis seperti ini menyebabkan aliran air pada permukaan tanah Kabupaten banjar kurang lancar. Kondisi tersebut menyebabkan 299,93 persen wilayah selalu tergenang dan 0,58% lainnya tergenang secara periodik.

2.1.1.4. Geologi

Kondisi tanah di Kabupaten Banjar beraneka ragam, Tekstur tanah halus (77,62%) meliputi tanah liat, berlempung, berpasir, dan berdebu. Tekstur tanah sedang (14,93%) meliputi jenis lempung, berdebu, ilat berpasir. Tekstur kasar (5,39%) meliputi pasir berlempung dan pasir berdebu. Jenis tanah organosol, glei humus, bahan induk alluvial (28,57%). Tanah alluvial bahan induk lahan alluvial dan fisiografi (3,72%). Tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit, bahan induk batuan beku dengan fisiografi dataran (14,29%). Tanah Latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi intrusi (24,84%). Tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan bahan induk endapan dan metamorf (28,57%).

2.1.1.5. Hidrologi

Sebagian daerah Kabupaten Banjar merupakan daerah dataran rendah yang dilewati sungai besar yaitu sungai Martapura, sungai Riam Kanan, sungai Riam Kiwa, serta beberapa sungai-sungai kecil. Keadaan hidrografi Kabupaten Banjar sangat dipengaruhi oleh curah hujan, terlebih lagi daerah rawa yang terdiri dari 3 bagian kedalaman, yaitu kedalaman air tanah 90cm (66,45%), kedalaman 60-90 (18,72%), dan kedalaman 30-60 (14,38%).

Daerah Aliran Sungai Martapura mempunyai luas 453,88 km² atau 45.388 hektar, dengan sungai utamanya, yang keluar dari sungai Riam Kanan melewati kota Martapura, sepanjang 36.566 m, serta jika dihitung termasuk anak-anak sungainya mempunyai jumlah panjang 375,91 km, sehingga tingkat kerapatan sungainya 0.828 km/km². Beda tinggi dari Hulu ke Hilir adalah 8,00 m, sehingga diperoleh gradien sungai sebesar 0.022%. DAS Martapura adalah jenis DAS yang berbentuk paralel

yang tersusun dari percabangan dua sub-DAS maupun sungai yang cukup besar di bagian hulu, tetapi menyatu di bagian hilirnya. DAS Martapura adalah sub-DAS dari DAS Barito yang merupakan bagian dari WS (Wilayah Sungai) Barito. Daerah hulunya adalah Waduk Riam Kanan. Sungai Martapura atau Sungai Banjar Kecil atau Sungai Kayutangi dan karena banyaknya aktivitas pedagang Cina di hilir sungai pada zaman dahulu maka disebut juga Sungai Cina (*China river*). Merupakan anak sungai Barito yang muaranya terletak di kota Banjarmasin dan di hulunya terdapat kota Martapura ibukota Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 4 Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Banjar 2015

Bulan	Curah hujan (mm3)	Hari hujan
Januari	405,9	23
Februari	433,3	18
Maret	240,8	15
April	613,0	14
Mei	204,5	11
Juni	82,7	9
Juli	5,0	1
Agustus	10,5	2
September	0	0
Oktober	18,0	3
November	46,0	5
Desember	137,9	15

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

2.1.1.6. **Klimatologi**

Wilayah Kabupaten Banjar sebagian besar didominasi oleh tipe iklim B, dengan curah hujan tahunan berkisar 2.000 – 2.500 mm, curah hujan per hari hujan berkisar 9,5 – 18,6 mm/hari hujan dan hari hujan per bulan rata-rata berkisar 12,3 – 15,6 hari/bulan.

Tabel 2. 5 Suhu Udara Rata-Rata dan Kelembaban Udara Kabupaten Banjar Tahun 2015

Bulan	Suhu Udara rata-rata	Kelembaban udara rata-rata (%)
Januari	27,3	86,1
Februari	27,2	88,1
Maret	27,5	87,9
April	27,9	89,0
Mei	28,8	85,2
Juni	27,9	83,2
Juli	27,0	82,8
Agustus	26,9	77,6
September	27,7	74,4
Oktober	28,9	71,6
November	29,1	76,9
Desember	28,2	82,7

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

Tekanan udara berkisar 1.007,3 – 1.014,3 milibar dan kelembaban udara berkisar 48 persen – 100 persen. Suhu udara berkisar dari 20° C – 36,2° C, serta kecepatan angin rata-rata 5,5 knot. Persentase penyinaran matahari berkisar dari 21 persen – 89 persen.

Tabel 2. 6 Suhu Rata-Rata dan Kelembapan Udara Bulanan
Kabupaten Banjar Tahun 2015

Uraian	Suhu (°C)
Suhu Rata-Rata Bulanan	
Maksimum	28,9
Minimum	26,9
Rata-rata	27,87
Kelembaban Udara Rata-Rata	
Maksimum	89
Minimum	71,60
Rata-rata	82,13
Curah Hujan Bulanan	199,78
Penyinaran Matahari 8 Jam	58,05

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan dilakukan melalui prosedur administrasi untuk kepentingan pembangunan lahan terbangun dan non-terbangun. Kawasan hutan juga dikonversi untuk lokasi transmigrasi dan di beberapa lokasi dilakukan pinjam pakai kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan, jalur transmisi listrik, pembangunan tower telekomunikasi dan sebagainya. Penggunaan lahan pada wilayah Kabupaten Banjar meliputi:

1. Permukiman. Kawasan ini merupakan kawasan permukiman baik perkotaan, perdesaan, perdagangan, industri, dan lain-lain yang memperlihatkan pola alur yang rapat.
2. Kebun. Kawasan ini merupakan seluruh kawasan kebun baik yang sudah ditanami maupun yang belum (masih berupa lahan kosong). Identifikasi dapat diperoleh persebaran perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat).

3. Sawah. Kawasan ini merupakan semua aktifitas pertanian di lahan basah yang dicirikan oleh pola pematang.
4. Sungai. Kawasan ini merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa atau ke sungai yang lain.
5. Semak/belukar rawa. Kawasan ini merupakan semak/belukar dari bekas hutan di daerah rawa.
6. Rawa. Kawasan ini merupakan kenampakan rawa yang sudah tidak berhutan.
7. Hutan. Kawasan ini merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

a. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah terkait dengan tinjauan potensi pertanian, perikanan, perindustrian dan pertambangan. Potensi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. Berikut adalah tinjauan berbagai potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

b. Potensi Pertanian

Sektor pertanian dan perikanan merupakan salah satu sektor unggulan yang dikembangkan di Kabupaten Banjar. Potensi wilayah pertanian dan perikanan cukup luas sehingga Kabupaten Banjar ditetapkan sebagai lumbung padi Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Namun, kontribusi yang besar dari sektor pertanian dan perikanan belum diiringi dengan sektor pengolahan. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kabupaten Banjar, kontribusi industri dan pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Banjar masih kecil berkisar 5 – 6 persen (termasuk industri besar). Kontribusi sektor pengolahan

pangan masih sangat kecil untuk perekonomian Kabupaten Banjar. Rata-rata hasil pertanian dijual mentah keluar daerah untuk diolah.

c. Potensi Perikanan

Pada Tahun 2015 nilai produksi paling banyak di Kabupaten Banjar terdapat di Kecamatan Karang Intan. Sementara itu, tidak semua kecamatan memiliki produksi perikanan, seperti di Kecamatan Beruntung Baru, Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Astambul, Paramasan, Pengaron, Mataraman, dan Talaga Bauntung.

Tabel 2. 7 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2015

Kecamatan	Produksi (Ton)	Nilai Produksi (juta Rp)
Aluh-Aluh	24,19	547,41
Beruntung Baru	-	-
Gambut	65,10	1.473,29
Kertak Hanyar	-	-
Tatah Makmur	-	-
Sungai Tabuk	375,23	8.492,41
Martapura	11.352,84	256.943,99
Martapura Timur	56,73	1.284,05
Martapura Barat	8.574,08	194.053,56
Astambul	-	-
Karang Intan	12.757,39	288.732,62
Aranio	7.657,49	173.308,71
Sungai Pinang	24,19	547,41
Paramasan	-	-
Pengaron	-	-
Sambung Makmur	24,19	547,41
Mataraman	-	-
Simpang Empat	121,83	2.757,34
Talaga Bauntung	-	-
Jumlah	41.033,25	928.688,20

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

d. Perindustrian

Letaknya yang strategis di sebelah Utara Kota Banjarmasin dan dikelilingi 7 kabupaten/kota sekitar Kalimantan Selatan dengan sumber daya alam yang berlimpah, menjadikan Kabupaten Banjar memiliki daya tarik tersendiri sebagai pusat industri di Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Banjar memiliki jumlah penduduk

sebanyak 554.443 jiwa pada tahun 2015, (BPS, 2016) direncanakan dijadikan salah satu kota metropolitan.

Perusahaan industri di Kabupaten Banjar berdasarkan data dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar berjumlah 9 072 buah. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang diserap maka jumlah itu terdiri dari 5 industri besar, 13 industri sedang, 229 industri kecil dan 8 825 industri rumah tangga, dengan 24 666 tenaga kerja. Sedangkan kalau dilihat menurut jenis industri maka industri makanan, minuman, dan tembakau berjumlah 2602 buah; industri tekstil, pakaian jadi, dan kulit berjumlah 491 buah; industri kayu dan hasil barang dari kayu berjumlah 280 buah; industri kertas, barang dari kertas dan percetakan berjumlah 130 buah; industri dasar dari logam berjumlah 406; industri barang logam dan mesin sebanyak 541 buah; industri barang galian bukan logam/kerajinan umum sebanyak 3 390 buah; industri kimia, karet, dan plastik sebanyak 709 buah; dan industri lain sebanyak 523 buah.

e. Pertambangan

Kalimantan Selatan dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Pendulangan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Selain intan, Kalimantan Selatan juga dikenal dengan pertambangan batubara, perusahaan batubara di Kabupaten Banjar sejumlah 55 perusahaan. Di Kabupaten Banjar juga terdapat endapan kaolin paling banyak di Kalimantan Selatan.

2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan informasi pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar, diketahui bahwa terdapat 4 potensi bencana yang biasa terjadi di Kabupaten Banjar yang tersebar di beberapa wilayah, antara lain:

1. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan

- Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, dan Kecamatan Sungai Pinang.
2. Kawasan rawan banjir (ROB) terdapat di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, dan Aluh-Aluh.
 3. Kawasan rawan kebakaran terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar, dan Kecamatan Gambut.
 4. Kawasang angin puting beliung terdapat di Kecamatan Martapura dan Beruntung Baru.

2.1.1.9. Demografi

Penduduk Kabupaten Banjar pada tahun 2015 sebanyak 554.443 jiwa yang terdiri atas 281.714 jiwa penduduk laki-laki dan 272.729 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2014, penduduk Kabupaten Banjar mengalami pertumbuhan sebesar 1,66 persen. Angka rasio jenis kelamin tahun 2015 penduduk laki- laki terhadap penduduk perempuan sebesar 1.03. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa setiap 100 orang penduduk perempuan, terdapat penduduk laki-laki sebanyak 103 orang.

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Kabupaten Banjar 2012-2015

Kecamatan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Aluh-Aluh	28.033	28.507	28.984	24.464
Beruntung Baru	13.504	13.782	13.985	14.185
Gambut	37.775	38.054	38.731	39.414
Kertak Hanyar	41.476	41.447	42.237	43.022
Tatah Makmur	11.297	11.646	11.847	12.052
Sungai Tabuk	59.739	59.540	60.455	61.358
Martapura	106.962	107.476	109.565	111.692
Martapura Timur	29.931	30.449	30.879	31.307
Martapura Barat	17.375	17.732	17.952	18.170
Astambul	33.886	34.618	35.088	35.534
Karang Intan	31.724	32.530	33.028	33.516
Aranio	8.545	8.727	8.899	9.074
Sungai Pinang	15.027	15.638	15.923	16.206

Paramasan	4.443	4.722	4.859	2.001
Pengaron	16.252	16.788	17.023	17.251
Sambung Makmur	11.057	12.048	12.308	12.567
Mataraman	24.417	24.739	25.071	25.397
Simpang Empat	33.344	34.596	35.221	35.839
Telaga Bauntung	3.210	3.289	3.342	3.394
Jumlah	527.997	536.328	545.397	554.443

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

Kepadatan penduduk di Kabupaten Banjar tahun 2015 mencapai 119 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 19 kecamatan sangat beragam. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Martapura dengan kepadatan sebesar 2.657 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Aranio sebesar 8 jiwa/km².

Tabel 2. 9 Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjar Tahun 2015

Kecamatan	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per km2
Aluh-Aluh	5,31	357
Beruntung Baru	2,56	231
Gambut	7,11	305
Kertak Hanyar	7,76	939
Tatah Makmur	2,17	340
Sungai Tabuk	11,07	417
Martapura	20,14	2.657
Martapura Timur	5,65	1.044
Martapura Barat	3,28	122
Astambul	6,41	164
Karang Intan	6,04	156
Aranio	1,64	8
Sungai Pinang	2,92	35
Paramasan	0,90	9
Pengaron	3,11	40
Sambung Makmur	2,27	93
Mataraman	4,58	171
Simpang Empat	6,46	79
Telaga Bauntung	0,61	21
Jumlah	100,00	119

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka, 2016

Bila dilihat dari sebaran penduduknya, sebanyak 20,14 persen penduduk Kabupaten Banjar berada di Kecamatan Martapura dan

hanya 0,61 persen penduduknya berada di Kecamatan Telaga Bauntung.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub bab ini mendeskripsikan dan menganalisis aspek kesejahteraan rakyat yang terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial, dan fokus seni budaya dan olahraga. Berikut ini penjelasan dari masing-masing fokus tersebut.

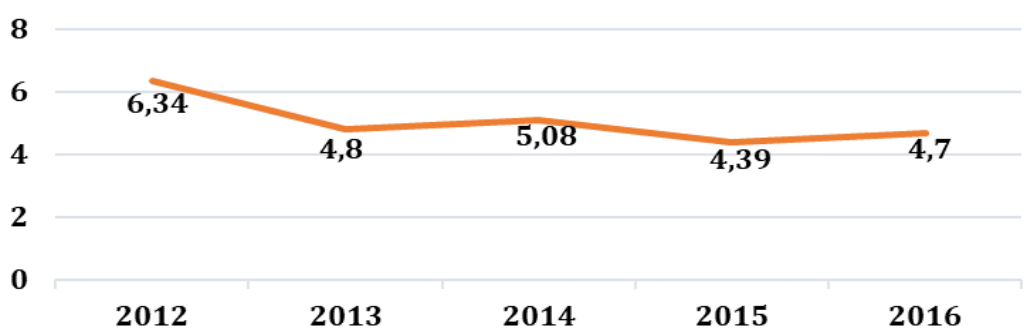
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab ini membahas tentang kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi tersebut.

2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk menilai kemajuan sebuah daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi sebuah daerah, maka semakin maju daerah tersebut. Selain itu, LPE dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tingginya pertumbuhan ekonomi daerah secara otomatis meningkatkan tersedianya lapangan kerja yang memadai bagi seluruh masyarakat.

Gambar 2. 2 Grafik Persentase Perkembangan laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016



Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2013-2017

LPE Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. LPE yang paling tinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,34 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2016, namun peningkatan tersebut masih di bawah tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa LPE Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) belum optimal.

2.2.1.2. Pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDRB merupakan salah satu indikator dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu daerah, bahan analisis tingkat kemakmuran masyarakat dan tingkat perubahan barang dan jasa, bahan analisis produktivitas secara sektoral, dan alat kontrol dalam menentukan kebijakan pembangunan. Berikut ini persentase distribusi PDRB Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 10 Persentase Distribusi PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan(Hk) Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

Lapangan Usaha	2012		2013		2014		2015*		2016**	
	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,66	18,86	18,49	18,65	18,14	18,17	18,42	17,75	18,61	17,75
Pertambangan dan Penggalian	24,33	24,09	22,62	23,06	21,22	22,57	18,22	21,57	16,12	20,5
Industri pengolahan	6,82	6,68	6,7	6,66	6,73	6,61	6,8	6,53	7	6,6
Pengadaan listrik dan Gas	0,07	0,08	0,06	0,09	0,07	0,1	0,1	0,12	0,12	0,12
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,2	0,2	0,2	0,2	0,21	0,2	0,22	0,21	0,22	0,22
Konstruksi	8,61	9,11	9	9,2	9,29	9,29	9,71	9,43	10,01	9,44
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,69	11,33	12,14	11,78	12,71	12,19	13,28	12,59	13,89	12,95
Transportasi dan Pergudangan	3,96	4,02	4,24	4,14	4,31	4,2	4,4	4,36	4,55	4,52
Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	2,73	2,75	2,81	2,84	2,96	2,89	3,03	2,96	3,07	3,02
Informasi dan Komunikasi	3,23	3,27	3,21	3,32	3,32	3,45	3,4	3,59	3,45	3,72
Jasa Keuangan dan Asuransi	1,97	1,93	2,14	2,08	2,18	2,08	2,23	2,09	2,23	2,09
Real Estate	3,33	3,39	3,32	3,42	3,42	3,44	3,44	3,47	3,48	3,52
Jasa Perusahaan	0,28	0,27	0,3	0,28	0,31	0,29	0,32	0,29	0,34	0,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,35	6,19	6,78	6,25	6,83	6,29	7,45	6,56	7,29	6,39
Jasa Pendidikan	4,55	4,57	4,71	4,72	4,86	4,86	5,27	5,07	5,73	5,28
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,84	1,87	1,93	1,95	2,01	1,98	2,18	2,04	2,28	2,11
Jasa Lainnya	1,37	1,38	1,34	1,36	1,43	1,4	1,51	1,41	1,6	1,47

Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2012-2016

Ket: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Persentase distribusi PDRB menurut harga berlaku dan harga konstan berdasarkan lapangan usaha masih didominasi beberapa sektor yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; dan konstruksi. Sementara itu, persentase distribusi PDRB atas harga berlaku lebih baik dibandingkan

persentase PDRB atas harga konstan karena banyaknya lapangan usaha mengalami peningkatan pada distribusi PDRB atas harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi per kapita penduduk di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Penyebab indikatif kondisi tersebut adalah banyaknya sektor lapangan usaha yang mengalami penurunan dan stagnan.

Tabel 2. 11 Persentase Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kab.Banjar Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (Persen)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2012	2013	2014	2015*	2016**
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,87	3,45	2,36	1,75	4,94
Pertambangan dan Penggalian	7,98	0,16	2,83	-0,23	-0,48
Industri pengolahan	5,66	4,24	4,27	3,17	5,74
Pengadaan listrik dan Gas	6,87	5,64	19,08	31,27	4,42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	3,90	6,73	7,15	7,70
Konstruksi	6,43	5,62	6,08	5,97	4,81
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,53	8,79	8,73	7,85	7,71
Transportasi dan Pergudangan	7,39	7,57	6,70	8,42	8,41
Penyediaan Akomodasi dan makan Minum	7,92	7,89	7,15	6,74	6,68
Informasi dan Komunikasi	5,66	6,12	9,41	8,49	8,65
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,16	12,88	5,03	5,16	4,75
Real Estate	5,98	5,65	5,48	5,38	6,35
Jasa Perusahaan	6,63	7,75	6,89	7,22	8,33
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,95	5,68	5,66	8,87	2,06
Jasa Pendidikan	3,12	7,92	8,24	8,93	9,05
Jasa Kesehatan dan Kegiatan	7,63	9,11	6,77	7,33	8,22

Sosial					
Jasa Lainnya	1,61	2,91	8,20	5,84	8,73
Produk Domestik Regional Bruto	6,28	4,6	5,08	4,4	4,7
Produk Domestik Regional Bruto Tanpa Migas	6,28	4,6	5,08	4,4	4,7

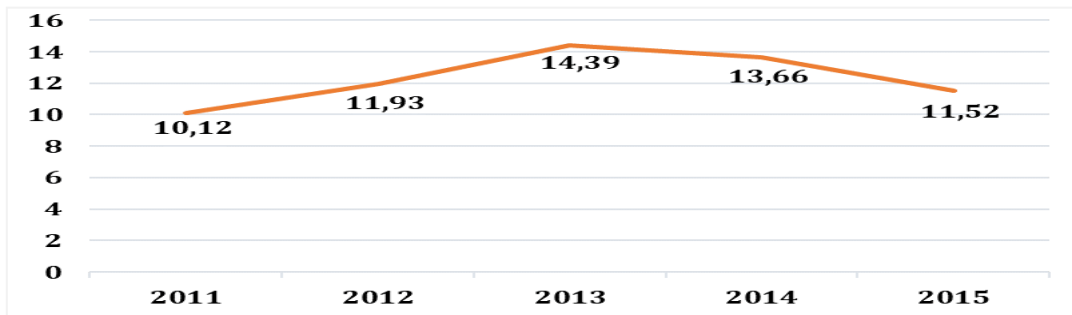
Sumber: PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan 2012-2016

Persentase pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Capaian pertumbuhan PDRB yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar 6,28 persen. Sementara itu, pertumbuhan yang paling rendah t pada tahun 2015, yaitu hanya sebesar 4,4 persen. Meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2016, namun peningkatan tersebut belum memadai karena masih di bawah pertumbuhan PDRB tahun 2012. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha belum berjalan optimal. Sebab indikatif dari persoalan ini adalah banyaknya sektor menurut lapangan usaha yang menurun secara signifikan seperti sektor pengadaan listrik dan gas, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor.

2.2.1.3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting bagi pembangunan daerah. Indikator ini mengukur sejauhmana tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin rendah ketergantungan keuangan daerah atau mandiri. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD terhadap total APBD, maka semakin tinggi tingkat ketergantungan keuangan daerah kepada sumber pendapatan lain.

Gambar 2. 3 Grafik Rasio PAD terhadap Total Penerimaan APBD Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2016



Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (sebelum diPerubahan)

Rasio PAD terhadap total penerimaan APBD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Dari tahun 2013 hingga 2015, terjadi penurunan kontribusi PAD secara berturut-turut mulai dari 14,39 persen pada tahun 2013 menjadi 13,66 persen pada tahun 2014, dan kemudian turun lagi menjadi 11,52 persen pada tahun 2015. Dilihat dari besaran kontribusi, maka kontribusi PAD yang paling tinggi berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 14,39 persen. Sedangkan kontribusi PAD paling rendah berada pada tahun 2011, yaitu sebesar 10,12 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total penerimaan APBD masih rendah. Sebab indikatif dari persoalan ini adalah rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

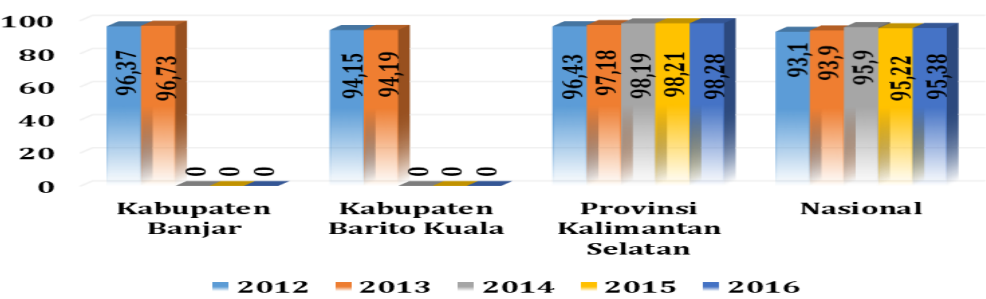
Gambaran tentang fokus kesejahteraan sosial terkait dengan indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. Berbagai indikator tersebut digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Banjar. Berikut adalah gambaran mengenai capaian beberapa indikator tersebut:

2.2.2.1. Angka Melek Huruf (AMH)

AMH merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas pendidikan yaitu sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan. AMH merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca

dan menulis terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar memberi kemanfaatan bagi sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dan melanjutkan pembelajaran. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian AMH disajikan dalam bentuk grafik, sebagai berikut:

Gambar 2. 4 Grafik Angka Melek Huruf Tahun 2012-2016 (%)



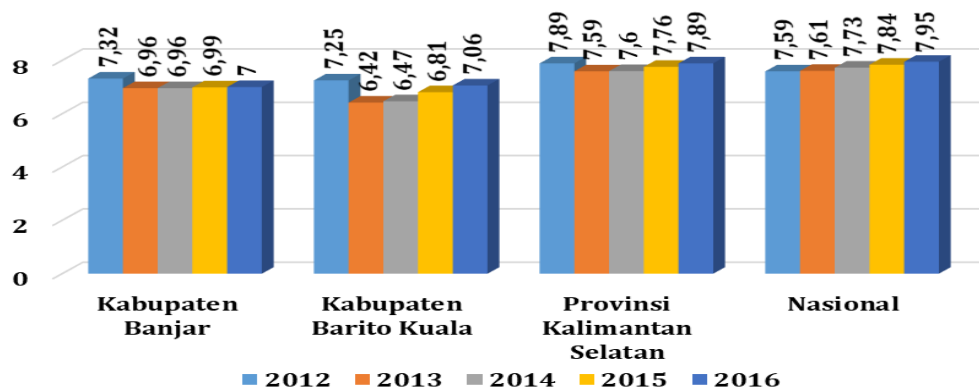
Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha meningkatkan pertumbuhan AMH daerahnya. Dalam beberapa tahun terakhir, usaha tersebut membuahkan hasil karena AMH di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Namun, capaian AMH Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian AMH Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya AMH. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar, rendahnya kualitas pendidikan disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan, rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP, rendahnya kualitas penyelenggaraan pendidikan usia dini (PAUD), kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif pendidikan, masih rendahnya pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses kegiatan belajar mengajar (KBM) yang efektif, dan kurangnya muatan keagamaan di PAUD, integrasi pendidikan agama di sekolah formal belum optimal, kurangnya penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-qur'an, dan kurangnya pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah.

2.2.2.2. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dapat digunakan untuk mengukur akses pendidikan. RLS merupakan jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam menempuh pendidikan formal. Manfaat dari RLS adalah untuk melihat kualitas penduduk dalam menempuh pendidikan formal. Capaian RLS di Kabupaten Banjar disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Grafik Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2012-2016 (tahun)



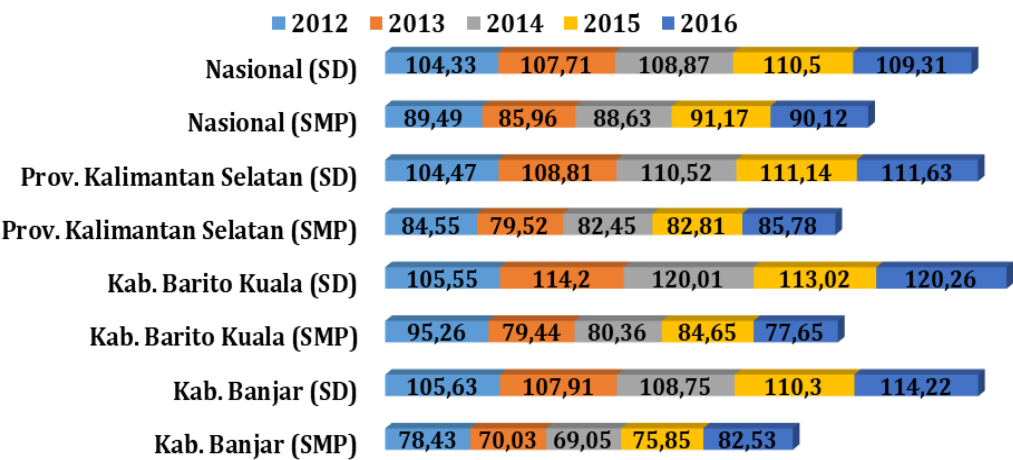
Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

RLS Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Capaian tersebut masih di bawah capaian RLS Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional. Hingga tahun 2016, capaian RLS hanya mencapai 7,95 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa RLS di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dikuatkan dengan data Dinas Pendidikan bahwa rasio jumlah penduduk usia sekolah terhadap jumlah penduduk mencapai 1:4 (rasio pencapaian mencapai 25 persen jumlah penduduk). Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Banjar belum mampu menuntaskan pendidikan dasar Sembilan (9) tahun sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kondisi tersebut mengindikasikan layanan pendidikan belum sepenuhnya diakses penduduk usia sekolah di Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut dikuatkan dengan capaian rasio usia sekolah terhadap jumlah penduduk pada tahun 2018 yang mencapai 1:4 (25 persen dari jumlah penduduk). Sebab dari persoalan tersebut adalah belum

optimalnya sarana dan prasarana pendidikan, kurangnya pembangunan sekolah pada wilayah terpencil, dan transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil belum memadai.

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu. Fungsi APK adalah untuk menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan. Nilai APK dapat lebih dari seratus karena APK tidak memperhitungkan kesesuaian umur peserta didik dengan jenjang sekolah yang diikutinya APK Kabupaten Banjar dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu APK pada tingkat sekolah dasar (SD) dan APK pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Capaian APK SD dan APK SMP Kabupaten banjar ditampilkan sebagai berikut:

Gambar 2. 6 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%)



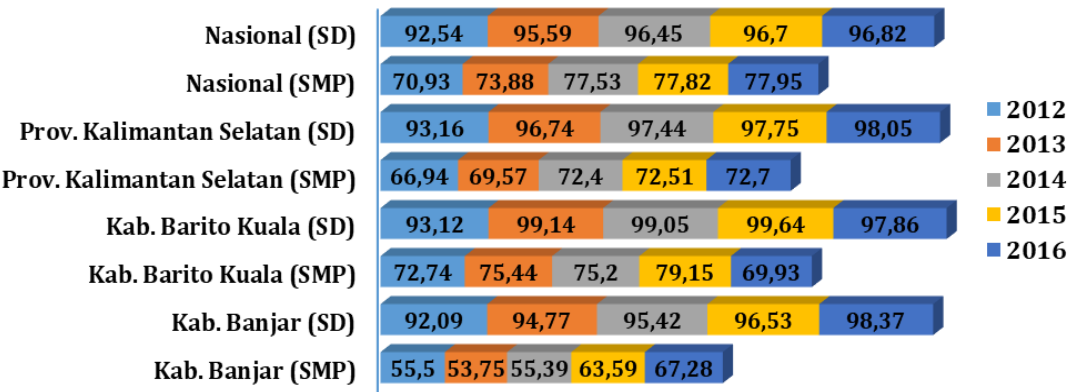
Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

Pemerintah Kabupaten Banjar menginginkan seluruh penduduk usia sekolah 7-15 tahun dapat mengenyam pendidikan dasar 9 tahun. Capaian APK pada tingkat sekolah dasar (SD) di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Namun, capaian APK SD Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan APK SD Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, capaian APK SMP Kabupaten Banjar relatif lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Capaian tersebut menggambarkan sebagian lulusan peserta didik dari SD di Kabupaten Banjar tidak seluruhnya melanjutkan ke jenjang SMP. Kondisi tersebut dapat

disebabkan minat penduduk usia SD untuk melanjutkan sekolah masih rendah karena faktor ekonomi. Mereka lebih memilih masuk dunia kerja dibandingkan melanjutkan sekolah.

Salah satu indikator penting lainnya untuk mengukur tingkat pemenuhan akses pendidikan adalah angka partisipasi murni (APM). APM merupakan indikator yang menggambarkan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sejak tahun 2007, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) turut diperhitungkan dalam APM. APM berfungsi untuk mengukur daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Capaian APM Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 7 Grafik Angka Partisipasi Murni SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

Capaian APM SD Kabupaten Banjar sudah baik dan berada di atas rata-rata capaian Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa akses masyarakat Kabupaten Banjar terhadap pelayanan pendidikan SD relatif tinggi. Namun, capaian tersebut berbeda kondisinya dengan pencapaian APM SMP. Capaian APM SMP Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian APM SMP di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional.

Capaian APM SD dan APM SMP menunjukkan hasil yang berbeda. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peserta didik golongan

usia SMP atau lulusan SD dari Kabupaten Banjar tidak melanjutkan sekolah SMP di Kabupaten Banjar. Hal tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya preferensi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan di Kabupaten Banjar.

Rendahnya preferensi peserta didik untuk melanjutkan pendidikan lebih disebabkan oleh lemahnya faktor ekonomi dan tingginya minat lulusan SD untuk mengambil pendidikan pesantren. Pada tahun 2018, Kabupaten Banjar memiliki sejumlah pesantren yang mencapai 626 pesantren. Jumlah pesantren tersebut mencakup beberapa jenis pesantren diantaranya: pesantren mencapai jumlah 53 lembaga, Diniyah TK AlQur'an mencapai 137 lembaga, Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) TK Alqur'an mencapai 361 lembaga, dan TK/TP Al Qur'an Albanjari mencapai 76 lembaga.

2.2.2.3. Usia Harapan Hidup (UHH)

UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. UHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan. Tingginya UHH menunjukkan adanya peningkatan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, rendahnya UHH menunjukkan adanya penurunan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. 12 Usia Harapan Hidup Tahun 2012-2016

	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Banjar	66.12	66.18	65,32	65,97	66,17
Kabupaten Barito Kuala	62.76	63.04	64,49	64,94	65,14
Provinsi Kalimantan Selatan	64.52	64.82	67,47	67,8	67,92

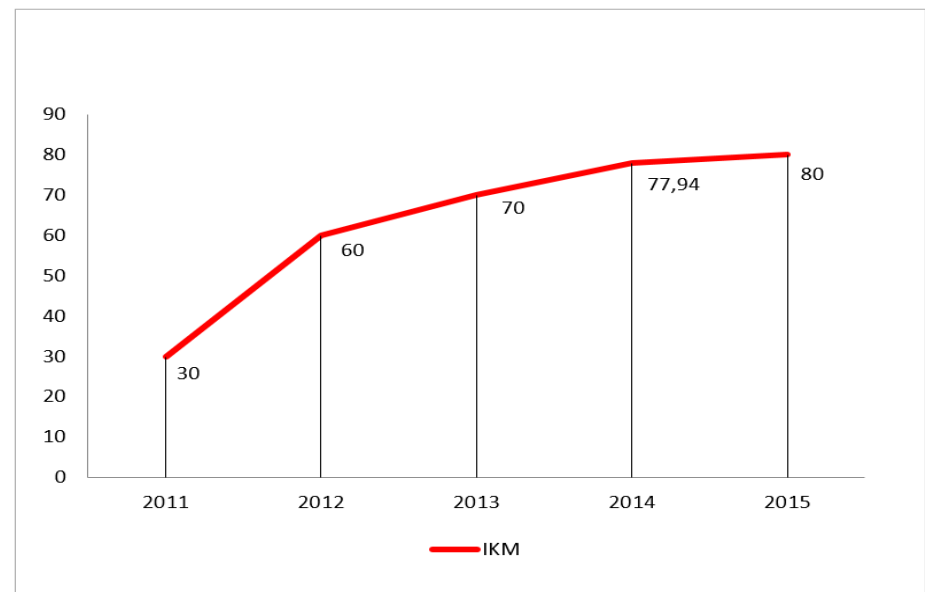
Sumber: BPS Kalimantan Selatan Tahun 2012-2016

UHH Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Capaian tertinggi UHH berada pada tahun 2013 sebesar 66,18 tahun. Namun, angka tersebut masih di bawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa UHH Kabupaten Banjar masih rendah. Persoalan tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, meliputi: sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit belum optimal, masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular, masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit tidak menular (PTM), rendahnya partisipasi masyarakat di bidang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit, rendahnya pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu, belum optimalnya integrasi penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir, belum optimalnya pelayanan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK), belum optimalnya kesehatan bayi dan balita, belum optimalnya pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita, belum optimalnya pelayanan *Pediatric Intensive Care Unit* (PICU)/Neonatal Intensif Care (NICU) di RSUD, belum optimalnya penerapan hidup sehat, belum kondusifnya gizi masyarakat, Belum optimalnya Kinerja dan mutu pelayanan kesehatan, dan belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas.

2.2.2.5. Tingkat Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat digunakan untuk merefleksikan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah daerah. Tingginya nilai IKM menunjukkan semakin tingginya kualitas pelayanan publik. Capaian IKM Kabupaten Banjar dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 2. 8 Grafik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 (indeks)



Sumber: RPJMD Kab. Banjar 2016-2021 (Sebelum diPerubahan)

Pada periode 2013 - 2017 IKM Kabupaten Banjar mengalami peningkatan. Peningkatan yang paling tinggi terjadi pada tahun 2012, yakni sebesar 60 persen dari sebelumnya hanya 30 persen pada tahun 2011. Sementara itu, peningkatan yang paling kecil terjadi pada tahun 2015, yaitu hanya 2.06 persen atau menjadi 80 persen dari tahun sebelumnya sebesar 77,94 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah semakin baik.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Fokus pada seni budaya dan olahraga merupakan salah aspek yang sangat penting bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Fokus ini menggambarkan indikator-indikator seni, budaya, dan olahraga dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi perkembangan seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 13 Perkembangan Seni, Budaya, dan Olahraga Kabupaten Banjar Tahun 2012-2015 (%)

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Persentase jumlah group kesenian aktif per 10.000	37,9	39,2	40,3	41,5

	penduduk				
2	Persentase jumlah fasilitas olah raga per 10.000 penduduk	68,2	72,7	78,8	84,8
3	Grup kesenian (jumlah)	NA	NA	NA	220

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (Sebelum Perubahan)

Persentase jumlah grup kesenian yang aktif per 10.000 penduduk mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah grup kesenian di Kabupaten Banjar mencapai 220 kelompok. Kelompok jenis kesenian terbesar adalah kelompok Maulid Habsyi, Penabuh Bedug, dan Rudat. Sementara itu, persentase jumlah fasilitas olahraga per 10.000 penduduk juga mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, fokus seni budaya dan olahraga di Kabupaten Banjar masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan dinas terkait, kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya pelestarian budaya, kurangnya penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya, kurangnya pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya, kurangnya ketersediaan data kebudayaan, kurangnya kajian sejarah lokal, belum optimalnya ekspresi budaya, kurangnya even festival budaya yang bernuansa religi, belum optimalnya perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya, belum optimalnya kajian warisan/cagar budaya, belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan keagamaan, masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan, dan belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya.

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik barang maupun jasa yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pada konteks ini, pemerintah daerah melalui berbagai bentuk pelayanan umum memegang

peranan penting dalam menentukan tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan pembangunan daerah. Kewajiban pemerintah daerah dalam menyelenggarakan aspek pelayanan umum berfokus pada: (1) layanan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, (2) urusan pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar, dan (3) urusan pemerintahan pilihan.

Deskripsi mengenai kondisi pelayanan umum terkini Kabupaten Banjar perlu dilakukan untuk menunjukkan permasalahan dan potensi penyelenggaraan pelayanan umum. Deskripsi situasi terkini (capaian terkini) dalam dokumen ini menggunakan rujukan Undang-Undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara itu, ukuran capaian disajikan secara umum dengan menggunakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 87 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan penyelenggaraan layanan publik yang mendasar. Pada konteks ini, layanan ini bersifat wajib untuk diselenggarakan dengan baik oleh pemerintah daerah untuk memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Layanan wajib pelayanan dasar difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan, serta jaminan kehidupan sosial yang baik.

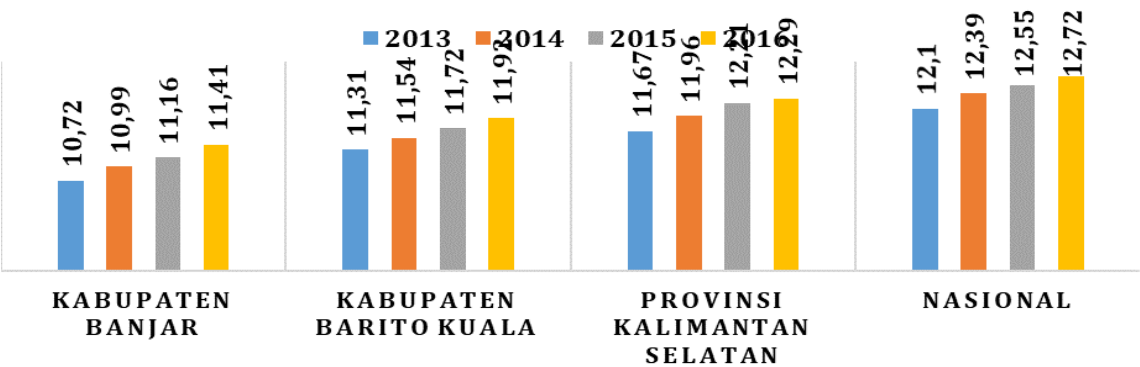
2.3.1.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan merupakan intervensi yang paling efektif dalam

meningkatkan kualitas hidup individu maupun kelompok masyarakat di daerah. Salah satu komponen utama dalam pembangunan sektor pendidikan adalah aspek akses pendidikan. Pada konteks Kabupaten Banjar, akses pendidikan dilihat dari empat aspek, yaitu: harapan lama sekolah (HLS), angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan rasio murid-guru.

HLS merupakan salah satu indikator yang berkaitan dengan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan pada anak usia tertentu di masa mendatang. HLS juga dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sektor pendidikan di berbagai jenjang. Meningkatnya angka HLS menjadi sinyal positif bahwa semakin banyak penduduk yang mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Pencapaian HLS Kabupaten Banjar disajikan dalam grafik sebagai berikut:

Gambar 2. 9 Grafik Harapan Lama Sekolah Tahun 2013-2016



Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

HLS di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Banjar. Namun, capaian tersebut masih rendah dibandingkan dengan capaian HLS Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Nasional. Kondisi tersebut menandakan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya lama sekolah yang diharapkan pada anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penyebab dari persoalan tersebut adalah rendahnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), rendahnya kuantitas sekolah PAUD di kecamatan, buruknya fasilitas pendidikan, rendahnya kuantitas sekolah inklusi, dan rendahnya

pembangunan sekolah inklusi.

Perkembangan akses pendidikan dapat pula ditinjau dari perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). PAUD merupakan upaya pembinaan kepada anak sejak lahir hingga usia enam tahun untuk membantu pertumbuhan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyelenggaraan PAUD selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter. Regulasi tersebut mengamanahkan setiap anak perempuan dan laki-laki mendapat akses pengasuhan PAUD. Capaian perkembangan PAUD di Kabupaten Banjar dapat ditinjau dari jumlah sekolah Penyelenggaraan PAUD. Capaian jumlah sekolah Penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 14 Jumlah Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2018

No	Kecamatan	Jumlah PAUD
1	Aluh-Aluh	26
2	Gambut	34
3	Kertak Hanyar	32
4	Sungai Tabuk	39
5	Martapura	98
6	Astambul	28
7	Karang Intan	36
8	Aranio	11
9	Sungai Pinang	9
10	Pengaron	9
11	Mataraman	39
12	Simpang Empat	23
13	Beruntung Baru	19
14	Martapura Barat	22
15	Martapura Timur	23
16	Paramasan	0
17	Tatah Makmur	14
18	Sambung Makmur	10
19	Telaga Bauntung	6
20	Cintapuri Darussalam	9
TOTAL		487

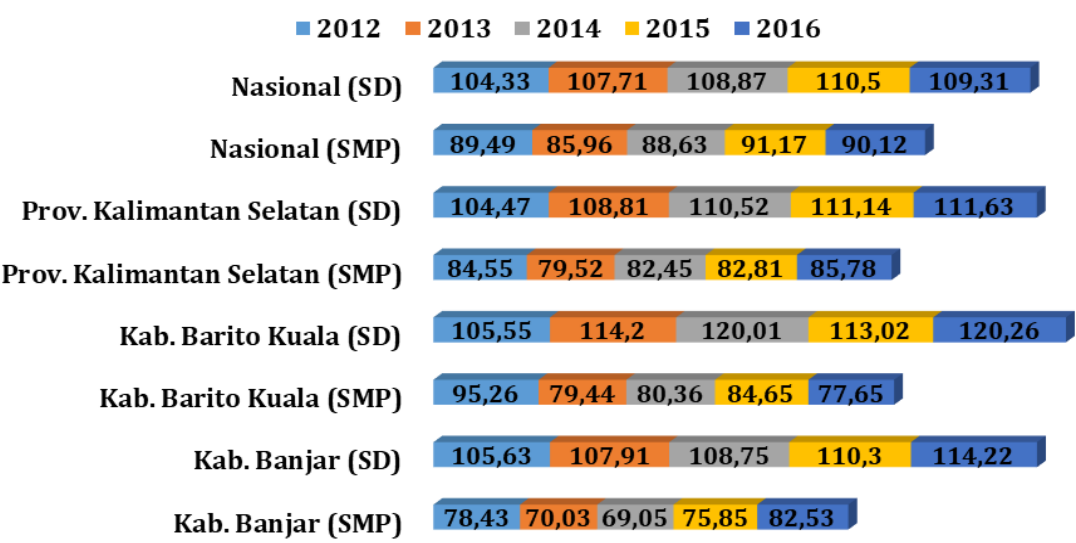
Sumber: <http://referensi.data.kemdikbud.go.id/>

Pada tahun 2018, kuantitas lembaga yang menyelenggarakan PAUD di Kabupaten Banjar mencapai 487 lembaga. Kecamatan Martapura merupakan kecamatan yang memiliki jumlah penyelenggara PAUD tertinggi di Kabupaten Banjar. Sementara itu,

Kecamatan Paramasan menjadi wilayah kecamatan yang belum memiliki lembaga penyelenggara PAUD. Pada konteks ini, Kabupaten Banjar mengalami rendahnya jumlah sekolah penyelenggara PAUD. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya kuantitas sekolah PAUD di wilayah kecamatan. Kondisi tersebut harus menjadi salah satu perhatian besar Pemerintah Kabupaten Banjar agar layanan PAUD dapat terakses merata kepada masyarakat.

Akses pendidikan dapat ditinjau dari angka partisipasi sekolah (APS). APS merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai. Sejak Tahun 2009, Pendidikan Non Formal (Paket A, Paket B, dan Paket C) juga ikut diperhitungkan. Tingginya APS menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian APS ditampilkan dalam grafik berikut ini:

Gambar 2. 10 Grafik Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP Tahun 2012-2016 (%)



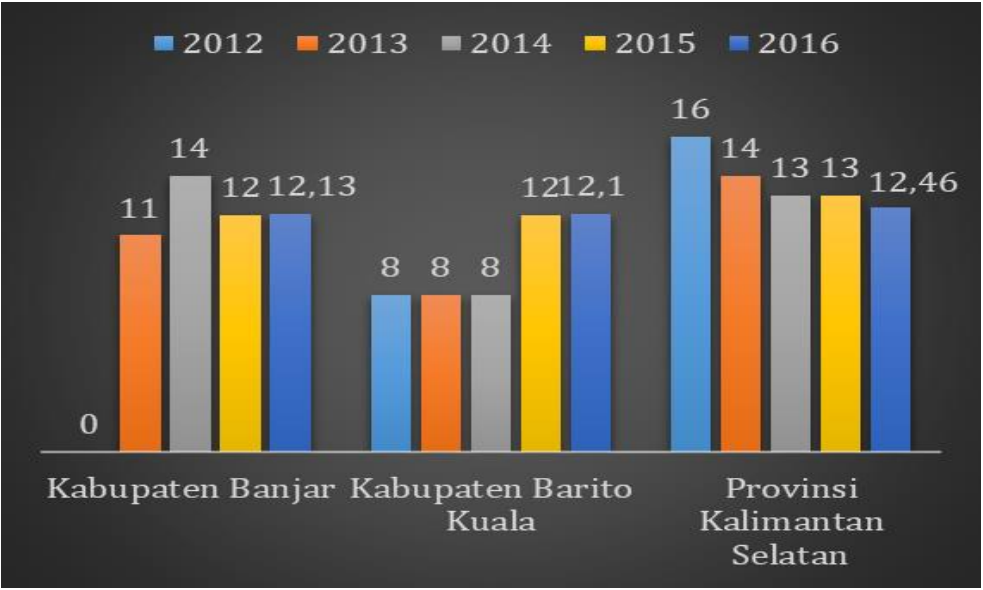
Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, BPS Pusat 2012-2016

Capaian APS SD dan APS SMP Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian di Kabupaten Banjar tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan capaian Kabupaten Barito Kuala,

Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami masalah rendahnya angka partisipasi sekolah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket dan kurangnya bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan Kejar Paket.

Pemerintah Kabupaten Banjar berkewajiban menyelenggarakan urusan pendidikan dasar. Akses terhadap pendidikan dasar juga dapat digambarkan melalui rasio murid-guru. Indikator rasio murid-guru merupakan perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah sekolah yang bersangkutan. Manfaat rasio murid-guru adalah untuk menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar dan melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin tinggi nilai rasio murid-guru, maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran cenderung semakin rendah.

Gambar 2. 11 Grafik Rasio Murid-Guru SD Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

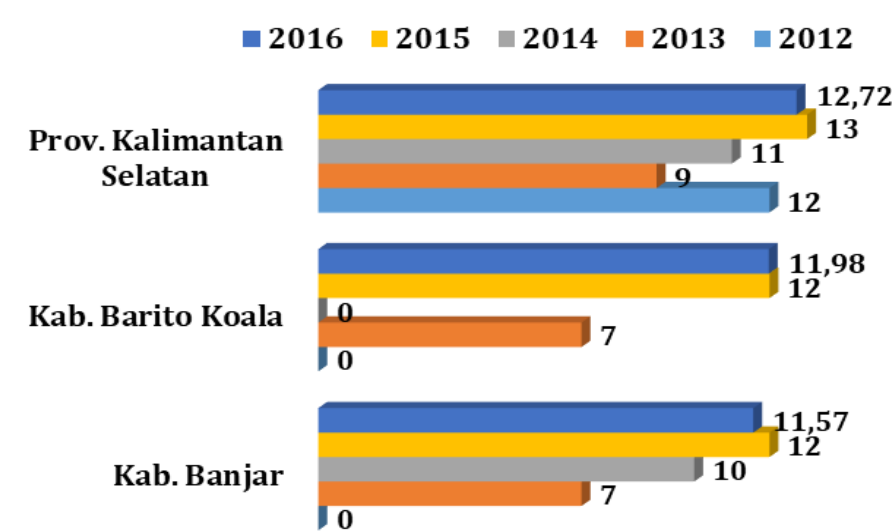
Rasio murid-guru SD mengalami tren fluktuatif. Pada tahun 2016, capaian rasio murid-guru SD di Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada periode tersebut, rasio murid-guru di Kabupaten Banjar mencapai 1: 12,13 peserta didik. Capaian tersebut belum memenuhi amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyebutkan bahwa rasio murid-guru pada jenjang SD adalah minimal 1:20 peserta didik.

Capaian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan tenaga pengajar di Kabupaten Banjar belum optimal. SD di Kabupaten Banjar mengalami kekurangan tenaga pengajar. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor, yaitu: banyaknya guru yang memasuki masa pensiun dan saat ini tidak ada kejelasan soal pengangkatan tenaga guru oleh Pemerintah Pusat. Pengangkatan guru honorer dinilai dilematis karena masalah pendanaan yang terbatas. Belum optimalnya perkembangan tenaga pengajar tersebut disebabkan oleh rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Banjar turut bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pendidikan menengah tingkat pertama. Akses terhadap pendidikan menengah tingkat pertama dapat digambarkan dalam rasio murid-guru. Capaian rasio murid-guru SMP di Kabupaten Banjar dipaparkan sebagai berikut:

Gambar 2. 12 Grafik Rasio Murid-Guru SMP Tahun 2012-2016



Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

Rasio murid-guru SMP mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2016, capaian rasio murid-guru SMP di Kabupaten Banjar masih

lebih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun tersebut, rasio murid-guru di Kabupaten Banjar mencapai 1:11,57 peserta didik.

Capaian tersebut belum memenuhi amanat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru yang menyebutkan bahwa rasio murid-guru pada jenjang SMP adalah minimal 1:20 peserta didik. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan tenaga pengajar di Kabupaten Banjar belum optimal. SMP di Kabupaten Banjar mengalami kekurangan tenaga pengajar.

Kondisi tersebut dapat disebabkan banyaknya guru memasuki masa pensiun dan tidak ada kejelasan soal pengangkatan tenaga guru oleh Pemerintah Pusat. Pengangkatan guru honorer dinilai dilematis karena masalah terbatasnya pendanaan serta kualifikasi tenaga pendidik SMP masih rendah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, Kabupaten Banjar mengalami dua masalah pokok di bidang akses pendidikan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah: rendahnya angka partisipasi penduduk usia sekolah SD dan SMP, dan rendahnya rasio murid-guru SD dan SMP. Pemerintah Kabupaten Banjar membutuhkan usaha yang lebih optimal untuk mengatasi permasalahan tersebut.

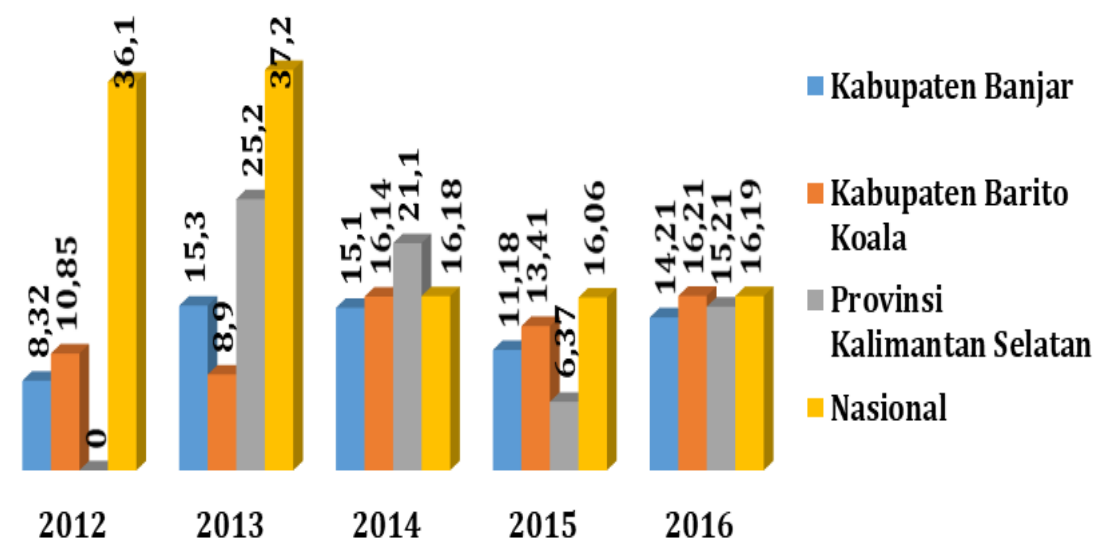
2.3.1.2. Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan salah satu sektor utama dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kondisi riil sektor kesehatan penting untuk dijelaskan agar didapat gambaran proporsional dari dimensi akses pelayanan. Gambaran akses layanan kesehatan di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dan ketersediaan sarana kesehatan.

Aspek ketersediaan tenaga kesehatan merupakan hal yang paling krusial dalam rangka menghadapi perkembangan kebutuhan layanan kesehatan masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, ketersediaan tenaga kesehatan dipaparkan dalam tiga macam,

yaitu rasio dokter umum, rasio bidan, dan rasio perawat. Capaian ketersediaan tenaga kesehatan Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 13 Grafik Rasio Dokter Umum per 100.000 penduduk Tahun 2012-2016

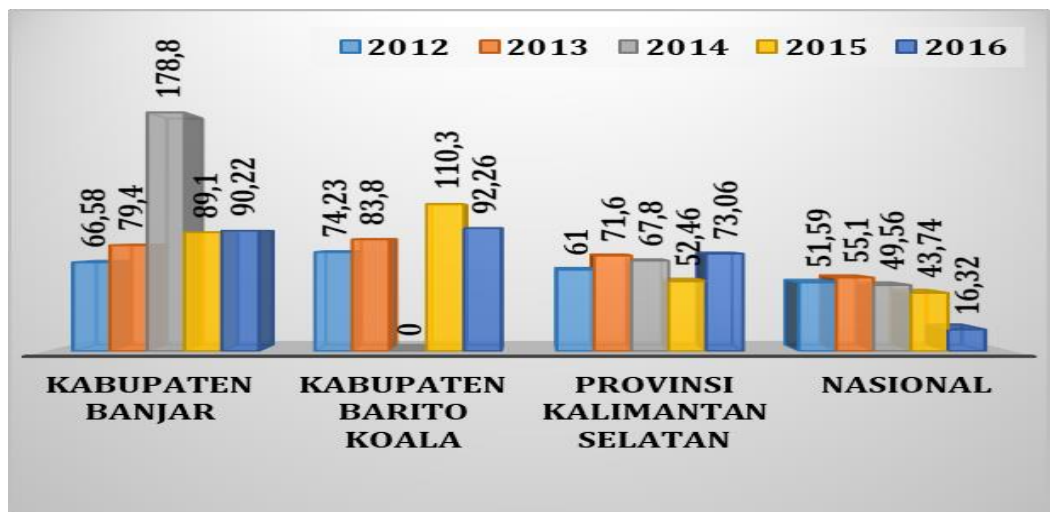


Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016

Rasio dokter umum terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan. Capaian rasio dokter di Kabupaten Banjar pada tahun 2016 masih rendah dibandingkan dengan capaian rasio dokter di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dan nasional. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan dokter di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan rendahnya jumlah dokter yang bekerja di rumah sakit puskesmas.

Salah satu aspek penting dalam pelayanan kesehatan adalah ketersediaan tenaga bidan. Tenaga kebidanan sangat vital perannya melayani kesehatan ibu hamil dan melahirkan. Selain itu, tenaga kebidanan cenderung memiliki frekuensi interaksi yang lebih sering dengan masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian rasio bidan disajikan dalam grafik berikut:

Gambar 2. 14 Grafik Rasio Bidan per 100.000 penduduk Tahun 2012-2016



Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016

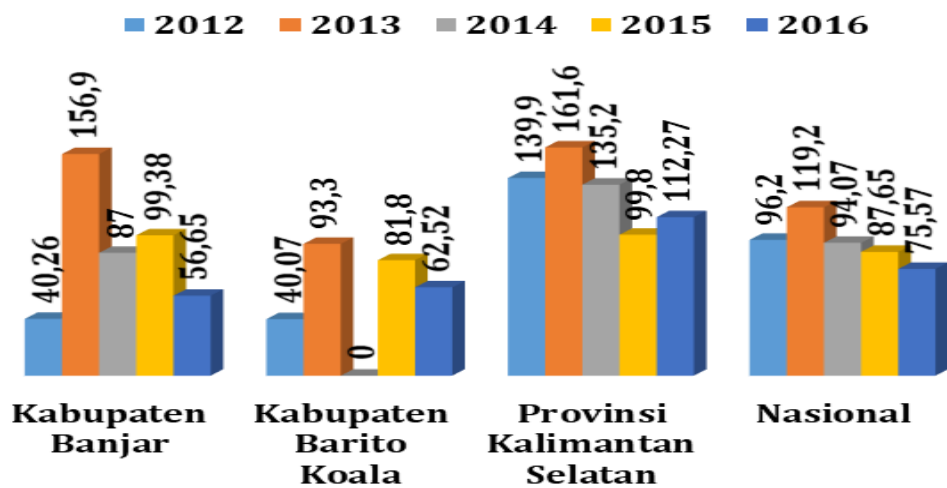
Rasio bidan terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif. Capaian rasio bidan Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala. Tren fluktuatif rasio bidan Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan bahwa tenaga bidan yang ditempatkan di puskesmas Kabupaten Banjar masih kurang dan belum merata. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh kurangnya tenaga bidan dan tidak berimbangnya antara ketersediaan tenaga bidan dengan jumlah penduduk yang terus meningkat.

Ketersediaan tenaga perawat juga memegang peranan penting dalam implementasi pelayanan kesehatan. Perawat berperan membantu unit pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya, perawat membantu kinerja dokter dalam melakukan tindakan medis dan memberikan pelayanan administasi kesehatan pada rumah sakit, puskesmas dan unit pelayanan kesehatan yang ada di daerah.

Rasio perawat terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar mengalami tren yang fluktuatif. Pada tahun 2016, capaian rasio perawat terhadap 100.000 penduduk di Kabupaten Banjar masih di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan nasional. Kabupaten Banjar mengalami rendahnya tenaga keperawatan yang dimiliki. Persoalan tersebut dapat disebabkan oleh belum

optimalnya redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) serta kurangnya kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD.

Gambar 2. 15 Grafik Rasio Perawat per 100.000 penduduk Tahun 2012-



Sumber: Profil Kesehatan Banjar 2012-2013, Barito Kuala 2015, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016, Profil Kesehatan Indonesia 2012-2016

Aspek sarana dan prasarana kesehatan termasuk unsur yang penting dalam pembangunan sektor kesehatan. Ketersediaan sarana seperti rumah sakit dan puskesmas turut mempengaruhi kinerja dari pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, di daerah dengan wilayah yang cukup luas, keberadaan puskesmas menjadi hal yang cukup penting bagi masyarakat. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian ketersediaan sarana kesehatan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 15 Jumlah Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2013-2016

	2012			2013			2014			2015			2016		
	RSU	Puskes mas	Pustu	RSU	Puskes mas	Pustu	RSU	Puskes mas	Pustu	RSU	Puskes mas	Pustu	RSU	Puskes mas	Pustu
Kab. Banjar	3	23	70	4	23	70	4	23	70	5	24	na	7	24	na
Kab. Barito Koala	1	19	65	1	19	65	1	19	65	3	19	na	1	19	na
Prov. Kalimantan Selatan	28	227	580	31	228	582	32	228	582	63	230	na	40	230	na
Nasional	2.083	9510	NA	2.228	9655	na	2.406	9731	na	2.488	9754	na	5.112	9767	na

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

Keterangan:

RSU : Rumah sakit umum

Pustu: Puskesmas pembantu

Pada periode 2013 - 2016, sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Banjar terus mengalami tren kenaikan. Kondisi yang sama terjadi pada Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan yang mengalami peningkatan jumlah infrastruktur kesehatan. Perkembangan infrastruktur kesehatan Kabupaten Banjar masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan.

Kondisi sarana prasarana kesehatan Kabupaten Banjar belum optimal dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, belum optimalnya kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD, sarana dan prasarana pelayanan Ponek di RSUD belum sesuai standard klasifikasi rumah sakit, belum optimalnya kinerja dan mutu Instalasi Farmasi, belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda), dan rendahnya fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya.

Pemerintah Kabupaten Banjar juga menyelenggarakan beragam layanan asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan/Pendampingan, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Pada tahun 2018, frekuensi penyaluran Layanan BPJS Aktif Satu Hari dalam satu tahun mencapai 211 keluarga. Frekuensi Penyaluran Layanan Jamkesda oleh Dinas Kesehatan dalam satu tahun mencapai 2.545 orang. Frekuensi Penyaluran Layanan Rekomendasi Bantuan Biaya Pengobatan/Pendampingan oleh *corporate social responsibility* Badan Amil Zakat Nasional (CSR BAZNAS) dalam satu tahun mencapai 18 orang. Sementara itu, frekuensi Penyaluran Layanan KIS Daerah oleh Dinas Kesehatan dalam satu tahun mencapai 49 keluarga. Kondisi kinerja asuransi kesehatan tersebut penting dipertahankan dan diperhatikan agar terjadi keberlanjutan yang lebih baik di Kabupaten Banjar pada masa mendatang.

2.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kinerja penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari beberapa aspek yang menggambarkan kondisi infrastruktur dasar di Kabupaten Banjar secara menyeluruh. Pada konteks tersebut, kondisi infrastruktur dilihat dari dua aspek mendasar yaitu ketersediaan dan kualitas.

a. Jalan dan Jembatan

Konektivitas antar wilayah di Kabupaten Banjar belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh ketersediaan jalan dan jembatan yang belum memadai. Hal ini diindikasikan dengan masih adanya wilayah-wilayah yang belum terhubung jalur darat.

Persoalan lain yang terjadi berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan jalan dan jembatan adalah belum optimalnya kualitas jaringan jalan terbangun. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya panjang jalan dan jembatan dalam kondisi rusak dan rusak berat. Meskipun persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap mencapai 73,34 persen pada tahun 2016, namun proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak masih cukup tinggi, yaitu mencapai 23,68 persen pada tahun yang sama. Kondisi jalan rusak tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Kertak Hanyar, Tatah Makmur, Mataraman, dan Simpang Empat.

Tabel 2. 16 Kondisi Jalan Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2016 (%)

No.	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Total
1.	Aluh-Aluh	10,7	-	-	-	10,70
2.	Beruntung	3,20	-	16,	-	19,70
3.	Gambut	13,1	-	-	-	13,10
4.	Kertak	12,6	7,00	-	4,70	24,35
5.	Tatah	12,2	-	3,80	2,30	18,35
6.	Sungai Tabuk	3,80	-	4,32	-	8,12
7.	Martapura	53,9	7,53	0,10	-	61,62
8.	Martapura	7,00	-	7,50	-	14,50
9.	Martapura	5,00	12,9	-	-	17,92
10	Astambul	58,6	3,40	19,	-	81,55
11	Karang Intan	36,5	5,50	24,	-	66,07
12	Aranio	-	-	-	-	-
13	Sungai Pinang	29,1	-	-	-	29,10

14	Paramasan	-	-	-	-	-
15	Pengaron	21,7	-	13,	-	34,70
16	Sambung	-	7,00	9,00	-	16,00
17	Mataraman	22,2	-	4,30	3,10	29,65
18	Simpang	15,8	12,8	14,	4,55	48,00
19	Telaga	-	-	-	-	-
Jumlah/Total		305,	56,2	116	14,	493,43

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016

Kualitas jaringan jalan juga dapat dilihat dari kondisi prasarana jembatan terbangun. Total panjang jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Banjar mencapai 72,37% pada tahun 2016. Sementara itu, panjang jembatan dalam kondisi rusak mencapai 13,27%. Jumlah jembatan rusak terbanyak berada di Kecamatan Aluh-aluh sejumlah 26 jembatan rusak, diikuti Kecamatan Sungai Tabuk berjumlah 21 jembatan.

Tabel 2. 17 Jumlah dan Kondisi Jembatan di Kabupaten Banjar Tahun 2016

No.	Kecamatan	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Total
1.	Aluh-Aluh	30	9	3	26	68
2.	Beruntung	17	8	4	18	47
3.	Gambut	24	0	0	0	24
4.	Kertak	28	11	8	6	53
5.	Tatah	12,25	-	3,80	2,30	0
6.	Sungai	55	6	9	21	91
7.	Martapura	39	-	-	2	41
8.	Martapura	39	-	1	-	40
9.	Martapura	30	-	3	-	33
10.	Astambul	57	-	7	-	64
11.	Karang Intan	69	-	7	16	92
12.	Aranio	18	-	3	-	21
13.	Sungai	22	-	7	4	33
14.	Paramasan	12		7	-	19
15.	Pengaron	61		6	-	67
16.	Sambung	24		9	1	34
17.	Mataraman	39	-	-	-	39
18.	Simpang	24	-	5	16	45
19.	Telaga	12	-	6	-	18
	Jumlah	600	34	85	110	829

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016

Kualitas jaringan jalan yang masih belum optimal disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah upaya rehabilitasi jalan dan jembatan yang masih belum

memadai. Selain itu, konstruksi jalan dan jembatan pada beberapa ruas jalan belum sesuai standar. Belum optimalnya pelaksanaan tanggap darurat jalan dan jembatan serta sarana prasarana kebinamargaan yang belum memadai.

b. Air Bersih dan Air Limbah

Akses masyarakat terhadap air bersih belum optimal. Pada tahun 2015, unit pelayanan air minum hanya melayani 51,02% dari keseluruhan kebutuhan. Pelayanan tersebut dilakukan oleh 35 unit pelayanan air minum tingkat kabupaten. Meskipun cakupan pelayanan masih belum maksimal, namun unit-unit tersebut telah mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat seperti rumah tangga, instansi sosial, niaga, industri, dan terminal.

Tabel 2. 18 Jumlah Pelanggan Air Minum Berdasarkan Unit Pelayanan Kabupaten Banjar Tahun 2015

Unit Pelayanan	Sosial Umum	Sosial Khusus	Rumah Tangga	Niaga Kecil	Niaga Menengah	Niaga Besar	Industri Kecil	Industri Besar	Khusus Bandara	Terminal Tangki	Jumlah
Banjarbaru 1	28	42	2443	112	219	21	1	-	-	-	2866
Banjarbaru 2	7	6	455	27	135	11	-	-	-	-	641
Banjarbaru 3	2	6	236	15	10	4	-	-	-	-	273
Banjarbaru 4	16	18	603	37	366	13	-	-	-	1	1054
Banjarbaru 5	26	11	351	49	405	4	-	-	-	-	846
Sei Besar	43	32	1072	89	342	12	-	-	-	-	1590
Loktabat	49	39	738	97	486	17	-	-			1426
Martapura 1	33	30	542	73	243	18	2	-	-	-	941
Martapura 2	27	37	684	66	202	10	1	-	-	-	1027
Gambut	46	18	180	115	246	57	-	-	-	-	662
Sei Tabuk	55	34	1080	61	8	2	-	-	-	-	1240
Astambul	6	17	1088	17	-	1	-	-	-	-	1129
Pengaron	12	12	687	6	-	1	-	-	-	-	718
Simpang Empat	13	14	790	24	5	2	-	4	-	-	852
Cempaka	25	12	1340	13	23	1	-	-	-	-	1414
Dalam Pagar	14	5	189	-	-	-	-	-	-	-	208

Mataraman	11	17	237	17	6	6	-	-	-	-	294
Karang Intan	5	9	212	4	-	2	-	-	-	-	232
Aluh-Aluh	12	7	449	8	2	1	-	-	-	-	479
Tambak Sirang	29	17	609	19	15	-	8	-	-	-	697
Tatah Makmur	33	12	680	10	35	-	4	-	-	-	774
Beruntung Baru	13	5	573	4	-	-	-	-	-	-	595
Sungai Pinang	5	12	266	3	-	-	-	-	-	-	286
Sungai Ulin	6	5	681	4	16	-	-	-	-	-	712
Trikora	1	2	137	2	16	-	-	-	-	-	158
Guntung Manggis	3	4	925	8	24	1	-	-	-	-	965
Guntung Payung	-	-	75	1	3	-	-	-	-	-	79
Sambung Makmur	-	-	190	5	-	-	-	-	-	-	195
Landasan	65	36	634	216	285	53	1		1		1291

Ulin											
Landasan Ulin 2	4	2	873	7	13	1	-	-	-	-	900
Landasan Ulin 3	8	11	48	16	34	-	-	-	-	-	117
Liang Anggang	2	2	144	8	34	-	-		-		190
Kertak Hanyar 2	1	1	441	4	29	1	-	-	-	-	477
Kertak Hanyar 3	3	3	568	9	16	-	-	-	-	-	599
Kertak Hanyar	57	33	727	85	271	46	1		-		1220

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2016

Belum optimalnya akses air bersih masyarakat disebabkan oleh dua faktor, yaitu rendahnya sarana prasarana pelayanan air minum dan belum optimalnya pengelolaan air limbah. Faktor utama yang paling berpengaruh adalah rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan air minum. Hal tersebut terindikasi dari ketersediaan sarana dan prasarana air minum perpipaan dan non perpipaan yang belum memadai.

Pengelolaan air limbah belum optimal. Hal ini terindikasi dari rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah pada skala individual, komunal, kawasan maupun IPLT. Kondisi tersebut diperparah dengan sistem drainase yang belum optimal baik dalam skala lingkungan maupun kawasan.

c. Bangunan dan Jasa Konstruksi

Kualitas bangunan gedung di Kabupaten Banjar belum memadai. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakefektifan kualitas konstruksi bangunan gedung yang ada. Persoalan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah sulitnya melakukan standarisasi kualifikasi bangunan karena NSPK (Norma, Standar, Pedoman, Kriteria) bangunan gedung yang belum tersedia. Selain itu, pelaksanaan pengawasan bangunan belum komprehensif dan berkelanjutan.

Persoalan lain yang berpengaruh terhadap level kualitas bangunan adalah kinerja penyelenggaraan jasa konstruksi. Saat ini, penyelenggaraan urusan tersebut belum memadai. Hal ini disebabkan oleh minimnya pembinaan terhadap pelaku konstruksi sehingga pemenuhan kualifikasi pada proyek-proyek bangunan gedung belum tercapai dengan baik. Persoalan lain yang juga berpengaruh adalah penyediaan informasi jasa konstruksi yang belum optimal serta pengawasan konstruksi bangunan yang belum menyeluruh.

2.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dihadapkan pada upaya pemenuhan akses

pemukiman yang layak huni. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemenuhan akses rumah layak huni, penataan pemukiman kumuh serta peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman yang memadai.

Akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Hal ini terindikasi dari masih adanya unit-unit rumah yang termasuk dalam kategori tidak layak huni. 5,57% jumlah rumah terbangun berada dalam kondisi kumuh. Kondisi tersebut disebabkan upaya penyediaan rumah umum, khusus dan susun untuk masyarakat masih belum optimal.

Tabel 2. 19 Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Banjar, 2011-2015

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Rumah Layak Huni	-	130.992	133.758	137.385	133.118
Jumlah Keluarga Miskin yang Mampu Mengakses Rumah Layak Huni	0	0	10	931	133.433
Cakupan Rumah Layak Huni	-	-	-	-	94,43%

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka Tahun 2012-2016

Belum optimalnya tingkat kelayakhunian di Kabupaten Banjar juga dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Salah satu faktor yang paling berpengaruh adalah belum optimalnya upaya penataan pemukiman kumuh eksisting. Hal tersebut terindikasi dari ketidakoptimalan penanganan, pencegahan serta penertiban pemukiman kumuh pada tingkat kabupaten. Selain itu, sarana dan prasarana lingkungan pemukiman masih belum memadai. Kondisi tersebut diindikasikan disebabkan belum optimalnya keterhubungan antar perumahan melalui jalan lingkungan serta upaya proteksi kebakaran di pemukiman yang belum memadai. Hal lain yang juga perlu menjadi perhatian adalah belum memadainya ketersediaan sistem drainase serta air limbah di

pemukiman. Kondisi jalur hijau yang sudah tersedia di Kabupaten Banjar adalah 28.530 m².

2.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi lingkungan yang aman dan tenteram menjadi jaminan bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera. Penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari di Kabupaten Banjar mulai diberlakukan pada tahun 2014 dan telah berjalan dengan baik. Banyak kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dan difasilitasi oleh Pemda, seperti Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi dan Sinoman Hadroh, serta keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) yang mengalami peningkatan. Angka kriminalitas di Kabupaten Banjar menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah maupun aparat keamanan. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah tindak pidana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 20 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016

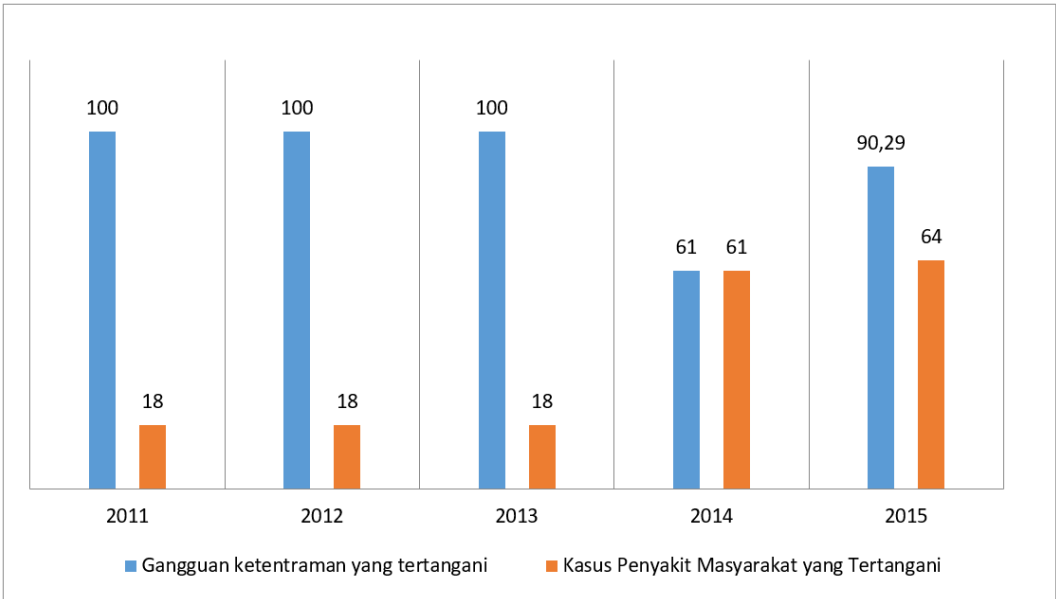
Kecamatan	2013	2014	2015	2016
Aluh-Aluh	-	-	-	-
Beruntung Baru	-	-	-	-
Gambut	41	58	34	57
Kertak Hanyar	58	58	48	31
Tatah Makmur	-	-	-	-
Sungai Tabuk	42	31	32	27
Martapura	373	268	175	61
Martapura Timur	-	23	15	14
Martapura Barat	23	15	12	13
Astambul	17	19	24	24
Karang Intan	27	30	18	-
Aranio	6	10	2	20
Sungai Pinang	6	19	12	9
Paramasan	-	-	-	14
Pengaron	13	6	15	-
Sambung Makmur	3	6	3	14
Mataraman	27	33	17	3

Simpang Empat	21	35	25	24
Telaga Bauntung	-	-	-	24
Jumlah	657	611	432	335

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2013-2015

Berdasarkan data dari Kepolisian Resort Kabupaten Banjar terdapat beberapa titik rawan kriminalitas yang ada di Kabupaten Banjar, yaitu: Kecamatan Martapura, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, dan Sungai Tabuk. Mayoritas kasus kriminal yang terjadi di Kabupaten Banjar adalah kasus peredaran narkoba dan pencurian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 16 Grafik Persentase Ketentraman, Ketertiban, dan Kasus Penyakit Masyarakat yang Tertangani di Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 (%)



Sumber: RPJMD Kab. Banjar Tahun 2011-2015 (Sebelum diPerubahan)

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban yang tertangani di Kabupaten Banjar mengalami fluktuasi. Sementara itu, kasus penyakit masyarakat yang tertangani mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir. Peningkatan yang signifikan terjadi pada tahun 2014. Meskipun tingkat penanganan dari kedua permasalahan meningkat, namun belum seluruhnya tertangani masih menyisahkan beberapa kasus yang belum tertangani. Kasus gangguan ketentraman dan ketertiban masih menyisahkan kasus yang belum selesai ditangani yaitu sebesar 9,71 persen dan kasus

penyakit masyarakat yang belum ditangani sebesar 36 persen.

Persoalan tersebut terjadi disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat karena masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan aparat dan masyarakat tentang hukum dan belum optimalnya cakupan patrol. *Kedua*, kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah (Perda) karena belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat dan rendahnya pengawasan pelaksanaan Perda. *Ketiga*, rendahnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban karena masih rendahnya kapasitas SDM pemuda; dan *keempat*, tingginya persebaran penyakit masyarakat (PEKAT) karena rendahnya kerjasama masyarakat dan aparat dalam menindak penyakit masyarakat.

Persoalan lain yang perlu diperhatikan dari pemerintah Kabupaten Banjar yaitu partisipasi politik. Saat ini, partisipasi politik masyarakat belum optimal. Kondisi ini disebabkan oleh fasilitas organisasi sosial politik belum optimal dan belum optimalnya pendidikan politik masyarakat.

2.3.1.6. Sosial

Kabupaten Banjar juga memiliki keragaman dalam hal kepemelukkan agama masyarakatnya. Agama Islam merupakan agama terbesar yang dipeluk mayoritas penduduk di Kabupaten Banjar. Agama Budha menjadi agama paling minoritas pemeluknya. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah penduduk menurut agama disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama Yang Dianut Kabupaten Banjar Tahun 2015 (jiwa)

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Aluh-Aluh	30.214	6	1	1	-	-
Beruntung Baru	13.203	2	-	-	-	-
Gambut	39.203	38	30	12	12	-
Kertak	37.947	486	287	18	178	2

Hanyar						
Tatah Makmur	10.708	-	-	-	-	-
Sungai Tabuk	70.100	169	49	19	16	-
Martapura	103.366	296	111	27	126	2
Martapura Timur	26.408	2	6	1	-	-
Martapura Barat	17.084	3	4	-	-	-
Astambul	36.133	11	4	-	-	-
Karang Intan	31.042	20	12	-	3	-
Aranio	8.392	5	-	-	-	2
Sungai Pinang	13.821	77	4	108	-	42
Paramasan	2.353	148	15	1.184	-	857
Pengaron	18.421	11	-	1	-	-
Sambung Makmur	11.502	3	-	-	-	-
Mataraman	24.764	95	38	1	-	-
Simpang Empat	33.640	74	54	2	-	-
Telaga Bauntung	3.395	-	-	-	-	-
Jumlah	531.696	1.446	615	1.374	335	905

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2016

Pada tahun 2015, agama Islam menjadi agama dengan mayoritas pemeluk sebesar 99.13 persen dari total keseluruhan penduduk Kabupaten Banjar. Agama Kristen Protestan menempati posisi kedua sebagai agama dengan pemeluk terbanyak sebesar 0,23 persen. Sementara itu, agama dengan pemeluk paling sedikit ialah agama Budha yang hanya sebesar 0.06 persen.

Gambaran kondisi sosial di Kabupaten Banjar dapat dilihat dari jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). PMKS

adalah seseorang atau keluarga yang memiliki kesulitan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya. Kondisi tersebut menyebabkan PMKS tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Kesulitan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah PMKS agama disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 22 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Kabupaten Banjar per Kecamatan Tahun 2016 (jiwa)

Kecamatan	PMKS
Aluh-Aluh	931
Beruntung Baru	1.729
Gambut	1.076
Kertak Hanyar	1.045
Tatah Makmur	1.710
Sungai Tabuk	3.015
Martapura	467
Martapura Timur	2.369
Martapura Barat	2.447
Astambul	871
Karang Intan	5.186
Aranio	203
Sungai Pinang	794
Paramasan	731
Pengaron	503
Sambung Makmur	589
Mataraman	1.102
Simpang Empat	1.857
Telaga Bauntung	180
Jumlah	26.805

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2017

Kondisi PMKS di Kabupaten Banjar relatif besar. Mayoritas PMKS di Kabupaten Banjar adalah lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga berumah tidak layak huni. Minoritas PMKS di Kabupaten Banjar adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Besaran angka ini harus tetap diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Sosial, munculnya PMKS di Kabupaten Banjar disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya pembinaan dan penanggulangan masalah sosial, rendahnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi, rendahnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin, rendahnya bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial dan lansia rentan sosial, rendahnya fasilitasi program keluarga harapan, rendahnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas, rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan), rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjol) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng), rendahnya verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu, rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat, belum optimalnya kapasitas lembaga zakat, masih rendahnya pengawasan terhadap aparatur daerah, kurangnya pengawasan terhadap aparatur daerah, rendahnya pemberdayaan terhadap pesantren, dan belum optimalnya pembinaan pesantren.

Munculnya PMKS di Kabupaten Banjar juga dapat disebabkan adanya bencana. Berdasarkan wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), saat ini Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki sejumlah permasalahan mengantisipasi dan/atau menangani bencana. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: perlu ditingkatkannya kesiapsiagaan terhadap bencana, kurangnya pemahaman masyarakat tanggap bencana, kurangnya kerja sama penyiapan

logistik, belum optimalnya pencegahan bencana, belum optimalnya ketersediaan bangunan pengendali banjir, belum optimalnya kemampuan kedaruratan, kurangnya koordinasi lembaga tanggap bencana, belum optimalnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik, belum optimalnya rehabilitasi pasca bencana, belum optimalnya rekonstruksi pasca bencana, belum optimalnya perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya efektifitas perencanaan penanggulangan bencana, belum optimalnya proteksi kebakaran, belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan, dan kurangnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan.

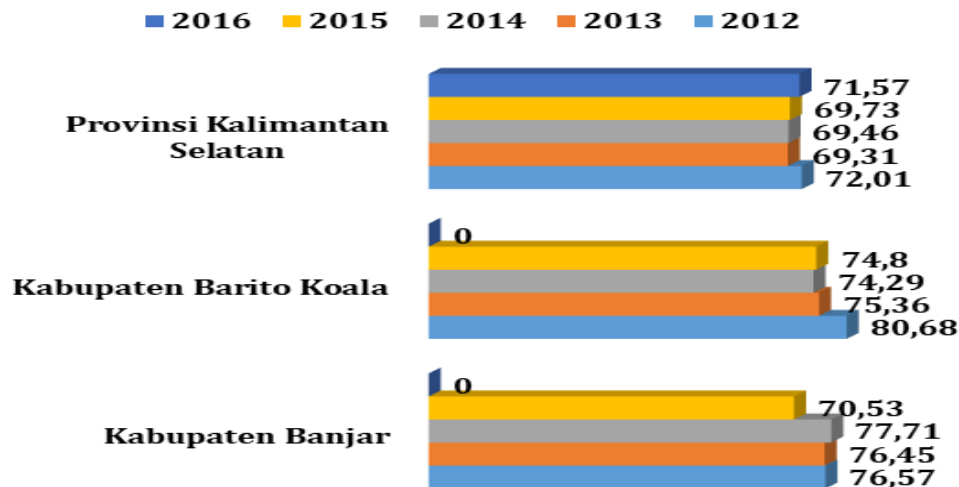
2.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Urusan wajib non-pelayanan dasar terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, perhubungan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, komunikasi dan informatika, koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, pangan, statistik, perpustakaan, pertanahan dan administrasi pendudukan. Berikut adalah gambaran umum mengenai urusan wajib non-pelayanan dasar di Kabupaten Banjar:

2.3.2.1. Tenaga Kerja

Sektor ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Angkatan kerja yang besar dengan kualitas yang baik mampu menjadi modal yang bagus bagi pembangunan ekonomi daerah. Namun sebaliknya kualitas tenaga kerja yang rendah adalah persoalan penting yang harus dihadapi. Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan. Dalam konteks Kabupaten Banjar, kondisi ketenagakerjaan ditentukan dalam dua indikator, yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat kesempatan kerja.

Gambar 2. 17 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2012-2016 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

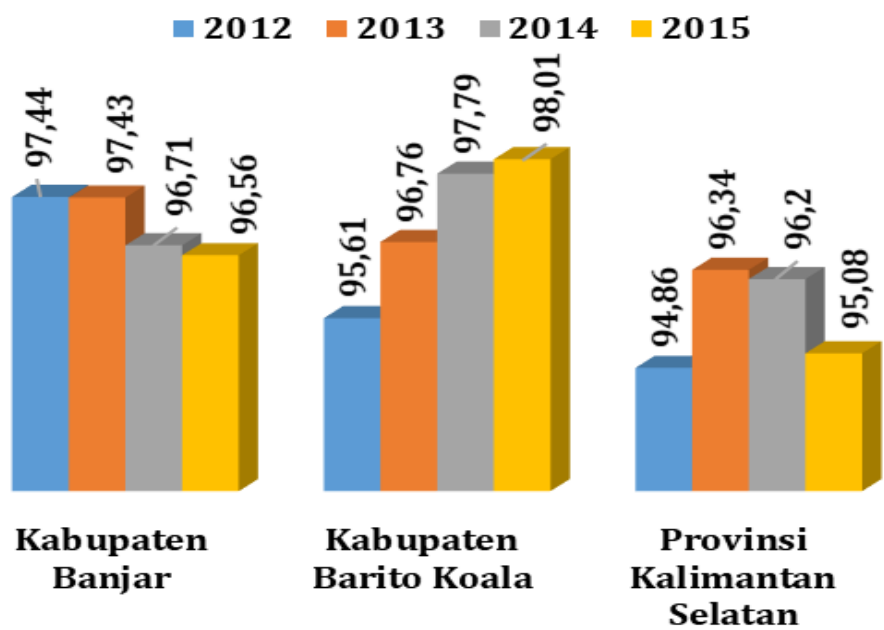
Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi tenaga kerja yang aktif bekerja dan mencari pekerjaan. TPAK didapat dengan membandingkan angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

TPAK Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, capaian TPAK Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan dengan TPAK Kabupaten Barito Kuala. Capaian tersebut mengindikasikan masih diperlukannya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor ekonomi potensial. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pencari kerja, kurangnya keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi, dan fasilitasi penyediaan lapangan kerja belum optimal.

Tingkat kesempatan kerja (TKK) juga menjadi salah satu indikator penting sektor ketenagakerjaan. TKK merupakan peluang seorang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. TKK menggambarkan peluang seseorang dalam angkatan

kerja untuk bisa terserap dalam pasar kerja atau dapat bekerja. Semakin besar angka TKK, semakin baik pula kondisi ketenagakerjaan dalam suatu wilayah.

Gambar 2. 18 Grafik Tingkat kesempatan kerja Tahun 2012-2015 (%)



Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016, BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

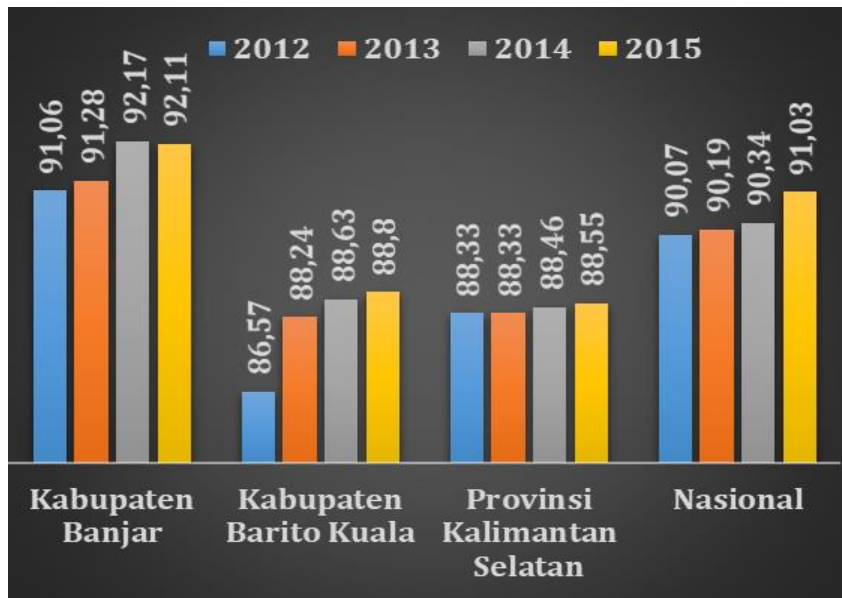
TKK Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2016, capaian TKK Kabupaten Banjar lebih rendah dibandingkan dengan TKK Kabupaten Barito Kuala. Capaian tersebut mengindikasikan masih diperlukannya perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat di berbagai sektor ekonomi potensial. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja belum optimal, fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial belum optimal, kurangnya kerjasama dengan penyedia lapangan kerja, dan kurangnya Pelaksanaan bursa kerja.

2.3.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator berdayanya masyarakat di suatu daerah, Kebijakan pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan perlu dikembangkan sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan. Tingkat keberdayaan perempuan di suatu daerah dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG).

Gambar 2. 19 Grafik Indeks Pembangunan Gender 2012-2015 (%)



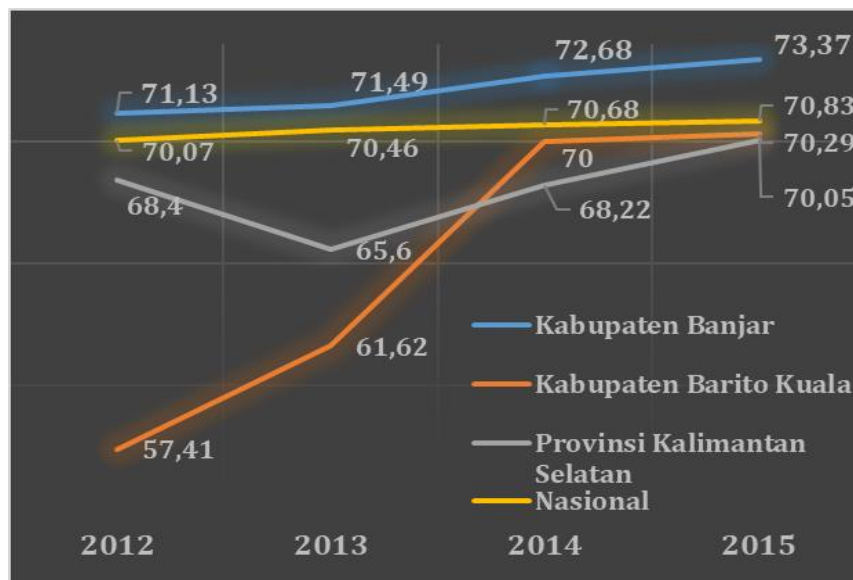
Sumber: BPS Pusat 2012-2016

IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG berfungsi untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG. Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Bila nilai IPG semakin tinggi, maka semakin tinggi pula kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian IPG mengalami tren peningkatan. Capaian IPG Kabupaten Banjar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kabupaten Banjar sudah optimal. Peningkatan IPG tersebut disebabkan adanya pemerataan pendidikan antara perempuan dan laki-laki di Kabupaten Banjar.

Pemerintah Kabupaten Banjar juga mempertimbangkan indikator kesejahteraan perempuan di samping IPG, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menunjukkan tingkat partisipasi perempuan dibanding dengan laki-laki dalam berbagai aktivitas publik dan kontribusinya dalam pendapatan.

Gambar 2. 20 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender 2012-2015 (%)



Sumber: BPS Pusat 2012-2015

Capaian IDG Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Capaian IDG Kabupaten Banjar sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pembanding lainnya.

Namun, nilai IDG Kabupaten Banjar belum mencapai 100 persen. Kondisi tersebut mengindikasikan pembangunan gender di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Kondisi tersebut disebabkan beberapa faktor yaitu: belum optimalnya kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi, belum optimalnya kapasitas SDM perempuan, belum optimalnya kecakapan hidup perempuan, belum optimalnya pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak, belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak, belum optimalnya kelembagaan Kabupaten Layak Anak, dan kurangnya koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media.

2.3.2.3. Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan urusan wajib dalam pembangunan daerah. Pada umumnya urusan ini dinilai dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) untuk melihat kualitas air, udara, tanah, tutupan lahan dan kesehatan lingkungan masyarakat.

Kenyamanan tinggal di suatu wilayah ditentukan dengan kondisi lingkungan hidup yang mendukung, salah satunya adalah faktor kebersihan suatu daerah menjadi faktor paling penting. Berikut adalah data tentang lingkungan hidup di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 23 Penanganan Sampah di Kabupaten Banjar Tahun 2012-2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Persentase penanganan sampah	18,3	20,54	25	26,55
2	Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut setiap hari	71,13	64,23	59,45	52,93

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan)

Kondisi persampahan di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dalam hal penanganannya. Pada periode 2012 - 2015, persentase penanganan sampah di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan sebesar 8,25%. Kondisi persampahan di Kabupaten Banjar sudah cukup tertangani. Peningkatan penanganan sampah juga dibuktikan dengan keberadaan sampah yang belum terangkut semakin berkurang. Total keseluruhan sampah yang belum terangkut di Kabupaten Banjar adalah 266.943 ton per hari, dari total sampah yang dihasilkan 406.018 ton per hari. Pada periode 2012-2015 keberadaan sampah yang belum diangkut menurun sebesar 18,2%.

Guna meningkatkan kualitas air, maka diperlukan peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan air. Upaya tersebut harus didukung oleh optimalisasi pemantauan sumber pencemar institusi dan non-institusi, optimalisasi pengelolaan laboratorium lingkungan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan air. Kualitas udara dapat ditingkatkan dengan penurunan polusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Sinergitas antar berbagai pemangku kepentingan diperlukan untuk menjalankan upaya ini. Kualitas tutupan lahan dan Sumber Daya Alam (SDA) dapat ditingkatkan dengan optimalisasi lahan kritis dan peningkatan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Pada tahun 2018 Kabupaten Banjar memiliki 28530 m2 daerah

jalur hijau. Perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam harus dijalankan untuk melindungi kualitas SDA.

Persoalan lingkungan lain yang harus diperhatikan adalah tingginya potensi pencemaran akibat sampah. Permasalahan ini disebabkan oleh volume sampah yang tidak terkelola dengan baik. Intervensi yang harus dilakukan adalah optimalisasi upaya pengurangan volume sampah dan penanganan sampah, Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 yang didukung oleh pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA dan pengembangan bank sampah.

2.3.2.4. Pangan

Ketahanan pangan terkait langsung dengan pemenuhan gizi masyarakat dan laju inflasi di bidang ekonomi. Ketahanan pangan terdiri dari dimensi ketersediaan pangan utama, distribusi atau akses pangan dan keanekaragaman konsumsi pangan. Ketahanan pangan dinilai dengan indikator makro indeks ketahanan pangan. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Banjar relatif baik, jika diperbandingkan dengan daerah lain. Faktor yang perlu diperhatikan adalah akses atau distribusi pangan ke berbagai kecamatan atau desa dan keanekaragaman konsumsi pangan. Capaian kondisi ketahanan pangan Kabupaten Banjar dapat ditunjukkan melalui ketersediaan pangan utama sebagaimana dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2. 24 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Kabupaten Banjar 2011-2017

No.	TAHUN	PRODUKSI PADI	PRODUKSI BERAS	KETERSEDIAAN BERAS	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN BERAS	PERIMBANGAN	RASIO
		(Ton)	(Ton)	(Ton)	(Jiwa)	(Ton)	(Ton)	
1	2010	240,478	139,862	135,205	506,839	70,527	64,678	1.92
2	2011	244,806	142,379	137,638	516,663	71,894	65,744	1.91
3	2012	284,829	165,724	160,206	527,997	73,471	86,735	2.18
4	2013	285,755	166,195	160,661	530,893	73,874	86,186	2.17
5	2014	263,942	153,509	148,397	534,699	74,404	72,505	1.99
6	2015	263,941	165,597	160,084	536,371	74,637	83,772	2.14
7	2016	261,269	163,914	158,457	540,582	75,223	80,339	2.11
8	2017	261,269	163,914	158,457	542,204	75,448	80,458	2.10
RATA-RATA		263,286	157,637	152,388	529,531	73,685	77,552	2.07

Ketersediaan pangan utama Kabupaten Banjar menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun 2010 hingga 2017. Data tersebut berbanding terbalik dengan data jumlah penduduk yang semakin naik. Fluktuasi produksi padi dan kurangnya pengembangan diversifikasi pangan non-beras menjadi salah satu faktor penyebab persoalan ini. Intervensi yang harus dijalankan ke depan harus dijalankan dengan peningkatan produksi padi yang didukung oleh pengembangan pangan lokal non-beras.

Tabel 2. 25 Ketersediaan Pangan Utama Berdasarkan Nilai Gizi Kabupaten Banjar Tahun 2011-2017

INDIKATOR (Satuan)	TAHUN						
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tersedianya Pangan berdasarkan nilai Gizi Orang per Hari :							
Ketersediaan Energi K.Kal/Kap/hr *Target Nasional= (2400 K.Kal/Kap/hr)	4,046	3,990	3,735	3,627	3,577	3,667	3,558
Ketersediaan Protein Gr/Kap/hr *Target Nasional = (63 Gr/Kap/hr)	109.97	106.4	101	100.5	98.67	94.58	91.78
Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan (Energi)	1.88	1.86	1.74	1.69	1.66	1.71	1.65
Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan (Protein)	1.93	1.87	1.77	1.76	1.73	1.66	1.61
% Ketersediaan pangan	191%	186%	175%	172%	170%	168%	163%

Ketersediaan energi menunjukkan tren yang semakin menurun dari tahun 2011 hingga 2017. Penurunan ini juga terjadi pada ketersediaan protein per hari. Diversifikasi konsumsi pangan harus segera dijalankan untuk mengatasi persoalan ini. Dukungan dari berbagai stakeholders untuk meningkatkan produksi tanaman pangan menjadi alternatif utama yang harus dijalankan secara berkesinambungan.

2.3.2.5. Perhubungan

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Banjar masih belum optimal. Hal tersebut terindikasi dari ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana perhubungan yang belum memadai. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh lambatnya rehabilitasi prasarana perhubungan terbangun. Selain itu, ketersediaan fasilitas keselamatan lalu lintas belum memadai. Salah satu indikasinya adalah banyak ruas jalan yang belum memiliki sarana rambu-rambu lalu-lintas yang memadai.

Meskipun ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan masih belum optimal, namun penyediaan layanan moda transportasi terus ditingkatkan setiap tahunnya. Jumlah angkutan di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada periode 2015 - 2016, awalnya hanya ada 292 angkutan di 11 trayek pada tahun 2015, kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 630 angkutan di 15 trayek. Hal ini menunjukkan kemajuan yang positif, diharapkan dengan banyaknya armada angkutan menjadikan masyarakat lebih memilih angkutan umum, sehingga mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meminimalisir kemacetan.

Tabel 2. 26 Nama Trayek dan Jumlah Angkutan di Kabupaten Banjar Tahun 2015-2016

Trayek	2015	2016	2017
Martapura – Simpang Tiga Liang Anggang	170	215	180
Martapura – Cempaka	2	2	2
Martapura – Riam Kanan	22	50	28
Martapura – Simpang Tiga Mataraman	40	142	33
Martapura – Sungai Tabuk Lok Baintan	11	35	9
Martapura – Kelampayan	3	17	1
Martapura – Pengaron	17	54	22
Martapura – Kahelaan	10	25	7
Martapura – Dalam Pagar	-	45	-
Martapura – Tungkep	12	3	10
Martapura – Pulau Nyiur	2	15	1

Martapura – Karang Intan	-	2	-
Martapura – Galam Rabah	-	25	-
Martapura – Kalampayan Hilir	-	2	-
Martapura – Aluh-aluh	3	25	2
Jumlah	292	630	295

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2015-2016

Peningkatan ketersediaan moda transportasi harus diimbangi dengan pengawasan dan pengendalian berkala. Hal tersebut dilakukan agar moda transportasi yang beroperasi dapat memenuhi standar keselamatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, upaya peningkatan kelayakan moda angkutan harus dilakukan secara komprehensif dan berkala.

2.3.2.6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB)

Pengendalian penduduk merupakan usaha untuk mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk ke arah angka pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah pada bidang kependudukan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator yang menggambarkan perihal kependudukan yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Manfaat dari laju pertumbuhan penduduk adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar periode waktu.

Tabel 2. 27 Laju Pertumbuhan Penduduk (%)

	2010-2016
Kabupaten Banjar	1,68
Kabupaten Barito Koala	1,45
Provinsi Kalimantan Selatan	1,79
Nasional	NA

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2012-2016

Capaian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjar mencapai 1,68 persen. Capaian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar masih dibawah capaian Provinsi Kalimantan

Selatan. Capaian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjar dapat disebabkan beberapa faktor yaitu belum optimalnya akses pelayanan program Keluarga Berencana (KB), kurangnya jumlah pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon), belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga), belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi, dan belum optimalnya kapasitas keluarga melalui kelompok Bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga.

2.3.2.7. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Kabupaten Banjar turut mengembangkan layanan bidang komunikasi dan informatika. Pada konteks ini, keberadaan sarana dan prasarana komunikasi dan Informatika dinilai sangat penting. Gambaran kondisi komunikasi dan informatika di Kabupaten Banjar dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: sarana dan prasarana seperti radio, TV, media center, fasilitas pelayanan pos dan giro, persentase penduduk yang menggunakan komputer, presentase rumah tangga yang memiliki Telepon seluler (HP), dan presentase rumah tangga yang menggunakan internet.

Tabel 2. 28 Jumlah sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Banjar tahun 2015

No	Uraian	Jumlah
1	Media center	1 Lokasi
2	Studio Intan TV	1 Lokasi
3	Studio Radio Penyiaran	1 Lokasi

Sumber: Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian tahun 2016-2021

Sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian seperti media center, studio intan TV, dan Studio Radio Penyiaran sangat penting. Media center digunakan dan dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan informasi dan internet gratis kepada masyarakat. Studio radio digunakan untuk menyiarkan informasi tentang pembangunan daerah kepada masyarakat baik melalui siaran langsung dan pengembangan radio streaming. Sementara studio TV digunakan untuk menyebarkan informasi melalui Channel Youtube. Ketiga media ini

dapat digunakan sebagai instrumen dalam meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar.

Tabel 2. 29 Fasilitas Pelayanan Pos dan Giro Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjar Tahun 2015 (unit)

Kecamatan	Kantor Pos	Kantor Pos Pembantu	Rumah Pos	Pos Keliling Desa	Jumlah
Aluh-Aluh	1	-	-	-	1
Beruntung Baru	-	-	-	-	-
Gambut	1	-	-	-	1
Kertak Hanyar	1	-	-	-	1
Tatah Makmur	-	-	-	-	-
Sungai Tabuk	1	-	-	-	1
Martapura	1	-	-	-	1
Martapura Timur	-	-	-	-	-
Martapura Barat	-	-	-	-	-
Astambul	-	-	-	-	-
Karang Intan	1	-	-	-	1
Aranio	-	-	-	-	-
Sungai Pinang	-	-	-	-	-
Paramasan	-	-	-	-	-
Pengaron	1	-	-	-	1
Sambung Makmur	-	-	-	-	-
Mataraman	1	-	-	-	1
Simpang Empat	1	-	-	-	1
Telaga Bauntung	-	-	-	-	-
Jumlah	9	-	-	-	9

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2015

Perkembangan fasilitas pelayanan pos dan giro di Kabupaten Banjar terbilang cukup minim. Capaian tersebut dinilai belum proporsional dengan jumlah kecamatan dan warga di Kabupaten Banjar. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan layanan pos dan giro di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan karena masyarakat Kabupaten Banjar lebih banyak menggunakan handphone.

Salah satu indikator penting urusan komunikasi dan informatika adalah penggunaan komputer. Komputer mengambil peranan penting dalam perkembangan teknologi. Perangkat komputasi mampu menghasilkan produk-produk digital yang semakin berkembang dengan kinerja lebih efisien dan efektif. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian persentase penduduk yang menggunakan komputer ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 30 Persentase Penduduk Yang Menggunakan Komputer Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017 (%)

No	Wilayah	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kabupaten Banjar	13,52	14.71	13,70
2	Kabupaten Barito Kuala	11,07	14,23	13,22
3	Provinsi Kalimantan Selatan	15,66	17,03	17,97

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2017

Perkembangan penduduk Kabupaten Banjar yang menggunakan komputer mengalami tren yang fluktuatif. Capaian Kabupaten Banjar masih lebih rendah dibandingkan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Banjar mengalami rendahnya persentase penduduk yang menggunakan komputer. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi.

Kehidupan masyarakat saat ini tidak terlepas dari kebutuhan untuk berkomunikasi antara yang satu dengan yang lain. Salah satu alat yang biasa digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh adalah telepon seluler atau handphone. Telepon seluler dapat digunakan untuk menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi terbaru, mempermudah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, dan hiburan. Saat ini, sebagian besar rumah tangga memiliki telepon seluler. Pada konteks Kabupaten Banjar, kondisi persentase rumah tangga yang memiliki telepon seluler ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 31 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Telepon Seluler (HP) Dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017 (%)

No	Uraian	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kabupaten Banjar	60,37	61.06	63.34
2	Kabupaten Barito Kuala	54,40	57,31	54,05
3	Provinsi Kalimantan Selatan	62,74	63,97	65,42

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017

Kondisi rumah tangga yang memiliki telepon seluler di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan penggunaan telepon seluler di Kabupaten Banjar masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor ekonomi.

Saat ini, internet sudah menjadi hal yang umum di lingkungan masyarakat umum. Segala sesuatu dapat diakses melalui internet. Internet telah menjadi media baru dalam berkomunikasi dan berinteraksi. Hal tersebut mempengaruhi perubahan budaya masyarakat karena perkembangan pola pikir, dan lingkungan. Media online kini sangat membantu kegiatan individu dan rumah tangga. Pada konteks Kabupaten Banjar, kondisi persentase rumah tangga yang mengakses internet ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 32 Persentase anggota Rumah Tangga yang Mengakses Internet dalam Tiga Bulan Terakhir Tahun 2015-2017

No	Wilayah	Tahun		
		2015	2016	2017
1	Kabupaten Banjar	23,58	25.02	29.23
2	Kabupaten Barito Kuala	19,17	19,17	21,11
3	Provinsi Kalimantan Selatan	23,35	27,05	31,37

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2015-2017

Perkembangan penggunaan internet di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Capaian Kabupaten Banjar masih rendah dibandingkan dengan capaian Provinsi Kalimantan

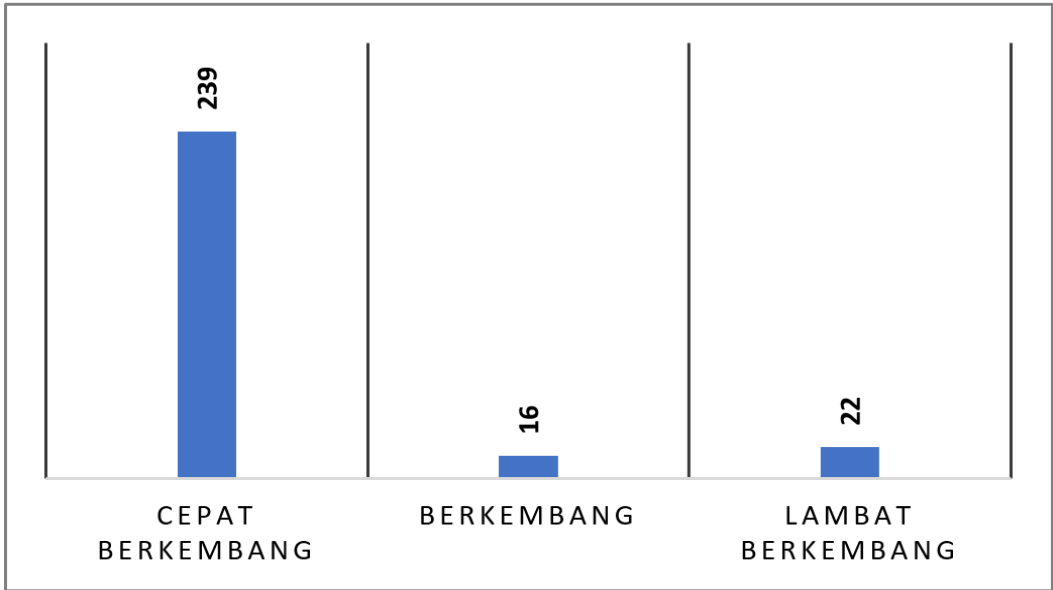
Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan penggunaan internet di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh faktor belum meluasnya jaringan sinyal internet hingga ke daerah pedalaman.

Persoalan lain yang tak kalah penting yaitu berkaitan dengan belum optimalnya keterbukaan informasi. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik karena belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi. Selain itu, belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik karena belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa.

2.3.2.8. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu urusan yang sangat penting berkaitan dengan kualitas pembangunan desa. Sebagian besar masyarakat bermukim di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu, perhatian terhadap pembangunan desa dan masyarakatnya sangat penting sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

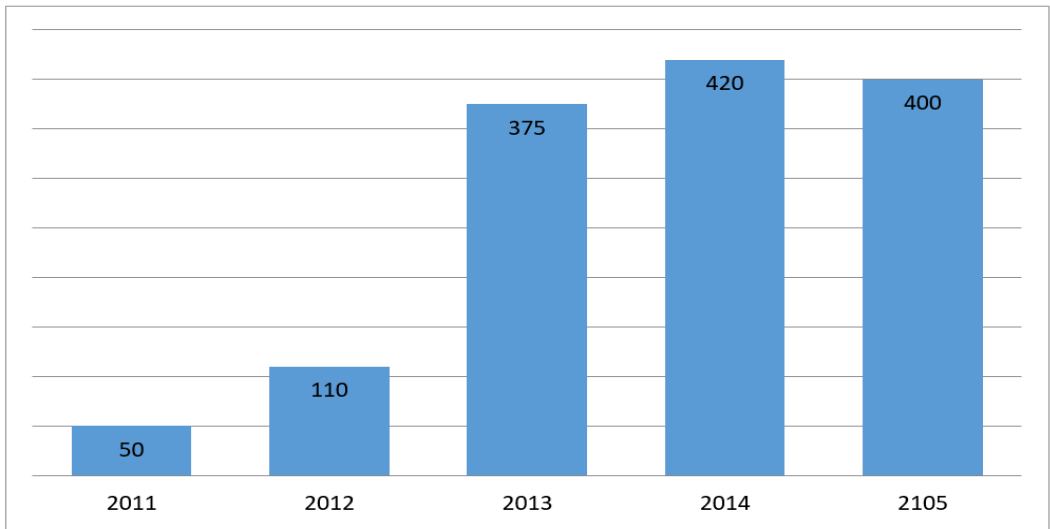
Gambr 2. 21 Grafik Status Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2017



Status desa di Kabupaten Banjar menunjukkan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah desa dengan status cepat berkembang sebanyak 239 desa, diikuti oleh desa lambat berkembang sebanyak 22 desa, dan desa berkembang sebanyak 16 desa.

Meskipun demikian, persentase desa yang berstatus swasembada masih rendah (lihat grafik 2.24). Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa yang dapat dilihat dari masih rendahnya perencanaan pembangunan desa, masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat, dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa. Selain itu, penyebab lain juga terkait dengan masih rendahnya kapasitas aparatur desa yang dapat dilihat dari belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan desa dan belum optimalnya kapasitas pengelolaan aset desa.

Gambar 2. 22 Grafik Jumlah Aparatur Desa yang Mengikuti Diklat di Banjar Tahun 2011 - 2015



Sumber: RPJMD Kab. Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan)

Pada tahun 2011 hingga 2014 jumlah aparatur desa yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengalami peningkatan. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2013, yaitu sebanyak 375 aparatur desa dari sebelumnya hanya 110 aparatur desa. Berbeda halnya pada tahun 2015, jumlah aparatur desa yang mengikuti diklat mengalami penurunan yaitu hanya sebanyak 400 aparatur desa dari sebelumnya 420 aparatur desa pada tahun 2014. Penurunan ini tentu saja mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap kapasitas aparatur desa.

Pemberdayaan masyarakat dan desa juga dapat dilihat dari jumlah BUMDes yang di bangun. Saat ini, jumlah BUMDes di Kabupaten Banjar sebanyak 98 unit. BUMDes tersebut dapat dijadikan

instrument untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan yang responsif terhadap pengembangan BUMDes tersebut agar meningkatkan perekonomian desa.

2.3.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kinerja koperasi dan usaha kecil menengah (KUKM) menjadi kunci bagi pemerataan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Koperasi mampu menjadi lembaga simpan-pinjam yang baik bagi masyarakat untuk menopang usaha kecil dan menengah yang dijalankan. Selain itu, koperasi juga mampu membantu kegiatan produksi dan konsumsi dengan harga yang lebih terjangkau, sehingga laju inflasi yang besar akibat tingginya harga barang dari luar daerah bisa ditekan. Pada level indikator, persentase koperasi aktif merupakan indikator yang sering digunakan untuk menilai kesehatan koperasi di berbagai daerah.

Pada konteks UKM, data tentang jumlah UKM digunakan untuk menilai kesehatan pertumbuhan ekonomi mikro daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah yang baik pada umumnya diikuti oleh semakin besarnya jumlah usaha masyarakat di berbagai sektor, baik dalam skala mikro, kecil atau menengah. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian jumlah koperasi dan UKM disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 33 Persentase Koperasi Aktif dan UKM di Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Koperasi aktif	55	58	60,26	61,47	NA
2	Persentase usaha mikro dan kecil	NA	NA	NA	98	98
3	Jumlah KUKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah	4	6	6	8	NA

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2016

Persentase koperasi aktif dan persentase UKM di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2017 terdapat 154 koperasi aktif dengan total keseluruhan SHU mencapai Rp. 9.556.475.353,-. Besarnya total SHU dan jumlah koperasi aktif mengindikasikan bahwa kualitas manajerial dan partisipasi masyarakat dalam berkoperasi dan UKM di Kabupaten Banjar sudah optimal.

UKM di Kabupaten Banjar didominasi oleh peningkatan usaha kecil. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatan jiwa wirausaha masyarakat di berbagai sektor potensial. Pemberdayaan masyarakat untuk menumbuhkan jiwa wirausaha juga perlu diberikan kepada masyarakat asli Kabupaten Banjar melalui kerjasama yang baik dengan pendatang dan berbagai pihak terkait. Berikut adalah data tentang jumlah usaha mikro dan kecil di Kabupaten Banjar:

Tabel 2. 34 Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Banjar Tahun 2017

No	NAMA KECAMATAN	JUMLAH UMK	KLASIFIKASI		DAGANG		PERTANIAN/ PERIKANAN/ PETERNAKAN		INDUSTRI PENGOLAHAN		AGRIBISNIS		TI		FASHION/ RIAS		JASA		OTOMOTIF		LAIN-LAIN	
			KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO	KECIL	MIKRO
1	GAMBUT	1.460	25	1.435	18	435	1	826	2	5	1	0	1	0	1	5	1	124	0	33	0	7
2	SUNGAI TABUK	3.000	7	2.993	4	568	1	2.078	0	0	0	0	0	0	1	36	0	16	1	35	0	260
3	ALUH ALUH	4.762	31	4.731	8	93	22	4.566	0	2	0	0	0	0	0	9	1	0	0	36	0	25
4	KARANG INTAN	1.043	9	1.034	7	496	2	329	0	3	0	0	0	0	0	28	0	16	0	16	0	146
5	ASTAMBUL	2.025	2	2.023	2	622	0	1.226	0	1	0	0	0	0	0	23	0	7	0	0	0	144
6	SIMPANG EMPAT	2.304	5	2.299	1	38	1	2.258	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3
7	SUNGAI PINANG	1.635	1	1.634	0	75	1	1.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	KERTAK HANYAR	1.018	30	988	21	385	0	346	7	0	0	0	0	0	0	33	2	37	0	42	0	145
9	PENGARON	2.341	3	2.338	3	162	0	2.154	0	0	0	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	13
10	MARTAPURA	2.002	34	1.968	28	1.228	1	39	0	6	0	0	0	0	1	112	2	37	2	67	0	479
11	ARANIO	1.572	10	1.562	0	35	10	1.516	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	9
12	MATARAMAN	1.625	11	1.614	8	199	2	1.332	0	2	0	0	0	0	1	5	0	4	0	21	0	51
13	BERUNTUNG BARU	2.109	0	2.109	0	114	0	1.970	0	2	0	0	0	0	0	7	0	4	0	1	0	11
14	MARTAPURA BARAT	1.916	18	1.898	6	273	8	1.514	0	0	2	0	0	0	1	9	1	0	0	16	0	86

15	MARTAPURA TIMUR	1.071	4	1.067	3	658	1	97	0	97	0	0	0	0	0	57	0	16	0	20	0	122
16	SAMBUNG MAKMUR	1.602	15	1.587	0	33	15	1.527	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	7	0	17
17	PARAMASAN	1.837	0	1.837	0	37	0	1.790	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	5
18	TELAGA BAUNTUNG	773	1	772	1	12	0	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
19	TATAH MAKMUR	1.218	2	1.216	0	66	1	1.096	0	1	0	0	0	0	0	12	1	4	0	4	0	33
TOTAL		35.313	208	35.105	110	5.529	66	26.980	10	121	3	0	1	0	5	342	10	271	3	304	0	1.558

Guna mendukung kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka dua faktor utama yang harus diperhatikan adalah kapasitas manajerial Usaha Mikro dan penguatan kelembagaan koperasi. Kapasitas manajerial usaha mikro dipengaruhi oleh kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM, akses bantuan permodalan UKM, kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM, sarana dan prasarana pemasaran UKM. Sementara itu, kualitas kelembagaan koperasi dipengaruhi oleh kapasitas SDM pengelola koperasi, kapasitas manajemen usaha koperasi, kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi dan pengawasan dan penilaian kelembagaan koperasi.

2.3.2.10. Penanaman modal

Aspek penanaman modal turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Penanaman modal menjadi pendorong utama bagi laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah, baik dari berbagai sektor pembangunan potensial (tambang dan non-tambang). Pada konteks sektor non-tambang, penanaman modal sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan PDRB di sektor pertanian dan turunannya.

Nilai investasi menjadi salah satu indikator penanaman modal suatu daerah. Nilai investasi yang besar di berbagai sektor potensial, khususnya di sektor non-tambang dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi secara signifikan, sehingga pemerataan pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Nilai investasi dapat dikategorikan menjadi dua (2) macam, yaitu: Penerimaan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penerimaan Modal Asing (PMA). Capaian nilai investasi Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 35 Realisasi investasi PMDN dan PMA Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Realisasi investasi PMDN (juta rupiah)	NA	NA	12.808,85	2.606,98	0
	Tenaga kerja (ribu)	1.505	NA	5	142	0
2	Realisasi investasi PMA (ribu US\$)	NA	10.355,20	1.358,14	169.947,10	1.505,8
	Tenaga kerja (ribu)	NA	1.740	201	331	5

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2013-2017

Nilai investasi PMDN Kabupaten Banjar mengalami tren penurunan. Nilai PMDN terbesar Kabupaten Banjar terjadi pada tahun 2014 yang mencapai 12.808,85 juta rupiah. Nilai investasi yang besar juga diikuti dari PMA terbesar terjadi pada tahun 2015 yang mencapai 169.947,1 ribu US\$. Kenaikan realisasi jumlah PMDN dan PMA di Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan bahwa perbaikan iklim investasi, kerjasama dan promosi investasi menunjukkan kinerja yang signifikan.

Guna meningkatkan realisasi nilai investasi, dua faktor utama yang harus diperhatikan adalah kondusifitas iklim dan promosi investasi. Kondusifitas iklim investasi terkait dengan kualitas kelembagaan dan perizinan, sedangkan promosi investasi dipengaruhi oleh koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan kerjasama, promosi dan perizinan. Hingga saat ini terdapat 49 izin pertambangan di Kabupaten Banjar. Pertambangan memang menjadi faktor penyumbang PDRB terbesar di wilayah Kalimantan, namun sudah tidak dapat dijadikan tumpuan untuk membangun pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan.

2.3.2.11. Kepemudaan dan olahraga

Kabupaten Banjar memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan dan olahraga, mengingat saat ini demografi penduduk didominasi oleh pemuda (usia angkatan kerja). Membangun kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan sumber daya manusia (SDM) Kabupaten Banjar. Kondisi pembangunan sektor

kepemudaan dan olahraga dapat ditinjau dari ketersediaan sarana prasarana olahraga.

Tabel 2. 36 Sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Banjar 2012-2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah fasilitas olah raga	36	39	43	47
2	Jumlah kegiatan olahraga	0	0	0	0
3	Jumlah wirausahawan muda	5	6	8	9

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2015

Pada tahun 2015, Kabupaten Banjar memiliki 47 fasilitas olahraga. Capaian tersebut berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Banjar telah bertambah menjadi 126 fasilitas olahraga pada tahun 2018. Beberapa cabang olahraga yang menjadi olahraga unggulan di Kabupaten Banjar diantaranya adalah: judo, volly pasir, karate, panahan, taekwondo, dayung, gulat, silat, renang, dan senam. Jumlah tersebut dinilai masih belum seimbang proporsinya seiring jumlah penduduk Kabupaten Banjar yang semakin bertambah. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan sektor kepemudaan dan olahraga Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan beberapa faktor yaitu: rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga, belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga, kurangnya aktivitas fisik massal, belum optimalnya sarana dan prasana olahraga, belum optimalnya kuantitas sarana dan prasarana olahraga, belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, belum optimalnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan belum optimalnya kapasitas pemuda.

2.3.2.12. Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan yang paling penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Banjar. Urusan ini memainkan peran dalam

penyediaan data bagi pemerintah daerah, masyarakat, dan *stakeholders* yang berkepentingan. Ketersediaan data yang memadai akan memudahkan para pengambil kebijakan dalam menentukan perkembangan daerah secara benar.

Penyelenggaraan urusan statistik di Kabupaten Banjar sudah berjalan optimal. Saat ini, data mengenai kabupaten dalam angka dan buku PDRB sudah tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat secara luas. Meskipun demikian, diperlukan pengembangan urusan statistik secara memadai karena masih ada beberapa data yang tidak dapat diakses seperti data kabupaten dalam angka tahun 2013.

2.3.2.13. Perpustakaan

Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan perpustakaan merupakan salah satu urusan wajib. Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional yang merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Perpustakaan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan kehidupan masyarakat, guna menumbuhkan budaya gemar membaca masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan berbagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian sektor perpustakaan dan persebarannya ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 37 Perpustakaan desa/kelurahan per kecamatan di Kabupaten Banjar 2018

Kecamatan	Jumlah
Martapura Kota	18
Martapura Timur	7
Martapura Barat	8
Mataraman	8
Astambul	5
Karang Intan	8

Gambut	4
Ketak Hanyar	4
Aluh-aluh	2
Tatah Makmur	1
Sungai tabuk	4
Sungai Pinang	1
Telaga Bauntung	1
Sambung Makmur	1
Simpang Empat	2
Pengaron	1
Aranio	2
Beruntung Baru	2
Peramasan	1
Jumlah perpustakaan (seluruh Kecamatan)	80

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2018

Kecamatan yang memiliki jumlah perpustakaan terbanyak adalah Kota Martapura. Sementara itu, kecamatan yang hanya memiliki satu (1) perpustakaan desa/kelurahan diantaranya: Kecamatan Tatah Makmur, Sungai Pinang, Telaga Bauntung, Sambung Makmur, Pengaron, dan Peramasan.

Tabel 2. 38 Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Banjar 2012-2015

No	Uraian	Tahun			
		2012	2013	2014	2015
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (jiwa)	7.400	8.250	11.012	12.382
2	Rasio Perpustakaan per satuan penduduk (persen)	0,10	0,10	0,05	0,08
3	Jumlah anggota per tahun (jiwa)	244	250	936	2081

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2012-2015

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami

peningkatan sebesar 40,24 persen. Jumlah tersebut turut mempengaruhi peningkatan jumlah anggota perpustakaan sebesar 88,27 persen. Namun, pencapaian Kabupaten Banjar tersebut dinilai belum optimal karena rasio perpustakaan per satuan penduduk mengalami tren penurunan. Pada tahun 2015, rasio perpustakaan per satuan penduduk mencapai 0,08 persen. Capaian Kabupaten Banjar tersebut mengindikasikan perkembangan perpustakaan masih rendah. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, kurangnya jangkauan pelayanan perpustakaan, dan belum optimalnya kapasitas pengelola perpustakaan.

2.3.2.14. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Saat ini, banyak sekali persoalan yang berkaitan dengan bidang pertanahan terutama menyangkut sengketa pertanahan. Oleh karena itu, pemerintah harus hadir untuk memastikan maupun memfasilitasi persoalan-persoalan pertanahan.

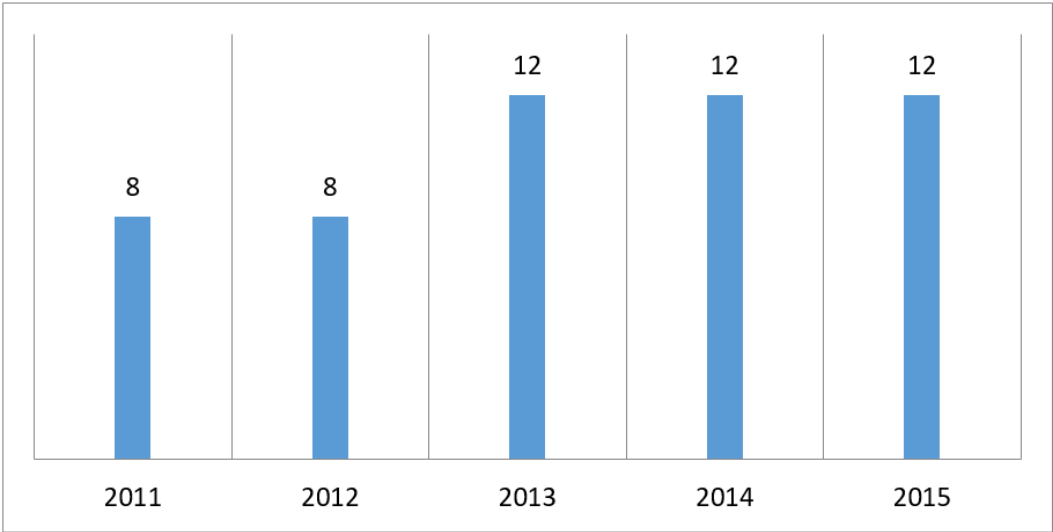
Dalam konteks pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Banjar masih sering muncul kasus sengketa tanah baik antara masyarakat dengan masyarakat maupun masyarakat dengan pemerintah. Persoalan ini terjadi disebabkan karena belum optimalnya tertib administrasi pertanahan karena belum optimalnya sistem pertanahan, belum optimalnya penataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pertanahan, belum optimalnya sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan, dan fasilitasi penanganan sengketa pertanahan belum berjalan optimal.

2.3.2.15. Kearsipan

Urusan kearsipan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuan dimunculkan urusan ini sebagai upaya arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman. Oleh karena itu, pemerintah daerah

dituntut untuk memastikan arsip-arsip daerah dapat ditata secara baik.

Gambar 2. 23 Grafik Jumlah SKPD yang Arsipnya sudah Tertata di Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015



Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 (sebelum Perubahan)

Jumlah SKPD yang telah menata arsipnya cenderung stagnan. Pada tahun 2011 hingga 2012, jumlah SKPD yang tertata arsipnya mencapai 26 persen dari jumlah total SKPD (47 SKPD). Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kearsipan Kabupaten Banjar masih rendah. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya penyelamatan dan pelestarian arsip daerah, optimalnya kemampuan identifikasi arsip daerah yang urgent, kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip daerah, belum optimalnya perangkat daerah yang menyusun arsip secara baku, dan belum optimalnya pengelola kearsipan.

2.3.2.16. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan salah satu urusan yang sangat penting. Urusan ini berkaitan dengan hak-hak warganegara dalam pemenuhan dokumen kependudukan. Oleh karena itu, pemerintah harus memastikan setiap warga negara memiliki dokumen kependudukan secara lengkap.

Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk Memiliki KTP Elektronik di Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2017

Tahun 2016		Tahun 2017	
Jumlah Wajib KTP el (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang sudah cetak KTP-el (Jiwa)	Jumlah Wajib KTP el (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang sudah cetak KTP-el (Jiwa)
386.307	283.986	397.069	294.586

Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang sudah mencetak KTP sebesar 73.5 persen (283.986 jiwa) meningkat menjadi 74.1 persen (294.586 jiwa) pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang telah mencetak KTP semakin meningkat. Meskipun demikian, hal ini belum dikatakan optimal karena hanya meningkat kurang lebih sebesar 0,6 persen.

Tabel 2. 40 Jumlah Penduduk Memiliki KTP Elektronik di Kabupaten Banjar
Tahun 2016-2017

Tahun 2016		Tahun 2017	
Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Jumlah Penduduk yang memiliki Akta Kelahiran (Jiwa)
540.582	113.123	543.799	115.448

Pada tahun 2016, jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran sebesar 20,9 persen (113.123 jiwa) meningkat menjadi 21.2 persen (115.448 jiwa) pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran semakin meningkat. Meskipun demikian, hal ini belum dikatakan optimal karena masih banyak penduduk yang belum memiliki akta kelahiran, yaitu sekitar 79 persen.

Persoalan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banjar terkait urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Hal ini disebabkan oleh kualitas pelayanan kependudukan belum berjalan optimal karena jangkauan layanan kependudukan belum optimal bagi seluruh masyarakat, masih rendahnya kapasitas araratur pelayanan kependudukan, dan sarana dan prasarana pelayanan kependudukan belum memadai.

2.3.3. Urusan Pelayanan Pilihan

Urusan pilihan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan, kondisi, serta potensi unggulan pada daerah tersebut. Beberapa urusan pilihan dalam dokumen ini adalah: pertanian, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, dan perindustrian. Kondisi perkembangan urusan pilihan Kabupaten Banjar dijabarkan sebagai berikut:

2.3.3.1. Pertanian

Kabupaten Banjar memiliki sumber daya alam potensial yang mengarah pada pertanian sebagai sektor strategis pembangunan. Potensi pertanian perlu dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mencapai ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Banjar. Potensi sektor pertanian tersebut meliputi: padi, palawija, tanaman pangan, dan ternak. Gambaran kondisi sektor pertanian dapat ditinjau melalui beberapa indikator, yaitu: produksi dan produktifitas padi, produksi palawija, produksi tanaman pangan, dan cakupan bina kelompok petani.

Produksi sektor pertanian bermanfaat untuk menyediakan informasi sektor pertanian yang akurat dan terkini bagi kebutuhan pemerintah dan masyarakat umum. Adanya capaian produksi padi dan palawija bermanfaat sebagai bahan perencanaan/perumusan kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan nasional. Selain itu, capaian produksi padi dan palawija dapat dijadikan bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil pembangunan sektor pertanian. Pada konteks Kabupaten Banjar, capaian produksi ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 41 Produksi Padi (ton) dan Produktifitas Padi (kwintal/hektar) Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Padi sawah	220.633	253.436	257.555	236.614	235.504
Produksi Padi ladang	24.173	31.393	28.200	27.327	25.755
Produktifitas Padi	37,66	39,5	40,48	38,63	38,40

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2016

Perkembangan produksi padi, baik kategori padi ladang maupun padi sawah serta produktifitas padi di Kabupaten Banjar mengalami tren fluktuatif. Tren tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan produksi dan produktifitas padi masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat disebabkan adanya permasalahan aliran dan intensitas keasaman air. Selain itu, budaya petani membakar lahan pertanian ketika memasuki musim panen atau ketika membersihkan lahan dapat memberikan dampak negatif dan kerugian kepada masyarakat.

Kabupaten Banjar memiliki potensi produksi palawija. Potensi tersebut adalah tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Capaian produksi palawija Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 42 Produksi Palawija Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 (ton)

Jenis Tanaman	2011	2012	2013	2014	2015
Jagung	894	2.346	1.977	3.225	1.971
Kedelai	134	5	1	269	1.377
Kacang Tanah	5.385	5.526	5.637	5.093	4.662
Kacang Hijau	24	34	72	110	5.545
Ubi Kayu	2.802	3.660	3.049	3.781	5.545
Ubi Jalar	445	365	235	732	1.307

Sumber: Statistik Pembangunan Kabupaten Banjar 2011-2015

Produksi palawija di Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2015, produksi palawija terbesar adalah kacang hijau dan ubi kayu. Pada tahun 2015, produksi palawija terendah adalah ubi jalar. Capaian tersebut mengindikasikan produksi palawija di Kabupaten Banjar sudah optimal. Produksi pertanian juga terkait dengan faktor luas sawah. Berikut adalah data mengenai luas sawah di Kabupaten Banjar:

Tabel 2. 43 Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan dan Jenis Pengairan (HA)

NO	KECAMATAN	IRIGASI	TADAH HUJAN	RAWA PASANG SURUT	RAWA LEBAK	TOTAL
1.	Aluh-Aluh			7.076		7.076
2.	Beruntung Baru			5.507		5.507
3.	Gambut		1.645	6.807		8.452
4.	Kertak Hanyar			2.931.5		2.931,5
5.	Tatah Makmur			2.417		2.417
6.	Sungai tabuk	2.096		7.513		9.609
7.	Martapura	35	263		599.5	897,5
8.	Martapura Timur		110		1.407	1.517
9.	Martapura Barat	3.213			2.225	5.438
10.	Astambul		1.958		2.819	4.777
11.	Karang Intan	78	2.280		194	2.552
12.	Aranio		5			5
13.	Sungai Pinang		110			110

14.	Paramasan		80			80
15.	Pengaron		854			854
16.	Sambung Makmur		367			367
17.	Mataraman		708		1.113	1.821
18.	Simpang Empat		4.925.5			4.925,5
19.	Telaga Bauntung	75	140			215
	Kabupaten Banjar	5.497	13.445.5	32.251.5	8.357.5	59.551,5

Tabel 2. 44 Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Kecamatan (HA)

NO	KECAMATAN	TEGAL/KEBUN	LADANG/HUMA	SEMENTARA TIDAK DIUSAHAKAN
1.	Aluh-Aluh	363	-	148
2.	Beruntung Baru	246	-	-
3.	Gambut	100	-	800
4.	Kertak Hanyar	-	-	-
5.	Tatah Makmur	-	-	344

6.	Sungai tabuk	17	-	3.466
7.	Martapura	118	22,5	192,25
8.	Martapura Timur	92	126	-
9.	Martapura Barat	534	-	2.995
10.	Astambul	9.000	5	412
11.	Karang Intan	8.216	2.218	850
12.	Aranio	3.021	1.548	8.820
13.	Sungai Pinang	2.600	2.500	2.067
14.	Paramasan	1.000	3.500	12.500
15.	Pengaron	1.914	1.390	3.146
16.	Sambung Makmur	2.575	1.380	1.020
17.	Mataraman	2.495	220	-
18.	Simpang Empat	196	447	890
19.	Telaga Bauntung	581	400	348
	KABUPATEN BANJAR	33.068	13.756,5	37.998,25

Kabupaten Banjar memiliki total luas sawah sebesar 59.551,5 HA. Luas sawah terbesar berada di Kecamatan Sungai Tabuk, sedangkan yang terkecil terdapat di Kecamatan Paramasan. Mayoritas sawah berupa ladang rawa pasang surut. Kabupaten Banjar masih memiliki lahan potensial bukan sawah yang sementara belum digunakan sebesar 37.998,25 HA. Potensi lahan yang masih ada dapat digunakan untuk perluasan lahan sawah atau perkebunan untuk meningkatkan produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan utama Kabupaten Banjar dapat tercukupi secara berkelanjutan.

Kabupaten Banjar juga memiliki sejumlah potensi pada sektor perkebunan. Potensi tersebut berupa tanaman karet, kelapa dalam, sagu, kelapa sawit, kopi, dan aren. Capaian produksi sektor perkebunan Kabupaten Banjar ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 45 Produksi Sektor Perkebunan Kabupaten Banjar (Kwintal)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Karet	133.969,4	135.315	161.085,21	159.257	160.128,5	176.610
Kelapa Dalam	23.720.90	233.431	23.733,7	31.013,5	24.976,4	25.040
Sagu	13.663.40	134.093	25.559,25	4.244.05	25.074,4	21.800
Kelapa Sawit	1.861.60	24.154	na	5.433,6	5.436,7	7.690
Kopi	5.241.20	52.252.0	5.916,8	5.923,10	5.933,0	5.241.2
Aren	3.514.00	36.822.0	3.583,08	2.512,30	3 .591,8	3.400

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2011-2016

Perkembangan sektor perkebunan Kabupaten Banjar mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2016, produksi sektor perkebunan terbesar di Kabupaten Banjar adalah produksi karet yang mencapai jumlah 176.610 kwintal. Produksi sektor perkebunan terendah adalah produksi aren yang mencapai jumlah 3.400 kwintal. Adanya tren peningkatan mengindikasikan bahwa perkembangan produksi sektor perkebunan di Kabupaten Banjar sudah optimal.

Kabupaten Banjar memiliki sejumlah potensi sektor peternakan. Potensi peternakan merupakan salah satu komoditas perdagangan

yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Setidaknya terdapat tiga kategori sektor peternakan yang dikembangkan di Kabupaten Banjar, yaitu: ternak besar, ternak kecil, dan ternak unggas.

Tabel 2. 46 Populasi Ternak di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

JENIS TERNAK	POPULASI (EKOR)				
	2011	2012	2013	2014	2015
Ternak Besar					
Sapi	17.573	Na	16.228	16.645	16.700
Kerbau	3.955	4.333	3.058	3.225	3.231
Kuda	40	26	21	17	43
Ternak Kecil					
Kambing	10.716	16.647	10.636	11.092	11.124
Domba	0	0	5	10	11
Ternak Unggas					
Ayam Ras	365.737	390.647	393.225	397.086	397.200
Petelur					
Ayam Ras	13.450.506	14.660.553	15.285.770	15.499.800	15.499.990
Pedaging					
Ayam	13.131.841	16.635.913	918.232	1.097.302	1.047.250
Buras					
Itik	305.963	330.444	355.140	361.940	350.022

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Banjar

Populasi ternak di Kabupaten Banjar terus dikembangkan. Populasi peternakan terbesar per kategori dan mengalami tren peningkatan adalah populasi sapi, kambing, dan ayam populasi peternakan terendah per kategori dan mengalami tren peningkatan adalah kuda, domba, dan itik. Perkembangan tersebut mengindikasikan perkembangan sektor peternakan sudah optimal.

Pembinaan kelompok petani turut menjadi indikator penting pada sektor pertanian. Pembinaan kelompok petani bertujuan agar petani mendapatkan kemudahan dalam produksi dan pemasaran produk. Pada tahun 2011-2015, jumlah kelompok petani dan anggota kelompok mengalami tren fluktuatif. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa pembinaan kelompok petani di Kabupaten Banjar belum optimal. Kondisi tersebut dapat

disebabkan oleh perpindahan pekerjaan masyarakat Kabupaten Banjar dari sektor pertanian ke sektor perdagangan.

Guna mendukung peningkatan kontribusi sub-sektor peternakan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah jumlah kelahiran dan kematian ternak serta optimalisasi pengembangan sentra-sentra produksi dan penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) tepat guna serta mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak.

2.3.3.2. Pariwisata

Sektor pariwisata Kabupaten Banjar sangat potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi *multiplier effect* untuk pengembangan sektor perekonomian lainnya. Kabupaten Banjar memiliki kekayaan alam dan budaya beragam yang dapat dikembangkan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah. Pada konteks Kabupaten Banjar, pengembangan kepariwisataan diarahkan kepada pembenahan potensi dan produk wisata yang bernuansa Islam, budaya dan alam. Salah satu pengembangan kepariwisataan adalah mendatangkan jumlah wisatawan.

Tabel 2. 47 Jumlah Wisatawan di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016

Tahun	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2013	2 647	1 703 190	1.705.837
2014	2 329	1 999 655	2.001.984
2015	1 576	1 915 839	1.917.415
2016	1 657	5 190 403	5.192.060

Sumber: BPS Kabupaten Banjar 2013-2016

Jumlah wisatawan di Kabupaten Banjar secara umum mengalami tren fluktuatif. Pada periode 2013 - 2016 kunjungan wisatawan domestik terbesar terjadi pada tahun 2016, sedangkan kunjungan

wisatawan mancanegara terbesar terjadi pada tahun 2013. Tren fluktuatif tersebut mengindikasikan bahwa sektor pariwisata Kabupaten Banjar mengalami sejumlah tantangan. *Pertama*, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) bidang pariwisata baik di sektor pemerintah, swasta, maupun masyarakat. *Kedua*, rendahnya sinergitas antara pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata swasta dalam bekerja sama dengan investor pariwisata. *Ketiga*, rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dalam bidang pariwisata oleh aparatur pemerintah dalam mempromosikan pariwisata. Kunjungan wisatawan sangat terkait dengan pengembangan destinasi wisata. Semakin banyak destinasi wisata yang dikembangkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut adalah lima destinasi wisata paling diminati wisatawan di Kabupaten Banjar:

Tabel 2. 48 Lima Destinasi Wisata Terbaik di Kabupaten Banjar

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata
1	Bukit Matang Keladan Kecamatan Aranio	Alam
2	Pasar Terapung Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk	Budaya
3	Danau Tamiyang Kecamatan Karang Intan	Alam
4	Wisata Belanja Central Permata & Souvenir Cahaya Bumi Selamat Martapura	Buatan
5	Makam Kh. M. Zaini Ghani Sekumpul, Martapura	Religi

Selain lima obyek wisata utama yang paling diminati, Kabupaten Banjar juga memiliki beberapa jumlah obyek wisata potensial yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Berikut adalah jumlah obyek wisata di Kabupaten Banjar secara detil:

Tabel 2. 49 Nama Obyek Wisata Potensial di Kabupaten Banjar

No.	Nama Obyek Wisata		Jenis Obyek Wisata
I		Kecamatan Aranio	
	1	Air Terjun Bagugur (Desa Kalaan, Kec. Aranio)	Alam
	2	Air Terjun Cemara Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio)	Alam
	3	Air Terjun Lembah Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio)	Alam
	4	Air Terjun Mandin Atawang (Desa Belangian, Kec. Aranio)	Alam
	5	Air Terjun Panayar (Desa Artain, Kec. Aranio)	Alam
	6	Air Terjun Pantan / Air Terjun Mandin (Desa Rantau Bujur, Kec. Aranio)	Alam
	7	Air Terjun Malinau (Desa Rantau Bujur, Kec. Aranio)	Alam
	8	Air Terjun Sungai Mihak (Desa Apuai, Kec. Aranio)	Alam
	9	Air Terjun Sungai Karuh (Desa Rantau Balai, Kec. Aranio)	Alam
	10	Air Terjun Minanga (Desa Rantau Balai Kec. Aranio)	Alam
	11	Bendungan Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio)	Alam
	12	Bukit Batas (Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio)	Alam
	13	Bukit Lawangan / Bukit Tiwingan (Desa Tiwingan Lama, Kec. Aranio)	Alam
	14	Bukit Matang Keladan (Desa Tiwingan Lama, Kec. Aranio)	Alam
	15	Bukit Atawang Riam Kanan, Kecamatan Aranio	Alam
	16	Sungai Kambang (Desa Tiwingan Lama, Kec. Aranio)	Alam
	17	Danau Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio)	Alam
	18	Gunung Batu Riam Kanan (Desa Aranio, Kec. Aranio)	Alam
	19	Jembatan Kahung (Desa Belangian, Kec. Aranio)	Buatan
	20	Pulau Pinus II (Desa Tiwingan Baru, Kec. Aranio)	Alam
	21	Pulau Sirang (Desa Aranio, Kec. Aranio)	Alam

	22	Villa Sungai Luar (Kampung Sungai Luar, Desa Aranio, Kec. Aranio)	Alam
II		Kecamatan Astambul	
	1	Makam Datu Abdullah (Desa Lok Gabang, Kec. Astambul)	Religi
	2	Makam Datu Kalampayan / Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Desa Kalampayan Tengah, Kec. Astambul)	Religi
	3	Makam Syekh Zainal Ilmi (Desa Kalampayan Tengah, Kec. Astambul)	Religi
III		Kecamatan Beruntung Baru	
	1	Danau Biru Tambak Padi (Desa Tambak Padi, Kec. Beruntung Baru)	Buatan
IV		Kecamatan Gambut	
	1	Tugu 17 Mei (Jl. Ahmad Yani KM 17, Kelurahan Kayu Bawang, Kec. Gambut)	Sejarah
V		Kecamatan Karang Intan	
	1	Bendungan Karang Intan (Desa Mandikapau Barat, Kec. Karang Intan)	Alam
	2	Benteng Mandiingin (Desa Mandiingin Timur, Kec. Karang Intan)	Sejarah
	3	Bukit Palawangan (Desa Awang Bangkal Timur, Kec. Karang Intan)	Alam
	4	Bukit Pematang Kanas / Bukit Damar Gusang (Desa Kiram, Kec. Karang Intan)	Alam
	5	Bukit Putra Bulu / Bukit Patra Bulu (Desa Awang Bangkal Timur, Kec. Karang Intan)	Alam
	6	Bumi Perkemahan Awang Bangkal (Desa Awang Bangkal Barat, Kec. Karang Intan)	Alam
	7	Kolam Renang Peninggalan Belanda (Desa Mandiingin Timur, Kec. Karang Intan)	Sejarah
	8	Makam Sultan Sulaiman Saidullah (Desa Lihung, Kec. Karang Intan)	Religi
	9	Prasasti Gunung Pamaton (Desa Kiram, Kec. Karang Intan)	Religi
	10	Gunung Mawar (Desa Kiram, Kec. Karang Intan)	Alam

	11	Kiram Park / Villa Paman Birin (Desa Kiram, Kec. Karang Intan)	Buatan
	12	Rumah Adat Palimasan Kembar (Desa Lihung, Kec. Karang Intan)	Budaya
	13	Sungai Hanaru (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan)	Alam
	14	Taman Hutan Raya Sultan Adam Mandiangin (Desa Mandiangin Timur, Kec. Karang Intan)	Petualang
	15	Danau Tamiyang (Desa Mandikapau Barat Kec. Karang Intan	Alam
VI		Kecamatan Kertak Hanyar	
	1	Pusat Kerajinan Sasirangan (Desa Manarap Lama dan Desa Manarap Tengah, Kec. Kertak Hanyar)	Budaya
	2	Waterboom Pesona Modern (Jl. Ahmad Yani KM 11, Kelurahan Simpang Empat, Kec. Kertak Hanyar)	Buatan
VII		Kecamatan Martapura Barat	
	1	Makam Datu Abulung (Kampung Lok Buntar, Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat)	Religi
	2	Makam Datu Rambut Panjang (Kampung Lok Buntar, Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat)	Religi
	3	Mesjid Jami Sungai Batang (Desa Sungai Batang, Kec. Martapura Barat)	Religi
	4	Pusat Kerajinan Emas dan Perak (Desa Teluk Selong, Kec. Martapura Barat)	Edukasi
	5	Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Sungai Rangas Tengah, Kec. Martapura Barat)	Edukasi
	6	Rumah Adat Balai Bini (Desa Telok Selong Ulu, Kec. Martapura Barat)	Budaya
	7	Rumah Adat Bubungan Tinggi (Jl. Martapura Lama No. 28, Desa Telok Selong Ulu, Kec. Martapura Barat)	Budaya
VIII		Kecamatan Martapura Kota	
	1	Agrowisata Kolam Pemancingan Bincau (Desa Bincau, Kec. Martapura Kota)	Kuliner
	2	Alun-Alun Ratu Zalecha (Jl. Ahmad Yani KM 39, Kec. Martapura Kota)	Edukasi

	3	Makam Guru Sekumpul / Muhammad Zaini Abdul Ghani (Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota)	Religi
	4	Makam Guru Seman Mulia (Kelurahan Sekumpul, Kec. Martapura Kota)	Religi
	5	Makam Sultan Adam (Kelurahan Jawa, Kec. Martapura Kota)	Religi
	6	Monumen Adipura Kencana (Jl. Ahmad Yani, Kec. Martapura Kota)	Sejarah
	7	Mesjid Agung Al-Karomah (Jl. Ahmad Yani KM 39, Desa Cindai Alus, Kec. Martapura Kota)	Religi
	8	Pasar Intan Martapura (Jl. Ahmad Yani KM 39, Desa Cindai Alus, Kec. Martapura Kota)	Belanja
	9	Pondok Pesantren Darussalam (Jl. KH Kasful Anwar, Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota)	Edukasi
	10	Pusat Kerajinan Batu Permata (Kelurahan Pasayangan dan Desa Tunggul Irang, Kec. Martapura Kota)	Edukasi
	11	Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Tangkas dan Desa Tambak Baru, Kec. Martapura Kota)	Edukasi
	12	Rumah Adat Cacak Burung (Desa Pasayangan Utara, Kec. Martapura Kota)	Budaya
	13	Rumah Adat Gajah Manyusu (Desa Pasayangan Selatan, Kec. Martapura Kota)	Budaya
	14	Rumah Adat Palimbangan (Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota)	Budaya
	15	Rumah Adat Tadah Alas (Desa Pasayangan Selatan, Kec. Martapura Kota)	Budaya
	16	Rumah Batu Adat Banjar (Kelurahan Pasayangan, Kec. Martapura Kota)	Budaya
	17	Taman Cahaya Bumi Selamat (Jl. Ahmad Yani KM 39, Kec. Martapura Kota)	Belanja
	18	Penggosokan Intan (Jl. A. Yani, Batas Kota Martapura)	Edukasi
IX		Kecamatan Martapura Timur	
	1	Makam Syekh Kasyful Anwar (Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur)	Religi
	2	Makam Syekh Salim Ma'ruf (Jl. Kertak Hanyar, Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur)	Religi

	3	Makam Syekh Sya'rani Arif (Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur)	Religi
	4	Pusat Kerajinan Arguci (Desa Pekauman dan Desa Melayu Ilir, Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	5	Pusat Kerajinan Batu Permata (Desa Pekauman, Desa Melayu Ilir, Desa Tambak Anyar, dan Desa Antasan Senior, Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	6	Pusat Kerajinan Emas dan Perak (Desa Dalam Pagar, Desa Keramat, Desa Keramat Baru, dan Desa Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	7	Pusat Kerajinan Hadrah dan Tarbang (Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	8	Pusat Kerajinan Manik-Manik (Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	9	Pusat Kerajinan Sulaman Bordir (Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	10	Pusat Kerajinan Sulaman Sugul (Desa Pekauman Ulu dan Desa Antasan Senior, Kec. Martapura Timur)	Edukasi
	11	Rumah Adat Gajah Manyusu (Kampung Melayu, Desa Mekar, Kec. Maratapura Timur)	Budaya
	12	Rumah Adat Palimbangan (Desa Dalam Pagar, Kec. Martapura Timur)	Budaya
	13	Rumah Adat Tadah Alas (Kampung Melayu, Desa Mekar, Kec. Maratapura Timur)	Budaya
	14	Pusat Pasar Kuliner Kue Tradisional (Desa Pekauman Ulu, Kec. Martapura Timur)	Kuliner
	15	Susur sungai Desa Pekauman, Kec. Martapura Timur	Budaya
X		Kecamatan Paramasan	
	1	Air Terjun Mandin Mangapan (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan)	Alam
	2	Air Terjun Mandin Niwak (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan)	Alam
	3	Air Terjun Munggu Lahung (Kampung Munggu Lahung, Desa Paramasan Bawah, Kec. Paramasan)	Alam
	4	Gunung Ambilatau (Desa Paramasan Atas, Kec. Paramasan)	Alam

XI		Kecamatan Pengaron	
	1	Air Terjun Maniapun (Desa Maniapun, Kec. Pengaron)	Alam
	2	Benteng Oranje Nassau (Desa Benteng, Kec. Pengaron)	Sejarah
	3	Danau Biru Pengaron (Desa Mangkauk, Kec. Pengaron)	Alam
	4	Goa Pengaron (Desa Benteng, Kec. Pengaron)	Sejarah
	5	Gunung Batu (Kampung Sukaramai, Desa Benteng, Kec. Pengaron)	Alam
	6	Jembatan Pohon (Kampung Lobang Baru, Desa Benteng, Kec. Pengaron)	Budaya
XII		Kecamatan Sambung Makmur	
	1	Bukit Janar (Desa Gunung Batu, Kec. Sambung Makmur)	Alam
XIII		Kecamatan Simpang Empat	
	1	Danau Biru Parta / Danau Biru 3A (Desa Paring Tali, Kec. Simpang Empat)	Buatan
XIV		Kecamatan Sungai Tabuk	
	1	Gudang Belanda Indrasari (Desa Paku Alam, Kec. Sungai Tabuk)	Sejarah
	2	Pasar Terapung Lok Baintan (Desa Lok Baintan Dalam, Kec. Sungai Tabuk)	Budaya
	3	Musium Monumen ALRI Divisi IV (Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk)	Sejarah
XV		Kecamatan Sungai Pinang	
	1	Mandin Pilung (Desa Kalaan, Kec. Sungai Pinang)	Alam

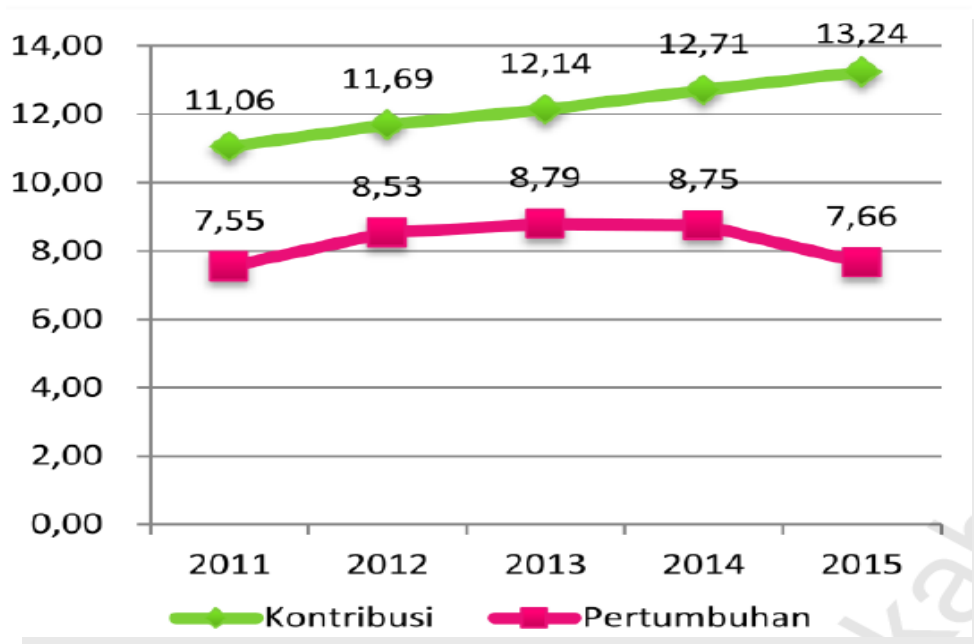
Pengembangan destinasi harus diikuti dengan optimalisasi pemasaran dan pengembangan kerjasama antar pelaku pariwisata. Pengembangan destinasi dapat dijalankan dengan pengembangan sarana prasarana, kapasitas SDM pelaku wisata dan berbagai hal lainnya. Pengembangan pemasaran pariwisata harus diarahkan pada penggunaan teknologi komunikasi dan informatika. Diperlukan dukungan, kolaborasi dan kerjasama yang baik antar pelaku dan pegiat pariwisata untuk mendukung

berbagai upaya tersebut.

2.3.3.3. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap kemajuan daerah. Sektor ini masuk dalam salah satu urusan pilihan yang perlu diperhatikan oleh setiap pemerintah daerah. Indikator dalam melihat kemajuan sektor ini adalah kontribusi dan perkembangan PDRB, nilai ekspor barang/jasa, jumlah pedagang, dan sarana/prasarana perdagangan.

Gambar 2. 24 Grafik Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015



Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016

Kontribusi PDRB sektor perdagangan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun di Kabupaten Banjar. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sumbangan atau peranan sektor ini terhadap perekonomian daerah berjalan optimal. Namun, tren positif tersebut bertolak belakang dengan laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Pada periode 2012 - 2015, laju pertumbuhan PDRB sektor perdagangan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB dari sektor perdagangan masih belum memadai. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah menurunnya nilai ekspor perdagangan.

Tabel 2. 50 Nilai Ekspor Barang dan Jasa

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah nilai ekspor barang dan jasa	USD	480.436.107.4	489.414.074.01	217.893.155.21	383.193.062	264.161.309

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016

Nilai perdagangan atau nilai ekspor barang dan jasa kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Pada periode 2012 – 2015, nilai ekspor barang dan jasa yang paling tinggi berada pada tahun 2012, yaitu sebesar 489.414.074.01 USD. Nilai ekspor barang dan jasa yang paling rendah berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 217.893.155.21 USD. Hal ini menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Banjar belum berjalan secara optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah menurunnya permintaan atas barang dan jasa.

Tabel 2. 51 Jumlah Perusahaan Sektor Perdagangan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan	Jumlah	547	556	576	601	625

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016

Tabel ini menunjukkan bahwa jumlah perusahaan yang terdaftar dan bergerak di sektor usaha perdagangan berkembang dari tahun ke tahun. Tren perkembangan tersebut harus dipertahankan oleh pemerintah Kabupaten banjar. Banyaknya perusahaan yang

bergerak di sektor perdagangan akan meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap kemajuan ekonomi daerah.

Tabel 2. 52 Sertifikasi Produk dan Sarana Prasarana Perdagangan

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Peningkatan Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan	Buah	543	1.384	2.309	8.265	7.701
Peningkatan Sarana Perdagangan	Jumlah	1	1	1	3	6
Penertiban alat ukur unit takar, timbang dan peralatannya	Kali	2	3	3	5	10

Sumber: Statistik Daerah Kabupaten Banjar 2016

Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan selama lima tahun (2011-2015) cenderung menurun. Penurunan tersebut tentu mempunyai dampak negatif bagi konsumen atau masyarakat karena manfaat dari sertifikasi adalah menjamin keamanan dan mutu dari produk yang dihasilkan. Selain itu, juga berdampak pada daya saing dari produk tersebut. Sementara itu, dari sisi sarana dan prasaran perdagangan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tren peningkatan ini harus dipertahankan karena dengan memadainya sarana perdagangan dapat meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah.

Penertiban sarana dan prasarana perdagangan seperti timbangan, unit takar, dan peralatan lainnya tetap diupayakan. Penertiban ini dilakukan di pasar, SPBU, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk mengurangi potensi kerugian atau kecurangan yang terjadi pada konsumen. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa potensi kecurangan dalam transaksi perdagangan ke depan akan berkurang.

Guna meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka diperlukan optimalisasi jangkauan perdagangan untuk pasar lokal, regional, nasional

maupun internasional. Upaya ini harus didukung oleh standarisasi ekspor produk-produk perdagangan, peningkatan kualitas SDM pedagang kecil dan menengah, peningkatan sarana dan prasarana perdagangan dan akses permodalan bagi pedagang. Upaya lain yang harus dijalankan adalah stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting dan optimalisasi keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting.

2.3.3.4. Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berperan penting terhadap peningkatan ekonomi daerah. Sektor ini meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan lapangan kerja bagi penduduk setempat misalnya. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan daerah, sektor perindustrian dimasukkan ke dalam aspek pelayanan umum yang berkaitan dengan urusan pilihan.

Tabel 2. 53 Distribusi Sektor Industri (Industri Pengolahan) Terhadap PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2016

Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Banjar	6.82	6.70	6.73	6.80	7
Kabupaten Barito Kuala	18.46	18.44	18.16	17.64	17.33
Kotabaru	32.53	32.13	32.15	32.51	34.48

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar 2012-2016

Dalam kurun 5 (lima) tahun, kontribusi sektor industri terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa sektor ini mempunyai sumbangan terhadap perekonomian daerah yang signifikan. Meskipun demikian, distribusi tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan Kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi sektor industri terhadap PDRB

berdasarkan lapangan usaha di Kabupaten Banjar masih rendah.

Tabel 2. 54 Jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Usaha Industri Kecil dan Menengah	Unit	6.502	6.939	7.799	8.741	8.978

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016

Distribusi sektor industri terhadap PDRB yang masih rendah di atas, bertolak belakang dengan pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah yang setiap tahun meningkat di Kabupaten Banjar. Dari tahun 2011 hingga 2016, rata-rata pertumbuhan jumlah usaha industri kecil dan menengah sebesar 8,48 persen. Pertumbuhan tersebut perlu dipertahankan sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah secara optimal.

Tabel 2. 55 Perbandingan Perusahaan Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Kelompok Industri	2011	2012	2013	2014	2015
Besar	6	5	5	5	5
Sedang	11	13	13	13	13
Kecil	203	208	211	225	229
Rumah Tangga	6.273	6.706	7.570	8.498	8.825
Jumlah	6.493	6.932	7.799	8.741	9.072

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Jumlah Perusahaan Industri menurut kelompok industri di Kabupaten Banjar masuk dalam kategori kelompok industri kecil dan kelompok industri rumah tangga yang berkembang setiap tahun. Sementara itu, kelompok industri besar dan kelompok industri mengalami pertumbuhan yang stagnan. Saat ini, kelompok industri yang paling banyak adalah kelompok industri

rumah tangga diikuti kelompok industri kecil, kelompok industri sedang, dan kelompok industri besar.

Tabel 2. 56 Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang Mendapat Pembinaan

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat pembinaan teknologi industri	Orang	125	135	165	265	265
Unit Usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri	Unit	15	20	30	46	52

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2015

Jumlah orang di industri kecil dan menengah di Kabupaten Banjar yang mendapat pembinaan teknologi industri mengalami peningkatan pada tahun 2011 hingga 2014. Namun pada 2015 terjadi stagnasi. Unit usaha industri kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri meningkat setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah orang yang mendapat pembinaan teknologi industri di industri kecil dan menengah masih belum berjalan optimal.

Tabel 2. 57 Perbandingan Serapan Tenaga Kerja Perusahaan Industri Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

Kelompok	2011	2012	2013	2014	2015
Besar	2.648	2.648	2.648	2.648	2.648
Sedang	356	356	356	356	356
Kecil	1.658	1.721	1.754	1.867	1.916
Rumah Tangga	15.139	15.893	17.766	19.179	19.746
Jumlah	19.801	20.618	22.524	24.050	24.666

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan 2011-2015

Serapan tenaga kerja di perusahaan industri besar dan sedang

mengalami stagnan. Sementara itu, serapan tenaga kerja di perusahaan industri kecil dan rumah tangga setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa peran dari perusahaan industri kecil dan rumah tangga lebih besar dalam menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan perusahaan industri besar dan sedang.

Tabel 2. 58 Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Banjar Tahun 2011-2016

Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai	(Rp.000)	90.394.43	95.752.12	100.710.79	101.190.69	108.971.02
Investasi	rupiah	7	2	9	4	2
Industri						
Kecil Dan						
Menengah						

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016

Pada sisi nilai investasi, industri kecil dan menengah mengalami peningkatan setiap tahun. Namun, persentase peningkatan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung fluktuatif. Sementara itu, rata-rata peningkatan pada periode 2011-2015 mencapai 4,8 persen. Hal ini menunjukkan nilai investasi industri kecil dan menengah mengalami peningkatan, tetapi persentase peningkatanya setiap tahun berjalan fluktuatif.

Guna mendukung peningkatan kontribusi sektor industri terhadap ekonomi daerah, maka faktor yang harus diperhatikan adalah pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah. Upaya tersebut dapat berjalan jika optimalisasi industri Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut (ILMEASA) dan industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan (AGROKIM) dijalankan dengan baik.

2.3.3.5. Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian daerah dan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Sektor ini harus masuk dalam perencanaan daerah

karena merupakan salah satu urusan pilihan. Saat ini, kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Banjar digabungkan dengan sektor pertanian dan kehutanan, sebagai berikut:

Tabel 2. 59 Persentase Distribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2012-2016 (%)

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Banjar	18.66	18.49	18.14	18.42	18.61
Kotabaru	19,68	19,55	19,72	19,43	19,06
Kabupaten Barito Kuala	31,41	29,80	28,66	28,45	28,41

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016; PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2012-2016

Pada periode 2012 - 2016, persentase distribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap PDRB berdasarkan lapangan usaha mengalami peningkatan. Meskipun demikian. Peningkatan tersebut masih rendah dibandingkan dengan persentase distribusi sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor perikanan dan keluaran terhadap PDRB masih rendah. Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya produksi sektor perikanan.

Tabel 2. 60 Produksi Perikanan Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015

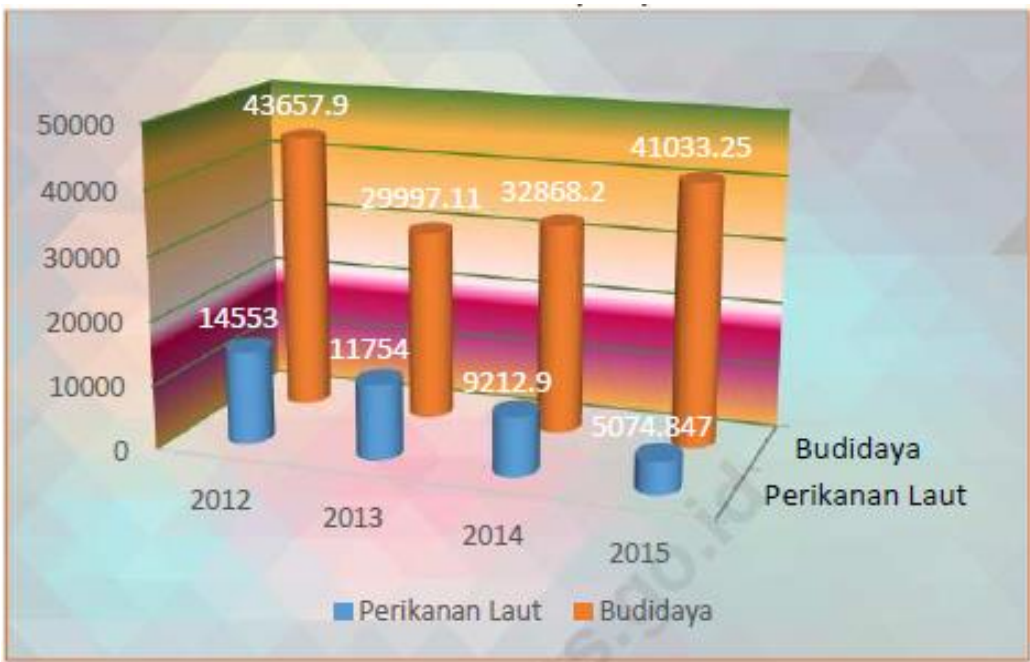
Indikator	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
Perikanan Budidaya	Ton	33.559,13	34.074,03	35.096,25	42.022,05	42.022,05
Perikanan Tangkap	Ton	11.457,02	14.321,27	15.446,97	16.300,00	16.300,00

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2010-2016

Produksi perikanan budidaya dan tangkap di Kabupaten Banjar pada tahun 2011 hingga 2015 mengalami penurunan dan cenderung stagnan. Produksi perikanan budidaya mengalami perkembangan dari tahun 2011 hingga 2014, tetapi pada tahun

2015 produksi tersebut stagnan. Pertumbuhan produksi perikanan budidaya terbesar berada pada tahun 2014 mencapai 19,7 persen dengan rata-rata pertumbuhannya selama lima tahun sebesar 6,1 persen. Sementara itu, untuk perikanan tangkap mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2014, dan kemudian pada tahun 2015 mengalami stagnan. Rata-rata pertumbuhan perikanan tangkap sebesar 9,6 persen dan pertumbuhan yang paling tinggi berada pada tahun 2012 yaitu sebesar 25 persen. Produksi perikanan laut yang mengalami penurunan setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan produksi perikanan budidaya, tangkap, dan laut belum berjalan optimal di Kabupaten Banjar.

Gambar 2. 25 Grafik Produksi Perikanan di Kabupaten Banjar Tahun 2012 - 2015 (Ton)



Sumber: Statistik Pembangunan Kabupaten Banjar, 2016

Guna meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, maka faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah kapasitas produksi dan pemasaran produk perikanan. Produksi dipengaruhi oleh kapasitas SDM petani perikanan, sedangkan kapasitas pemasaran produk perikanan dipengaruhi oleh mutu produk olahan hasil perikanan.

2.3.4. Urusan Penunjang

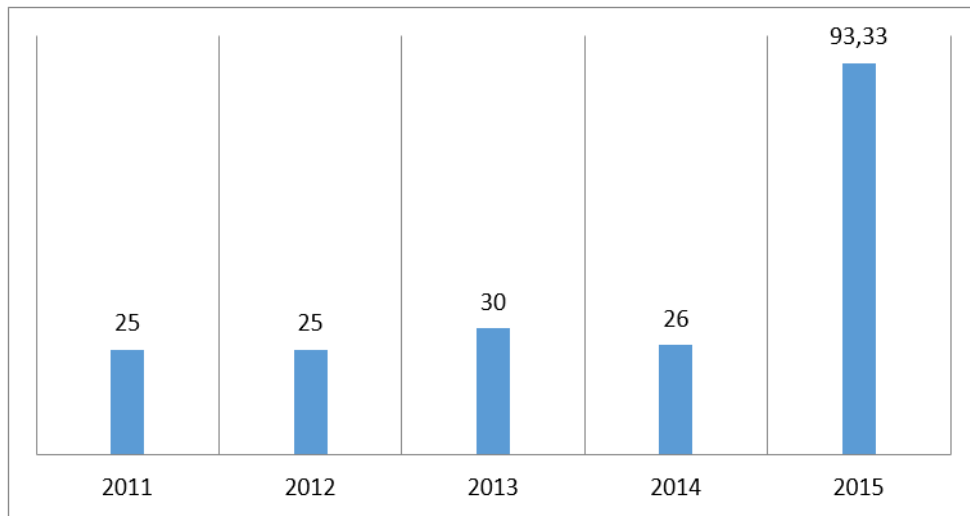
Gambaran umum mengenai urusan penunjang terkait dengan perencanaan pembangunan, keuangan, kepegawaian dan pendidikan serta pelatihan, pengawasan dan kesekretariatan atau pemerintahan umum. Berikut adalah gambaran umum mengenai berbagai indikator tersebut:

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang dalam pembangunan daerah. Urusan ini sangat penting karena menjadi pedoman dalam menyelenggarakan pembangunan di Kabupaten Banjar. Indikator untuk mengukur perencanaan pembangunan adalah tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan Perda, tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan Perda, tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan Perda, dan tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan Perda.

Saat ini, dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, dan RTRW sudah tersedia di Kabupaten Banjar. Dokumen tersebut juga sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan baik. Namun, yang perlu diperhatikan dari setiap perencanaan pembangunan daerah adalah sejauhmana usulan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrembang) diakomodir oleh pemerintah daerah. Berikut ini grafik usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD.

Gambar 2. 26 Grafik Porsi Usulan Masyarakat yang Diakomodir dalam RKPD terhadap Total RKPD di Kabupaten Banjar Tahun 2011 - 2015 (%)



Pada periode 2011 - 2014 porsi usulan masyarakat mengalami peningkatan yang fluktuatif. Namun, pada tahun 2015, terjadi peningkatan yang sangat signifikan terkait usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD, yaitu sebanyak 93,33 persen dari sebelumnya hanya 26 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Banjar.

Kualitas perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Banjar masih belum optimal karena belum terpadunya antar dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh belum efektifitas perencanaan pembangunan daerah karena belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah, belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah, dan belum optimalnya kualitas aparatur perencana. Selain itu, penyebab lain juga terkait dengan belum optimalnya kualitas data, penelitian dan pengembangan. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya pemanfaat data informasi pembangunan, belum optimalnya updating data pembangunan melalui SIPD, dan belum optimalnya penerapan inovasi daerah.

2.3.4.2. Keuangan

Urusan keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang sangat penting. Lancarnya penyelenggaraan pemerintahan sangat

ditentukan oleh kekuatan finansial pemerintah setempat. Indikator untuk mengukur baik buruknya pengelolaan keuangan daerah adalah Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada lima kriteria, yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan ketepatan waktu penetapan APB.

Tabel 2. 61 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: IHPS I Tahun 2017; <https://banjarkab.go.id/banjar-raih-wtp-lima-kali-berturut-turut/>

Hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banjar tahun 2017 mendapatkan opini WTP. Hasil ini menegaskan kembali capaian-capaian yang telah diraih Kabupaten Banjar, sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Banjar sudah sangat baik. Dalam mempertahankan capaian tersebut maka perlu adanya peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah dapat dilakukan melalui optimalisasi kapasitas pengawasan, monitoring dan evaluasi, optimalisasi sistem pengendalian internal pemerintah, peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah, peningkatan akuntabilitas laporan kinerja SKPD, dan peningkatan legalisasi aset daerah.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya. DOFD menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

total pendapatan daerah. Semakin tinggi DOFD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin rendah DOFD, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Tabel 2. 62 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	DOFD
2013	190.828.576.727,93	1.226.495.629.254,93	16
2014	160.159.429.171,31	1.225.440.993.043,31	13
2015	172.554.625.628,46	1.502.410.703.286,46	11
2016	189.854.372.832,05	1.711.541.447.620,05	11
2017	186.897.808.440,74	1.619.101.409.956,74	12
Rata-Rata Pertumbuhan			13

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Pada periode 2013-2017, nilai DOFD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Sementara nilai tertinggi DOFD dalam kurun 5 (lima) tahun berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 16 persen. Dilihat dari tingkat rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah berada pada angka 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Banjar masih dalam kategori kurang baik karena masih berada di bawah angka 20 persen. Hal ini disebabkan karena kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah masih rendah. Persoalan ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, belum optimalnya akurasi data Pajak daerah, dan masih kurangnya penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT).

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan termasuk ke dalam urusan penunjang. Urusan ini mempunyai peran yang sangat penting bagi peningkatan kapasitas pegawai dalam pelayanan publik. Berikut ini data-data yang terkait dengan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan.

Tabel 2. 63 Jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan di Kabupaten Banjar tahun 2015-2017

No	Tahun	Jenis jabatan	
		Jabatan structural	Jabatan Fungsional
1	2015	905	6.875
2	2016	874	6.131
3	2017	884	6.011
4	2018	809	5.838

Sumber: Kabupaten Banjar dalam Angka Tahun 2016,2017,2018; BKD Kab. Banjar

Jumlah pegawai menurut jenis jabatan menunjukkan adanya tren menurun pada jumlah jabatan struktural. Sementara jumlah jabatan fungsional juga mengalami penurunan. Kondisi disebabkan oleh adanya perampingan struktur organisasi, banyaknya pegawai yang pensiun, dan belum adanya perekrutan pegawai baru. Oleh karena itu, diperlukan adanya intervensi terhadap jumlah pegawai tersebut agar tidak mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah.

Tabel 2. 64 Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis dan structural di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2016 (Orang)

Uraian	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	64	111	80	241	20
Jumlah PNS yang mengikuti diklat Penjenjangan struktural	39	52	59	9	51

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum Perubahan)

Pada periode 2011-2015, jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung menurun. Jumlah PNS yang paling banyak mengikuti diklat teknis berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 201,3 persen (241 orang), sementara yang paling rendah berada pada tahun 2016, yaitu - 91,7 persen atau hanya 20 orang saja yang mengikuti diklat teknis. Jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural, mengalami fluktuatif. Pada tahun 2015, jumlah PNS yang mengikuti diklat penjenjangan struktural sebesar 51 orang

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu hanya 9 orang. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalitas aparatur daerah belum optimal. Persoalan ini disebabkan oleh dua hal; *Pertama*, belum optimalnya kompetensi aparatur daerah karena belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan, belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi, dan belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur. *Kedua*, masih kurangnya kinerja aparatur daerah disebabkan karena belum optimalnya kualitas kelembagaan. *Ketiga*, masih kurangnya disiplin pegawai disebabkan karena masih belum optimalnya penerapan *punishment* dan *reward* pegawai. *Keempat*, masih kurangnya kesejahteraan pegawai karena pelayanan kepegawaian belum optimal.

2.3.4.4. Pengawasan

Urusan pengawasan merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan ini untuk memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain itu, juga memastikan tidak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur daerah.

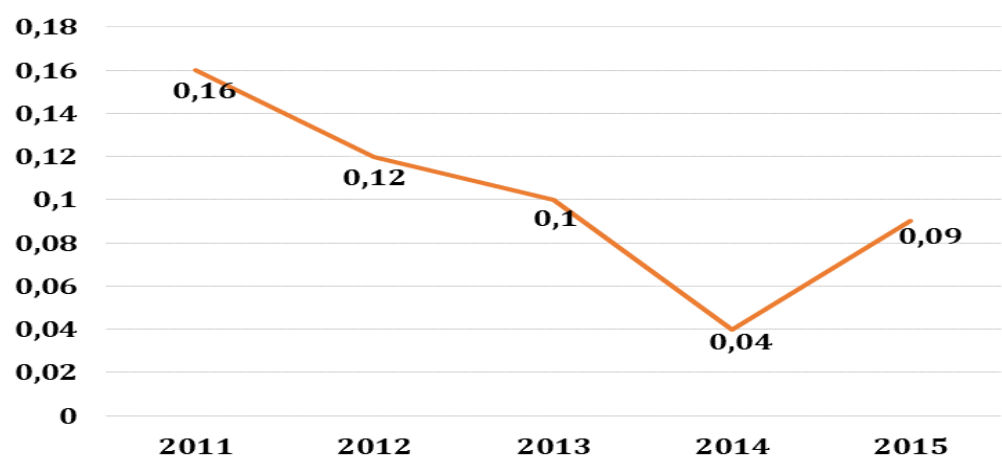
Tabel 2. 65 Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Uraian	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	C	CC	B	B (60,97)	B (62,62)

Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum diPerubahan); <https://banjarkab.go.id/akuntabilitas-kinerja-2017-pemkab-banjar-kembali-raih-predikat-b-di-indonesia/>

Capaian AKIP pemerintah Kabupaten Banjar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, predikat AKIP adalah C meningkat menjadi CC pada tahun 2014. Predikat tersebut terus meningkat hingga tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Banjar semakin baik. Dalam konteks ini, agar dapat mempertahankan capaian tersebut maka perlu adanya upaya meningkatkan kualitas perencanaan daerah sebagai salah satu komponen dalam penilaian AKIP.

Gambar 2. 27 Grafik Persentase PNS yang Mendapatkan Hukuman Disiplin di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015



Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (Sebelum Perubahan)

Pada periode 2011-2015, persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin mengalami peningkatan yang fluktuatif dan cenderung naik. Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin paling tinggi berada pada tahun 2011, yaitu sebesar 0,16 persen. Sementara itu, persentase PNS yang mendapatkan hukuman yang paling rendah berada pada tahun 2014, yaitu sebesar 0,04 persen. Meningkatnya pelanggaran disiplin PNS menunjukkan bahwa tingkat integritas PNS belum optimal. Hal ini disebabkan oleh kompetensi aparatur pengawasan dan penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan belum optimal, kegiatan diklat dan pelatihan mandiri untuk aparatur pengawas belum berjalan optimal dan sistem pengawasan belum berjalan optimal. Selain itu, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa juga belum optimal karena efektifitas dan tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal.

Peningkatkan integritas ASN harus memiliki mekanisme yang mampu menopangnya. Beberapa mekanisme yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar diantaranya, *pertama*, optimalisasi pencegahan korupsi. Hal ini dilakukan melalui optimalnya fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi, pelaksanaan pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk menuju Zona Integritas, dan peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan APH. *Kedua*, memudahkan

mekanisme penyampaian pengaduan masyarakat dan efektivitas penanganannya. Hal ini dilakukan melalui peningkatan sistem penanganan pengaduan masyarakat. Dan *ketiga*, melakukan pengawasan pada daerah-daerah yang jauh. Dengan menjalankan mekanisme-mekanisme di atas, diharapkan integritas aparatur daerah semakin meningkat.

2.3.4.5. Kesekretariatan/Pemerintahan Umum

Urusan kesekretariatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Urusan ini merupakan salah satu urusan yang sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini terutama menyangkut fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi.

Fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat melalui frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang dirumuskan mampu mengakomodir berbagai kebutuhan masyarakat. Selain itu, perlu adanya koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama tugas dan fungsi pemerintahan umum atau sekretariat daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu, *pertama*, peningkatan pengendalian pembangunan daerah melalui peningkatan capaian indikator kinerja kunci baik pada tataran pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan kebijakan. *Kedua*, optimalisasi kerjasama pembangunan daerah. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat, optimalisasi kerjasama antara daerah, dan optimalisasi penyelesaian batas wilayah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah menunjukkan kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Aspek tersebut dapat dilihat dari beberapa fokus, yaitu fokus kemampuan ekonomi daerah, fokus fasilitas wilayah/infrastruktur, fokus iklim usaha, dan fokus sumber daya manusia.

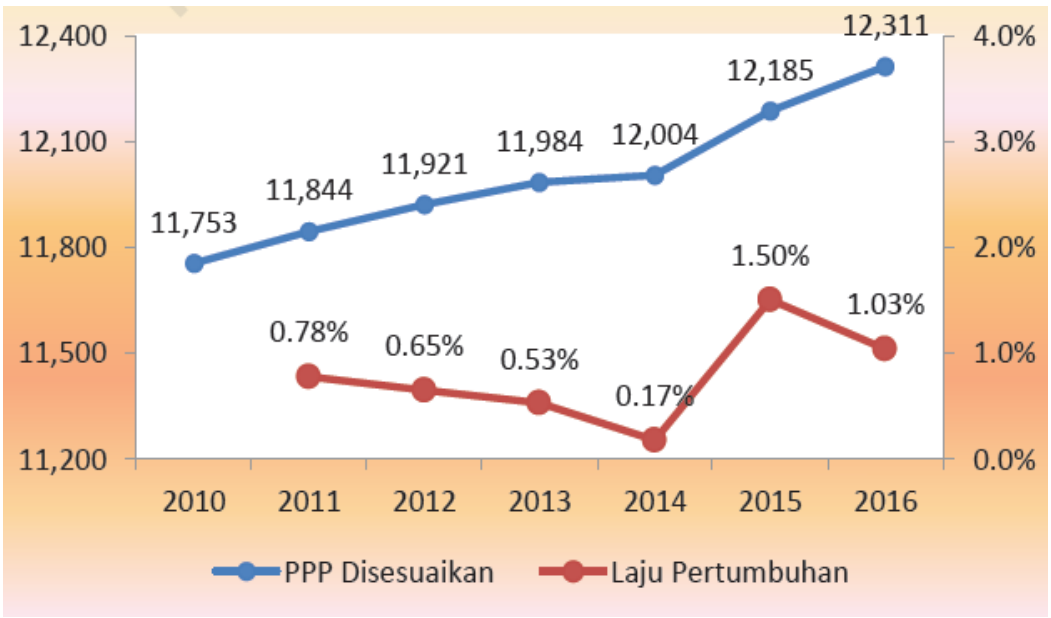
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Fokus kemampuan ekonomi daerah merupakan kapasitas ekonomi daerah yang memiliki daya tarik tersendiri (*attractiveness*) bagi para pelaku usaha untuk berinvestasi dan menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Indikator dari fokus tersebut adalah pengeluaran rumah tangga per kapita dan Nilai Tukar Petani (NTP).

2.4.1.1. Pengeluaran Penduduk Per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator yang sangat penting bagi daerah. Indikator ini termasuk dalam aspek daya saing daerah yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat setempat. Berikut ini pengeluaran penduduk per kapita di Kabupaten Banjar.

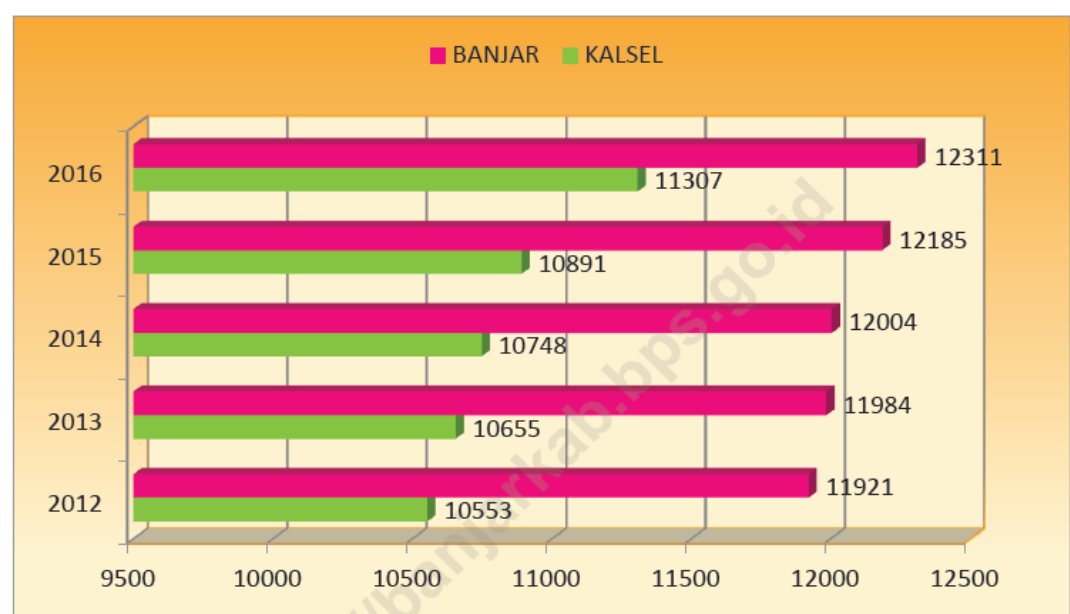
Gambar 2. 28 Grafik Pengeluaran Penduduk Per Kapita Disesuaikan (ribu rupiah per tahun) Kabupaten Banjar dan Laju Pertumbuhannya Tahun 2010-2016



Sumber: Indikator Sosial Ekonomi 2016

Pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan dengan rupiah per tahun meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar sebesar Rp. 12.311. Berbeda halnya dengan laju pertumbuhan pengeluaran per kapita mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung menurun. Laju pertumbuhan yang paling tinggi terdapat pada tahun 2015 yaitu sebesar 1.50 persen dan tahun 2016 menurun menjadi 1,03 persen. Hal ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan pengeluaran per kapita masih belum optimal. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Banjar.

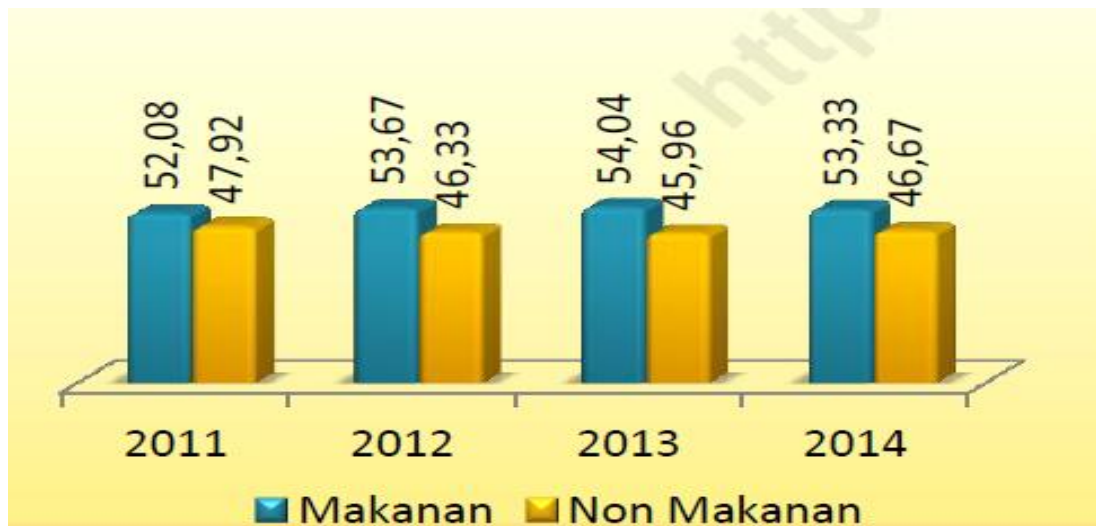
Gambar 2. 29 Grafik Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten Banjar dan Kalimantan Selatan, Tahun 2012-2016 (Ribu Rupiah/Tahun)



Sumber: Analisis Perkembangan Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

Pengeluaran per kapita Kabupaten Banjar lebih tinggi daripada Provinsi Kalimantan Selatan pada periode 2012-2016. Tingginya pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa daya beli penduduk Kabupaten Banjar lebih baik daripada Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk Banjar semakin baik sebagai dampak dari membaiknya perekonomian daerah.

Gambar 2. 30 Grafik Persentase Pengeluaran Makanan dan Non-Makanan (%) Tahun 2011-2014



Sumber: Susenas, 2014

Pengeluaran per kapita ditinjau dari pola konsumsi penduduk, maka pengeluaran untuk makanan lebih tinggi dari non makanan. Semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin membaik tingkat kesejahteraan. Sebaliknya, semakin tinggi persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran, maka semakin memburuk tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan penduduk Kabupaten Banjar masih belum baik disebabkan karena pola pengeluaran penduduk untuk makanan masih tinggi. Hal ini disebabkan karena tingkat pendapatan per kapita penduduk masih rendah.

2.4.1.2. Nilai Tukar Petani (NTP)

NTP merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Saat ini, peran dari sektor pertanian khususnya para petani sangat signifikan dalam meningkatkan perekonomian daerah. Tingginya nilai tukar petani selain dapat mensejahterakan para petani dan berkontribusi terhadap PDRB daerah.

Tabel 2. 66 Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015 (%)

Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Nilai Tukar Petani	108	109	110	98,47	98,47

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2011-2016

NTP di Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung stagnan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan NTP masih belum berjalan optimal. Selain itu, angka NTP di bawah 100 persen (2014-2015) menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani pada periode tersebut mengalami penurunan dari periode sebelumnya. Sebab indikatif dari persoalan tersebut adalah kemampuan atau daya beli petani menurun.

2.4.2. Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur

Fokus fasilitas wilayah/infrastruktur merupakan sarana prasarana yang sangat penting bagi daerah. Infrastruktur memainkan peran penting dalam menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan aktivitas mereka. Salah satu indikator infrastruktur yang memadai adalah jumlah kecelakaan di jalan raya.

Tabel 2. 67 Jumlah Kecelakaan di Kabupaten Banjar Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Kecelakaan	Korban		
		Meninggal	Luka Berat	Luka
Aluh-Aluh	-	-	-	-
Beruntung Baru	-	-	-	-
Gambut	46	24	4	53
Kertak Hanyar	20	11	3	17
Tatah Makmur	-	-	-	-
Sungai Tabuk	11	10	3	10

Martapura	18	7	-	15
MartapuraTimur	9	1	2	14
Martapura Barat	8	1	2	9
Astambul	12	5	2	10
Karang Intan	4	4	1	5
Aranio	-	-	-	-
Sungai Pinang	-	-	-	-
Paramasan	-	-	-	-
Pengaron	1	1	-	1
SambungMakmur	-	-	-	-
Mataraman	16	10	-	16
Simpang Empat Telaga	20	10	2	18
Bauntung	-	-	-	-
Total	165	84	19	168

Sumber: Kabupaten Banjar Dalam Angka 2016

Pada tahun 2016, jumlah kecelakaan sebanyak 165 kasus. Kecamatan Gambut menempati urutan pertama dalam hal banyaknya kecelakaan, yaitu sebanyak 46 kasus, sementara korbannya sebanyak 81 orang. Kemudian diikuti oleh Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Simpang Empat Telaga, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Mataram. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas wilayah/infrastruktur belum memadai.

2.4.3. Fokus iklim berinvestasi

Investasi menjadi instrumen yang sangat penting untuk meningkatkan perekonomian daerah. Tingginya minat para investor untuk menanamkan modal di sebuah daerah ditentukan oleh baik buruknya iklim investasi. Semakin baik iklim investasi, maka semakin tinggi peluang para investor untuk menanamkan modalnya. Sebaliknya, semakin buruk iklim investasi, maka

semakin kecil peluang para investor menanamkan modal. Indikator untuk mengukur iklim investasi adalah tindak kriminalitas atau kejahatan yang dapat dilihat dari jumlah tindak pidana.

Tabel 2. 68 Jumlah Tindak Pidana Tahun 2012-2016

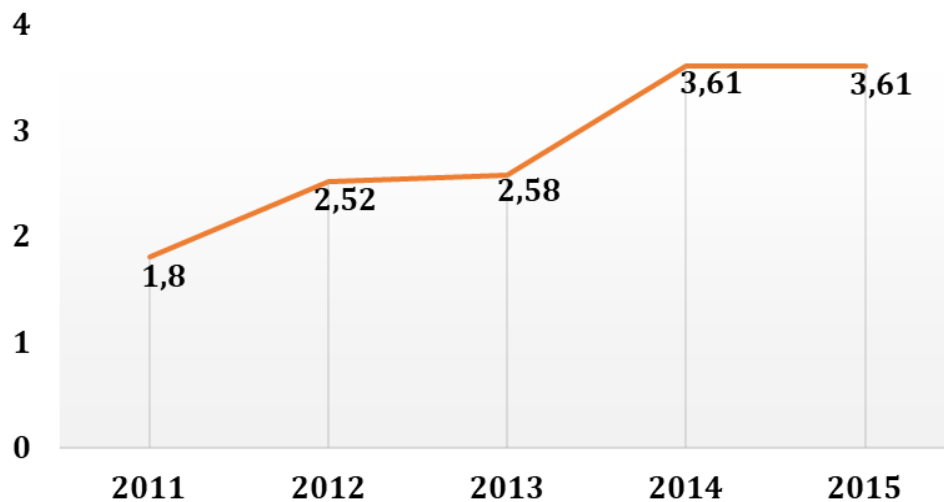
Daerah/Wilayah	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Kabupaten Banjar	307	898	920	714	765
Kabupaten Barito Kuala	42	215	324	480	432

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2012-2016

Pada periode 2012 - 2016 jumlah tindak pidana di Kabupaten Banjar mengalami perkembangan yang fluktuatif dan cenderung meningkat. Pada tahun 2014 jumlah tindak pidana sebanyak 920 kasus menurun menjadi 714 pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 terjadi peningkatan tindak pidana sebesar 7,1 persen (765 kasus). Selain itu, tindak pidana tersebut juga lebih tinggi dibandingkan jumlah tindak pidana di Kabuten Barito Kuala. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas atau kejahatan sangat tinggi di Kabupaten Banjar. Tingginya kriminalitas tersebut akan membuat iklim investasi tidak kondusif sehingga berpengaruh terhadap minat para investor untuk menanamkan modal mereka.

Persentase desa berstatus swasembada juga dapat digunakan untuk mengukur iklim berinvestasi di daerah. Indikator ini digunakan untuk melihat kesiapan daerah khususnya daerah pedesaan dalam menerima investasi yang masuk ke desa. Capaian desa berstatus swasembada di Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 31 Grafik Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa di Kabupaten Banjar Tahun 2011-2015



Sumber: RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 (sebelum Perubahan)

Persentase desa yang berstatus swasembada terhadap total desa mengalami peningkatan yang fluktuatif. Pada periode 2011 - 2014 terjadi peningkatan desa yang berstatus swasembada dari 1,8 persen menjadi 3,61 persen. Namun, pada tahun 2015, tidak terjadi peningkatan persentase desa yang berstatus swasembada di Kabupaten Banjar. Hal ini menunjukkan bahwa persentase desa yang berstatus swasembada masih rendah. Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah rendahnya ketersediaan infrastruktur di tingkat desa.

2.4.4. Fokus sumber daya manusia

Rasio ketergantungan digunakan sebagai indikator yang secara kasar menilai keadaan ekonomi suatu daerah apakah tergolong sebagai daerah yang sudah maju. Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif. Semakin rendah rasio ketergantungan, maka semakin rendah beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif.

Tabel 2. 69 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Banjar Tahun 2013-2016

No	Uraian	Tahun			
		2013	2014	2015	2016
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	154026	156615	157782	159260
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	20144	20498	21780	22706
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1)&(2)	174170	177113	179562	181966
4	Jumlah penduduk Usia 15-64 tahun	362158	368284	374881	381096
Rasio ketergantungan		48,09	48.09	47,9	47.75

Sumber: Statistik Kalimantan Tahun 2013-2016

Rasio ketergantungan Kabupaten Banjar mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, rasio ketergantungan sebesar 47.75 persen. Artinya, setiap 100 orang yang berusia kerja atau dianggap produktif mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif. Hal ini menunjukkan bahwa rasio ketergantungan Kabupaten Banjar sudah cukup baik. Secara umum, data atau informasi capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Banjar yang telah dilaksanakan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 70 Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Realisasi Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Realisasi Kinerja					Standar	Interpretasi: Belum tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)
		2013	2014	2015	2016	2017		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
A	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
I	Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi							
1.1	Tingkat pengangguran terbuka			3,29	3,44	3,11		
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat			80	80,12	80,20		
1.3	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah			11,52				
1.4	Opini BPK			WTP	WTP	WTP		
1.5	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)			89,1	89,2	89,2		
1.6	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang telah ditindaklanjuti			6	43,33	100%		
1.7	Meningkatnya Nilai Survey				100	100%		

	Kepuasan Masyarakat terhadap Optimalisasi Pelayanan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan) dan Pelaksanaan Tugas Umum Pemerintah							
II	Kesejahteraan Sosial							
1	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf			97,54				
1.2	Angka rata-rata lama sekolah			6,96	6,87	7,6		
1.2.1	Angka Lama Sekolah SD/MI/SMP/MTs			6,96				
1.2.2	Angka Lama Sekolah SMA/MA/SMK			3,01				
2.1	Umur harapan hidup			65,32				
2.2	Prevelensi balita gizi kurang			4,62	20,46	16,50		
2.3	Cakupan desa siaga aktif			263				
2.4	Indeks Pembangunan Gender (IPG)			65,58				
2.5	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri				12,07	82,80		
2.6	Angka laju pertumbuhan			2,60	1,81	1,81		

	penduduk							
B	ASPEK PELAYANAN UMUM							
I	Pelayanan urusan wajib terkait pelayanan dasar							
1	Pendidikan							
1.1	Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				65,36	67,80		
1.1.1	APK SD/MI/SDLB			67,06	106,10	113,72		
1.1.2	APK SLTP/MTs/SMPLB			66,42	77,62	86,40		
1.1.3	APK SMU/MA/SMK/PLB			90,21				
1.1.4	APM SD/MI/Paket A			67,06	89,41	97,36		
1.1.5	APM SMP/MTs/SMPLB/Paket B			40,33	57,48	62,58		
1.1.6	APM SMU/MA/SMK/PLB			100				
1.2	Angka Putus Sekolah							
1.2.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI			0,22	0,33	0,27		
1.2.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs			0,49	0,23	0,34		
1.2.3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA			0,49				
1.3	Angka Kelulusan (AL)							
1.3.1	Angka Kelulusan (AL)			99,50				

	SD/MI/SDLB							
1.3.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs			96,96				
1.4	Nilai UAN rata-rata							
1.4.1	Nilai UAN rata-rata SD/MI/SDLB			6,42				
1.4.2	Nilai UAN rata-rata SLTP/MTs/SMPLB			6,41				
1.4.3	Nilai UAN rata-rata SMU/MA/SMK/PLB			5,45				
1.5	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan dasar			1:23,71				
1.6	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Pendidikan menengah			1:34				
1.7	Jumlah sekolah standar nasional SMA/MA/SMK/PLB			5,66				
1.8	Perpustakaan Sekolah			457				
1.9	Perpustakaan Umum			1				
1.10	Perpustakaan Desa			77				
1.11	Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun			12.382				
1.12	Jumlah anggota per tahun			2.081				

1.13	Prosentase peserta didik SD dan SMP yang memenuhi persyaratan kompetensi baca tulis AlQur'an				91,40	99,54		
1.14	Persentase peningkatan kunjungan ke Perpustakaan Daerah				107,5	6,73		
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup			10,3	9,5	6,9		
2.2	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup			2,8				
2.3	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup			110,97	99,33	90,85		
2.4	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya			88				
2.5	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Rumah Sakit			86				
2.6	Terpeliharanya peralatan alat kesehatan Rumah Sakit			100				
2.7	Terlaksananya pelayanan			80,83				

	rawat jalan dan rawat inap							
2.8	Persentase pemenuhan kebutuhan ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan dasar			99,39				
2.9	Ketersediaan anggaran obat per kapita di sarana pelayanan kesehatan			12.519				
2.10	Persentase penggunaan obat rasional di sarana pelayanan kesehatan			69				
2.11	Persentase Angka penyakit dan keracunan akibat makanan			0				
2.12	Persentase Pemenuhan Tenaga Dokter di Puskesmas Terpencil			100%				
2.13	Persentase Pemenuhan Tenaga Strategis di Daerah Terpencil			7				
2.14	Tertanggulangnya kasus narkoba, penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS melalui penyuluhan			300				

2.15	Persentase Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Purnama dan Mandiri				100%			
2.16	Pemenuhan Standar Operasional prosedur (SOP)				663	624		
3	Pekerjaan umum dan penataan ruang							
3.1	Pekerjaan umum							
3.1.1	Rasio Jaringan Irigasi			11,2				
3.1.2	Persentase keluarga yang memiliki akses air bersih			55,01				
3.1.3	Panjang jalan yang terbangun			15,002				
3.1.4	Jumlah desa yang tidak dapat dijangkau kendaraan roda 4			20				
3.1.5	Jumlah desa yang telah memiliki jalan aspal			168				
3.1.6	Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi mantap: Jalan Kabupaten			67,03	67,85	68,85		
3.1.7	Persentase Jembatan dalam kondisi baik			82,19	88,01	89,08		
3.1.8	Persentase panjang jalan dalam Kondisi mantap: Jalan			71,60				

	Desa							
3.1.9	Persentase Jembatan dalam kondisi baik :Jembatan Desa			60,07				
3.1.10	Persentase Luasan Pertanian yang Terlayani Air Irigasi			80				
3.1.11	Persentase pemenuhan air baku untuk air minum/air bersih			100				
3.1.12	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi IUJK			100				
3.1.13	Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Kawasan			6				
3.1.14	Tersedianya sistem jaringan drainase Skala Kawasan dan Skala Kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari >30 cm selama 2 Jam dan tidak lebih kurang dari 2 x setahun			46,64				
3.1.15	Terbangunnya gedung perkantoran yang representative			106				
3.2	Penataan Ruang							

3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB			100 %				
3.2.2	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan peruntukannya			100 %				
3.2.3	Rasio bangunan ber-IMB (IMB yang diterbitkan)			22,05				
3.2.4	Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang			96,45	91,91	92,11		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							
4.1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni			133.118	97,91	98,6		
4.2	Persentase Peningkatan Lingkungan Sehat Perumahan			13,45				
4.3	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi			42,78				
4.4	Cakupan air minum				61,74	67,19		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							

5.1	Persentase Penegakan PERDA (Perda Ramadhan)			terlaksana	76,5	90,73		
5.2	Penerapan norma agama dalam kehidupan sehari-hari			Baik				
5.3	Lembaga sosial keagamaan (Majelis Taqlim, Kelompok Maulid Habsyi, sinoman hadrah, dan jumlah TPA) meningkat			Kegiatan lembaga terfasilitasi				
5.4	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk			1,79				
5.5	Rata-rata kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban/tahun/1.000 jumlah penduduk			0,34				
5.6	Persentase kejadian gangguan ketentraman dan ketertiban yang ditangani			90,29	81,34	95,81		
5.7	Jumlah demonstrasi			2	100%			
5.8	Jumlah masalah/kejadian terkait ketahanan bangsa			6				
5.9	Jumlah kampanye dan sosialisasi ketahanan bangsa			37				

5.10	Persentase kasus penyakit masyarakat yang tertangani			64				
5.11	Jumlah kasus pelanggaran penyakit masyarakat			68				
5.12	Terbentuknya FKDM/FKUB tingkat kab/kec/desa dan kelurahan			21	15,82	25,68		
5.13	Jumlah kejadian masalah tentang perbedaan budaya			0				
5.14	Jumlah Linmas Desa/Kelurahan Per Jumlah Desa/Kelurahan			7	79,31	92,76		
5.15	Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk			0,44				
5.16	Jumlah Linmas yang mengikuti Bintek			75				
5.17	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP			1/21				
5.18	Jumlah Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana			26				
5.19	Tertanganinya Darurat Bencana Pada Wilayah Bencana			8				
5.20	Penanganan Darurat Bencana			100				

	Terhadap Daerah Rawan Bencana							
5.21	Pemulihan Pasca Bencana			87,5				
5.22	Penurunan Jumlah kasus kriminal				79	638		
5.23	Penurunan Jumlah Pelanggaran Perda yang bernuansa kearifan lokal				13	42		
5.24	Persentase Pengurangan Risiko Bencana				50	0,06		
5.25	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi				100	100		
5.26	Persentase FKDM, FKUB, FPK dan PPWK tingkat kab/kec/desa dan kelurahan				100%			
5.27	Harmonisasi Kerukunan Beragama			Baik				
5.28	Pengajian Rutin keagamaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar			Terlaksana				
6	Sosial							
6.1	Jumlah Keluarga Miskin Punya Rumah Layak Huni			133443				
6.2	Jumlah PMKS yang Terdata			26.845				

6.3	Jumlah Korban Bencana yang Terbantu			100				
6.4	Jumlah Anak Terlantar yang Tertangani			30				
6.5	Penyandang Disabilitas yang mendapat pembinaan			14				
6.6	Panti Jompo			60				
6.7	Jumlah Jompo Yang Mendapat Pengayoman			60				
6.8	Panti Asuhan			415				
6.9	Jumlah penyandang PMKS (Narapidana) yang Terbina			30				
6.10	Jumlah Korban Narkoba dan PMKS yang Tertangani			90				
6.11	Jumlah Keluarga Miskin (PKH) yang terayomi			4.085				
6.12	Jumlah Anggota Veteran yang Terayomi			135				
6.13	Jumlah Keluarga Miskin yang punya Keterampilan Berusaha (KUBE)			11				
6.14	Persentase Kawasan santri yang diberdayakan				0	33,33		
6.15	Jumlah dana BAZ yang				0	374.280.000		

	tersalurkan							
6.16	Persentase penyandang masalah kesejahteraan sosial yang dilayani				65	70		
II	Pelayanan Urusan Wajib terkait Non Pelayanan Dasar							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)			60				
1.2	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan			5,46				
1.3	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek			85,9				
1.4	Besaran Pemeriksaan Perusahaan			6,8				
1.5	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan			10,04				
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			63,8				
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan			57,57				

	berbasis kemasyarakatan							
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan			0				
1.9	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Profil Tenaga Kerja Kab. Banjar			2				
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah			3,66				
2.2	Partisipasi perempuan dilembaga swasta			2,33				
2.3	Rasio KDRT			0,004				
2.4	Indeks Pemberdayaan Gender (G3EM)			70,47				
2.5	Rasio siswa perempuan dibanding laki-laki			93,90		142,85%		
2.6	Rasio penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak				65	100		
2.7	Persentase Kelurahan Layak anak				0	7,7		

3.	Pangan							
3.1	Ketersediaan pangan utama				92,93%			
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			9.863 278,39	3,48 92	3.591 150,46		
3.3	Produksi tanaman pangan (Padi)			235.504				
3.4	Laju Pertumbuhan produksi tanaman pangan			-1.93				
3.5	Rasio Pemenuhan Kebutuhan Pangan			4,5				
3.6	Penguatan Lembaga Distribusi (LUEP dan LDPM)			8 16				
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Peningkatan Indeks Kualitas Air				48	36		
5.2	Peningkatan Indeks Kualitas Udara				99	103		
5.3	Adanya sekolah Adiwiyata			30				
5.4	Persentase perusahaan yang telah memiliki dokumen AMDAL/dokumen lingkungan			39				
5.5	Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan			18				

	limbah (IPAL)							
5.6	Persentase perusahaan yang berpotensi mengganggu lingkungan hidup dan telah memiliki AMDAL			53,84				
5.7	Terciptanya taman keanekaragaman hayati			10				
5.8	Motivasi berperilaku ramah lingkungan			20				
5.9	Persentase penanganan sampah			26,55	100	100		
5.10	Rata-rata produksi sampah yang tidak terangkut perhari			52,93				
5.11	Persentase tersedianya akses air minum yang aman melalui sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan dan bukan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok 60 l/org/hari			55,01				
5.12	Rasio luasan RTH Publik			1,57	1,57	1,59		

	sebesar 20 persen dari luas kawasan perkotaan							
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk				99,35%			
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran			1,47	69,85%			
6.3	Kepemilikan KTP			92,80	91,4			
6.4	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk			35,98	43,31	100,15%		
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)			337				
7.2	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK			277				
7.3	Persentase Posyandu aktif			85				
7.4	Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan			48 LSP-BM				
7.5	Persentase desa yang telah memenuhi swasembada			75				

	pangan							
7.6	Terbangunnya Lumbung Pangan Desa			12				
7.7	Pelatihan perempuan perdesaan di bidang usaha ekonomi produktif			50				
7.8	Jumlah aparatur Desa yang mengikuti Diklat			400				
7.9	Jumlah anggota BPD yang dilatih se Kabupaten Banjar			1000				
7.10	Jumlah pertemuan aparatur desa dengan masyarakat			290				
7.11	Persentase kehadiran masyarakat dalam Musrenbang desa			60	55			
7.12	Persentase kelengkapan aparat desa			100				
7.13	Persentase kelengkapan administrasi desa				100	100%		
7.14	Persentase desa tertib pengelolaan keuangan desa				19,7	45,13		
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							

8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)			100 %	100%			
8.2	Rasio Akseptor KB			16,58				
8.3	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)				31,92	37,00		
8.4	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun			6,50				
8.5	Cakupan akseptor aktif			75,39				
8.6	Persentase keluarga prasejahtera dibandingkan jumlah total keluarga			36				
8.7	Adanya Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling remaja/mahasiswa			300				
9	Perhubungan							
9.1	Rasio ijin trayek			0,0009				
9.2	Kepemilikan KIR angkutan umum			10				
9.3	Jumlah terminal angkutan darat yang dibangun			13				

9.4	Jumlah terminal dermaga angkutan sungai yang dibangun			12				
9.5	Jumlah Titik kemacetan yang ditangani			4				
9.6	Peningkatan rasio volume/kapasitas			0,60				
9.7	Peningkatan kecepatan			60				
9.8	Pemasangan Ramburambu			175				
9.9	Rata-rata kecelakaan Lalu-Lintas yang menyebabkan kematian atau luka parah per-100.000 penduduk per tahun			16,40				
9.10	Pengujian kendaraan bermotor			6.420	67,19	62,95		
9.11	Persentase terminal dan dermaga yang berfungsi baik				66,7	100		
9.12	Cakupan layanan internet dan telepon seluler				54,16	80,34		
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Terlaksananya pengembangan website Domain dan Sub			100				

	Domain di seluruh SKPD							
10.2	Terlaksananya Pengembangan Dan pemberdayaan Media Interpersonal Media Tradisional dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			15				
10.3	Persentase penduduk yang menggunakan internet			60,16				
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah							
11.1	Persentase koperasi aktif			61,47	62,87	63,9		
11.2	Jumlah anggota koperasi pada koperasi aktif			19.368				
11.3	Jumlah KUMKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah			8				
11.4	Peningkatan Jumlah Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah			8.978				
11.5	Peningkatan Jumlah Produk Industri Kecil dan Menengah			465.931.153				
11.6	Peningkatan Jumlah Bahan Baku Industri Kecil Dan			245.046.270				

	Menengah							
11.7	Jumlah IKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah			37				
11.8	Unit Usaha industry kecil dan menengah yang menggunakan teknologi industri			52				
11.9	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang mendapat pembinaan teknologi industri			265				
11.10	Persentase skala usaha mikro menjadi usaha kecil				0,2	0,5		
11.11	Persentase meningkatnya taraf hidup masyarakat dikawasan transmigrasi				0	17,14		
11.12	Jumlah nilai ekspor karet				40.824.924,17	52.181.067		
11.13	Persentase Desa Berkembang				0,2274	22,74		
12	Penanaman Modal							
12.1	Rasio daya serap tenaga kerja			6,03				
12.1	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)			100 %	169,64%			

12.3	Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah			108.971.022				
12.4	Tercapainya kemitraan antara pengusaha besar, menengah kecil, dan mikro			69,1				
12.5	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)			89				
12.6	Penyelesaian pengaduan masyarakat			100				
12.7	Indeks Kepuasan masyarakat bidang pelayanan perijinan			98,76 %				
12.8	Pertumbuhan investasi(Kenaikan/ penurunan nilai realisasi PMDN)			89	119,9	143		
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Jumlah wirausaha muda			9				
13.2	Jumlah pembinaan olahraga			30				
13.3	Persentase nomor cabang olahraga yang meraih medali dalam kompetisi tingkat nasional			7,5				

13.4	Jumlah atlet daerah yang dikirim ke event olahraga di luar negeri			1				
13.5	Jumlah fasilitas olahraga			47				
13.6	Jumlah Jupel			23				
13.7	Jumlah kebijakan nasional bidang pemuda yang telah ditindaklanjuti			8				
13.8	Jumlah organisasi pemuda			13				
13.9	Jumlah kegiatan kepemudaan			14				
13.10	Persentase pemuda yang mendapat binaan kewirausahaan				0,49	0,70		
13.11	Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki fasilitas olahraga.				50,69	50		
14	Statistik							
14.1	Ketersediaan informasi dalam bentuk digital terhadap data dan informasi keseluruhan			84				
15	Kebudayaan							
15.1	Jumlah situs budaya			23				
15.2	Persentase pengembangan budaya daerah			100 %				

15.3	Jumlah kegiatan/pertunjukan kebudayaan			13				
15.4	Jumlah grup kesenian aktif			23				
15.5	Jumlah kelompok budaya yang diberikan pembinaan			13	100%			
15.6	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina				77,27	80		
15.7	Jumlah Kegiatan Kebudayaan yang bernuansa religi			baik	8	8		
16	Perpustakaan							
16.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun			100 %				
16.2	Jumlah perpustakaan (umum dan desa)			100 %				
16.3	Jumlah anggota pertahun			100 %				
17.	Kearsipan							
17.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku			12	28,57	30,19		
Layanan Urusan Pilihan								
1	Pariwisata							
1.1	Kunjungan wisata			1.917.415				
1.2	Peningkatan wisatawan lokal				2.447.644	2.027.415		

1.3	Peningkatan wisatawan mancanegara				5,14	-11,89		
2	Pertanian							
2.1	Meningkatnya PDRB Sektor Pertanian			20,95				
2.2	Bertambahnya jumlah pengelolaan padi yang telah menggunakan teknologi			31				
2.3	Meningkatnya produktivitas pertanian (Padi)			38,60				
2.4	Jumlah serangan penyakit ternak			0,50				
2.5	Peningkatan Produksi Ternak			8,31				
2.6	Peningkatan Populasi Ternak			0,3				
2.7	Kualitas Hasil Perkebunan (Karet)			55				
2.8	Pendapatan rata-rata per tahun petani kebun (karet)			23.280.000				
2.9	Tingkat produktivitas kebun			895				
2.10	Peningkatan Kualitas Penyuluh yang mengikuti diklat teknis			80				
2.11	Peningkatan Kualitas			20				

	Penyuluh bersertifikasi							
2.12	Jumlah petani sebagai penyuluh swadaya			100				
2.13	Jumlah Petani yang mengikuti pelatihan			251				
2.14	Peningkatan kemampuan kelas kelompok			200				
2.15	Peningkatan Sarana Prasarana Penyuluhan pada balai Penyuluhan Kecamatan			20				
2.16	Produksi komoditas prioritas padi sawah				248.960	218.855		
2.17	Produksi komoditas prioritas padi ladang				34.939	31.532		
2.18	Produksi karet				16.317.300	17.627.000		
2.19	produktifitas komoditas prioritas padi sawah				39,04	38,95		
2.20	produktifitas komoditas prioritas padi ladang				33,5	28,33		
2.21	produktifitas karet				930	892		
2.22	Persentase Kelompok tani madya				2,9	3,03		
2.23	Persentase luasan pertanian				80	81,89		

	yang terlayani air Irigasi							
2.24	Populasi sapi				16.700	17.627		
2.25	Persentase peningkatan produk pengolahan hasil perkebunan				12	35		
2.26	Jumlah produksi olahan hasil perikanan				945	715		
3	Kehutanan							
3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis			335				
3.2	Kerusakan Kawasan Hutan			3.013				
3.3	Terbinanya ijin pemanfaatan kawasan hutan dan industri hasil hutan			16				
4.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Persentase rumah tangga pengguna listrik			91,01				
4.2	Jumlah Pengembangan Energi Terbarukan			2				
4.3	Persentase peningkatan pengelolaan pertambangan dengan tertib			69,93				
4.4	Angka Penurunan Kasus Peti			0				

	(dalam kawasan pertambangan yang berijin)							
4.5	Persentase reklamasi lahan pertambangan			50,23				
5	Perdagangan							
5.1	Peningkatan Jumlah produk sertifikasi yang diterbitkan			7.701				
5.2	Jumlah nilai ekspor barang dan jasa			264.161.309				
5.3	Jumlah perusahaan yang terdaftar yang bergerak di sektor usaha perdagangan			625				
5.4	Peningkatan Sarana Perdagangan			6				
5.5	Jumlah Distribusi Barang Beredar			5				
5.6	Penertiban alat ukur unit takar, timbang, dan peralatannya			10				
5.7	Pengawasan Barang Beredar			13				
6	Transmigrasi							
6.1	Rasio Pendapatan Per Kapita Transmigran Terhadap			0,58				

	Pendapatan Per Kapita Kabupaten							
7	Kelautan dan Perikanan							
7.1	Cakupan bina kelompok nelayan			98				
7.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya			42.022,05	58.000	58.105		
7.3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap			16.300	8.228	11.182		
7.4	Konsumsi ikan perkapita			47,10	51	51		
7.5	Kasus Pelanggaran UU Perikanan			0				
Penunjang Urusan								
1	Perencanaan Pembangunan							
1.1	Peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang			100				
1.2	Porsi usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD dengan total RKPD			93,33	100%	75%		
1.3	Persentase kesesuaian perencanaan dengan peruntukannya			96,45	82,2	91,68		

1.4	Kesesuaian antar dokumen perencanaan tingkat kabupaten dan SKPD				100	100		
1.5	Persentase SKPD yang memiliki bank data yang terintegrasi				55	54,55		
1.6	Persentase pengguna website Domain dan Sub Domain SKPD				65,45	88,23		
2	Keuangan							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan			WTP	WTP	WTP		
2.2	Penetapan APBD			Tepat Waktu				
2.3	Tingkat capaian kinerja pengelolaan keuangan			80	WTP	WTP		
2.4	Rasio belanja modal terhadap APBD			24				
2.5	Jumlah pajak dan retribusi daerah			60.671				
2.6	Tingkat capaian kinerja rata-rata SKPD pemungu			100				
2.7	Terkelolanya Aset Daerah dengan baik			90				

2.8	Persentase capaian penerimaan pendapatan daerah				96,13	95,51		
3	Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan							
3.1	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			51	100%			
3.2	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun			87				
3.3	Persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin			0.09	0.22	0,13		
3.4	Jumlah PNS yang mengikuti Sosialisasi peraturan perundang-undangan			200				
3.5	Jumlah PNS yang mendapatkan bantuan hukum			5				
3.6	Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis			20				
3.7	Persentase Rata-rata nilai prestasi kerja SKPD				100	65,57		

3.8	Persentase Penempatan dalam jabatan sesuai dengan kompetensi				100	47,99		
3.9	Persentase kasus hukum PNS yang ditangani				100	100		
3.10	Prosentase SDM aparatur yang mengikuti diklat sesuai dengan kebutuhan				100	30,28		
3.11	Persentase peningkatan kemampuan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi				27,8	42,24		
5	Pengawasan							
5.1	Peningkatan Sumber Daya Manusia di Inspektorat			106				
5.2	Tersusunnya Standar Operasional Prosedur Inspektorat			100				
5.3	Terselesaikannya Kasus pengaduan Masyarakat			100				
5.4	Terselesaikannya Temuan Hasil Pemeriksaan dan Pengembalian Uang Negara/Daerah			80				

5.5	Tingkat Maturitas SPIP				3	3		
5.6	Tingkat Kapabilitas APIP				3	3		
5.7	Persentase Temuan yang ditindaklanjuti				80	81,40		
5.8	Persentase Kepatuhan SKPD/Entitas terhadap peraturan perundangundangan				41,18	79		
5.9	Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti melalui unit pengaduan masyarakat yang terintegrasi				0	100		
6	Kesekretariatan							
6.1	Persentase SPM yang terpenuhi			61	76,25			
6.2	Persentase SKPD yang sesuai dengan beban kerja			0				
6.3	Ketersediaan Produk Hukum Daerah (PERDA)			20				
6.4	Jumlah RAPERDA yang diusulkan			25				
6.5	Waktu rata-rata penyelesaian			2 bulan, 3				

	RAPERDA			minggu				
6.6	Rencana aksi HAM			3				
6.7	Persentase permasalahan hukum yang dapat diselesaikan			100				
6.8	Daftar perencanaan penyusunan peraturan perundang undangan Daerah			25				
6.9	Jumlah Raperda (inisiatif DPRD) yang diusulkan			25				
6.10	Waktu rata-rata pembahasan RAPERDA menjadi PERDA			2,75				
6.11	Jumlah rata-rata dengar pendapat dengan masyarakat dalam penyusunan PERDA			3				
6.12	Peningkatan Kualitas Pengendalian Pembangunan			80				
6.13	Persentase Produk Hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan				100	70		
6.14	Persentase fasilitasi rapat				100	100		

	rapat dewan tepat waktu							
6.15	Persentase peraturan yang dibuat				88,61	63		
C	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
1	Nilai Tukar Petani			98,47				
2	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa			3,61				

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN

DAERAH

Bab ini menganalisis pengelolaan keuangan daerah periode sebelumnya dan menyusun kerangka pendanaan untuk satu periode ke depan. Analisis tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran terkait kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan daerah di Kabupaten Banjar. Analisis pengelolaan keuangan daerah didasarkan pada APBD minimal 5 (lima) tahun sebelumnya sehingga dapat menghasilkan analisis yang lebih akurat. Dengan adanya analisis tersebut diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dalam pengalokasian anggaran di RPJMD Kabupaten Banjar sebagai instrumen untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Analisis kinerja keuangan daerah masa lalu dilakukan dengan menganalisis kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah lima tahun terakhir. Teknik yang digunakan untuk menganalisisnya, yaitu teknik analisis rasio, analisis horisontal, dan analisis vertikal. Analisis rasio yaitu membandingkan satu/kumpulan akun dengan satu/kumpulan akun lain di laporan keuangan untuk menggambarkan keadaan kinerja keuangan suatu daerah. Analisis horizontal yaitu membandingkan satu/kumpulan akun pada periode tertentu dengan satu/kumpulan akun yang sama

pada periode-periode lain. Sementara analisis vertikal yaitu membandingkan berbagai jenis akun yang terdapat di laporan keuangan pada 1 (satu) periode yang sama.

Salah satu instrumen untuk menilai kinerja keuangan daerah yaitu dengan melihat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai rumah tangganya. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD). DOFD menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi DOFD maka semakin tinggi kemandirian daerah. Sebaliknya, semakin rendah DOFD, maka semakin rendah kemandirian daerah tersebut.

Tabel 3. 1 Persentase Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	DOFD
2013	190.828.576.727,93	1.226.495.629.254,93	16
2014	160.159.429.171,31	1.225.440.993.043,31	13
2015	172.554.625.628,46	1.502.410.703.286,46	11
2016	189.854.372.832,05	1.711.541.447.620,05	11
2017	186.897.808.440,74	1.619.101.409.956,74	12
Rata-Rata Pertumbuhan			13

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Pada tahun 2013 hingga 2017, besaran nilai DOFD Kabupaten Banjar mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung meningkat. Nilai DOFD yang paling tinggi selama 5 (lima) tahun berada pada tahun 2013, yaitu sebesar 16 persen. Sementara rata-rata kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah sebesar 13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjar masih dalam kategori kurang baik karena masih berada di bawah angka 20 persen.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sub bab ini menganalisis kinerja pelaksanaan APBD yang didasarkan pada struktur APBD, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berikut ini uraian hasil analisis kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Banjar.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menjelaskan bahwa pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Adapun komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan atau dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berikut ini penjelasan dari pendapatan daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbuhan (%)	Proposisi Rata-Rata Terhadap Total Pendapatan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Pendapatan Asli Daerah	190.828.576.727,93	160.159.429.171,31	172.554.625.628,46	189.854.372.832,05	186.897.808.440,74	0,03	12,55
1.1	Pajak daerah	36.107.513.075,50	50.937.836.669,75	50.709.287.768,00	62.166.292.235,00	66.632.374.970,68	17,60	3,64
1.2	Retribusi daerah	15.652.959.837,00	15.106.815.950,00	10.324.073.066,00	8.659.478.972,00	7.190.396.363,50	-0,17	0,83
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	56.233.409.269,00	1.909.645.624,00	9.860.693.011,00	6.716.228.407,00	6.787.200.322,00	0,72	1,24
1.4	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	82.834.694.546,43	92.205.140.927,56	101.660.571.783,46	112.312.373.218,05	106.287.836.784,56	6,67	6,83
2	Daerah perimbangan	847.987.406.043,00	870.962.840.767,00	1.005.915.412.922,00	1.265.212.875.472,00	1.074.257.384.910,00	7,22	69,49
2.1	Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak	229.962.561.043,00	220.570.306.767,00	279.409.606.922,00	293.044.452.820,00	142.528.807.467,00	-5,97	16,25
2.2	Dana alokasi umum	590.526.945.000,00	624.196.721.000,00	656.161.364.000,00	722.092.250.000,00	709.407.411.000,00	4,78	45,75
2.3	Dana alokasi khusus	27.497.900.000,00	26.255.820.000,00	70.344.442.000,00	250.076.172.652,00	222.321.166.443,00	101,95	7,48
3	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	187.679.646.484,00	194.318.706.105,00	323.940.664.736,00	256.474.199.316,00	357.946.216.606,00	22,25	17,96
3.1	Pendapatan hibah	1.216.416.630,00	1.000.000.000,00	7.531.467.649,00	1.061.432.500,00	46.707.492.111,00	1212,47	0,73
3.2	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya	90.841.517.854,00	101.189.571.105,00	94.051.292.467,00	86.082.859.816,00	94.584.429.495,00	1,44	6,56
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	93.321.712.000,00	92.129.135.000,00	218.441.454.620,00	169.329.907.000,00	-	37,78	7,91
3.4	Dana desa	-	-	-	-	209.154.295.000,00		2,58

3.5	Dana insentif daerah	-	-	-	-	7.500.000.000,00		0,09
3.6	Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya	2.300.000.000,00	-	3.916.450.000,00	-	-	70,28	0,09
Total Pendapatan Daerah		1.226.495.629.254,93	1.225.440.993.043,31	1.502.410.703.286,46	1.711.541.447.620,05	1.619.101.409.956,74	7,76	100,00

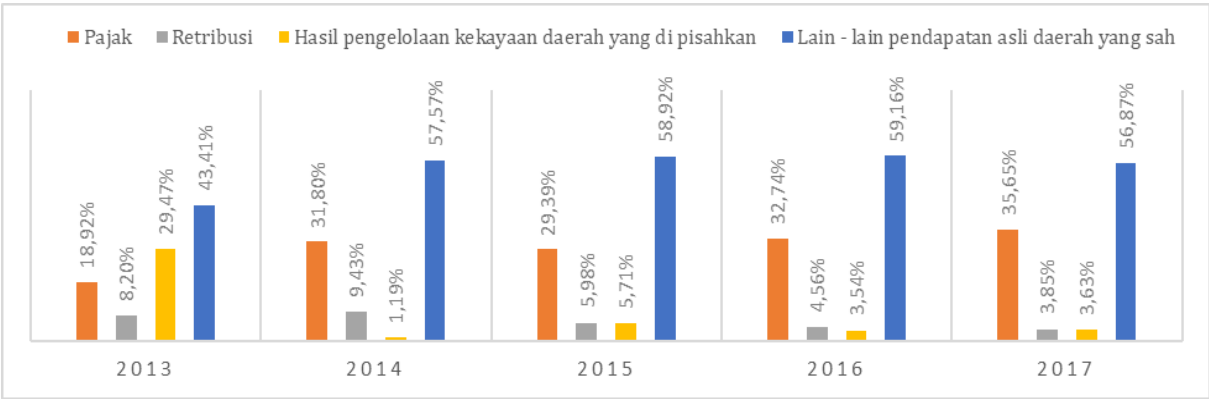
Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Dana perimbangan atau dana transfer dari pusat masih menjadi komponen utama dalam penyusun pendapatan daerah di Kabupaten Banjar. Ketergantungan pada dana tersebut terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan besaran proporsi rata-rata selama 5 (lima) tahun terakhir sebesar 69,49 persen. Komponen kedua penyusun pendapatan daerah berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan proporsi rata-rata sebesar 17,96 persen. Sementara komponen terakhir penyusun pendapatan daerah berasal dari PAD dengan proporsi rata-rata hanya sebesar 12,55 persen. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Banjar karena terkait dengan kemandirian daerah ke depannya. Jika tidak menangani kondisi tersebut, maka akan menimbulkan permasalahan bagi pemerintah daerah ke depan.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rata-rata pertumbuhan PAD Kabupaten Banjar hanya sebesar 0,03 persen dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan ini terjadi karena tren pertumbuhan PAD mengalami penurunan di beberapa komponennya, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3. 1 Grafik Persentase Kontribusi Komponen PAD Terhadap Total PAD Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

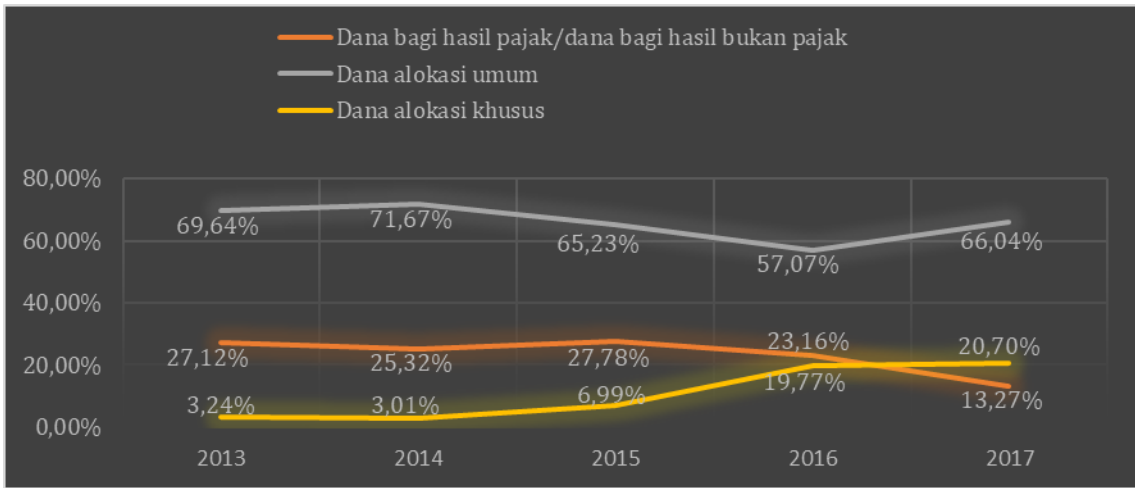
Persentase kontribusi komponen PAD terhadap total PAD yang paling tinggi berasal dari lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata kontibusinya sebesar 55,18 persen. Setelah itu, diikuti oleh pajak daerah sebesar 29,70 persen, hasil pengelolaan

daerah yang dipisahkan sebesar 8,71 persen, dan terakhir retribusi daerah yaitu hanya sebesar 6,41 persen. Sementara dilihat dari sisi pertumbuhan, retribusi daerah mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu -17,06 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi komponen PAD terhadap total PAD masih belum optimal.

b. Dana Perimbangan

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah masih menjadi komponen utama. Selama 5 (lima) tahun, rata-rata pertumbuhan dana perimbangan mencapai 7,22 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhannya setiap tahun cenderung mengalami penurunan yang berpengaruh terhadap perkembangan pendapatan daerah. Artinya penurunan yang terjadi pada dana perimbangan berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan daerah. Adapun kontribusi komponen dana perimbangan terhadap total dana perimbangan dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Gambar 3. 2 Grafik Persentase Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Total Dana Perimbangan Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017



Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

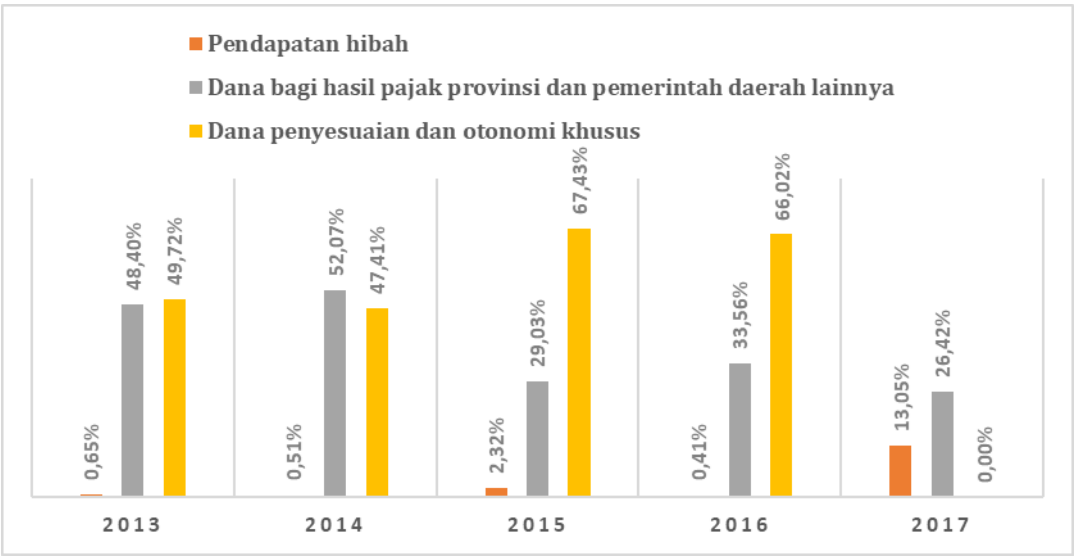
Persentase kontribusi komponen dana perimbangan terhadap total dana perimbangan terbesar masih berasal dari DAU dengan rata-rata kontibusinya sebesar 65,93 persen. Setelah itu diikuti oleh dana bagi hasil pajak atau bukan pajak sebesar 23,33 persen dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10,74 persen. Dilihat dari sisi pertumbuhan, DAU dan DAK menunjukkan tren peningkatan,

sedangkan dana bagi hasil pajak atau bukan pajak mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Banjar terhadap anggaran pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena alokasi DAU tergantung dari kondisi APBN, apabila kondisi APBN tidak baik maka keadaan keuangan daerah akan terganggu.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada periode 2013 - 2017 rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 22,25 persen. Dilihat dari tren peningkatan per tahun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami peningkatan, sementara pendapatan daerah mengalami penurunan. Berikut ini kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Gambar 3. 3 Grafik Persentase Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Total Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)



Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah paling besar berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus, kemudian diikuti oleh bagi hasil provinsi dan pemerintah daerah lain, dan dana hibah. Meskipun dana penyesuaian dan otonomi khusus mempunyai kontribusi yang sangat besar, namun kontribusinya

hanya sampai pada tahun 2016 karena pada tahun 2017 dana tersebut sudah tidak ada. Meskipun demikian, lain-lain pendapatan daerah yang sah terus meningkat karena ada komponen lain yang memberikan kontribusi, yaitu dana desa dan dana insentif daerah yang masing-masing sebesar Rp. 209.154.295.000,00 dan Rp. 7.500.000.000,00.

3.1.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang ditentukan. Analisa belanja daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan pada periode tahun 2013-2017. Kebijakan tersebut digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana belanja daerah ke depan dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Metode untuk menganalisis belanja daerah sangat beragam misalnya analisis efektifitas rencana terhadap realisasi belanja. Namun, analisis tersebut tidak menjadi indikator tunggal dalam melihat kinerja belanja daerah. Telaah secara struktur terhadap komponen belanja daerah sangat diperlukan untuk melihat masing-masing kinerja dari komponen belanja tersebut. Berikut ini hasil analisis belanja daerah:

Tabel 3. 3 Rata-Rata Pertumbuhan dan Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-Rata Pertumbu han (%)	Proposisi Rata- Rata Terhadap Total Pendapatan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017		
1	Belanja Tidak Langsung	597.294.294.839,00	636.866.808.076,00	884.902.317.112,00	960.698.190.732,20	964.432.821.825,17	13,63	54,19
1.1	Belanja pegawai	549.932.142.779,00	583.510.047.276,00	662.608.055.810,00	680.007.926.993,00	629.420.241.102,00	3,71	42,32
1.2	Hibah	9.127.699.200,00	6.413.845.300,00	40.125.264.787,00	11.027.665.877,00	14.405.072.163,00	113,50	1,07
1.3	Bantuan sosial	5.309.472.500,00	7.318.882.000,00	3.661.461.700,00	3.599.603.900,00	4.991.777.860,00	6,21	0,35
1.4	Belanja kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	2.932.524.000,00	2.865.288.000,00	3.000.272.534,08	2.990.106.846,61	5.734.659.459,07	23,47	0,24
1.5	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa	29.293.054.000,00	35.651.573.000,00	172.827.942.781,02	263.072.887.115,09	309.881.071.241,00	119,12	10,15
1.6	Belanja tidak terduga	699.402.360,00	1.107.172.500,00	2.679.319.500,00	0,50	-	33,43	0,06
2	Belanja langsung	583.019.580.221,60	691.757.238.208,87	687.703.608.169,29	709.647.663.985,00	681.070.900.347,09	4,31	45,81
2.1	Belanja pegawai	60.675.229.900,00	77.263.486.587,00	79.063.002.282,00	117.743.305.547,00	131.311.674.659,00	22,53	6,20
2.2	Belanja barang dan jasa	220.527.747.404,79	283.028.174.785,39	310.758.950.959,20	295.978.439.977,00	317.524.350.697,80	10,17	19,35
2.3	Belanja modal	301.816.602.916,81	331.465.576.836,48	297.881.654.928,09	295.925.918.461,00	232.234.874.990,29	-5,62	20,26
Total Belanja Daerah		1.180.313.875.060,60	1.328.624.046.284,87	1.572.605.925.831,39	1.670.345.854.717,20	1.645.503.722.172,26	8,91	100,00

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Pada periode tahun 2013 - 2017 proporsi rata-rata belanja tidak langsung sebesar 54,19 persen dari total belanja. Proporsi terbesar komponen belanja tidak langsung digunakan untuk belanja pegawai yaitu sebesar 42,32 persen, kemudian diikuti belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa sebesar 10,15 persen. Sementara realisasi belanja langsung sebesar 45,81 persen dari total belanja daerah. Komponen belanja terbesar adalah belanja modal sebesar 20,26 persen, belanja barang dan jasa 19,35 persen, dan belanja pegawai 6,20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pengalokasian belanja masih mengarah pada belanja operasional pemerintahan dibandingkan dengan prioritas belanja pembangunan seperti, belanja modal.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Setiap pelaksanaan APBD sering tidak bisa menghindari adanya realisasi belanja daerah yang melebihi realisasi pendapatan daerah yang secara otomatis akan terjadi defisit. Perlu adanya sebuah kebijakan pembiayaan daerah untuk menutup defisit tersebut. Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah sendiri terdiri dari dua komponen penyusun, yaitu: *pertama* penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya, penerimaan atas investasi permanen, dan pencairan dana cadangan. *Kedua* adalah pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan cadangan dan penyertaan modal atau investasi pemerintah daerah.

Analisis pembiayaan daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini gambaran realisasi

pembiayaan daerah Kabupaten Banjar :

Tabel 3. 4 Rata-Rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017 (%)

No	Uraian	Tahun (Rupiah)					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	
1	Penerimaan Pembiayaan	315.194.557.791,17	347.574.697.568,04	221.391.644.326,48	140.196.422.331,55	151.187.513.616,40	-13,72
1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA)	315.194.557.791,17	340.376.281.987,29	200.391.644.326,48	131.196.422.331,55	151.187.513.616,40	-13,11
1.2	Penerimaan atas investasi permanen	-	7.198.415.580,75	-	-	-	-
1.3	Pencairan dana cadangan	-	-	21.000.000.000,00	9.000.000.000,00	-	-57,14
2	Pengeluaran Pembiayaan	21.000.000.000,00	44.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	9,58
2.1	Pembentukan cadangan		10.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	-	-
2.2	Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah	21.000.000.000,00	34.000.000.000,00	-	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-5,51
PEMBIAYAAN NETTO		294.194.557.791,17	303.574.697.568,04	201.391.644.326,48	110.196.422.331,55	141.187.513.616,40	-11,91
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)		340.376.311.985,50	200.391.644.326,48	131.196.422.331,55	151.392.015.234,40	114.785.201.400,00	-21,11

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Pembiayaan daerah di Kabupaten Banjar masih bergantung pada SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Rata-rata pertumbuhan SiLPA mengalami pertumbuhan negatif yaitu -13,11 persen. Hal ini disebabkan karena dalam kurun 5 (lima) tahun terjadi beberapa kali defisit, sehingga membuat penerimaan pembiayaan daerah menurun yang secara otomatis mengurangi SiLPA. SiLPA memiliki peran penting bagi pembiayaan anggaran tahun selanjutnya, terutama jika terjadi defisit realisasi APBD. Namun, dalam melihat kebijakan dan kinerja keuangan daerah, besaran SiLPA tersebut patut ditelaah lebih mendalam untuk mengetahui komponen penyusunnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Selain kinerja APBD, kinerja keuangan daerah juga dapat dilihat dari kondisi neraca daerah. Neraca daerah merupakan gambaran posisi keuangan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Sebagai sebuah kinerja keuangan, aset daerah dilihat dari nilai uang yang terkandung di dalam aset, sekaligus manfaat sosial dan ekonomi terhadap pemerintah daerah maupun masyarakat yang merupakan hasil dari pembelanjaan daerah di masa lalu. Namun, untuk memenuhi kebutuhan daerah, kadang kondisi keuangan tidak mendukung sepenuhnya, sehingga mengharuskan pemerintah daerah mengambil hutang. Hutang sebagai sebuah kewajiban daerah, diambil dalam jangka panjang atau jangka pendek. Selain itu, juga dapat melihat ekuitas dana, yaitu selisih antara nilai aset daerah dan kewajiban.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Berikut ini analisis perkembangan neraca daerah Kabupaten Banjar tahun 2012-2016.

Tabel 3. 5 Neraca Komparatif dan Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Banjar 2012-2016

No	Uraian	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Aset						
1.1	Aset Lancar	348.363.522.299,85	411.445.677.587,36	283.293.755.239,80	203.998.135.988,09	218.018.668.390,32	-8,54
1.1.1	Kas	315.005.433.679,53	340.848.226.596,23	200.478.951.421,98	133.177.048.967,05	153.624.651.100,40	-12,80
1.1.2	Piutang	25.302.233.550,00	62.591.398.828,24	73.076.853.184,20	60.306.008.330,04	53.415.375.834,92	33,81
1.1.3	Persediaan	8.055.855.070,32	8.006.052.162,89	9.737.950.633,62	10.515.078.691,00	10.966.141.455,00	8,32
1.2	Investasi Jangka Panjang	248.055.085.178,07	238.037.591.757,58	1.084.634.889.235,74	1.083.169.912.757,86	1.108.021.659.578,19	88,44
1.3	Aset tetap	2.019.957.478.278,94	2.350.355.366.617,87	2.583.595.568.845,25	1.875.586.195.598,21	1.803.852.700.658,50	-1,24
1.4	Dana Cadangan	-		10.080.684.940,00	9.897.380.146,00	-	-1,82
1.5	Aset Lainnya	11.509.773.959,00	29.201.883.618,00	36.379.979.858,00	74.360.713.666,15	225.058.132.830,32	121,34
Jumlah Aset		262.788.585.971.586,00	3.029.040.519.580,81	3.997.984.878.118,89	3.247.012.338.156,31	3.354.951.161.457,33	-20,58
2	Kewajiban						
2.1	Kewajiban Jangka Pendek	4.593.509.457,50	3.970.675.326,40	3.434.106.954,00	10.919.289.566,33	21.304.944.057,51	71,50
2.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-				
Jumlah Kewajiban		4.593.509.457,50	3.970.675.326,40	3.434.106.954,00	27.061.296.254,33	38.464.050.216,51	110,79
3	Ekuitas Dana						
3.1	Ekuitas Dana Lancar	343.770.021.842,35	407.475.002.260,96	279.859.648.285,80			-6,39

3.2	Ekuitas Dana Investasi	2.279.522.337.416,01	2.617.594.841.993,45	3.704.610.437.939,09			28,18
3.3	Ekuitas Dana yang Dicadangkan			10.080.684.940,00			0,00
Jumlah Ekuitas Dana		2.623.292.350.258,36	3.025.069.844.254,41	3.994.550.771.164,89	3.219.951.041.901,98	3.316.487.111.240,82	7,74
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		2.627.885.859.715,86	3.029.040.519.580,81	3.997.984.878.118,89	3.247.021.338.156,31	3.354.951.161.457,33	7,95

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

2.4.1.1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas dianalisis dengan menggunakan rasio lancar/*current ratio* dan rasio *quick*. Rasio lancar, adalah kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Artinya semakin besar nilai *current ratio* maka semakin besar likuid, yaitu dengan nilai proporsional berada pada batas 200 persen. Rasio *quick* yaitu ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid, di mana nilai yang baik berada pada batas 100 persen.

Tabel 3. 6 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Likuiditas Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio lancar (Current Ratio) %	7583,82%	10362,11 %	8249,42%	1868,24%	1023,32%
2	Rasio Quick (Quick Ratio) %	7409,53%	10160,48 %	7965,85%	1771,94%	971,85%

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

Pada tahun 2016 setiap Rp. 1,00 atau 100 persen hutang lancar di jamin atau ditanggung oleh Rp. 1023,32 aktiva lancar. Hal ini menunjukkan bahwa *current ratio* sudah baik karena sesuai dengan prinsip kehati-hatian di mana besaran *current ratio* yang baik adalah 200 persen. Sementara untuk *quick ratio* pada tahun 2016 juga menunjukkan hal yang sama, yaitu sudah baik karena setiap hutang lancar 100 persen dijamin oleh aktiva lancar sebesar 971,85 persen. Angka tersebut sudah di atas prinsip kehati-hatian, yaitu minimal 100 persen. Meskipun demikian, pemerintah daerah Kabupaten Banjar harus mengantisipasi hutang ke depan karena kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek penurunan dari tahun ke tahun.

2.4.1.2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang, yang sekaligus menunjukkan indikasi tingkat keamanan bagi para pemberi pinjaman. Rasio ini terdiri dari dua hal, yaitu pertama rasio total hutang terhadap total aset yaitu seberapa besar pendanaan pemerintah yang dibiayai oleh hutang dibandingkan dengan total aktiva yang dimiliki oleh pemerintah. Semakin besar nilainya diartikan semakin besar kreditur mendanai pembiayaan daerah. Kedua, rasio hutang terhadap modal digunakan untuk mengukur seberapa perlunya hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, di mana semakin kecil nilainya berarti tingkat ketergantungan pembiayaan daerah semakin kecil atau pemerintah daerah semakin mandiri.

Tabel 3. 7 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Solvabilitas Tahun 2012-2016

No	Uraian	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Rasio Total Hutang terhadap Total Aset	0,00175%	0,13109%	0,08590%	0,83342%	1,14649 %
2	Rasio Total Hutang terhadap Total Modal	0,17510%	0,13126%	0,08597%	0,84043%	1,15978 %

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

Pada tahun 2012 hingga 2016 rasio total hutang terhadap total aset mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan di Kabupaten Banjar yang dibiayai oleh hutang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dilihat dari rasio hutang terhadap total modal juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banjar masih memerlukan hutang sebagai pendanaan mereka. Artinya bahwa tingkat kemandirian pemerintah dalam membiayai pembangunan daerah masih belum optimal.

2.4.1.3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas digunakan untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Rasio ini

menggunakan dua analisis, yaitu pertama, rata-rata umur piutang yang digunakan untuk melihat berapa lama atau hari yang diperlukan untuk melunasi piutang. Kedua, rata-rata umur persediaan, yaitu digunakan untuk melihat seberapa lama dana tertanam dalam bentuk persediaan (menggunakan persediaan untuk memberi pelayanan publik).

Tabel 3. 8 Analisis Neraca Daerah melalui Rasio Aktivitas Tahun 2012-2016 (Hari)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata (Hari)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Rata-rata umur piutang	1166	1171	1172	956	839	1.061
2	Rata-rata umur persediaan	432	432	356	329	316	373

Sumber: Laporan Keuangan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016

Rata-rata umur piutang dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Selama 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata umur piutang berada pada angka 1.061 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah pemerintah Kabupaten Banjar belum aman karena semakin cepat waktu pembayaran hutang menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah tidak baik.

Begitu juga dengan rata-rata umur persediaan di mana mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan jumlah rata-rata hari sebanyak 373 hari. Jumlah hari tersebut menunjukkan berapa lama dana dalam bentuk persediaan digunakan untuk memberi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas keuangan daerah belum aman karena alokasi anggaran pemerintah untuk pelayanan publik semakin menurun.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu ini menganalisis dua hal, yaitu proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan tentang proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran yang terdiri dari belanja dan pembiayaan pengeluaran, sebagai berikut:

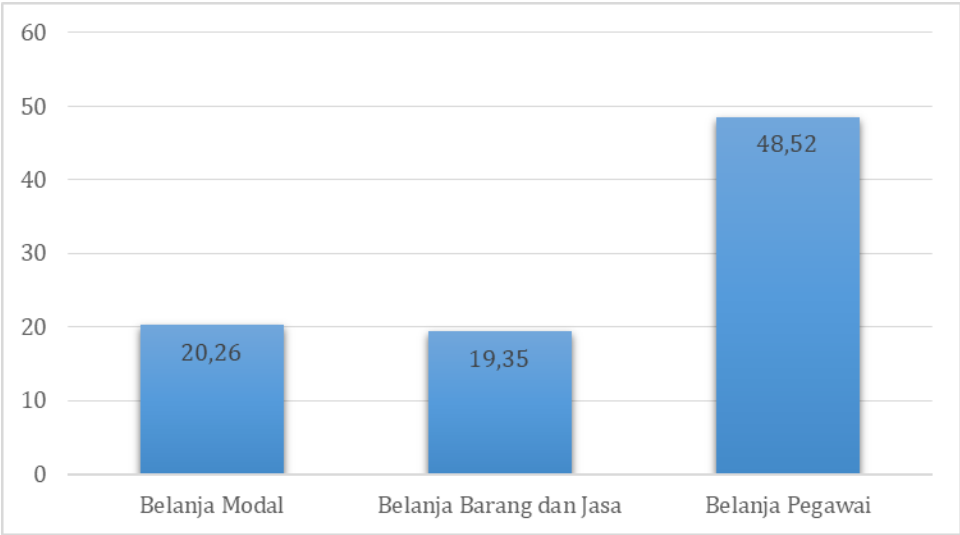
Tabel 3. 9 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran (Rp)	Persentase (%)
1	2013	610.607.372.679,00	1.201.313.875.060,60	50,83
2	2014	660.773.533.863,00	1.372.624.046.284,87	48,14
3	2015	741.671.058.092,00	1.592.605.925.831,39	46,57
4	2016	797.751.232.540,00	1.700.345.854.717,20	46,92
5	2017	760.731.915.761,00	1.655.503.722.172,26	45,95

Sumber: LRA Kabupaten Banjar 2013-2017

Proporsi total belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total pengeluaran pembiayaan mengalami perkembangan fluktuatif dan cenderung penurunan dari tahun ke tahun. Proporsi yang paling tinggi berada pada tahun 2013 yaitu sebesar 50,83 persen. Meskipun demikian, belanja untuk memenuhi kebutuhan aparatur daerah masih lebih tinggi dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan seperti terdapat pada gambar dibawah ini.

Gambar 3. 4 Persentase Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Kabupten Banjar Tahun 2017 (%)



Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Perbandingan persentase belanja modal, belanja barang dan jasa, dan belanja pegawai di atas menunjukkan bahwa belanja daerah Kabupaten Banjar masih didominasi oleh belanja pegawai. Artinya bahwa pertumbuhan belanja modal setiap tahun mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan belanja daerah masih belum terlalu berpihak terhadap penyediaan kebutuhan masyarakat.

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan daerah dilakukan dengan terlebih dahulu mencari besarnya defisit riil anggaran, sekaligus mencari penutup defisit riil anggaran tersebut. Selanjutnya melakukan analisis sisa lebih atau kurang perhitungan anggaran (SiLPA). Adapun analisis pembiayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. 10 Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Realisasi pendapatan daerah	1.226.495.629.254,93	1.225.440.993.043,31	1.502.410.703.286,46	1.711.541.447.620,05	1.619.101.409.956,74
	Dikurang realisasi:					
2	Belanja daerah	1.180.313.875.060,60	1.328.624.046.284,87	1.572.605.925.831,39	1.670.345.854.717,20	1.645.503.722.172,26
3	Pengeluaran pembiayaan daerah	21.000.000.000,00	44.000.000.000,00	20.000.000.000,00	30.000.000.000,00	10.000.000.000,00
A	Defisit riil	25.181.754.194,33	(147.183.053.241,56)	(90.195.222.544,93)	11.195.592.902,85	(36.402.312.215,52)
	Ditutup oleh realisasi penerimaan pembiayaan					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya	315.194.557.791,17	340.376.281.987,29	200.391.644.326,48	131.196.422.331,55	151.187.513.616,40
5	Penerimaan atas investasi permanen		7.198.415.580,75			
6	Pencairan dana cadangan			21.000.000.000,00	9.000.000.000,00	
B	Total realisasi penerimaan pembiayaan	340.376.311.985,50	200.391.644.326,48	110.196.421.781,55	142.392.015.234,40	114.785.201.400,88
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	365.558.066.179,83	53.208.591.084,92	20.001.199.236,62	153.587.608.137,25	78.382.889.185,36

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Secara riil, kinerja pembiayaan daerah mempunyai peran penting pada tahun 2014, 2015, dan 2017 karena pada tahun tersebut terjadi defisit APBD. Penutup defisit ini terutama bersumber dari penggunaan SiLPA tahun sebelumnya. Sementara dilihat dari surplus riil, terjadi surplus pada tahun 2013 dan 2016 sehingga membuat jumlah penerimaan pembiayaan semakin menambah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun tersebut.

Selain itu, perlu juga menganalisis lebih dalam lagi terkait dengan sisa lebih (riil) pembiayaan anggaran tahun berkenaan untuk menghitung kapasitas pendanaan daerah. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 11 Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Kabupaten Banjar Tahun 2012-2016 (%)

No	Uraian	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016	
1	Saldo kas neraca daerah	315.005.433.679,53	340.848.226.596,23	200.478.951.421,98	133.177.048.967,05	153.624.651.100,40	-12,80
	Dikurang						
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.380.842,50	1.709.136,50	69.812.095,50	18.895.114,50	-	1311,83
3	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-	-
Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran		315.004.052.837,03	340.846.517.459,73	200.409.139.326,48	133.158.153.852,55	153.624.651.100,40	-12,80

Sumber: LRA Kabupaten Banjar Tahun 2013-2017

Tabel di atas menunjukkan bahwa sisa lebih riil pembiayaan anggaran tahun berkenaan untuk membiayai pembangunan daerah mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar -12,80 persen. Artinya bahwa anggaran tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan terutama pada tahun 2014 dan 2015. Meskipun pada tahun 2016 terjadi peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa kapasitas pendanaan daerah belum optimal.

3.3. Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah. Permendagri No. 86 Tahun 2017 memberikan fleksibilitas pada daerah untuk mengembangkan teknik dan penghitungan sendiri yang dianggap lebih akurat dalam memproyeksi kerangka pendanaan karena masing-masing objek dan rincian objek APBD mempunyai karakteristik yang berbeda-beda di setiap daerah. Teknik yang digunakan dalam memproyeksi kerangka pendanaan Kabupaten Banjar yaitu teknik *forecasting* (peramalan).

Teknis peramalan adalah suatu proses memperkirakan secara sistematis tentang apa yang akan terjadi pada masa mendatang berdasarkan informasi pada masa lalu dan sekarang yang dimiliki agar kesalahan dapat diminimalisir. Perlu diketahui bahwa peramalan tidak memberikan informasi secara pasti, namun cara ini berusaha mencari pendekatan tentang apa yang akan terjadi sehingga dapat menentukan kebijakan yang terbaik. Teknik ini secara umum terdiri dari dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode peramalan kuantitatif digunakan untuk meramalkan suatu keadaan dengan menggunakan data historis tanpa menghiraukan pengaruh atau hubungan dengan variabel lainnya. Metode peramalan yang biasa digunakan adalah metode kuantitatif statistik yaitu dengan melihat pola perubahan data dari waktu ke waktu.

Sementara teknik peramalan kualitatif adalah teknik yang bersifat subjektif atau berdasarkan intuisi. Teknis ini digunakan ketika terjadi perubahan data secara signifikan. Dengan melihat konteks data keuangan di atas, maka kedua metode tersebut digunakan secara eklektis untuk memproyeksi kerangka pendanaan di Kabupaten Banjar, di mana penggunaannya disesuaikan dengan konteks data atau informasi yang didapatkan.

Sebelum memproyeksi setiap objek dan rincian objek dalam APBD, *pertama* yang dibahas adalah strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah untuk 4 (empat) tahun ke depan yang dijadikan sebagai kerangka acuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, optimalisasi belanja daerah, dan pembiayaan daerah. *Kedua*, hasil proyeksi terhadap objek APBD yang ditampilkan dalam bentuk tabel dan diberikan interpretasi pada hasil proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah. *Ketiga* adalah menghitung kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Banjar.

Penyusunan kerangka pendanaan di atas, tentu saja tidak lepas dari asas-asas pengelolaan keuangan atau dengan kata lain harus memperhatikan berbagai asas tersebut. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya persoalan terkait pertanggungjawaban dalam penggunaan anggaran daerah terutama dalam pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah ke depan. Adapun asas pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Akuntabilitas, yaitu asas pengelolaan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik maupun internal institusi pemerintahan.
- b. Profesionalitas, yaitu membutuhkan prasyarat berupa kapasitas dan integritas yang tinggi, terutama dari aparatur pemerintah daerah.
- c. Proporsionalitas, yaitu anggaran daerah dapat dikelola secara tepat dengan distribusi yang sesuai dengan perencanaan atau berdasarkan kebutuhan pembangunan daerah.
- d. Transparansi, yaitu pengelolaan anggaran yang terbuka sehingga dapat memperkuat kepercayaan publik.
- e. Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh publik maupun badan pengawasan dan pemeriksa yang bebas dan mandiri.

3.3.1. Strategi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah

Sub bab ini menguraikan strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah sebagai berikut:

3.3.1.1. Strategi dan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah terdiri dari tiga komponen, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Ketiganya mempunyai strategi dan kebijakan sebagai berikut:

- a. PAD merupakan representasi dari kemandirian daerah, sehingga strategi dalam peningkatan pendapatan daerah adalah peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan publik yang berkaitan langsung dengan peningkatan PAD, dan koordinasi lintas instansi. Adapun arah kebijakan dari strategi ini adalah sebagai berikut:
 - 1) Penataan sistem dan prosedur pemungutan, pencatatan dan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - 2) Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak dan retribusi daerah melalui sosialisasi dan peningkatan kualitas pelayanan perpajakan.
 - 3) Melakukan evaluasi dan Perubahan secara berkala terhadap berbagai peraturan daerah yang mengatur pajak dan retribusi daerah.
 - 4) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan PAD.
 - 5) Identifikasi dan optimalisasi sumber-sumber PAD potensial berbasis sektor unggulan daerah
 - 6) Meningkatkan hasil pendapatan dari retribusi dan pajak daerah melalui identifikasi potensi retribusi dan

pajak daerah disertai peningkatan kualitas pelayanan objek retribusi/pajak daerah.

- 7) Meningkatkan PAD dengan percepatan investasi yaitu pengoptimalan potensi daerah melalui investasi.
 - 8) Pelaksanaan penyesuaian tarif pajak berdasarkan pertimbangan kepentingan umum daerah, termasuk dalam rangka meningkatkan investasi ke daerah yang berbasis pada potensi daerah, menyerap tenaga kerja lokal, serta mampu menjaga keberlanjutan alam, sosial, dan ekonomi
 - 9) Melakukan koordinasi secara intensif antar instansi vertikal maupun horizontal, yaitu dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kepolisian, OPD teknis penghasil, dan kecamatan.
 - 10) Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pelayanan OPD penghasil beserta Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti BUMD, BULD, dan sebagainya.
 - 11) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB.
- b. Dana transfer masih menjadi komponen penganggaran yang strategis dan penting bagi Kabupaten Banjar, sehingga strategi yang dijalankan terutama melalui peningkatan koordinasi vertikal dan peningkatan penerimaan dari dana bagi hasil pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:
- 1) Mengembangkan data dasar dan sistem informasi yang akurat dalam pendataan sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dana perimbangan;
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan dana transfer
 - 3) Upaya peningkatan jumlah DAU ketika terjadi penurunan DBH melalui koordinasi dengan Kemendagri dan Kemenkeu

- 4) Identifikasi kebutuhan daerah untuk disesuaikan dengan peruntukkan Dana Alokasi Khusus (DAK)
- c. Dalam komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, strategi yang dijalankan melalui koordinasi dengan provinsi dan kabupaten/kota lain. Strategi tersebut mempunyai arah kebijakan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lain, terutama dalam rangka bagi hasil pajak/ retribusi serta alokasi bantuan keuangan.
 - 2) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam hal transfer dana penyesuaian.

3.3.1.2. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Belanja Daerah

Komponen belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung di mana keduanya menjadi penentu keberlangsungan penyelenggaraan pembangunan daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi pengalokasian belanja daerah yang tepat sasaran dan tujuan, sebagai berikut:

- a. Strategi penganggaran berbasis kinerja, yaitu berdasarkan pada indikator kinerja yang jelas dan terukur. Indikator kinerja yang digunakan adalah pencapaian kinerja dalam tahun anggaran/periode sebelumnya maupun indikator kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
- b. Penganggaran disinergikan dengan berbagai dokumen perencanaan, baik itu perencanaan jangka menengah dalam bentuk RPJMD dan Renstra OPD maupun perencanaan teknis tahunan seperti RKPD dan Renja OPD.
- c. Strategi penganggaran berbasis urgensi kebutuhan daerah dan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran daerah.

Strategi di atas dijalankan melalui berbagai kebijakan belanja daerah yang berbasis kapasitas riil keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Belanja daerah digunakan untuk menjalankan program pembangunan daerah yang menjadi unggulan kepala daerah, bersifat wajib dan mengikat, mempunyai manfaat yang luas kepada publik, serta untuk melaksanakan amanah kebijakan nasional, terutama anggaran infrastuktur dan peningkatan sumber daya manusia.
- b. Belanja daerah dilaksanakan berdasarkan program prioritas dalam setiap OPD
- c. Belanja operasi daerah diantaranya adalah belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan tambahan penghasilan PNS
- d. Kebijakan belanja operasi juga diarahkan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan sehingga dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat, mampu menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan
- e. Alokasi belanja operasi, terutama berupa belanja bantuan sosial dan belanja keuangan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan desa serta sebagai stimulus bagi berbagai kelompok masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah.

3.3.1.3. Strategi dan Kebijakan Optimalisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah dilaksanakan ketika terjadi defisit anggaran, yaitu ketika pendapatan daerah tidak mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah. Pembiayaan daerah yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, mempunyai arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya yang dimasukkan sebagai sumber penerimaan APBD, namun dengan besaran SiLPA yang diupayakan seminimal mungkin dari tahun ke tahun.

3.3.2. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

Proyeksi ini didasarkan pada tren pertumbuhan rata-rata dan proporsi rata-rata komponen pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah pada periode sebelumnya. Selain itu, juga memperhatikan kemungkinan perkembangan perekonomian makro ke depan dan adanya perubahan kebijakan pemerintah, khususnya yang berimplikasi pada pendapatan daerah maupun belanja daerah. Adapun hasil proyeksi APBD Kabupaten Banjar tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 12 Proyeksi Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021 (%)

No	Uraian	Tahun				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2018	2019	2020	2021	
A	Pendapatan Daerah	1.795.107.736.016,88	1.927.829.416.717,01	2.064.864.254.344,80	2.206.826.641.531,21	7,02
1	Pendapatan Asli Daerah	212.060.552.000,48	233.134.674.141,20	256.659.324.232,59	283.062.632.007,92	10,21
1.1	Pajak daerah	78,359,672,965.52	92,150,975,407.45	108,369,547,079.16	127,442,587,365.10	17.60
1.2	Retribusi daerah	7.478.012.218,04	7.777.132.706,76	8.088.218.015,03	8.411.746.735,63	4,0
1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan	7.058.688.334,88	7.341.035.868,28	7.634.677.303,01	7.940.064.395,13	4,0
1.4	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	119.164.178.482,04	125.865.530.158,71	132.566.881.835,39	139.268.233.512,06	5,2
2	Dana perimbangan	1.266.904.181.754,50	1.351.583.180.998,41	1.436.262.180.242,31	1.520.941.179.486,19	6,1
2.1	Dana bagi hasil pajak/dana bagi hasil bukan pajak	202.385.138.674,10	192.145.802.564,20	181.906.466.454,30	171.667.130.344,40	-5,5
2.2	Dana alokasi umum	761.179.876.500,00	794.751.522.600,00	828.323.168.700,00	861.894.814.800,00	4,1
2.3	Dana alokasi khusus	303.339.165.880,41	364.685.854.434,20	426.032.542.988,00	487.379.231.541,81	16,0
3	Lain - lain pendapatan daerah yang sah	316.143.002.261,90	343.111.561.577,40	371.942.749.869,90	402.822.830.037,10	8,4
3.1	Pendapatan hibah	38.816.436.816,60	47.920.795.162,80	57.025.153.509,00	66.129.511.855,20	18,0
3.2	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya	91.063.667.745,30	90.301.578.944,60	89.539.490.143,90	88.777.401.343,20	-0,8
3.3	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	186.262.897.700,00	204.889.187.470,00	225.378.106.217,00	247.915.916.838,70	10,0
3.4	Dana desa	-	-	-	-	-

3.5	Dana insentif daerah	-	-	-	-	-
3.6	Bantuan keuangan dan provismsi atau pemerintah daerah lainnya	-	-	-	-	-
B	Belanja Daerah	1.863.179.414.131,86	1.987.771.857.813,99	2.159.196.477.948,44	2.292.610.804.572,03	7,1
1	Belanja Tidak Langsung	1.126.271.417.505,44	1.232.082.261.168,28	1.337.893.104.831,16	1.443.703.948.494,00	8,3
1.1	Belanja pegawai	697.737.905.700,90	723.285.313.337,20	748.832.720.973,50	774.380.128.609,80	3,5
1.2	Hibah	20.770.479.416,30	22.287.336.066,60	23.804.192.716,90	25.321.049.367,20	6,6
1.3	Bantuan sosial	3.669.839.378,00	3.234.372.640,00	2.798.905.902,00	2.363.439.164,00	-14,8
1.4	Belanja kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa	5.223.297.097,38	5.796.206.073,85	6.369.115.050,33	6.942.024.026,80	9,5
1.5	Belanja bantuan keuangan kepada provinsi kabupaten/kota dan pemerintah desa	398.724.510.206,56	477.584.245.066,28	556.443.979.926,00	635.303.714.785,69	15,7
1.6	Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-
2	Belanja langsung	736.907.996.626,42	755.689.596.645,71	821.303.373.117,28	848.906.856.078,03	5,3
2.1	Belanja pegawai	147.737.152.338,40	171.634.070.887,10	195.820.570.455,02	204.440.771.652,77	12,7
2.2	Belanja barang dan jasa	347.646.574.298,13	332.870.284.969,11	364.250.152.241,18	372.784.127.987,34	2,7
2.3	Belanja modal	241.524.269.989,90	251.185.240.789,50	261.232.650.421,08	271.681.956.437,92	4,0
Surplus/Defisit		(68,071,678,114.98)	(59,942,441,096.98)	(94,332,223,603.64)	(85,784,163,040.82)	
C	Pembiayaan Daerah	149.349.986.225,34	155.323.985.674,35	161.536.945.101,32	167.998.422.905,38	4,0
1	Penerimaan Daerah	159.749.986.225,34	166.139.985.674,35	172.785.585.101,32	179.697.008.505,38	4,0
2	Pengeluaran daerah	10.400.000.000,00	10.816.000.000,00	11.248.640.000,00	11.698.585.600,00	4,0

Pada periode 2018 - 2021, pendapatan daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,02 persen. PAD menjadi komponen dalam pendapatan daerah yang rata-rata pertumbuhannya paling tinggi, yaitu sebesar 17,06 persen, kemudian diikuti oleh lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu sebesar 8,4 persen, dan dana perimbangan sebesar 6,1 persen. Peningkatan PAD yang signifikan di atas diasumsikan terjadi karena dipengaruhi oleh laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan di Kabupaten Banjar sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan komponen PAD. Selain itu, adanya pengoptimalan kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) terutama OPD penghasil PAD menjadi faktor pendorong pertumbuhan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa ke depan tingkat kemandirian Kabupaten Banjar akan lebih baik.

Dari sisi belanja daerah diproyeksikan akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 7,1 persen pada periode 2018-2021. Belanja tidak langsung akan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,3 persen. Pertumbuhan tersebut lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan pada periode sebelumnya (2013-2017), yaitu sebesar 14 persen. Sementara belanja langsung diproyeksi akan mengalami pertumbuhan dengan rata-rata sebesar 5,3 persen. Angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan pada periode sebelumnya (2013-2017), yaitu hanya sebesar 4 persen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun alokasi belanja tidak langsung masih lebih tinggi, namun selisih antara kedua belanja tersebut relatif kecil. Kondisi tersebut sesuai dengan kebijakan dalam RPJMD sebelum diubah, bahwa anggaran daerah akan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan langsung terhadap masyarakat.

Dari sisi pembiayaan daerah juga akan mengalami peningkatan ke depan. Asumsi ini didasarkan pada asumsi makro ekonomi, yaitu laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pembiayaan daerah akan mempunyai peran penting karena APBD diproyeksikan akan defisit selama 4 (empat)

tahun mendatang.

Substansi penyusunan kerangka pendanaan adalah untuk mengetahui kapasitas riil keuangan daerah dan rencana penggunaannya untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 4 (empat) tahun ke depan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan penggunaannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018-2021

No	Uraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Pendapatan Daerah	1.795.107.736.016,88	1.927.829.416.717,01	2.064.864.254.344,80	2.206.826.641.531,21
2	Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan anggaran	159.749.986.225,34	166.139.985.674,35	172.785.585.101,32	179.697.008.505,38
A	Total penerimaan	1.951.492.164.027,16	2.084.040.359.669,94	2.218.730.042.988,55	2.355.758.631.228,64
	Dikurang				
4	Belanja tidak langsung	1.126.271.417.505,44	1.232.082.261.168,28	1.337.893.104.831,16	1.443.703.948.494,00
5	Belanja pegawai di belanja langsung	147.737.152.338,40	171.634.070.887,10	195.820.570.455,02	204.440.771.652,77
6	Pengeluaran Pembiayaan	10.400.000.000,00	10.816.000.000,00	11.248.640.000,00	11.698.585.600,00
B	Total pengeluaran	1.284.408.569.843,84	1.414.532.332.055,38	1.544.962.315.286,18	1.659.843.305.746,77
A-B	Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	670.449.152.398,38	679.437.070.335,98	692.687.524.159,94	726.680.344.289,82

Anggaran tersebut merupakan hasil dari alokasi penerimaan daerah untuk belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat serta belanja prioritas utama yang terdapat pada belanja tidak langsung, belanja pegawai di belanja langsung, dan pengeluaran pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada sisa anggaran yang nantinya digunakan untuk membiayai kegiatan lain yang tidak termasuk dalam belanja tersebut. Adapun penggunaan anggaran tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 14 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banjar

No	Uraian	Proyeksi (Rp)			
		2018	2019	2020	2021
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	679,437,070,335.98	692,687,524,159.94	726,680,344,289.82	741,904,260,004.63
	Dibagi ke				
2	Prioritas I		167,933,751,735.00	263,987,140,886.00	309,341,509,563.00
3	Prioritas II		524,753,772,424.94	462,693,203,403.82	432,562,750,441.63

Rencana penggunaan kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Banjar digunakan untuk dua prioritas pembangunan daerah. *Prioritas I* untuk program pembangunan daerah, yaitu program strategis dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dan program yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan seperti program pada sektor pendidikan dan kesehatan. *Prioritas II* adalah untuk program perangkat daerah yang mejadi prioritas masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari kedua prioritas tersebut, rencana pendanaan untuk *prioritas I* akan semakin meningkat.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU- ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis adalah bagian yang berisi tentang intisari dari berbagai permasalahan pembangunan Kabupaten Banjar. Analisis ini menjadi dasar bagi penyusunan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam RPJMD. Merujuk pada pertimbangan tersebut, maka isu strategis harus dirumuskan secara benar dengan menggunakan metode yang baik, agar semua permasalahan pembangunan yang dihadapi dapat dipetakan dengan baik. Pemetaan permasalahan pembangunan yang baik, menjadi dasar bagi perumusan intervensi yang komprehensif. Berikut adalah permasalahan pembangunan yang menjadi basis bagi penyusunan isu-isu strategis Kabupaten Banjar:

4.1. Penelaahan RTRW

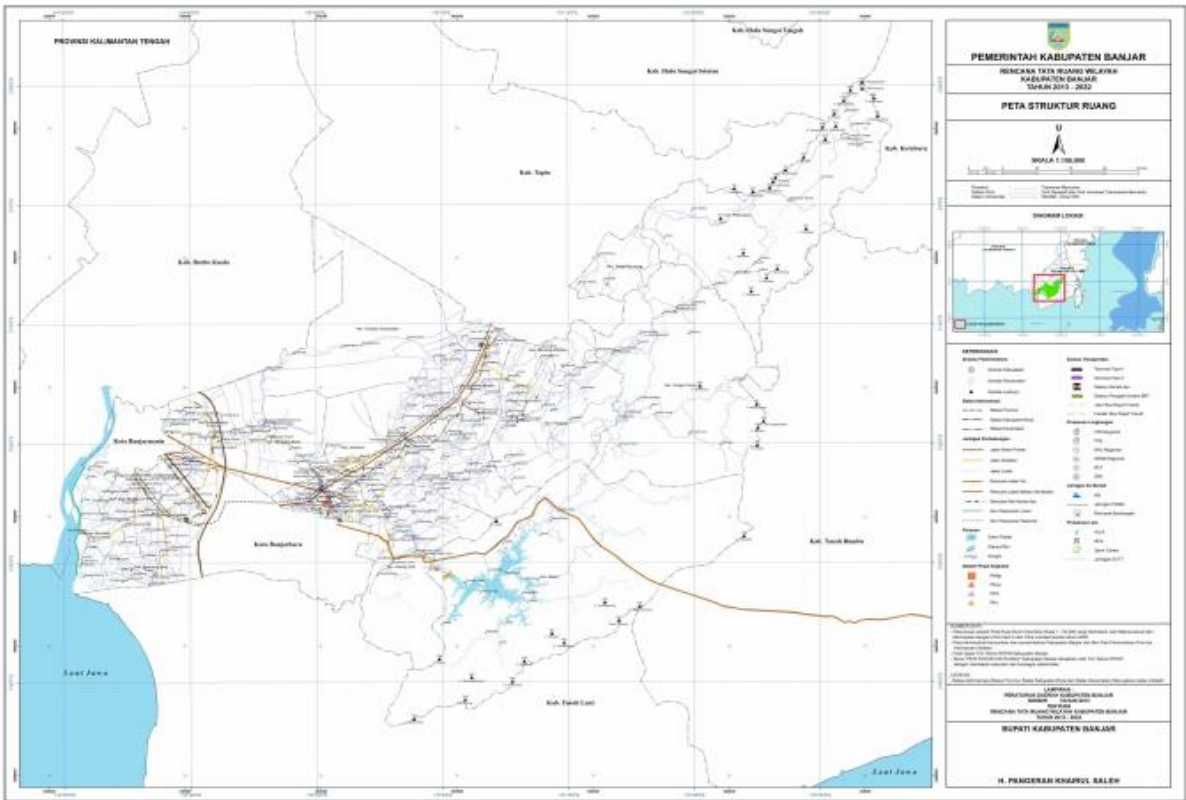
Pada sub bab ini menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Banjar yang meliputi rencana struktur ruang dan rencana pola ruang, yaitu sebagai berikut.

4.1.1. Rencana Struktur Ruang

Rencana struktur ruang Kabupaten Banjar meliputi rencana sistem pusat pelayanan dan rencana sistem jaringan prasarana. Rencana sistem pusat pelayanan terdiri dari penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan, rencana sistem perkotaan, dan rencana

sistem perdesaan. Sementara rencana sistem jaringan prasarana terdiri dari rencana pengembangan sistem jaringan transportasi, rencana pengembangan sistem jaringan energi kelistrikan, rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi, rencana pengembangan sistem jaringan prasarana sumber daya air, dan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan. Rencana struktur ruang Kabupaten Banjar dapat dilihat pada peta berikut ini:

Gambar 4. 1 Peta Rencana Struktur Ruang Kaupaten Banjar



Sumber: RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032

4.1.1.1. Rencana Sistem Pusat Pelayanan

a. Penetapan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Penetapan Kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan dengan melihat kesesuaian kondisi dan karakteristik kegiatan di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banjar. Identifikasi Kawasan perkotaan dan perdesaan dilakukan untuk mengetahui dan menentukan jenis kegiatan yang akan ditentukan sehingga sesuai dengan peruntukan tanah dan ruangnya.

b. Rencana Sistem Perdesaan

Rencana sistem perdesaan dilakukan dengan tujuan untuk menentukan desa Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). PPK merupakan perdesaan yang berhubungan langsung dengan ibukota kecamatan atau perdesaan yang berhubungan atau berorientasi pada perkotaan lain. Sistem pusat pemukiman pedesaan membentuk pusat pelayanan desa secara hirarki, yaitu pusat pelayanan antar desa, pusat pelayanan setiap desa, dan pusat pelayanan setiap dusun atau kelompok pemukiman.

c. Rencana Sistem Perkotaan

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman kota, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Daerah perkotaan merupakan daerah strategis apabila ditinjau dari sisi kegiatan ekonomi dan memiliki infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pengembangan kawasan perkotaan yang direncanakan sebagai pusat pelayanan yang secara umum diarahkan untuk mencapai suatu keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan ruang yang terjadi pada sistem kota-kota tersebut. Pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Banjar meliputi pusat kegiatan nasional-Provinsi (PKNp), Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

4.1.1.2. Rencana Sistem Jaringan Prasarana

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi

Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi terdiri dari rencana sistem jaringan transportasi darat dan rencana sistem jaringan kereta api. Adapun telaahannya adalah sebagai berikut:

1) Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Jaringan transportasi darat meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas, jaringan pelayanan lalu lintas,

jaringan sungai, danau, penyeberangan, dan jaringan kereta api. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

- **Jaringan Jalan**

Peningkatan sarana dan prasarana transportasi merupakan salah satu pendorong kemajuan sebuah daerah. Salah satu sarana dan prasarana transportasi yang memiliki peran penting bagi kemajuan daerah adalah jaringan jalan. Jaringan jalan sebagai bagian utama dalam dalam sistem transportasi perlu dikembangkan untuk mendukung pengelolaan potensi daerah Kabupaten Banjar yang merupakan salah satu simpul strategis di Kalimantan Selatan. Rencana jaringan jalan di Kabupaten Banjar meliputi penentuan fungsi jaringan jalan dan pembangunan serta peningkatan jaringan jalan.

- **Jaringan Prasarana Lalu Lintas**

Pengembangan jaringan prasarana lalu lintas diarahkan untuk pengembangan terminal di Kabupaten Banjar. Terminal dalam sistem transportasi merupakan prasarana yang sangat penting dalam mendukung sistem pengangkutan yaitu memperlancar mobilisasi dari satu titik ke titik yang lain. Rencana pembangunan terminal di Kabupaten Banjar, yaitu terdiri dari terminal penumpang tipe A yang berlokasi di jalan A. Yani Km. 17, Kecamatan Gambut; terminal penumpang tipe C terdapat di pusat pembelanjaan sekumpulan Kecamatan Martapura; Stasiun pengalihan antara BRT (*Bus Rapi Transit*) yang berlokasi di Perkotaan Martapura dan Perkotaan Gambut – Kertak Hanyar; dan pengembangan dan pembangunan halte bus yang meliputi Perkotaan Martapura dan Perkotaan Kertak Hanyar – Gambut.

- **Jaringan Pelayanan Lalu Lintas**

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas bertujuan untuk meningkatkan layanan transportasi angkutan umum melalui perencanaan trayek angkutan umum yang dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Adapun

rencana trayek yang akan dibangun terdiri dari Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar – Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur; Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang menghubungkan Banjarmasin – Banjar Baru – Rantau – Kandangan - Barabai - Amuntai - Tanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; Angkutan Kota, Perkotaan dan Perdesaan menghubungkan : Martapura - Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron - Sungai Pinang; Martapura – Sungai Tabuk; Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan berbasis BRT dengan jaringan koridor pelayanan.

• Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pengembangan jaringan sungai, danau, dan penyeberangan dilakukan dengan tujuan, yaitu (1) mengarahkan pengembangan jaringan transportasi sungai untuk pelayanan angkutan (2) meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas keamanan, keselamatan, kenyamanan alur pelayaran pada sungai, kanal baik lebar maupun kedalamannya pada saat musim hujan maupun kemarau sehingga layak untuk dilayari sepanjang musim; (3) meningkatkan pengembangan pembangunan dermaga dan pelabuhan penyeberangan terpadu yang terhubung antara moda angkutan sungai dan moda angkutan darat dengan dilengkapi fasilitas pergudangan.

Tabel 4. 1 Pengembangan Jaringan Sungai, Danau, dan Penyebrangan di Kabupaten Banjar

No	Aspek	Lokasi
1	Jaringan sungai	1. Sungai Martapura 2. Sungai Riam Kanan 3. Sungai Riam Kiwa
2	Alur pelayaran sungai dan danau	Sungai Martapura, melintasi Martapura - Banjarmasin
3	Pelabuhan sungai dan danau	1. Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh; 2. Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh; 3. Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh; 4. Dermaga Depan Kantor Camat di

		Kecamatan Aluh-Aluh; 5. Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh; 6. Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh-Aluh; 7. Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh; 8. Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh; 9. Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh; 10. Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk; 11. Dermaga Sungai Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk; 12. Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk; 13. Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk; 14. Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio; 15. Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio; 16. Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura; 17. Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul; 18. Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur
--	--	--

4.1.1.3. Rencana Sistem Jaringan Kereta Api

Pengembangan jaringan kereta api penting bagi kelancaran barang dan orang. Rencana pengembangan jaringan rel kereta api di Kabupaten Banjar, adalah sebagai berikut:

1. Rencana pembangunan jalan kereta api, yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL yaitu ruas : Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin.
2. Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus yaitu ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong-Kabupaten Hulu Sungai Utara-Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan-Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut.

3. Rencana Lokasi pengembangan Stasiun Kereta Api yang terdapat di Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut.

a. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan

Pengembangan jaringan kelistrikan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan penyediaan daya listrik untuk mengimbangi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Pengembangan jaringan kelistrikan mencakup pengembangan pusat-pusat pembangkit listrik dan jaringan prasarana listrik. Berikut ini pengembangan sistem jaringan energi kelistrikan di Kabupaten Banjar.

Tabel 4. 2 Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan di Kabupaten Banjar

NO	Aspek	Rincian/lokasi
1	Rencana pusat-pusat pembangkit listrik	1. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio; 2. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di Kecamatan Aranio; 3. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan 4. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
2	Rencana Jaringan Prasarana Listrik	1. Gardu Induk (GI) Mantuil terdapat di Mantuil Kecamatan Gambut; 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) Mantuil 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Cempaka yaitu yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil ke Gardu Induk (GI) Cempaka (Kota Banjar Baru); 3. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 70 (tujuh puluh) Kilo Volt PLTA PM. Noor - Gardu Induk (GI) Cempaka yang menghubungkan PLTA PM. Noor dengan Gardu Induk (GI) Cempaka; 4. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 (seratus lima puluh) Kilo Volt Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin) yang menghubungkan Gardu Induk (GI) Mantuil -Gardu Induk (GI) Trisakti (Kota Banjarmasin); dan 5. Jaringan Distribusi Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) 20 (dua puluh) Kilo Volt yang menyuplai kebutuhan energi listrik di Kabupaten Banjar

b. Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Sasaran utama dalam pengembangan sistem jaringan telekomunikasi adalah terjangkaunya daerah pelosok yang belum terlayani jaringan telekomunikasi sehingga seluruh penduduk dapat berkomunikasi dan mempermudah akses terhadap informasi. Hal ini merupakan bentuk peningkatan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat. Pengembangan jaringan telekomunikasi terdiri dari sistem jaringan kabe dan sistem jaringan nirkabel. Pengembangan sistem jaringan kabel dilakukan untuk menunjang fasilitas telepon, yaitu dengan rencana pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO) Martapura, yaitu teknologi fiber optik yang mampu meningkatkan kualitas suara dan jumlah sambungan. Sementara sistem jaringan nirkabel adalah sistem jaringan telekomunikasi melalui jaringan seluler dan satelit. Pengembangan sistem ini yaitu dengan pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) yang dapat menjangkau wilayah Kabupaten Banjar.

c. Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air

Rencana jaringan sumberdaya air meliputi aspek konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arah pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai barito.

d. Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan meliputi peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam pengelolaan air minum, persampahan, air limbah dan drainase; dan cakupan pelayanan air minum, persampahan, air limbah dan drainase.

Tabel 4. 3 Hasil Telaah Struktur Ruang

No	Rencana Struktur Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Struktur Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu Pelaksanaan			
				Lima Tahun ke-1	Lima tahun ke-2	Lima tahun ke-3	Lima tahun ke -4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Rencana sistem perdesaan						
1.1	Desa pusat pelayanan kawasan	a. Pusat pelayanan antar desa b. Pusat pelayanan setiap desa c. Pusat pelayanan pada setiap dusun atau kelompok permukiman d. Pusat pelayanan lingkungan	Desa Melintang, Desa Lok Baintan, Desa Tiwingan, Desa Belangian, Desa Cindai Alus, Desa Tungkaran				
II	Rencana sistem perkotaan						
II.1	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	a. Pusat industri dan perdagangan intan nasional; b. Pusat kegiatan pemerintahan kabupaten; c. Pusat kegiatan jasa pariwisata nasional; d. Pusat kegiatan jasa dan perdagangan nasional; e. Pusat kegiatan keagamaan regional dan nasional; dan f. Pusat kegiatan perumahan dan	Martapura				

II.2	Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	permukiman					
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan; c. Pusat kegiatan pengembangan industri menengah dan pengolahan hasil pertanian; d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa, perbankan intraregional; e. Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan umum penumpang (terminal penumpang tipe A); f. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; dan g. Pengembangan rumah sakit jiwa	1. Gambut 2. Kertak Hanyar				
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; c. Pusat kegiatan wisata religius;	Perkotaan Simbang Empat				

		d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal; dan e. Pusat kegiatan pengembangan permukiman dan fasilitas lainnya.					
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan pelayanan lintas kecamatan; c. Pusat kegiatan pengembangan perdagangan dan jasa; d. Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; dan e. Pusat kegiatan pariwisata alam	Perkotaan Sungai Tabuk				
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan perdagangan lintas kecamatan; c. Pusat kegiatan jasa pariwisata alam; d. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala	Perkotaan Aluh-Aluh				

		lokal; e. Pusat kegiatan pendaratan hasil perikanan; f. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan; g. Kawasan pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya; h. Kawasan pengembangan industri dan pergudangan; dan i. Pusat kegiatan simpul transportasi angkutan sungai dan angkutan laut (pengembangan sektor kepelabuhanan).					
II.3	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan perkebunan dan pengolahan perkebunan; c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; dan e. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala	Perkotaan Mataraman				

		local					
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan industri pengolahan hasil pertanian; c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman; d. Pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal; e. Pusat kegiatan wisata religius; dan f. Pusat kegiatan pelayanan fasilitas umum dan sosial skala lokal.	Perkotaan Astambul				
		a. Pusat kegiatan pemerintahan dan administrasi kecamatan; b. Pusat kegiatan pengembangan kawasan perlindungan pertanian pangan berkelanjutan dan pusat kegiatan pengolahan hasil pertanian; c. Pusat kegiatan pengembangan permukiman perkotaan; d. Pusat kegiatan	Perkotaan Kampung Baru				

		perdagangan dan jasa skala					
III	Rencana jaringan transportasi						
III.1	Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat	Jaringan jalan	Jaringan jalan tol terdiri atas ruas : 1. Banjarmasin - Martapura; 2. Martapura - Binuang; 3. Martapura - Batulicin; dan 4. Pelaihari - Bati Bati - Gambut/Liang Anggang - Sungai Tabuk -Alalak - Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)				
			Jaringan jalan bebas hambatan (arteri primer) merupakan jaringan jalan lintas Kalimantan yang menghubungkan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin -Jalan Lingkar Selatan (Jalan Gubernur Soebardjo)- Liang Anggang - Bati Bati				
			Jaringan jalan arteri primer terdiri atas ruas : 1. Ruas Liang Anggang - Martapura; 2. Ruas Jalan A. Yani (Martapura); 3. Ruas Martapura -Desa				

			Tungkap (Batas Kabupaten Tapin); 4. Ruas Jalan Lingkar Selatan -Jalan A. Yani Km. 17; 5. Ruas Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi)- Sungai Tabuk; dan 6. Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sunga Lulut)				
			Jaringan jalan kolektor primer K2 dan K3 terdiri atas ruas : 1. Ruas Jalan Paramasan; 2. Ruas Jalan Martapura lama (Martapura – Sungai Lulut). 3. Ruas Teluk Selong - Dalam Pagar - Melayu Hilir - Kelampayan Tengah - Tambak Danau - Danau Salak; 4. Ruas Jalan P. M . Noor (Sungai Ulin - Desa Tiwingan Aranio); 5. Ruas Gambut - Beruntung Baru (Batas Kabupaten Tanah Laut); 6. Ruas Sungai Tabuk - Gambut;				

			7. Ruas Mataraman - Karang Intan - Sungai Ulin; 8. Ruas Jalan Desa Mandiingin Timur - Bendungan Irigasi Desa Mandi Kapau Karang Intan; 9. Ruas Jalan Lingkar Selatan (Desa Melintang)- Aluh Aluh; 10. Ruas Banjarmasin - Kuin Kecil - Aluh Aluh- Sungai Musang. 11. Ruas Jalan Mahligai - Manarap - Jalan Lingkar Utara (Jalan Gubernur Syarkawi); 12. Ruas Jalan Pengaron - Karang Intan; 13. Ruas Jalan Benteng - Pengaron; dan 14. Ruas Jalan Kuin Kecil - Handil Bujur.				
			Jaringan jalan lokal primer terdiri atas ruas jalan di Kabupaten Banjar yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar ibukota kecamatan dengan pusat desa, antar ibukota kecamatan dengan desa-				

			desa, serta menghubungkan antar desa-desa dalam wilayah Kabupaten				
			Jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan antara bagian tengah dengan bagian timur - tenggara Kalimantan Selatan terdiri atas ruas : 1. Ruas Simpang Empat Pengaron - Sungai Loban - Pagatan; dan 2. Ruas Martapura - Batulicin				
			Rencana pembangunan dan/atau peningkatan jalan lingkar dalam dan lingkar luar kabupaten terdiri atas ruas : 1. Pembangunan ruas jalan lingkar Kecamatan Simpang Empat -Karang Intan - Cempaka - Banjar Baru - Liang Anggang -Trisakti; 2. Pembangunan ruas jalan lingkar Mataraman - Sungai Ulin;				

			3. Pembangunan ruas jalan Sungai Kitano - Kelampayan; 4. Pembangunan ruas jalan Kampung Melayu - Kelampayan; 5. Pembangunan ruas jalan penghubung Martapura - Kawasan Minapolitan 6. Pembangunan ruas jalan Martapura - Kawasan Perkantoran Baru 7. Pembangunan ruas jalan Karang Intan - Pengaron; 8. Peningkatan ruas jalan Astambul - Kelampayan; 9. Peningkatan ruas jalan Astambul - Bincau; 10. Peningkatan ruas jalan Martapura Lama - Banjarmasin; dan 11. Peningkatan ruas jalan Angkipih - Remo - Paramasan Bawah				
			Rencana peningkatan dan pengembangan jalan pada ruas-ruas jalan khusus angkutan komoditas yang mendukung				

			kelancaran arus distribusi dari sentra-sentra produksi sumberdaya mineral dan perkebunan yang dikelola oleh pihak swasta/investor menuju pelabuhan khusus terdiri atas ruas : 1. Rencana jalan khusus untuk angkutan hasil tambang mulai dari underpass (Jalan A. Yani Km 71), Desa Simpang Empat, Desa Cintapuri, Desa Banua Anyar, Desa Alalak Padang, Desa Batik sampai pada pelabuhan khusus yang terletak di Sungai Barito; 2. Daerah pertambangan /daerah perkebunan di Desa Lok Cantung Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -underpass pada jalan nasional kurang lebih pada kilometer 71 (tujuh satu) di Desa Lokcantung				
--	--	--	---	--	--	--	--

			Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar -flyover pada jalan provinsi Margasari - Marabahan Desa Batik Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala arah Jembatan Rumpiang - pelabuhan khusus Desa Banua Anyar Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala; 3. Daerah pertambangan / daerah perkebunan di Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar - underpass pada jalan nasional kurang lebih kilometer pada 94 (sembilan empat) di Desa Pulau Pinang Utara Kecamatan Pulau Pinang Kabupaten Tapin - pelabuhan khusus Sungai Puting Kabupaten Tapin				
		Jaringan Prasarana Lalu Lintas	a. Terminal Penumpang Tipe A terdapat di				

			Jalan A. Yani Km 17, Kecamatan Gambut; b. Terminal Penumpang Tipe C terdapat di Pusat Perbelanjaan Sekumpul Kecamatan Martapura; c. Stasiun Pengalihan Antara BRT (Bus Rapid Transit) terdapat di Perkotaan Martapura, dan Perkotaan Gambut - Kertak Hanyar; dan d. Pengembangan dan pembangunan halte bus meliputi : perkotaan Martapura; perkotaan Kertak Hanyar – Gambut.				
		Jaringan Pelayanan Lalu Lintas	a. Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) menghubungkan Kabupaten Banjar - Kalimantan Tengah- Kalimantan Timur; b. Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) menghubungkan Banjarmasin- Banjarbaru - Martapura - Rantau - Kandangan -				

			Barabai - AmuntaiTanjung; dan Martapura - Pelaihari - Batulicin - Kota Baru; dan c. Angkutan Kota, Perkotaandan Perdesaan menghubungkan : Martapura -Astambul - Kelampayan; Martapura - Aranio; Martapura - Pengaron-Sungai Pinang; Martapura- Sungai Tabuk. d. Pengembangan sistem angkutan transportasi massal perkotaan berbasis Bus Rapid Transit (BRT) dengan jaringan koridor pelayanan meliputi : 1. Koridor I (rute pelayanan angkutan Sp. Serapat Alalak - Banjarmasin - Kertak hanyar - Gambut/Terminal Tipe A-Liang Anggang - Bandar Udara Syamsuddin				
--	--	--	--	--	--	--	--

			Noor); 2. Koridor II (rute pelayanan angkutan Mataraman-Astambul-Martapura Timur-Martapura/Terminal Tipe C-Banjarbaru-Landasan Ulin-Bandar Udara Syamsuddin Noor); 3. Koridor III (rute pelayanan angkutan Pleihari-Bati-Bati-Liang Anggang - Gambut/Terminal Tipe A); dan Koridor IV (rute pelayanan angkutan Martapura/Terminal Tipe Cperkantoran/pusat pemerintahan provinsi/jalan Trikora-Liang Anggang-Gambut/Terminal Tipe A).				
		Jaringan Sungai, Danau,	Jaringan sungai, terdiri				

		dan Penyeberangan	atas : a. Sungai Martapura; b. Sungai Riam Kanan; dan c. Sungai Riam Kiwa. d. Dermaga Simpang Warga I di Kecamatan Aluh-Aluh; e. Dermaga Simpang Warga II di Kecamatan Aluh-Aluh; f. Dermaga Aluh-Aluh Besar di Kecamatan Aluh-Aluh; g. Dermaga Depan Kantor Camat di Kecamatan Aluh-Aluh; h. Dermaga Kuin Kecil di Kecamatan Aluh-Aluh; i. Dermaga Kuin Besar di Kecamatan Aluh- Aluh; j. Dermaga Tanipah di Kecamatan Aluh-Aluh; k. Dermaga Bakambat di Kecamatan Aluh-Aluh; l. Dermaga Sungai Musang di Kecamatan Aluh-Aluh; m. Dermaga Sungai Lulut di Kecamatan Sungai Tabuk; n. Dermaga Sungai				
--	--	-------------------	--	--	--	--	--

			Tabuk di Kecamatan Sungai Tabuk; o. Dermaga Keliling Benteng di Kecamatan Sungai Tabuk; p. Dermaga Lok Baintan di Kecamatan Sungai Tabuk q. Dermaga Riam Kanan di Kecamatan Aranio; r. Dermaga Belangian di Kecamatan Aranio; s. Dermaga Murung Kenanga di Kecamatan Martapura; t. Dermaga Astambul di Kecamatan Astambul; u. Dermaga Telok Selong di Kecamatan Martapura Timur				
III.2	Rencana Sistem Jaringan Kereta Api	Rencana pembangunan jalan kereta api yaitu jalan angkutan penumpang dan barang antar kota PKN dengan PKW dan PKL	Tanjung - Barabai - Rantau - Martapura - Banjarmasin				
		Rencana angkutan barang sentra-sentra produksi untuk komoditas sumberdaya mineral dan komoditas perkebunan pada sebelah barat Pegunungan Meratus	Ruas Batas Kalimantan Tengah di Kabupaten Barito Timur - Kabupaten Tabalong - Kabupaten Hulu Sungai Utara - Kabupaten Hulu Sungai Tengah - Kabupaten Hulu Sungai Selatan -				

			Kabupaten Tapin - Kabupaten Banjar - Kabupaten Tanah Laut				
		Rencana pengembangan Lokasi Stasiun Kereta Api	Desa Mekar Kecamatan Martapura Timur, Desa Simpang Empat Kecamatan Simpang Empat, dan Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut				
IV	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Energi Kelistrikan						
IV.1	Rencana Pusat-Pusat pembangkit Listrik	Penggunaan energi baru dan terbarukan	a. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Ir. Pangeran Mohammad Noor di Kecamatan Aranio; b. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Riam Kiwa di Kecamatan Aranio; c. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU); dan d. Rencana Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)				
IV.2	Rencana Jaringan Prasarana Listrik	Pengembangan jaringan prasarana listrik	a. Mantuil Kecamatan Gambut; b. Cempaka (Kota Banjar Baru); c. Mantuil – Trisakti (Kota Banjarmasin) d. Kabupaten Banjar.				

V	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Telekomunikasi						
V.1	Sistem jaringan kabel	Menunjang fasilitas Telepon (Pengembangan Sentral Telepon Otomat (STO))	Martapura				
V.2	Sistem jaringan nirkabel	Pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS)	Kabupaten Banjar				
VI	Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air						
VI.1	Wilayah Sungai	Wilayah sungai yang terdapat di Kabupaten Banjar adalah WS lintas Provinsi Barito mencakup Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito	Kabupaten Banjar				
VI.2	Prasarana Sumber Daya Air	Pengembangan bendungan untuk penyediaan air baku dan pemeliharaan bendungan	1. Bendungan PLTA Ir. Pangeran Muhammad Noor, Riam Kanan 2. Bendung Karang Intan 3. Bendung Sungkai 4. Bendung Mandiangi 5. Bendung Takuti 6. Rencana Cek Dam Madu Rejo				
VI.3	Cekungan Air Tanah (CAT)		CAT Palangkaraya – Banjarmasin				
VI.4	Jaringan Irigasi	Pengembangan Daerah Irigasi dan Daerah Rawa (Kewenangan Nasional)	Daerah Irigasi (DI) Riam Kanan				
		Pengembangan Daerah Rawa (Kewenangan Provinsi)	Daerah Rawa (DR) Folder Liang, Daerah Rawa (DR) Folder Tambak Hanyar, Daerah Rawa (DR) Antasan Sutun, Daerah Rawa (DR)				

			Antasan Bawah Ringin, Daerah Rawa (DR) Antasan Kiayi, Daerah Rawa (DR) Antasan Tanipah, Daerah Rawa (DR) Tanggul Martapura				
		Pemeliharaan daerah irigasi: 1. Rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; 2. Pengembangan Daerah Irigasi (DI) pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan; dan 3. Membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.	Kabupaten Banjar				
VI.5	Jaringan Air Baku Untuk Air Bersih	a. Pengembangan prasarana jaringan air baku b. Prasarana air baku untuk air minum yang meliputi: 1. Saluran Air Baku	1. Bendungan Riam Kanan 2. Kabupaten Banjar				

		PDAM Intan Banjar 2. Sungai Martapura 3. Air tanah 4. Mata air Pegunungan Meratus 5. Air Gambut c. Rencana pengembangan jaringan sumber air baku mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan air tanah d. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) dipadukan dengan sistem jaringan sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku e. Prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air baku dan instalasi pengolahan air minum dan pembangunan rehabilitasi serta operasi pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air baku untuk air minum					
VI.6	Sistem Pengendalian	a. Pembangunan, rehabilitasi serta operasi	1. Bendungan Riam Kanan Kecamatan				

	Banjir	dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir b. Normalisasi sungai-sungai	Aranio 2. Kabupaten Banjar				
VII	Rencana Pengembangan Sistem Prasarana Pengelolaan Lingkungan						
VII.1	Rencana Sistem Pengelolaan Persampahan	a. Penampungan sementara secara terpusat pada tiap unit-unit lingkungan dan pusat kegiatan pelayanan yang terintegrasi dengan TPS (Tempat Penampungan Sementara) b. TPS tersebar pada setiap desa yang terintegrasi dengan penyediaan sarana dan prasarana transportasi persampahan c. Pengembangan pengolahan sampah menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan oleh masyarakat di sekitar lokasi TPS berbasis sistem 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) dan Sanitary Landfill;	Desa Padang Panjang, Kecamatan Karang Intan				

		dan					
VI.2	Rencana Sistem Jaringan Drainase	a. Sistem drainase primer adalah seluruh jaringan sungai; b. Sistem drainase sekunder di sepanjang kolektor primer dan lokal primer c. Wilayah-wilayah yang merupakan daerah genangan perlu disediakan pompa air yang sesuai dengan luasan yang tergenang	1. Seluruh jaringan sungai; 2. Desa-desa pusat perkotaan dan pada kompleks perumahan				
VI.3	Rencana Sistem Jaringan Air Limbah	a. Penggunaan septik tank dan peresapan air dilakukan dengan memperhatikan desain peresapan b. Kewajiban menyediakan sistem pembuangan air limbah terpusat dan pengorganisasian bagi pengelola kawasan industri dan pusat kegiatan perdagangan kapasitas besar c. Penggunaan sistem pembuangan secara komunal untuk pusat kegiatan fasilitas umum. d. Pengembangan pengolahan air limbah	Kawasan Perkotaan Martapura, bantaran Sungai Martapura, dan lingkungan perumahan di wilayah Kabupaten Banjar				

		dengan menggunakan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan; dan e. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) f. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Terpusat Regional g. Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala kawasan/lingkungan					
VI.4	Rencana Sistem Jaringan Air Minum	a. Pelayanan air minum dengan menggunakan PDAM	Seluruh kecamatan				
		b. Rencana jaringan pipa transmisi, reservoir distribusi, jaringan pipa distribusi dan sambungan pelayanan dan meter air	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan				

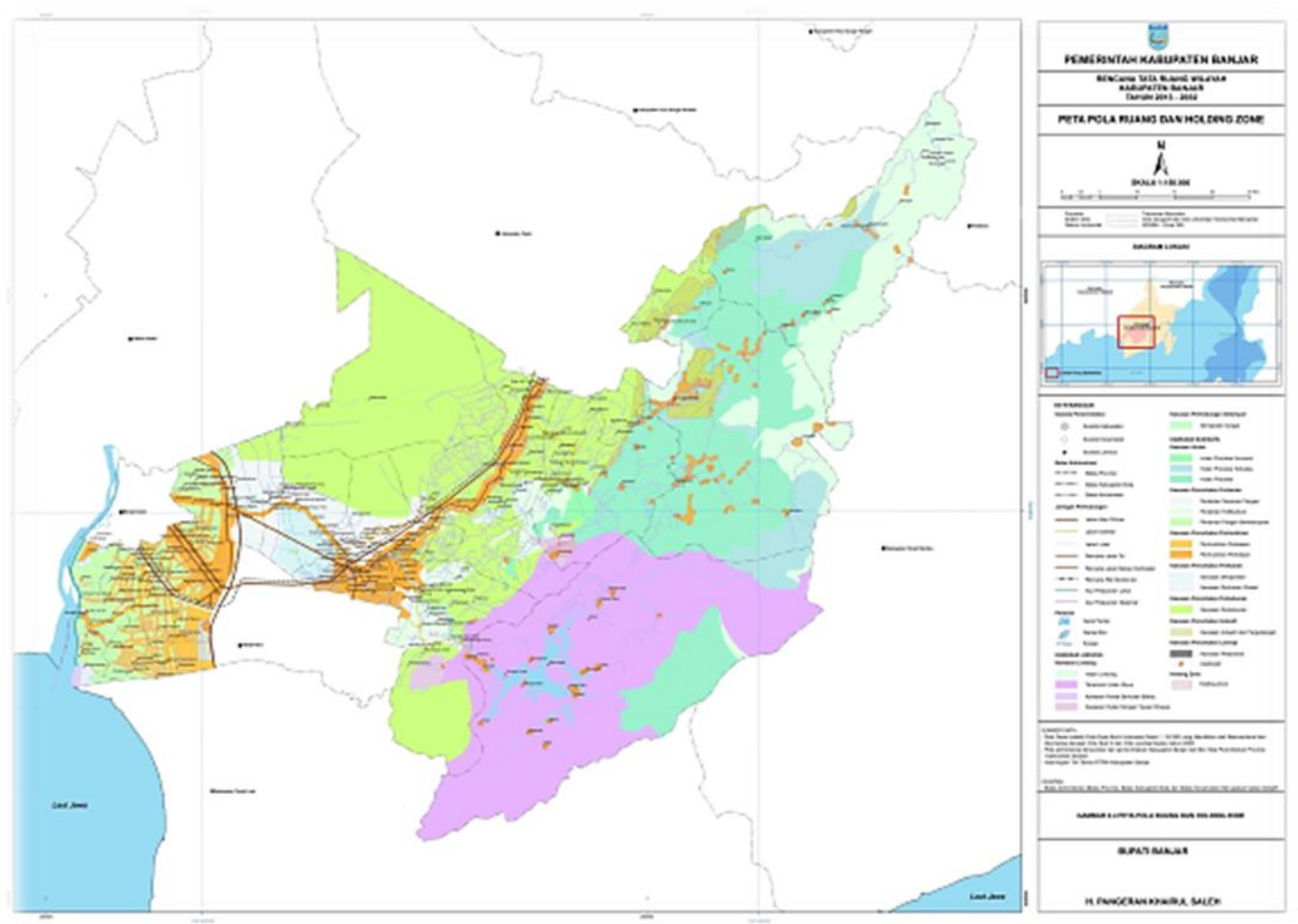
			Pengaron				
VI.5	Rencana Jalur Evakuasi Bencana/Mitigasi Bencana	a. Jalur utama dari lokasi bencana ke ruang terbuka hijau b. Fasilitas umum yang dapat digunakan untuk pengungsian sementara	Setiap Kecamatan				
VI.6	Rencana Proteksi Kebakaran	a. Pengembangan sistem proteksi kebakaran	Kawasan perkampungan di ibukota kabupaten dan pusat kecamatan				
VI.7	Rencana Jaringan Jalan Pejalan Kaki Dan Jaringan Jalur Sepeda	a. Rencana jaringan jalan pejalan kaki (pedestrian) di Kabupaten Banjar terdiri atas: 1) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki 2) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus; 3) Pengembangan jalur jalan pejalan kaki di sisi air berupa jalan inspeksi 4) Rencana penyediaan jalur jalan pejalan kaki akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci sesuai dengan ketentuan	Setiap subpusat pelayanan kota, seluruh jaringan irigasi, dan koridor-koridor jalan				

		yang berlaku. b. Rencana jalur sepeda di Kabupaten Banjar terdiri atas: 1) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda 2) Rencana penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda dengan membuat marka jalan di jalur sepeda.					
VI.8	Rencana Prasarana Lainnya	a. Rencana pengembangan kawasan olah raga terpusat berupa Sport Center; b. Rencana pengembangan pasar induk c. Rencana pengembangan rumah potong hewan (RPH) dan rumah potong unggas (RPU) d. Rencana pengembangan infrastruktur dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan pengembangan wilayah	Kecamatan Martapura; Kecamatan Gambut; Kecamatan Martapura dan Kecamatan Karang Intan				

4.1.2. **Telaah Rencana Pola Ruang**

Pola ruang di Kabupaten Banjar direncanakan terbagi dalam dua kategori pola ruang, yaitu peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang di Kabupaten Banjar dapat dilihat secara jelas pada peta berikut ini:

Gambar 4. 2 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Banjar



Sumber: RTRW Kabupaten Banjar 2013-2032

4.1.2.1. **Rencana Kawasan Lindung**

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Penetapan kawasan lindung Kabupaten Banjar meliputi: kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya; dan Kawasan rawan bencana alam. Penjelasan masing-masing Kawasan lindung dijabarkan sebagai berikut:

a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Resapan air. Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 42.901 (empat puluh dua ribu sembilan ratus satu) hektar. Sementara itu, Kawasan resapan air meliputi kawasan taman hutan raya, kawasan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawasan mata air.

b. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan Perlindungan Setempat terdiri dari Kawasan Sempadan Pantai, Kawasan Sempadan Sungai, Kawasan Sekitar Danau atau Waduk, Kawasan Sekitar Mata Air, Kawasan Ruang Terbuka Hijau; dan Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai. Kawasan Sempadan Pantai berada di sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh. Kawasan Sempadan Pantai memiliki dua ketentuan sebagai berikut: daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; dan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi pantai.

Kawasan Sempadan Sungai terdapat pada sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Karang Intan, Martapura Timur, Martapura, Martapura Barat, dan Sungai Tabuk. Kawasan Sempadan Sungai mempunyai manfaat penting untuk melestarikan fungsi sungai. Kawasan sekitar danau atau waduk terdapat di Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air. Kawasan tersebut

mencakup daratan sepanjang tepian danau/tangkapan air yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik danau/tangkapan air antara 50 (lima puluh) sampai 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Kawasan sekitar mata air tersebar di Kabupaten Banjar. Kawasan ini memiliki dua ketentuan khusus yaitu daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan Wilayah dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter dari mata air. Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Sementara itu, Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai tersebar di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan dengan ketentuan: yaitu kawasan yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi penghijauan sepanjang pantai dan sungai.

c. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya di Kabupaten Banjar terdiri dari tiga kawasan yaitu: Kawasan Taman Hutan Raya, Kawasan Pantai Berhutan Bakau, dan Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan. Kawasan Taman Hutan Raya adalah kawasan Taman Hutan Raya Sultan Adam yang terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron dengan luas kurang lebih 88.394 hektar. Kawasan Pantai Berhutan Bakau terdapat di Kecamatan Aluh-Aluh dengan luas kurang lebih 481 hektar. Sementara itu, Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan terdiri dari beberapa Kawasan yaitu: Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam dengan luas kurang lebih 1.704 hektar; Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dengan luas kurang lebih 3.033 hektar di Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan; Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus; Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong dan Pesayangan; dan Kawasan Keagamaan

yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar sebagai tempat pengembangan pendidikan agama maupun tempat ibadah.

d. Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Banjar terdiri dari empat kawasan yaitu kawasan rawan tanah longsor; kawasan rawan banjir; kawasan rawan kebakaran; dan kawasan angin puting beliung. Kawasan rawan tanah longsor terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang. Kawasan rawan banjir, terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat. Kawasan rawan kebakaran terdapat di Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut. Sementara itu, kawasan angin puting beliung di Kecamatan Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk.

4.1.2.2. Rencana Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan. kawasan budidaya terdiri dari beberapa kawasan, yaitu: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri dan pergudangan; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; dan kawasan peruntukan lainnya. masing-masing kawasan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi terdiri dari tiga kawasan

yaitu: kawasan hutan produksi terbatas, kawasan hutan produksi tetap, dan kawasan hutan produksi dikonversi. Kawasan hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 23.068 hektar. Kawasan hutan produksi tetap terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luasan kurang lebih 75.798 hektar. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdapat di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron dengan luasan kurang lebih 1.821 hektar.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian terdiri dari beberapa kawasan yaitu: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan; dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. kawasan budidaya tanaman pangan tersebar di seluruh kecamatan dalam wilayah kabupaten banjar dengan luas kurang lebih 17.356 hektar.

Kawasan budidaya hortikultura ada dua macam, yaitu tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan. Tanaman sayuran berada di Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura; dan Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron. Sementara itu, tanaman buah-buahan berada di Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur.

Kawasan budidaya perkebunan memiliki komoditas utama karet, sawit dan kawasan tanaman perkebunan lainnya yang tersebar di Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat,

Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan dengan luas kurang lebih 122.859 hektar.

Kawasan budidaya peternakan memiliki beberapa komoditas ternak unggulan meliputi: ternak besar, ternak kecil, ternak unggas, dan Aneka Ternak (Kelinci, Puyuh dan lainnya). Ternak besar terdiri dari: sapi potong tersebar di Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Astambul dan Karang Intan; Sapi perah di Kecamatan Martapura, Mataraman dan Karang Intan; Kerbau di Kecamatan Karang Intan dan Simpang Empat. Ternak kecil terdiri dari kambing dan domba tersebar di Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung Makmur dan Karang Intan.

Ternak Unggas terdiri dari: Ayam Bukan Ras (Buras) tersebar di seluruh kecamatan di Wilayah Daerah; Ayam Ras Pedaging (Broiler) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Mataraman, Astambul, Pengaron dan Sambung Makmur; Ayam Ras Petelur (layer) di Kecamatan Martapura, Karang Intan, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Mataraman, Pengaron, Sungai Tabuk dan Sambung Makmur; dan Itik Pedaging dan Petelur di Kecamatan Aluh-aluh, Gambut, Beruntung Baru, Tatah Makmur, Sungai Tabuk, Astambul, Kertak Hanyar, dan Karang Intan. Sementara itu, aneka ternak (Kelinci, Puyuh, dan lainnya) di seluruh kecamatan di dalam wilayah Daerah.

Kawasan pertanian pangan berkelanjutan Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk, dan Kecamatan Tatah Makmur sesuai dengan potensi dan fungsional yang diperuntukan bagi padi di lahan basah dan kering sebesar kurang lebih 15.828 hektar; dan lahan yang dicadangkan sebagai lahan pertanian

pangan berkelanjutan terdapat di Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Intan.

c. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Banjar direncanakan terdiri dari kawasan peruntukan perikanan tangkap; kawasan peruntukan perikanan budidaya; kawasan industri pengolahan hasil perikanan; dan kawasan konservasi sumber daya perikanan. Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh.

Kawasan peruntukan perikanan budidaya terdiri beberapa kawasan, yaitu: kawasan peruntukan perikanan kolam, kawasan peruntukan perikanan keramba, kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung, dan kawasan peruntukan perikanan tambak, dan kawasan peruntukan perikanan mina padi. kawasan peruntukan perikanan kolam tersebar di Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul. Kawasan peruntukan perikanan keramba dan jaring apung tersebar di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Astambul. Kawasan peruntukan perikanan tambak terdapat di Kecamatan Aluh Aluh; dan kawasan peruntukan perikanan mina padi tersebar di Kecamatan Gambut, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Martapura, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur.

Kawasan industri pengolahan hasil perikanan adalah kawasan minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup

Kecamatan Martapura dan Kecamatan Martapura Barat seluas kurang lebih 5.091 hektar. Sementara itu, kawasan konservasi sumber daya perikanan adalah kawasan sumber daya perikanan yang berada di seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah, yang berpotensi untuk dijaga kelestarian sumber daya perikanan yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

d. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan terdiri dari dua kawasan yaitu: kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara, dan batuan; dan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan dan batubara terdiri dari beberapa kawasan yaitu: Batubara terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung; Mineral logam terdapat di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Sungai Pinang, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan; Mineral Bukan Logam, terdapat di Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang; dan Batuan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar. Sementara itu, kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi terdapat di Kecamatan Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang Empat.

e. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebesar kurang lebih 1.631 hektar terdiri dari kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan, kawasan peruntukan industri sedang, dan kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan terdiri dari lima macam yaitu: Industri air minum dalam kemasan di Kecamatan Karang Intan, Industri *Rubber Sheet Smoked* (RSS) di Kecamatan

Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang; industri barang dari semen di Kecamatan Astambul; industri lampit rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul); dan industri perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh.

Kawasan peruntukan industri sedang di Kabupaten Banjar terdiri dari dua belas macam yaitu: industri sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut; industri permata/batu mulia di Desa Keramat Kecamatan Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; industri emas dan perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; industri tahu dan tempe di Kecamatan Kota Martapura; Gudang Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk; Industri makanan dan minuman di Martapura; Industri batu bata di Kecamatan Sungai Tabuk; Industri bokor/lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan; Industri percetakan di Kecamatan Martapura; Industri minyak atsiri di Kecamatan Gambut; Industri moulding, meubel, kusen, daun pintu dan jendela di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura; Industri pembungkusan teh di Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura; dan Industri jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk.

Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga terdiri dari sembilan kawasan yaitu: Industri kerajinan airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur; Industri manik di Desa Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Industri batu aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura; Industri sulaman sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura

Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Timur; Industri makanan dan minuman (agro) di Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk; Industri barang dari semen di Kecamatan Martapura; Industri kosmetik di Kecamatan Kertak Hanyar; Industri kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah Makmur; dan Industri anyaman purun/atap rumbia di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur.

f. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata terdiri dari kawasan peruntukan wisata alam; kawasan peruntukan wisata belanja; dan kawasan peruntukan wisata budaya dan cagar budaya. Kawasan peruntukan wisata alam terdiri dari: Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron; Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio; Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio; Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang; Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang; Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan; Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan; Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio; Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor di Kecamatan Aranio; Pulau Pinus di Kecamatan Aranio; Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan; Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan; Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan; Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh; Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul; Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; dan Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman.

Kawasan peruntukan pariwisata belanja terdiri dari Pusat

Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai Tradisional dan penggosokan Intan Modern di Martapura. Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya terdiri dari beberapa Kawasan diantaranya: Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan; Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura; Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur; Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut; Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk; Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul; Makam Syech Abdullah Lok Gabang di Kecamatan Astambul; Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura; Makam Guru Sekumpul di Martapura; Makam Aminullah di Martapura; Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura; Makam Datu Panjang di Martapura; Makam Datu Ma’ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat; Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur; Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk; Makam Sultan Adam di Martapura; Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura; Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur; Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan; Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul; Makam Sultan Tahlilullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; Makam Tuan Guru H. Anang Sya’rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur; Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan Simpang Empat; Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul; Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; Mesjid Al Karomah Martapura di

Martapura; Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur; Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan; Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.

g. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Banjar terdiri dari kawasan peruntukan permukiman perkotaan dan Kawasan peruntukan permukiman perdesaan. Kawasan peruntukan permukiman perkotaan mempunyai kegiatan utama non pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, industri, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman perkotaan di wilayah Kabupaten Banjar tersebar di Kecamatan Aluh-aluh, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil yang luasnya sekitar 21.041 hektar.

Kawasan peruntukan permukiman perdesaan merupakan kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa sosial, dan kegiatan ekonomi. Pengembangan kawasan permukiman perdesaan dan permukiman transmigrasi di wilayah Kabupaten Banjar meliputi Kecamatan AluhAluh, Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Simpang Empat, Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung sebesar kurang lebih 20.811 hektar.

h. Kawasan Peruntukan Lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Banjar terdiri dari kawasan peruntukan pesisir dan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan. Kawasan peruntukan pesisir dikategorikan menjadi dua macam yaitu: zona konservasi dan zona budidaya perikanan. Zona konservasi luasnya kurang lebih 481 hektar yang meliputi konservasi perairan; dan mitigasi bencana. Zona budidaya perikanan seluas kurang lebih 713 (tujuh ratus tiga belas) hektar yang meliputi: Perikanan budidaya air laut; kawasan permukiman desa nelayan; Industri pengolahan hasil perikanan; Pelestarian hutan mangrove; Alur pelayaran meliputi pelayaran nasional dan pelayaran lokal; dan Kawasan PPI (Pelabuhan Pendaratan Ikan). Sementara itu, kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kabupaten Banjar terdiri beberapa lokasi diantaranya: Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura, Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah, Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura, dan Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.

Tabel 4. 4 Hasil Telaahan Pola Ruang Kabupaten Banjar

No	Rencana Pola Ruang	Rencana Pentahapan Pemanfaatan Pola Ruang sesuai RTRW					
		Arah Pemanfaatan Ruang/Indikasi Program	Lokasi	Waktu pelaksanaan			
				Lima Tahun ke I	Lima Tahun ke II	Lima Tahun ke III	Lima tahun ke IV
I	Rencana kawasan lindung						
I.1	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya	Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Gambut, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan				
		Kawasan resapan air	Kawasan taman hutan raya, kawasan lindung di Pegunungan Meratus termasuk kawasan lindung geologi sekitar kawasan mata air.				
I.2	Kawasan Perlindungan Setempat	Kawasan Sempadan Pantai	sepanjang tepian pantai di Kecamatan Aluh-Aluh				
		Kawasan Sempadan Sungai	sepanjang sungai Martapura, Sungai Riam Kanan dan Sungai Riam Kiwa di Kecamatan Aranio, Pengaron, Sungai Pinang, Paramasan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Karang Intan,				

			Martapura Timur, Martapura, Martapura Barat, Sungai Tabuk				
		Kawasan Sekitar Danau atau Waduk	Kecamatan Karang Intan dan Kecamatan Aranio dengan sempadan danau/tangkapan air				
		Kawasan Sekitar Mata Air	tersebar di Kabupaten Banjar				
		Kawasan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar				
		Jalur Hijau Sepanjang Sungai dan Pantai	di seluruh Ibukota Kabupaten dan pusat kecamatan				
I.3	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Kawasan Taman Hutan Raya	Taman Hutan Raya Sultan Adam terdapat di Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Sungai Pinang, Pengaron				
		Kawasan Pantai Berhutan Bakau	Kecamatan Aluh-Aluh d				
		Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan	a. Kawasan Hutan Pendidikan di Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam; dan b. Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Kecamatan Pengaron, Kecamatan Mataraman dan Kecamatan Karang Intan.				

			c. Kawasan Cagar Budaya Suku Dayak Bukit di Kawasan Pegunungan Meratus; d. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Telok Selong; e. Kawasan Cagar Budaya Banjar di Desa Pesayangan; f. Kawasan Keagamaan yang tersebar di seluruh Kabupaten Banjar				
I.4	Kawasan Rawan Bencana Alam	Kawasan rawan tanah longsor	Kecamatan Aranio, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Paramasan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur dan Kecamatan Sungai Pinang				
		Kawasan rawan banjir	ecamatan Karang Intan, Kecamatan Astambul, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Martapura Barat.				
		Kawasan rawan kebakaran	Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Astambul, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Kertak Hanyar dan Kecamatan Gambut.				

		Kawasan angin puting beliung	Kecamatan Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Mataraman, Martapura Barat, Martapura Timur dan Sungai Tabuk.				
II	Kawasan Budidaya						
II.1	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Aranio, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan				
		Kawasan hutan produksi tetap	Kecamatan Aranio, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan				
		Kawasan hutan produksi	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, dan Kecamatan Pengaron				
II.2	Kawasan Peruntukan Pertanian	Kawasan budidaya tanaman pangan	seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Banjar				
		Kawasan budidaya hortikultura (tanaman sayuran)	Kecamatan Mataraman, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura				

			Timur dan Kecamatan Martapura; dan Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron				
		Kawasan budidaya hortikultura (buah-buahan)	Kecamatan Astambul, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Sambung Makmur.				
		Kawasan budidaya perkebunan	Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Astambul, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kecamatan Simpang Empat, Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Pengaron, Kecamatan Aranio, Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Sungai Pinang, Kecamatan Telaga Bauntung, dan Kecamatan Paramasan				
		Kawasan budidaya peternakan: - ternak besar	Kecamatan Sungai Pinang, Pengaron, Sambung Makmur,				

			Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Astambul dan Karang Intan, Kecamatan Martapura.				
		Kawasan budidaya peternakan: - ternak kecil	Kecamatan Martapura, Mataraman, Astambul, Pengaron, Sambung Makmur dan Karang Intan.				
		Kawasan budidaya peternakan: - ternak unggas - aneka ternak	seluruh kecamatan di Wilayah Daerah,				
		Kawasan pertanian pangan berkelanjutan	Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Gambut, Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Beruntung Baru, Kecamatan Sungai Tabuk dan Kecamatan Tatah Makmur				
II.3	Kawasan Peruntukan Perikanan	Kawasan budidaya peruntukan perikanan tangkap	Kecamatan Aranio, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Timur, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Simpang Empat dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kecamatan Aluh-Aluh.				

		Kawasan peruntukan perikanan budidaya	Kecamatan Karang Intan, Kecamatan Martapura, Kecamatan Martapura Barat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Astambul, Kecamatan Aranio, Kecamatan Aluh Aluh, Kecamatan Beruntung Baru dan Kecamatan Tatah Makmur.				
		Kawasan industri pengolahan hasil perikanan	kawasan minapolitan dengan wilayah pengembangannya mencakup Martapura dan Kecamatan Martapura Barat				
		kawasan konservasi sumber daya perikanan	seluruh kecamatan dalam wilayah Daerah				
II.4	Kawasan Peruntukan Pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan mineral logam, mineral bukan logam, batubara dan batuan dan batubara	Batubara: Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Astambul, Paramasan, Mataraman, Sungai Pinang, Sambung Makmur dan Telaga Bauntung Mineral logam: di Kecamatan Karang Intan, Pengaron, Sungai				

			Pinang, Cintapuri Darussalam, Simpang Empat, Mataraman, Aranio, Astambul dan Paramasan Mineral Bukan Logam: di Kecamatan Simpang Empat, Cintapuri Darussalam, Mataraman, Astambul, Pengaron, Aranio dan Sungai Pinang Batuan terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Banjar				
		Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi	Kecamatan Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Gambut, Astambul, Mataraman, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura, Cintapuri Darussalam dan Simpang Empat.				
II.5	Kawasan Peruntukan Industri Dan Pergudangan	Kawasan peruntukan industri besar dan pergudangan	a. Industri Air Minum Dalam Kemasan di Kecamatan Karang Intan; b. Industri <i>Rubber Sheet Smoked</i> (RSS) di Kecamatan Mataraman, Karang Intan, Astambul, Simpang Empat, Pengaron dan Sungai Pinang; c. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Astambul;				

			d. Industri Lampit Rotan di Kecamatan Martapura (Sekumpul); dan e. Industri Perbengkelan di Kecamatan Gambut, Kertak Hanyar dan Astambul, Kecamatan Tatah Makmur, Aluh-aluh.				
		Kawasan peruntukan industri sedang	a. Industri Sasirangan di Kecamatan Kertak Hanyar dan Gambut; b. Industri Permata/Batu Mulia di Desa Keramat Kecamatan Pasayangan, Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur dan Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; c. Industri Emas dan Perak di Desa Keramat, Desa Melayu, Desa Keramat Baru, Desa Dalam Pagar, Desa Pekauman di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; d. Industri Tahu dan Tempe di Kecamatan Kota Martapura; Gudang Hirang di Kecamatan Sungai Tabuk;				

			e. Industri Makanan dan Minuman di Martapura; f. Industri Batu Bata di Kecamatan Sungai Tabuk; g. Industri Bokor/Lum di Kecamatan Mataraman, Astambul, Pengaron, Sungai Pinang, Sambung Makmur, Simpang Empat dan Karang Intan; h. Industri Percetakan di Kecamatan Martapura; i. Industri Minyak Atsiri di Kecamatan Gambut; j. Industri Moulding, Meubel, Kusen, Daun Pintu dan Jendela di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, dan Martapura; k. Industri Pembungkusan Teh di Kecamatan Kertak Hanyar, Martapura; l. Industri Jukung di Kecamatan Aluh-Aluh, Sungai Tabuk.				
		Kawasan peruntukan industri kecil/rumah tangga	a. Industri Kerajinan Airguci di Desa Melayu, Desa Melayu Ilir, Desa Melayu Ulu, Desa Mekar di Kecamatan Martapura Timur; b. Industri Manik di Desa				

			Pekauman, Desa Keramat, Desa Sungai Batang, Desa Sungai Rangas di Kecamatan Martapura Timur, Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat c. Industri Batu Aji di Desa Keraton Kecamatan Martapura; d. Industri Sulaman Sugul di Desa Pesayangan Kecamatan Martapura, Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Barat, Desa Pesayangan Selatan, Desa Pesayangan Barat, Desa Dalam Pagar, Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Timur; e. Industri Makanan dan Minuman (Agro) di Kecamatan Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Gambut, Aluh-Aluh, Kertak Hanyar, Tatah Makmur dan Sungai Tabuk; f. Industri Barang dari Semen di Kecamatan Martapura; g. Industri Kosmetik di				
--	--	--	--	--	--	--	--

			Kecamatan Kertak Hanyar; h. Industri Kerajinan dari Rotan di Kecamatan Aluh-Aluh, Tatah Makmur; dan i. Industri Anyaman Purun/Atap Rumbia di Kecamatan Martapura, Sungai Tabuk, Aluh-Aluh dan Martapura Timur.				
II.6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	Kawasan peruntukan wisata alam	a. Air Terjun Batu Lumut di Desa Maniapun Kecamatan Pengaron; b. Air Terjun Lembah Kahung di Kecamatan Aranio; c. Air Terjun Panayar di Kecamatan Aranio; d. Air Terjun Riam Paku Parasung di Kecamatan Sungai Pinang; e. Air Terjun Limpahu di Kecamatan Sungai Pinang; f. Air Terjun Dusun Niwak di Kecamatan Paramasan; g. Sungai Mandin Perahu Dusun Mendukuan di Kecamatan Paramasan; h. Arus Alam Sungai Kambang dan Sungai Aranio di Kecamatan Aranio; i. Kawasan Hutan dan Waduk PLTA Ir. P. M. Noor				

		di Kecamatan Aranio; j. Pulau Pinus di Kecamatan Aranio; k. Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Adam di Kecamatan Aranio dan Gunung Pamaton Desa Kiram di Kecamatan Karang Intan; l. Waduk Irigasi dan Kawasan Agrowisata Bincau di Martapura/Kecamatan Karang Intan; m. Kolam Belanda di Kecamatan Karang Intan; n. Kawasan Wisata Bahari di Kecamatan Aluh-Aluh; o. Agro minapolitan di Desa Tungkaran Kecamatan Astambul; p. Air Terjun dan Goa (terowongan) tambang batubara/Benteng Desa Pengaron Kecamatan Pengaron; q. Wisata alam/Historis Kebun Danau Salak di Kecamatan Astambul dan Mataraman.				
	Kawasan peruntukan pariwisata belanja	a. Pusat Pertokoan Permata “Cahaya Bumi Selamat” dan Pasar Wadai				

			Tradisional di Martapura; b. Penggosokan Intan Modern di Martapura.				
		Kawasan peruntukan pariwisata budaya dan cagar budaya	a. Rumah Balai Adat di Kecamatan Paramasan; b. Rumah Tradisional Banjar di Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; c. Rumah Tradisional Banjar di Pasayangan di Martapura; d. Kerajinan Air Guci di Kecamatan Martapura Timur; e. Kerajinan Sasirangan di Kecamatan Gambut; f. Pasar Terapung di Desa Lok Baintan dan Agrowisata Sungai Madang di Kecamatan Sungai Tabuk; g. Kawasan Keraton Kesultanan Banjar di Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura dan di Desa Telok Selong di Kecamatan Martapura Barat; h. Makam Syech Muhammad Arsyad Al Banjari di Kecamatan Astambul; i. Makam Syech Abdullah				

			Lok Gabang di Kecamatan Astambul; j. Makam Syech Abdul Hamid Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; k. Makam Keluarga Besar K.H. Badaruddin di Martapura; l. Makam Guru Sekumpul di Martapura; m. Makam Aminullah di Martapura; n. Makam Datu Fatimah dan Abdullah Bugis di Martapura; o. Makam Datu Panjang di Martapura; p. Makam Datu Ma'ad bin Ali (Datu Panjang Rambut) di Kecamatan Martapura Barat; q. Makam K.H. Kasful Anwar di Kecamatan Martapura Timur; r. Makam Menteri Empat di Kecamatan Sungai Tabuk; s. Makam Sultan Adam di Martapura; t. Makam Tamjidillah di Kecamatan Martapura Timur;				
--	--	--	---	--	--	--	--

			u. Makam Sultan Muda Abdurrahman di Martapura; v. Makam Sultan Inayatullah di Desa Dalam Pagar Kecamatan Martapura Timur; w. Makam Sultan Mustainbillah di Desa Sungai Kitano Kecamatan Martapura Timur; x. Makam Sultan Sulaiman Rahmatullah di Kecamatan Karang Intan; y. Makam Syech Abdul Qodir di Kecamatan Astambul; z. Makam Sultan Tahlillullah di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; aa. Makam Sultan Saidillah (Ratu Anom) di Kelurahan Keraton Kecamatan Martapura; bb. Makam Tuan Guru H. Anang Sya'rani di Desa Melayu Kecamatan Martapura Timur; cc. Makam Datu Bangkala di Desa Cinta Puri Kecamatan SimpanG Empat;				
--	--	--	--	--	--	--	--

			dd. Masjid Kelampaian di Kecamatan Astambul; ee. Mesjid Datu Abulung Desa Sungai Batang di Kecamatan Martapura Barat; ff. Mesjid Al Karomah Martapura di Martapura; gg. Rumah Banjar Bubungan Tinggi milik Tuan Guru H. Kasyful Anwar di Desa Melayu Tengah Kecamatan Martapura Timur; hh. Prasasti Gunung Pamaton di Kecamatan Karang Intan; ii. Tugu Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan (Alam Roh) di Desa Paku Alam Kecamatan Sungai Tabuk.				
II.8	Kawasan Peruntukan Permukiman	Kawasan peruntukan permukiman perkotaan	kecamatan Aluh-aluh, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Karang Intan, Simpang Empat, Mataraman, Astambul, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Desa Kuin Besar, Desa Kuin Kecil				
		Kawasan peruntukan	Kecamatan AluhAluh,				

		permukiman perdesaan	Tatah Makmur, Beruntung Baru, Gambut, Kertak Hanyar, Martapura Barat, Martapura Timur, Mataraman, Simpang Empat, Cintapuri Darusalam, Astambul, Karang Intan, Aranio, Sungai Tabuk, Sungai Pinang, Paramasan, Telaga Bauntung, Pengaron, Sambung Makmur, Mataraman dan Telaga Bauntung				
II.9	Kawasan Peruntukan Lainnya	kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan	a. Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 1006 di Martapura; b. Markas Komando Rayon Militer (Makoramil) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah; c. Markas Polisi Resort (Mapolres) di Martapura; d. Markas Polisi Sektor (Mapolsek) yang tersebar di seluruh wilayah Daerah.				

4.2. Penelaahan KLHS

Pelaksanaan pembangunan di semua daerah, tidak terkecuali Kabupaten Banjar harus memperhatikan aspek lingkungan. Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Pasal 15 Ayat 1 pada UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Integrasi pembangunan berkelanjutan tersebut dapat dijalankan dengan pengintegrasian KLHS ke dalam dokumen RPJMD.

Seiring dengan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Banjar, dokumen KLHS juga disesuaikan dengan perubahan tersebut. Pentingnya dokumen KLHS dalam penyusunan awal RPJMD adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang termuat di dalam RPJMD Kabupaten Banjar khususnya Rencana Teknokratik dan Visi Misi Bupati yang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Dokumen KLHS dalam rancangan perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 meliputi (a) penyusunan profil kondisi umum daerah dan daya dukung lingkungan, (b) analisis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) serta analisis peran stakeholders dalam perwujudan TPB, (c) analisis isu pembangunan berkelanjutan, (d) proyeksi target pembangunan berkelanjutan berbasis daya dukung lingkungan, serta perumusan rekomendasi penyempurnaan pencapaian TPB, (e) peningkatan penjaminan kualitas,

pendokumentasian, dan validasi KLHS RPJMD, (f) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan akhir RPJMD.

Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanatkan bahwa pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD dilakukan pada saat penyusunan rancangan awal RPJMD. Pemanfaatan dokumen KLHS dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Banjar digunakan untuk mempertajam penyusunan (a) gambaran umum kondisi daerah; (b) identifikasi dan perumusan isu Pembangunan Berkelanjutan; (c) tujuan pembangunan daerah; (d) sasaran strategis daerah.

Hasil analisis pembangunan berkelanjutan dilihat dari sisi dimensi meliputi dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dan dimensi kelembagaan. Adapun persoalan yang dihadapi oleh masing-masing dimensi berdasarkan TBP, adalah sebagai berikut; (1) dimensi sosial berdasarkan TBP memiliki persoalan terkait ada beberapa target pada tujuannya belum dikaji dan masih banyaknya data-data di Kabupaten Banjar yang belum sepenuhnya mendukung capaian indikator TPB pada dimensi sosial; (2) dimensi ekonomi berdasarkan TBP memiliki persoalan pada tingkat pencapaian tujuannya masih menuai kendala, yaitu belum sepenuhnya data yang dimiliki mendukung capaian TBP pada dimensi ekonomi karena masih terdapat data yang kosong; (3) dimensi lingkungan berdasarkan TBP memiliki persoalan pada tingkat capaian tujuannya yang belum optimal karena masih sedikit program-program yang mendukungnya; dan (4) dimensi kelembagaan berdasarkan TBP menunjukkan meskipun program-program terkait dimensi tersebut sudah mendukung capaian TBP pada dimensi kelembagaan, namun ada beberapa tujuan yang datanya masih kosong.

Perumusan skenario dan rekomendasi pembangunan berkelanjutan juga dilihat dari sisi dimensi, meliputi; (1) dimensi

sosial menunjukkan bahwa penyediaan pangan Kalimantan Selatan termasuk ke dalam wilayah yang memiliki potensi pangan tinggi dan sangat tinggi. (2) dimensi ekonomi fokus pada isu prioritas yang menjadi program unggulan bupati dan isu prioritas. (3) dimensi lingkungan fokus pada mempertahankan daya dukung air bersih, perlindungan bencana, dan biodiversitas. (4) dimensi kelembagaan meliputi tiga subdimensi yaitu pelayanan publik, kelembagaan, dan kemitraan.

4.3. Penelaahan RPJPD

Penekanan tahapan pembangunan lima tahunan di Provinsi Kalimantan Selatan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Tahapan pembangunan Kalimantan Selatan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

4.2.1.1. Arah Umum

a. Bidang Sumberdaya Manusia dan Sosial-Budaya-Agama

Sumberdaya manusia merupakan faktor utama dan dominan dalam pembangunan suatu daerah dalam rangka peningkatan kemakmuran masyarakat. Kondisi internal dan eksternal dalam pembangunan sumberdaya manusia semakin bertambah kompleks sehingga diperlukan kebijakan dan strategi yang lebih terarah. Adapun pembangunan diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan pendidikan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong pemerataan akses pendidikan, penuntasan wajib belajar 12 tahun, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pengembangan kurikulum, pengembangan pola pikir

penelitian, peningkatan kualitas manajemen pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan pendidik.

- 2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumberdaya kesehatan disertai distribusi SDM kesehatan yang merata, pengembangan sistem jaminan kesehatan, pengembangan sistem pencegahan dan pemberantasan wabah penyakit, penurunan fertilitas dan angka kematian ibu, serta pembudayaan pola hidup sehat masyarakat.
- 3) Mengembangkan kehidupan sosial, budaya, dan beragama sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia dengan berbagai kebijakan yang mendorong pengembangan dan penguatan kepekaan sosial, pengembangan sistem informasi dan komunikasi, penguatan wawasan kebangsaan, pengembangan pemasaran pariwisata, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan lansia, peningkatan kualitas pemuda, penanggulangan bencana alam dan konflik sosial, menumbuhkan rasa cinta tanah air, peningkatan pemahaman dan implementasi agama dalam kehidupan bermasyarakat, serta menjaga kerukunan antar dan intra umat beragama.

b. Bidang ekonomi

Dalam bidang ekonomi, pembangunan diarahkan untuk mengembangkan industri dan perdagangan yang berbasis pada potensi sumber daya manusia dan potensi agraris dengan dukungan transportasi yang kuat. Dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang tangguh dan fondasi yang kokoh serta mampu memberikan kesejahteraan pada masyarakat secara berkeadilan, maka diperlukan strategi dan kebijakan ekonomi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi produktivitas ekonomi dan nilai tambah produksi, peningkatan sistem informasi penanaman modal, penganekaragaman produk industri, pengembangan kerjasama strategis, dan pengembangan riset.
- 2) Terciptanya sistem distribusi yang efisien berdasarkan untuk perluasan akses terhadap sumber ekonomi, perluasan kesempatan memiliki usaha, pengembangan sistem tata niaga yang kondusif, penciptaan iklim persaingan yang sehat, perlindungan perkembangan UKM, dan pengembangan sistem dan jaringan transportasi.
- 3) Terwujudnya struktur ekonomi industrialis yang diiringi oleh perdagangan, jasa, dan transportasi.
- 4) Terwujudnya pertanian berkelanjutan yang didasarkan pada penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup sumberdaya pertanian, penjaminan bagi perluasan lahan pertanian, penjaminan ketahanan pangan, pengolahan hasil kebun lebih lanjut, pengembangan sentra-sentra agribisnis, dan reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk.
- 5) Terwujudnya pemanfaatan secara optimal potensi perikanan dan kelautan untuk mendorong penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup sumberdaya ikan, revitalisasi peraturan tentang penangkapan ikan dan budidaya ikan, dan pemanfaatan sumberdaya ikan, serta diversifikasi produk perikanan dan kelautan bagi industri dan perdagangan.
- 6) Terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa hasil hutan secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas.
- 7) Optimalisasi sumberdaya alam untuk mendorong pengembangan agribisnis modern, pengembangan pola kemitraan dan pola produksi, pengembangan

sumberdaya energy alternatif, dan pengembangan sumberdaya mineral.

- 8) Berkembangnya pengusaha daerah untuk mendorong pengembangan UMKM dan BUMD yang professional, pengembangan koperasi syariah rakyat, prioritas keikutsertaan pengusaha daerah dalam kegiatan pembangunan dan dalam kepemilikan asset daerah.
- 9) Tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan untuk mendorong pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi, pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, penurunan jumlah penduduk miskin, dan penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri, serta pengembangan indtitusi forml zakat yang profesinal.

c. Bidang Prasarana dan Sarana

Secara keseluruhan pembangunan prasarana dan sarana ini diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi melalui peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan publik melalui :

- 1) Terwujudnya transportasi yang berkualitas untuk mendorong pemeliharaan prasarana transportasi secara berkala, pembangunan prasarana transportasi yang efektif dan efisien serta melayani seluruh penjuru wiayah, pengembangan sistem transportasi untuk angkutan hasil pertambangan dan bumi, serta partisipasi swasta dalam pengelolaan dan pemeliharaan transportasi.
- 2) Penyediaan air minum dengan kebijakan untuk mendorong peningkatan cakupan pelayanan air minum, terpeliharanya sumber air baku, serta pemelihaaran dan peningkatan instalasi pengolahan air minum.
- 3) Terwujudnya penyediaan sarana dan prasarana listrik untuk mendorong peningkatan kapasitas pelayanan listrik sampai ke pelosok wilayah, partisipasi swasta dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat,

pemanfaatan sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan lebih ekonomis, serta pengembangan sistem penyediaan dan pemeliharaan yang berkala.

- 4) Terwujudnya sarana prasarana pendidikan yang merata serta dengan kualitas yang terjaga dan terpelihara.
- 5) Terwujudnya sarana prasarana kesehatan yang merata, kualitas yang terjaga dan terpelihara, serta peran serta swasta dalam penyediaan fasilitas kesehatan.
- 6) Terwujudnya pengembangan telematika untuk mendorong peningkatan cakupan pelayanan telekomunikasi dan informasi yang merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang baik, serta peran serta swasta dalam penyediaannya.
- 7) Pengembangan perumahan dan permukiman untuk mendorong terwujudnya perumahan dan permukiman yang responsif terhadap perubahan alam, dengan kondisi yang sederhana dan layak pakai yang dapat mencakup seluruh kalangan masyarakat, serta melibatkan peran swasta.
- 8) Pengembangan fasilitas perkantoran, fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai kebutuhan daerah dan mengikuti perkembangan teknologi, dan pemeliharaan secara berkala,

d. Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Sumberdaya alam dan lingkungan hidup merupakan modal pembangunan yang semakin menuntut perhatian yang besar dalam pengelolaannya. Kekeliruan pengelolaan dimasa lampau bagi Provinsi Kalsel menjadi pelajaran untuk melakukan perbaikan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup agar memberi manfaat bagi pembangunan berkelanjutan. Pembangunan bidang pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan dalam 20 tahun ke depan dalam rangka mendorong pengelolaan SDA secara efisien untuk; (1) menjamin keberlanjutan pembangunan dan menjaga keseimbangan lingkungan diarahkan untuk

terjaminnya ketersediaan sumberdaya berkelanjutan, (2) terwujudnya kelestarian fungsi Daerah Aliran Sungai (DAS), (3) terwujudnya sistem manajemen bencana alam, (4) terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, (5) terwujudnya peningkatan kapasitas pengelolaan SDA dan lingkungan hidup.

e. Bidang Politik, Pemerintahan, dan Hukum

Pembangunan bidang politik, dan hukum diadakan untuk mendorong terwujudnya *good local governance* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berdasarkan pada 4 (empat) prinsip, yaitu prinsip kepastian hukum, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas dan prinsip partisipasi.

f. Bidang Penataan Ruang

Kegiatan penataan ruang diarahkan untuk mampu mengarahkan kegiatan yang memerlukan ruang yang serasi, konsisten, dan berkelanjutan dengan tahapan-tahapan per 5 tahunan.

4.4. Penelaahan RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai pedoman penyusunan perencanaan jangka menengah daerah. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 terdapat beberapa masalah pokok antara lain: (1) merosotnya kewibawaan negara; (2) melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; (3) merebaknya intoleransi dan krisis kepribadian bangsa. Selanjutnya, secara lebih terperinci RPJMN tahun 2015-2019 telah menguraikan beberapa tantangan utama pembangunan yang meliputi:

1. Peningkatan stabilitas dan keamanan negara, serta pembangunan tata kelola untuk menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien, dan pemberantasan korupsi
2. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, percepatan pemerataan dan keadilan, serta keberlanjutan pembangunan
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia, pengurangan kesenjangan antar wilayah, dan percepatan pembangunan kelautan.

Tantangan lain yang menjadi permasalahan nasional adalah kondisi lingkungan strategi, yang diuraikan sebagai berikut:

4.3.1. Geo-Ekonomi

Aspek geo-ekonomi dalam konteks ini menunjukkan berbagai tantangan sekaligus potensi pemanfaatan. Tantangan dan peluang tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Proses pemulihan ekonomi global diperkirakan akan berlangsung moderat;
- b. Pusat ekonomi dunia ke depan diperkirakan akan bergeser terutama dari kawasan Eropa-Amerika ke kawasan Asia;
- c. Tren perdagangan global ke depan tidak saja dipengaruhi oleh peranan perdagangan barang;
- d. Harga komoditas secara umum diperkirakan menurun, namun harga manufaktur dalam tren meningkat;
- e. Hambatan non-tarif di negara tujuan ekspor meningkat;
- f. Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 yang akan dimulai tanggal 31 Desember 2015.
- g. Pergeseran fenomena kerjasama ekonomi ke arah plurilateral dan mega blok.

4.3.2. Geo – Politik

4.3.2.1. Konstelasi Geo – Politik;

Kondisi geografi Indonesia yang terbuka menjadi peluang bagi negara lain masuk dan melakukan aktivitasnya di wilayah Indonesia dengan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Pencurian ikan, perompakan, penyelundupan, peredaran

narkotika, perdagangan manusia, eksploitasi ilegal sumber daya alam seperti kayu, produk kayu dan kertas merupakan bentuk-bentuk ancaman terhadap kehidupan masyarakat dan berdampak pula pada kerugian ekonomi.

4.3.2.2. Lingkungan Geo – Politik Regional;

Dengan pergeseran gravitasi geo-strategi dunia ke Asia Pasifik, kawasan ini menjadi pengendali kunci politik global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Stabilitas dan keamanan kawasan perlu dipelihara agar dapat melaksanakan pembangunan dengan baik tanpa gangguan. Sekalipun tidak terlibat secara langsung, Indonesia perlu terus mengantisipasi perkembangan konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS).

4.3.2.3. Lingkungan Strategis Nasional.

Indonesia menghadapi suatu lingkungan strategis yang akan mempengaruhi eksistensi demo-krasi dan kemajuan Indonesia. Sepanjang sejarah negara ini, Indonesia menghadapi fakta bahwa kebhinekaan bangsa dari segi geografis, etnis, kebudayaan, agama telah menjadi modalitas dan unsur-unsur penguat bangunan bangsa Indonesia. Tantangan ke depan adalah menguatkan dan memantapkan Pancasila sebagai ideologi yang dapat menjamin semua kelompok yang ada di Indonesia, dengan mengutamakan nilai-nilai toleransi dan non-diskriminasi. Konflik-konflik vertikal dan horizontal yang berdi-mensi kekerasan harus dicegah secara serius apabila Indonesia ingin melakukan konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan.

4.3.3. Bonus Demografi

Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati ‘bonus demografi’, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya

suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*).

Selain tantangan pembangunan, RPJMN Tahun 2015-2019 memuat visi nasional, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.

Dalam mewujudkan misi tersebut, terdapat delapan misi dalam RPJMN Tahun 2015- 2019 meliputi:

- a. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- b. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- c. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- e. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- f. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- g. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- h. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Sebagai wujud dukungan dan sinkronisasi perencanaan, maka perencanaan pembangunan Kabupaten Banjar harus sinergis dan selaras mendukung pencapaian visi dan misi nasional. Disamping itu, RPJMN tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Banjar antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM
- b. Peningkatan kapasitas pengawasan
- c. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat

Strategi tersebut merupakan strategi umum yang diamanatkan oleh RPJMN tahun 2015-2019. Adapun strategi yang akan disusun dalam RPJMD Kabupaten Banjar periode ini

merupakan strategi yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks Kabupaten Banjar.

4.5. Penelaahan RPJMD Daerah Lain

Perencanaan pembangunan daerah tidak hanya melihat ke depan (*vision based*) dan ke belakang (*problem based*), namun harus melihat ke sekitar. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka telaah RPJMD Daerah lain di sekitar Kabupaten Banjar harus dilakukan. Berikut adalah beberapa RPJMD kabupaten/ kota lain di sekitar Kabupaten Banjar:

4.4.1. RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021

Kota Banjarmasin memiliki visi pembangunan periode 2016-2021, yaitu Kayuh Baimbai Menuju Banjarmasin Baiman (Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman). Visi tersebut ditopang oleh delapan misi diantaranya:

1. Mewujudkan Kota Banjarmasin bertaqwa dalam setiap sendi kehidupan masyarakat, dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan budi pekerti sehingga terwujud masyarakat Banjarmasin yang religius, berbudi luhur, berbudaya, sehat dan sejahtera.
2. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang aman, sehat, dan kondusif bagi pribadi dan kehidupan masyarakat.
3. Mewujudkan Kota Banjarmasin indah dengan penataan kota berbasis tata ruang berbasis sungai guna terwujud kota yang asri dan harmoni.
4. Mewujudkan Kota Banjarmasin yang maju dengan penguatan perekonomian melalui sektor perdagangan, perindustrian, dan pelabuhan dengan memerhatikan pemerataan pendapatan, meningkatkan taraf pendidikan, pengembangan dan pelestarian budaya banjar serta

pariwisata sungai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

5. Melaksanakan pemerintahan amanah, ramah, bersih dan professional berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan fungsi melayani sebagai suatu tanggungjawab terhadap masyarakat dan Tuhan YME.
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur yang handal dan berkelanjutan dengan memperhatikan kesesuaian tata ruang, serta pembangunan menyeluruh mulai dari daerah terluar, terpencil, dan terbelakang sebagai pembangunan dasar untuk menjadikan kota Banjarmasin nyaman. Hal ini ditunjang dengan perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pasar tradisional secara profesional.

Visi dan misi pembangunan Kota Banjarmasin sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunan yang dihadapi Kota Banjarmasin. Permasalahan utama yang dihadapi berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan melalui pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Adapun isu strategis yang dirumuskan oleh pemerintah Kota Banjarmasin adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan kualitas sumber daya manusia berdaya saing nasional;
2. Pembangunan Kota Banjarmasin berkelanjutan (*Sustainability Development*);
3. Akselerasi perekonomian Kota Banjarmasin;
4. Peningkatan kualitas penataan ruang Kota Banjarmasin;
5. Perwujudan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) melalui Reformasi;
6. Birokrasi Pemerintah Kota Banjarmasin;
7. Penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA);
8. Tingginya pertumbuhan penduduk akibat bonus demografi;
9. Perwujudan pembangunan Kota Banjarmasin berbasis teknologi informasi;

10. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kota Banjarbaru;
11. Masuknya pasar dan retail modern;
12. Perbaikan pengelolaan pariwisata berbasis sungai;
13. Peningkatan sektor perdagangan dan industri;
14. Revitalisasi sungai untuk mengembangkan transportasi sungai dan pariwisata;
15. Rencana struktur wilayah kota;
16. Rencana pola ruang wilayah kota;
17. Penetapan kawasan strategis.

Letak wilayah Kota Banjarmasin berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan di Kota Banjarmasin dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar dapat saling berkaitan. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarmasin yang dapat berkaitan dengan Kabupaten Banjar antara lain:

Tabel 4. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Banjarmasin 2016-2021 yang berimplikasi pada Kabupaten Banjar

Strategi	Arah Kebijakan
Pengembangan Infrastruktur yang handal dan inklusif dan perbaikan manajemen pelayanan angkutan sungai	• Peningkatan konektivitas antar wilayah • Peningkatan penataan dan revitalisasi sumber daya air • Pelaksanaan normalisasi saluran sungai
Peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Peningkatan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup terhadap pengelolaan persampahan,limbah dan limbah B3 • Peningkatan pengendalian dampak lingkungan

4.4.2. RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021

Kota Banjarbaru memiliki visi pembangunan periode 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Banjarbaru sebagai Kota Pelayanan yang Berkarakter”. Visi tersebut ditopang oleh delapan misi

diantaranya:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas, dan berwawasan lingkungan;
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan;
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi;
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.

Visi dan misi pembangunan Kota Banjarbaru sangat erat berkaitan dengan permasalahan utama pembangunannya. Permasalahan utama yang dihadapi yaitu adalah kesejahteraan masyarakat yang perlu ditingkatkan dengan pembangunan daya saing daerah yang berkelanjutan. Permasalahan utama ini terdiri dari beberapa permasalahan pokok yang menjadi basis bagi penyusunan isu strategis. Berikut ini adalah isu-isu strategis Kota Banjarbaru:

1. Belum meratanya kualitas pendidikan;
2. Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan;
3. Belum meratanya kualitas infrastruktur perkotaan;
4. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
5. Masih rendahnya kualitas lingkungan;
6. Belum tercapainya luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik;
7. Masih rendahnya tingkat kemandirian daerah;
8. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat;
9. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi;
10. Belum optimalnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban umum; dan

11. Belum optimalnya penanganan PMKS dan penanganan masyarakat miskin.

Letak wilayah Kota Banjarbaru berbatasan langsung dengan Kabupaten Banjar. Pembangunan di Kota Banjarbaru dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan di Kabupaten Banjar. Pada konteks ini, strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru dan Kabupaten Banjar bisa saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah Kota Banjarbaru yang dapat berkaitan dengan Kabupaten Banjar antara lain:

Tabel 4. 6 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah RPJMD Kota Banjarbaru 2016-2021 yang berimplikasi pada Kabupaten Banjar

Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan infrastruktur jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Pengembangan dan peningkatan kapasitas, kualitas jaringan jalan dan jembatan melalui pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
Menjaga kualitas lingkungan sesuai baku mutu lingkungan	Menjaga kualitas udara

4.6. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan menjadi basis utama perumusan isu-isu strategis daerah. Permasalahan pembangunan ini disusun berdasarkan sebab indikatif dari berbagai data capaian kinerja pembangunan Kabupaten Banjar, kesepakatan mengenai *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan kebijakan-kebijakan di level nasional maupun level Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pembangunan jangka menengah di Kabupaten Banjar. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai data capaian pembangunan, observasi, FDG dan berbagai metode pengumpulan data lainnya, maka dapat

dirumuskan permasalahan pembangunan Kabupaten Banjaradalah sebagai berikut:

4.5.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Analisis terhadap capaian pembangunan di bidang urusan wajib pelayanan dasar menjadi basis utama bagi perumusan isu strategis. Urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Berikut adalah gambaran permasalahan pembangunan daerah dibidang urusan wajib pelayanan dasar, yaitu sebagai berikut:

4.5.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu intervensi yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di suatu daerah. Pendidikan juga mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan bangsa serta memberikan kontribusi yang signifikan atas pertumbuhan ekonomi dan transformasi sosial. Namun, pada konteks Kabupaten Banjar, pembangunan di bidang pendidikan masih menyisakan berbagai masalah pokok yaitu rendahnya akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, dan Kurangnya pengetahuan Baca Tulis Al Qur'an (BTA) peserta didik sejak dini. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 7 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pendidikan

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya akses pendidikan	Rendahnya jumlah sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rendahnya kuantitas sekolah PAUD di kecamatan
		Belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan	Kurangnya pembangunan sekolah pada wilayah terpencil
			Transportasi menuju sekolah pada wilayah

			terpencil belum memadai
			Buruknya fasilitas pendidikan
		Rendahnya kuantitas sekolah inklusi	Rendahnya pembangunan sekolah inklusi
		Rendahnya peran dan partisipasi madrasah swasta/pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket	Kurangnya bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket
2.	Rendahnya kualitas pendidikan	Rendahnya pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Rendahnya kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP
		Rendahnya kualitas penyelenggaraan PAUD	Kurangnya ketersediaan tenaga kependidikan non-guru yang membantu kegiatan administratif pendidikan
			Masih rendahnya pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif
			Kurangnya muatan keagamaan di PAUD
3.	Rendahnya pengetahuan Baca Tulis Al Qur'an peserta didik sejak dini	Integrasi pendidikan agama di sekolah formal belum optimal	Kurangnya penyelenggaraan pendidikan Baca Tulis Al-qur'an
			Kurangnya pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah

4.5.1.2. Kesehatan

Pemerintah Kabupaten Banjar telah berusaha secara optimal dalam menyelenggarakan pelayanan di sektor kesehatan. Namun, pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu: tingginya tingkat kesakitan masyarakat, tingginya risiko kematian, dan memburuknya kondisi gizi balita. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 8 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesehatan

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
-----	---------------	---------	--------------

1.	Tingginya tingkat kesakitan masyarakat	Sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit belum optimal	Masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular
			Masih rendahnya pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan PTM
		Rendahnya partisipasi masyarakat di bidang penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Belum optimalnya upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit
2.	Tingginya risiko kematian	Rendahnya pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu	Belum optimalnya integrasi penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir
		Rendahnya sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Rendahnya fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya
		Belum optimalnya pelayanan PONEK	Belum optimalnya redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di RSUD
			Sarana dan prasarana pelayanan PONEK di RSUD belum sesuai standard klasifikasi rumah sakit
		Belum optimalnya kesehatan bayi dan balita	Belum optimalnya pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
		Belum optimalnya pelayanan PICU/NICU di RSUD	Kurangnya kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD
			Belum optimalnya kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD
3	Belum kondusifnya kondisi gizi balita	Belum optimalnya penerapan hidup sehat	Belum optimalnya gizi masyarakat
		Belum optimalnya Kinerja dan	Belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas

		mutu pelayanan kesehatan	Belum optimalnya kinerja dan mutu instalasi farmasi
			Belum optimalnya kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

4.5.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dihadapkan pada beberapa persoalan mendasar. Upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyediakan layanan transportasi yang handal terkendala oleh minimnya akses dan kualitas jalan dan jembatan. Persoalan lain adalah belum optimalnya akses lingkungan perumahan layak. Hal tersebut terjadi karena penyediaan air bersih serta layanan pengelolaan air limbah yang belum memadai. Sementara itu, sub-urusan penataan ruang dan bangunan belum terselenggara dengan baik disebabkan oleh belum optimalnya pelaksanaan tahapan perencanaan, implementasi dan pengendalian tata ruang serta bangunan.

Tabel 4. 9 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya konektivitas jaringan jalan	Belum optimalnya keterhubungan wilayah terpencil	Belum tersedianya jalan dan jembatan pada wilayah-wilayah terpencil
		Belum optimalnya kualitas jaringan jalan	Belum optimalnya kontstruksi jalan dan jembatan terbangun
			Upaya rehabilitasi jalan dan jembatan belum optimal
			Belum optimalnya upaya tanggap darurat jalan dan jembatan
			Sarana dan prasarana kebinamargaan belum memadai
2.	Belum optimalnya akses	Belum optimalnya akses air bersih	Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan belum memadai

	lingkungan perumahan layak		Ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan belum memadai
		Belum optimalnya kualitas pengelolaan pengelolaan air limbah	Perlu ditingkatkannya pengelolaan air limbah individual
			Belum optimalnya pengelolaan air limbah IPLT
		Sistem drainase belum memadai	Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala kawasan
4.	Adanya pelanggaran tata ruang	Belum optimalnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan tata ruang	Belum optimalnya kualitas perencanaan tata ruang
			Belum optimalnya pengendalian pelaksanaan pemanfaatan ruang
5.	Belum optimalnya kualitas bangunan	Belum optimalnya kualitas konstruksi bangunan	NSPK bangunan gedung belum tersedia
			Belum optimalnya pengawasan bangunan gedung
			Belum optimalnya upaya pembinaan konstruksi
			Kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten belum memadai
			Perlu ditingkatkannya pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi

4.5.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Masalah utama di bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman adalah belum optimalnya akses pemukiman layak huni. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu belum optimalnya akses masyarakat terhadap rumah layak huni, minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pemukiman layak huni, serta upaya penataan pemukiman yang belum maksimal.

Tabel 4. 10 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya akses	Belum optimalnya akses perumahan layak huni	Minimnya akses masyarakat terhadap rumah umum, khusus, dan susun

pemukiman layak huni	Belum optimalnya upaya penataan pemukiman kumuh	Belum optimalnya upaya penanganan pemukiman kumuh
		Belum optimalnya upaya pencegahan pemukiman kumuh
		Belum optimalnya upaya penertiban pemukiman kumuh
	Keterhubungan antar perumahan melalui jalan lingkungan layak belum memadai	Perlu ditingkatkannya ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, pemukiman, perkotaan, dan kawasan strategis
		Belum optimalnya layanan penerangan jalan lingkungan
	Upaya proteksi kebakaran di pemukiman belum memadai	Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan
		Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan
	Belum optimalnya kualitas pengelolaan pengelolaan air limbah	Perlu ditingkatkannya pengelolaan air limbah individual
		Belum optimalnya pengelolaan air limbah komunal
	Sistem drainase belum memadai	Belum optimalnya upaya pengembangan sistem drainase skala lingkungan

4.5.1.5. Keamanan, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan yang sangat penting. Adapun permasalahan pokok dalam urusan tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keamanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih tingginya tingkat kriminalitas	Belum optimalnya pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum
			Masih rendahnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum
			Belum optimalnya cakupan patroli
		Kurang nya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan perda	Belum optimalnya pembinaan kelompok masyarakat
			Rendahnya pengawasan pelaksanaan Perda
		Rendahnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban	Masih terbatasnya kapasitas SDM pemuda
2	Partisipasi politik masyarakat masih belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pemilu masih belum optimal	Rendahnya kerjasama masyarakat dan aparat dalam menindak penyakit masyarakat
			Fasilitas organisasi sosial politik masih belum optimal
			Belum optimlanya pendidikan politik masyarakat

4.5.1.6. Sosial

Pembangunan sektor sosial berperan penting dalam memberikan pelayanan dasar bidang sosial agar dapat berjalan secara baik sesuai amanat dari Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 129/HUK/2008. Pada konteks Kabupaten Banjar, pembangunan sosial masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, belum optimalnya pemberdayaan lembaga keagamaan, dan belum optimalnya penanggulangan bencana. Permasalahan pokok tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagaimana ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4. 12 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Sosial

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1	Rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Belum optimalnya pembinaan dan penanggulangan masalah sosial	Rendahnya pendampingan wanita rawan sosial ekonomi
			Rendahnya fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
			Rendahnya bimbingan sosial dan bantuan keluarga miskin non potensial dan lansia rentan sosial
			Rendahnya fasilitasi program keluarga harapan
		Rendahnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Rendahnya tingkat pelatihan ketrampilan penanggulangan bencana bagi satuan tugas
			Rendahnya penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan <i>psikotik</i> (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
			Rendahnya identifikasi dan pembinaan anak jalanan (anjol) dan/atau gelandangan pengemis (gepeng)
			Rendahnya verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu
			Rendahnya koordinasi penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat
	Belum optimalnya pemberdayaan lembaga keagamaan	Masih rendahnya kualitas manajemen lembaga zakat	Belum optimalnya kapasitas lembaga zakat
		Masih rendahnya pengawasan terhadap aparat daerah	Kurangnya pengawasan terhadap aparat daerah
		Rendahnya pemberdayaan terhadap pesantren	Belum optimalnya pembinaan pesantren
2	Perlu ditingkatkannya penanggulangan bencana	Perlu ditingkatkannya kesiapsiagaan terhadap bencana	Kurangnya pemahaman masyarakat tanggap bencana
			Kurangnya kerja sama penyiapan logistik

		Belum optimalnya pencegahan bencana	Belum optimalnya ketersediaan bangunan pengendali banjir
		Belum optimalnya kemampuan kedaruratan	Kurangnya koordinasi lembaga tanggap bencana
		Belum optimalnya pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik	Belum optimalnya rehabilitasi pasca bencana
			Belum optimalnya rekonstruksi pasca bencana
		Belum optimalnya perencanaan penanggulangan bencana	Belum optimalnya efektifitas perencanaan penanggulangan PB
		Belum optimalnya proteksi kebakaran	Belum optimalnya Ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan
			Kurangnya ketersediaan dan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan

4.5.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan yang bersifat wajib non pelayanan dasar meliputi urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olah raga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan. Berikut adalah rincian permasalahan pembangunan di bidang urusan wajib non pelayanan dasar:

4.5.2.1. Tenaga Kerja

Pembangunan sektor ketenagakerjaan berperan penting bagi peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja. Pemerintah Kabupaten Banjar berusaha secara optimal dalam penyelenggaraan layanan di sektor ketenagakerjaan. Namun, pembangunan ketenagakerjaan masih menyisakan beberapa permasalahan pokok, yaitu rendahnya kesempatan kerja/lapangan kerja dan belum kondusifnya hubungan industrial. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

Tabel 4. 13 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya kesempatan/lapangan kerja	Kurangnya kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	Kurangnya pelaksanaan bursa kerja
			Fasilitasi penyediaan lapangan kerja belum optimal
		Belum optimalnya kapasitas dan kompetensi pencari kerja	Kurangnya keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi
2.	Belum kondusifnya hubungan industrial	Perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja belum optimal	Fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial belum optimal

4.5.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan daerah. Pembangunan yang responsif terhadap isu-isu perempuan harus dikembangkan sebagai daya ungkit peningkatan pemberdayaan perempuan. Adapun masalah pokok yang terkait urusan tersebut, yaitu rendahnya pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4. 14 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Belum optimalnya kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi	Belum optimalnya kapasitas SDM perempuan
			Belum optimalnya kecakapan hidup perempuan
		Belum optimalnya pendampingan serta perlindungan terhadap perempuan dan anak	Belum optimalnya kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
		Belum optimalnya kelembagaan kabupaten layak anak	Kurangnya koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media

4.5.2.3. Ketahanan Pangan

Masalah pokok yang dihadapi pada urusan wajib non-pelayanan dasar ketahanan pangan adalah rendahnya ketahanan pangan daerah. Masalah pokok ini disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah berikut:

Tabel 4. 15 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Ketahanan Pangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya ketahanan pangan daerah	Belum optimalnya ketersediaan pangan	Belum optimalnya pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan
		Belum optimalnya akses distribusi pangan	Belum optimalnya suplai pangan daerah
		Belum adanya kontrol yang baik untuk menjaga kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Belum optimalnya pengembangan diversifikasi pangan non-beras
			Kurangnya sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah

4.5.2.4. **Lingkungan Hidup**

Masalah pokok yang dihadapi pada urusan wajib non-pelayanan dasar lingkungan hidup adalah menurunnya kualitas lingkungan hidup. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 16 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Lingkungan Hidup

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Semakin menurunnya kualitas air	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan kerusakan air	Belum optimalnya pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
			Belum optimalnya pengelolaan laboratorium lingkungan
			Belum optimalnya peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan air
2.	Semakin menurunnya kualitas udara	Semakin tingginya polusi akibat kebakaran hutan dan lahan	Kurangnya sinergitas kerjasama antar <i>stakeholders</i>
3.	Semakin menurunnya kualitas tutupan hutan dan SDA	Belum optimalnya rehabilitasi lahan kritis	Kurangnya sinergitas kerjasama antar <i>stakeholders</i>
		Belum optimalnya pengembangan luas RTH	Kurangnya luasan RTH di kawasan perkotaan
			Belum optimalnya rehabilitasi RTH
		Belum optimalnya perlindungan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Belum optimalnya perlindungan Sumber Daya Alam
			Belum optimalnya pembinaan dan penataan lingkungan hidup
4.	Tingginya potensi pencemaran akibat sampah	Tingginya volume sampah yang tidak terkelola dengan baik	Belum optimalnya upaya pengurangan volume sampah
			Belum optimalnya upaya penanganan sampah
			Belum optimalnya upaya pengelolaan B3 dan limbah B3
			Belum optimalnya upaya pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA
			Belum optimalnya upaya pengembangan bank sampah

4.5.2.5. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil merupakan urusan yang sangat penting. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan. Adapun masalah dan akar masalahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya tingkat kepemilikan dokumen kependudukan	Kualitas pelayanan kependudukan belum optimal	Jangkauan layanan kependudukan bagi seluruh masyarakat masih belum optimal
			Masih terbatasnya kapasitas aparatur pelayanan kependudukan
			Sarana dan prasarana pelayanan kependudukan masih belum memadai

4.5.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang sangat penting. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah masih rendahnya kualitas pembangunan desa. Adapun penyebab dari masalah pokok tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas pembangunan desa	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat desa	Masih rendahnya perencanaan pembangunan desa
			Masih rendahnya keberdayaan ekonomi masyarakat
			Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam membangun desa
		Masih rendahnya kapasitas	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan keuangan desa

		aparatur desa	Belum optimalnya kapasitas pengelolaan aset desa
--	--	---------------	--

4.5.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan usaha pemerintah untuk mempengaruhi pola perkembangbiakan penduduk ke arah pertumbuhan penduduk yang diinginkan melalui suatu kebijakan pemerintah di bidang kependudukan. Masalah pokok yang terjadi pada sektor pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yaitu rendahnya kesehatan reproduksi. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4. 19 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya kesehatan reproduksi	Belum optimalnya akses pelayanan KB	Kurangnya jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi (alkon)
			Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
			Belum optimalnya advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi
			Belum optimalnya kapasitas keluarga melalui kelompok bina ketahanan dan kesejahteraan keluarga

4.5.2.8. Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika merupakan urusan yang sangat penting, terutama terkait dengan transportasi pemerintah daerah. Adapun masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah belum optimalnya keterbukaan informasi publik. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal, berikut:

Tabel 4. 20 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Belum optimalnya tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimalnya pengembangan teknologi dan informasi
			Belum optimalnya transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)
		Belum optimalnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Belum optimal cakupan pelayanan pembangunan melalui media massa

4.5.2.9. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar koperasi dan UKM, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya omzet/ sisa hasil usaha/ nilai produksi koperasi. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 21 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kontribusi sektor koperasi dan UKM terhadap pertumbuhan ekonomi	Belum optimalnya revitalisasi koperasi	Rendahnya kapasitas SDM pengelola koperasi
			Kurangnya kapasitas manajemen usaha koperasi
			Belum optimalnya kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi
			Kurangnya pengawasan dan penilaian kelembagaan koperasi
		Rendahnya kapasitas manajerial usaha mikro	Rendahnya kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM
			Kurangnya akses bantuan permodalan UKM
			Rendahnya kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM
			Kurangnya sarana dan prasarana pemasaran UKM

4.5.2.10. Penanaman Modal

Pada urusan wajib non-pelayanan dasar penanaman modal, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya realisasi nilai penanaman modal. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 22 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Penanaman Modal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya realisasi nilai investasi	Rendahnya kondusifitas iklim investasi	Belum optimalnya perbaikan kualitas kelembagaan dan perizinan
		Belum optimalnya promosi investasi	Masih lemahnya koordinasi antar perangkat daerah dalam pengembangan kerjasama, promosi, dan perizinan

4.5.2.11. Kepemudaan dan Olahraga

Membangun kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya memajukan Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar memiliki potensi yang cukup besar dalam mengembangkan aspek kepemudaan dan olahraga, karena demografi penduduk didominasi oleh pemuda (usia angkatan kerja). Namun, Kabupaten Banjar juga memiliki sejumlah permasalahan pokok pada urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga dan belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4. 23 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga	Belum optimalnya pembinaan dan pemasyarakatan	Kurangnya aktivitas fisik massal

		olahraga	
		Belum optimalnya Sarana dan Prasana Olahraga	Belum optimalnya kuantitas Sarana dan Prasana Olahraga
2.	Belum optimalnya pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Belum optimalnya peran serta pemuda dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Belum optimalnya kapasitas pemuda

4.5.2.12. Statistik

Urusan statistik merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masalah pokok yang dihadapi dalam urusan ini adalah belum optimalnya ketersediaan data statistik. Masalah poko tersebut disebabkan oleh beberapa masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Statistik

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Ketersediaan data statistik belum memadai	Kemampuan pengumpulan data statistik belum optimal	Belum optimalnya pendokumentasian capaian pembangunan daerah
			Masih rendahnya koordinasi antar instansi untuk menyusun data statistik sektoral

4.5.2.13. Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan kebudayaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional. Namun, Kabupaten Banjar memiliki permasalahan pada urusan kebudayaan, yaitu rendahnya perlindungan dan pengembangan seni dan budaya. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4. 25 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kebudayaan

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Belum optimalnya pelestarian budaya	Penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya masih belum optimal	Pemahaman, kepedulian, dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya masih rendah
			Ketersediaan data kebudayaan masih belum optimal
			Kajian sejarah lokal belum optimal
		Belum optimalnya ekspresi budaya	Even festival budaya yang bernuansa religi masih rendah
		Perlindungan benda, situs, dan kawasan cagar budaya belum optimal	Partisipasi/ keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya masih rendah
			Kajian warisan/cagar budaya masih rendah
2	Belum optimalnya pelestarian budaya yang berkaitan dengan keagamaan	Masih rendahnya manajemen perayaan hari besar keagamaan	Belum selarasnya pengamalan agama dengan seni dan budaya

4.5.2.14. Perpustakaan

Penyelenggaraan perpustakaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memajukan kebudayaan nasional sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Namun, Kabupaten Banjar memiliki permasalahan pokok pada urusan perpustakaan, yaitu rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat. Permasalahan pokok tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perpustakaan

No.	Masalah pokok	Masalah	Akar masalah
1.	Rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Jangkauan pelayanan perpustakaan belum optimal	Kapasitas pengelola perpustakaan masih terbatas

4.5.2.15. Kearsipan

Urusan kearsipan terkait upaya pelestarian, penyelamatan, dan pengembangan pelayanan informasi kearsipan. Permasalahan pokok terkait urusan kearsipan, yaitu masih rendahnya kualitas kearsipan. Permasalahan pokok ini disebabkan oleh masalah dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kearsipan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Masih rendahnya kualitas kearsipan	Belum optimalnya kualitas layanan kearsipan	Belum optimalnya kemampuan identifikasi arsip daerah yang penting
			Kurangnya pemahaman tentang pentingnya arsip daerah
			Belum optimalnya pengelola kearsipan

4.5.2.16. Pertanahan

Urusan pertanahan merupakan salah satu urusan wajib non pelayanan dasar yang mempunyai peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pokok dalam urusan ini adalah masih tingginya sengketa pertanahan. Adapun masalah dan akar masalahnya adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 28 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sengketa pertanahan masih tinggi	Belum optimalnya tertib administrasi pertanahan	Belum optimalnya sistem pertanahan
			Belum optimalnya penataan kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pertanahan
			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan belum optimal
			Fasilitasi penanganan sengketa pertanahan belum berjalan optimal

4.5.2.17. Perhubungan

Penyelenggaraan bidang urusan perhubungan dihadapkan pada permasalahan utama, yaitu belum optimalnya akses dan kualitas transportasi. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu belum optimalnya ketersediaan dan kualitas pelayanan simpul jaringan perhubungan serta sistem jaringan transportasi yang belum memadai. Persoalan lain yang juga menghambat optimalisasi pelayanan perhubungan adalah belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi.

Tabel 4. 29 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perhubungan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya akses dan kualitas transportasi	Belum optimalnya kualitas pelayanan simpul jaringan perhubungan	Belum optimalnya ketersediaan prasarana perhubungan
			Perlu ditingkatkannya upaya rehabilitasi prasarana perhubungan
			Perlu ditingkatkannya kualitas pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan
		Perlu ditingkatkannya sistem jaringan transportasi	Perlu ditingkatkannya pelayanan trayek angkutan
		Belum optimalnya pelayanan keselamatan transportasi	Perlu ditingkatkannya kelayakan kendaraan bermotor
			Perlu ditingkatkannya kapasitas pengguna jalan
			Ketersediaan fasilitas keselamatan jalan belum memadai

4.5.3. Urusan Pilihan

Urusan pilihan pada umumnya berhubungan dengan berbagai sektor yang menjadi potensi unggulan daerah. Jika dikembangkan dengan baik, sektor ini mampu menjadi pengungkit bagi peningkatan produktivitas ekonomi daerah yang nantinya berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Urusan pilihan terdiri dari pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, energi dan sumber daya mineral. Berikut ini adalah beberapa permasalahan pembangunan Kabupaten Banjar di bidang urusan pilihan:

4.5.3.1. **Pariwisata**

Pada urusan pilihan pariwisata, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 30 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pariwisata

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB/ PAD	Kurangnya kunjungan wisata	Kurangnya daya tarik destinasi pariwisata
			Belum optimalnya keterlibatan stakeholder pariwisata
			Belum optimalnya pemasaran pariwisata

4.5.3.2. **Pertanian**

Pada urusan pilihan pertanian, masalah pokok yang dihadapi adalah menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 31 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pertanian

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Rendahnya produksi tanaman pangan, hortikultura, dan komoditas unggulan perkebunan	Kurangnya luas tanam/panen tanaman pangan dan hortikultura
			Kurangnya produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
			Rendahnya SDM kelembagaan petani dan penyuluh
			Rendahnya pelayanan irigasi pertanian
			Pengembangan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna
			Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian
		Kurangnya pemasaran produk dan pengolahan	Kurangnya kualitas produk olahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura

		hasil pertanian	Belum optimalnya penanganan pasca panen dan pengolahan perkebunan berbasis teknologi
			Rendahnya mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak
		Kurangnya kapasitas hasil produksi peternakan	Rendahnya kelahiran ternak
			Besarnya angka kematian ternak
			Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna
		Kurangnya kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap	Rendahnya kapasitas petani perikanan
		Kurangnya kapasitas pemasaran produk perikanan	Kurangnya mutu produk olahan hasil perikanan

4.5.3.3. **Perdagangan**

Pada urusan pilihan perdagangan, masalah pokok yang dihadapi adalah menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 32 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perdagangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Menurunnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Belum optimalnya jangkauan perdagangan untuk pasar lokal, regional, nasional maupun internasional	Kurangnya standarisasi ekspor produk-produk perdagangan
			Rendahnya kualitas SDM pedagang kecil dan menengah
			Kurangnya sarana dan prasarana perdagangan
			Kurangnya akses permodalan bagi pedagang
		Belum optimalnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Belum optimalnya keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting

4.5.3.4. Perindustrian

Pada urusan pilihan perindustrian, masalah pokok yang dihadapi adalah rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Masalah pokok tersebut disebabkan oleh masalah dan akar masalah berikut ini:

Tabel 4. 33 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perindustrian

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Rendahnya kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Rendahnya pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah	Belum optimalnya pengembangan sektor industri Logam, Mesin Elektronika, dan Alat Angkut (ILMEASA)
			Belum optimalnya pengembangan sektor industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan Bahan Bangunan (AGROKIM)

4.5.4. Urusan Penunjang Pemerintahan

Fungsi penunjang urusan pemerintahan memiliki peran penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Banjar. Tata kelola pemerintahan merupakan sistem yang menopang pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan agar dapat berjalan baik. Sistem tata kelola pemerintahan dibentuk oleh urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan; keuangan; kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; pengawasan; serta kesekretariatan. Pelaksanaan urusan penunjang di Kabupaten Banjar masih menyisakan berbagai permasalahan, yakni sebagai berikut:

4.5.4.1. Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan penunjang yang paling penting. Terwujudnya visi misi daerah sangat ditentukan dari seberapa baik pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan mereka. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah terkait perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 34 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Belum efektifitas perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah
			Belum optimalnya koordinasi dalam proses perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya kualitas aparatur perencana
		Kualitas data, penelitian, dan pengembangan masih belum optimal	Belum optimalnya pemanfaat data informasi pembangunan
			Belum optimalnya <i>updating</i> data pembangunan melalui SIPD
			Belum optimalnya penerapan inovasi daerah

4.5.4.2. Keuangan

Keuangan merupakan salah satu urusan penunjang yang sangat penting bagi penyelenggaraan pembangunan daerah. Urusan ini berkaitan dengan penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah yang dihadapi terkait urusan ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 35 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Keuangan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah	Rendahnya Kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	Masih rendahnya kemampuan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
			Rendahnya kepatuhan wajib pajak
			Belum optimalnya akurasi data pajak daerah
			Masih kurangnya penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT)
		Rendahnya akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Belum optimalnya kapasitas pengawasan dan monev
			Belum optimalnya sistem pengendalian internal pemerintah
			Rendahnya kapasitas aparatur

			pengelolaan keuangan daerah
			Masih kurangnya akuntabilitas laporan kinerja OPD
			Belum optimalnya legalisasi aset daerah

4.5.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan terkait dengan profesionalitas aparatur pemerintah daerah berupa kompetensi, kualifikasi, dan pelayanan kepegawaian di Kabupaten Banjar. Profresionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi modal dalam pelaksanaan pembangunan. Namun saat ini masih terdapat berbagai permasalahan terkait dengan profesionalisme ASN. Masalah pokok, masalah, dan akar masalah pada urusan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 36 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No .	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya profesionalisme aparatur sipil negara	Belum optimalnya kompetensi aparatur daerah	Belum optimalnya pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan
			Belum optimalnya pelaksanaan uji kompetensi
			Belum optimalnya pembinaan dan pengembangan aparatur
		Masih kurangnya kinerja aparatur daerah	Belum optimalnya kualitas kelembagaan
		Masih kurangnya disiplin pegawai	Masih belum optimalnya penerapan punishmant dan reward pegawai
		Masih kurangnya kesejahteraan pegawai	Pelayanan kepegawaian belum optimal

4.5.4.4. Pengawasan

Pembangunan daerah tentang urusan pengawasan terkait upaya meningkatkan integritas ASN dan sistem pengendalian internal

pemerintah daerah. Permasalahan pokok pada urusan ini, yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 37 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Pengawasan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya integritas aparatur sipil negara	Belum optimalnya pencegahan korupsi	Belum optimalnya fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi
			Masih kurangnya pendampingan bagi Perangkat Daerah untuk menuju Zona Integritas (ZI)
			Masih kurangnya koordinasi dan sinergitas dengan APH
		Kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat dan efektivitas penanganannya belum berjalan optimal	Sistem penanganan pengaduan masyarakat belum optimal
		Kompetensi aparatur pengawasan dan penyempurnaan sistem serta prosedur pengawasan belum optimal	Aparatur pengawasan dalam kegiatan diklat dan pelatihan mandiri belum berjalan optimal
			Sistem dan prosedur pengawasan belum berjalan optimal
		Pengawasan terhadap penyelenggaran pemerintahan daerah dan desa belum optimal	Efektifitas pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan masih belum optimal

4.5.4.5. Kesekretariatan

Urusan kesekretariatan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat daerah dan sekretariat DPRD. Permasalahan yang terdapat dalam pelaksanaan fungsi kesekretariatan terkait dengan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi maupun permasalahan yang melekat pada kinerja DPRD, yakni sebagai berikut:

Tabel 4. 38 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Urusan Kesekretariatan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya fasilitasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat belum optimal	Belum optimalnya frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat
2.	Masih rendahnya koordinasi dalam perumusan, pelaksanaan kebijakan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengendalian pembangunan daerah belum optimal	Masih rendahnya pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijakan dan pelaksanaan kebijakan
		Belum optimalnya Kerjasama pembangunan daerah	Belum optimalnya penyelesaian batas wilayah
			Belum optimalnya kerjasama antara daerah
			Belum optimalnya fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat

4.7. Isu-Isu Strategis Daerah

Isu strategis merupakan persoalan pembangunan yang perlu mendapatkan perhatian khusus dan memiliki dampak luas terhadap suatu pembangunan. Isu strategis harus dikelompokkan dan mendapatkan prioritas dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, apabila tidak diantisipasi maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Demikian pula sebaliknya, jika tidak dimanfaatkan akan dapat menghilangkan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam lima tahun ke depan. Di samping itu, isu strategis mengacu pada

capaian kinerja daerah 5 tahun sebelumnya, RTRW, KLHS, mandat nasional, dan isu global yang relevan.

4.6.1. Isu Internasional

Perumusan isu strategis harus mempertimbangkan dinamika internasional. Meskipun berada dalam level daerah, perencanaan pembangunan tidak terlepas juga dari isu krusial di level internasional. Beberapa isu strategis di bawah ini dipilih berdasarkan kesesuaiannya dengan konteks Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Banjar.

4.6.1.1. MDGs/SDGs

Pada tahun 2014, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) melakukan pembaruan *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan agenda pembangunan global yang bernama *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan-tujuan yang tertuang dalam SDGs merupakan penyempurnaan tujuan pembangunan MDGs. Melalui mandat SDGs, PBB berupaya untuk mewujudkan sumberdaya manusia global yang berkualitas, meningkatkan perekonomian global yang tidak mengesampingkan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk 2016-2030 meliputi:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mempromosikan pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua pada segala usia;
4. Menjamin kualitas pendidikan inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
5. Mencapai kesetaraan gender, memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan;

7. Menjamin akses energi modern yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan untuk semua;
8. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua;
9. Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan dan mendorong inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan dalam dan di antara negara-negara;
11. Membuat kota-kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
14. Melestarikan dan memanfaatkan samudera, laut dan sumberdaya kelautan untuk pembangunan berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan, dan meningkatkan pemanfaatan ekosistem darat dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memerangi desertifikasi, menghentikan dan membalikkan degradasi lahan, dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, dan memberikan perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan hidup, 17 tujuan dan 169 target sebagaimana tertuang dalam agenda SDGs dinilai sangat relevan untuk konteks pembangunan Kabupaten Banjar. Oleh

karena itu, Kabupaten Banjar juga berkomitmen untuk melaksanakan agenda-agenda SDGs yang targetnya dapat tercapai pada tahun 2030.

4.6.1.2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi menyebabkan perkembangan internet semakin pesat. Disertai perkembangan teknologi media telekomunikasi yang menciptakan konvergensi media, internet telah meruntuhkan sekat antar masyarakat bahkan dalam level global. Membanjirnya informasi bisa dimaknai sebagai peluang maupun tantangan bagi pemerintah daerah.

Bagi Kabupaten Banjar, teknologi komunikasi dan informasi (TIK) penting untuk membantu proses pembangunan daerah. Pembangunan lima tahun ke depan juga diharapkan dapat peka terhadap perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Tentu dalam membangun sektor ini juga tidak bisa lepas dari peran sektor-sektor lain termasuk kondisi infrastruktur listrik dan jaringan.

4.6.1.3. *Green Economy*

Pembangunan ekonomi global saat ini sudah mulai bergeser ke konsep *green economy*, yaitu ekonomi ekologis. Pengertian *green economy* merujuk pada ekonomi yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekologi sehingga praktiknya sangat memperhitungkan pengurangan risiko terhadap kelestarian lingkungan. Ekonomi ekologis tidak berarti ekonomi yang berbasis sektor lingkungan atau agraris melainkan ekonomi yang tidak mengesampingkan risiko kerusakan lingkungan dan ekologi. Misalnya perekonomian berbasis industri dengan meminimalkan penggunaan bahan bakar minyak dan gas, dan mereduksi polusi.

Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dalam *green economy* tersebut menjadi pedoman perubahan arah pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada keberlanjutan ekologi. Misalnya, perekonomian yang berbasis industri harus meminimalkan dampak lingkungan. Pembangunan berbasis

ekonomi agraris pun harus direncanakan dengan pertimbangan dampak ekologis yang minimalis. Hal penting untuk dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai upaya mendukung perkembangan ekonomi hijau tersebut, yaitu dalam level perencanaan pembangunan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan minimalisir dampak lingkungannya.

4.6.2. Isu Nasional

Dalam rangka mewujudkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan, yang kemudian disebut sebagai *NAWA CITA*, yaitu sebagai berikut:

- a. Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- b. Membuat pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa asia lainnya;
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor ekonomi domestik;
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa;
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

NAWA CITA ini kemudian mempertegas sasaran utama yang ingin dicapai sebagaimana termaktub pada RPJPN 2005-2025, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2015-2019 adalah:

Tabel 4. 39 Tahapan dan Skala Prioritas RPJPN 2005-2025

RPJMN I (2005-2009)	Menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang Menata kembali NKRI, membangun Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik
RPJMN II (2010-2014)	Memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing daerah
RPJMN III (2015-2019)	Menetapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta kemampuan IPTEK
RPJMN IV (2020-2024)	Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif

Sumber: RPJP Nasional 2005-2025.

4.6.3. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan permasalahan pembangunan tingkat nasional dan isu-isu strategis di level internasional serta regional, isu strategis pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021, adalah sebagai berikut:

4.6.3.1. Rendahnya Kualitas Sumberdaya Manusia (IPM)

Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dapat dilihat dari belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2014, nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 67,63 dengan kategori sedang. Nilai tersebut masih di bawah IPM Nasional (68,9), Provinsi Kalimantan Timur (73,82), Provinsi Kalimantan Tengah (67,77), dan Provinsi Kalimantan Utara (68,64). Penyebab indikatif dari persoalan tersebut adalah masih rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH) dan masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah.

4.6.3.2. Rendahnya Daya Saing Perekonomian Daerah

Isu strategis tersebut berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan. Pada periode tahun 2012 - 2015

terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu hanya sebesar 3,84 persen. Angka tersebut masih di bawah angka nasional dan secara nasional berada pada peringkat ke 27. Persoalan ini disebabkan karena merosotnya harga komoditas Kalimantan Selatan terutama pada sector pertambangan dan perkebunan.

4.6.3.3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan

Rendahnya kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan yang secara nasional berada pada peringkat ke 22. Persoalan tersebut disebabkan karena pembukaan lahan di sektor pertambangan, meningkatnya pencemaran oleh limbah domestic, dan akibat aktifitas perekonomian lainnya, serta terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

4.6.3.4. Rendahnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian Dasar

Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian dapat dilihat dari belum tersedianya energi listrik secara memadai, kemacetan, kepadatan penumpang, dan belum adanya pelabuhan yang representatif. Sedangkan, rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar dapat dilihat dari air bersih dan jalan yang belum merata.

4.6.3.5. Belum Optimalnya Kinerja Pemerintah Daerah

Belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dapat dilihat dari nilai LKIP yang masih B++. Selain itu, juga berkaitan dengan penurunannya kemampuan fiskal daerah akibat dari perlambatan perekonomian Kalimantan Selatan.

4.6.4. Isu Strategis Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar menghadapi beberapa isu strategis di bidang keagamaan, SDM dan sosial, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan. Isu-isu strategis tersebut disusun berdasarkan permasalahan pembangunan daerah pada berbagai

urusan pemerintahan. Isu strategis juga disusun berdasarkan isu di tingkat internasional, nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini adalah isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Banjar:

4.6.4.1. Belum Optimalnya Penerapan Nilai-Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat

Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia ditunjukkan dengan mudurnya penerapan nilai-nilai budaya daerah dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya Banjar sangat berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan sehingga belum optimalnya penerapan nilai-nilai keagamaan menjadi isu strategis yang harus diselesaikan pada periode RPJMD ini. Jika nilai-nilai keagamaan diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat menciptakan situasi kehidupan yang kondusif di seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat.

4.6.4.2. Rendahnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis di bidang pendidikan yaitu rendahnya akses dan kualitas pendidikan. Semua penduduk usia sekolah belum sepenuhnya memperoleh kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Akses pendidikan dapat ditinjau dari meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS), dan rasio murid-guru. Sementara itu, kualitas pendidikan dapat dinilai belum optimalnya pemenuhan keperluan peserta didik, meningkatnya angka melek huruf, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah.

4.6.4.3. Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis kesehatan yaitu rendahnya derajat kesehatan masyarakat. Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu ukuran kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu daerah. Apabila derajat kesehatan rendah, maka berpengaruh terhadap produktivitas kerja penduduk. Derajat kesehatan masyarakat dapat ditinjau dari meningkatnya angka harapan hidup.

4.6.4.4. Tingginya Angka Pengangguran

Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis terkait ketenagakerjaan, yaitu tingginya angka pengangguran. Pengangguran merupakan orang yang dikategorikan dalam angkatan kerja berumur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingginya angka pengangguran dapat ditinjau dari indikator tingkat pengangguran terbuka, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat kesempatan kerja.

4.6.4.5. Tingginya Angka PMKS

Pemerintah Kabupaten Banjar memiliki isu strategis sosial, yaitu tingginya angka PMKS. Angka PMKS dapat bertambah seiring dengan munculnya sejumlah kesulitan berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung. Jenis PMKS setidaknya terdiri dari 26 jenis, diantaranya: anak balita telantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum, anak jalanan, Anak dengan Kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP), Orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, dan komunitas adat terpencil.

4.6.4.6. Belum Optimalnya Pertumbuhan Ekonomi

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjar dipengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan PDRB di berbagai sektor potensial, terutama kontribusi sektor pertanian sebagai sektor andalan. Persoalan ini disebabkan oleh belum optimalnya upaya peningkatan nilai produksi pada masing-masing sektor dan

masih rendahnya daya ungkit penanaman modal, akibat masih sedikitnya realisasi nilai investasi di Kabupaten Banjar. Pada sisi lain, produktivitas tenaga kerja juga menjadi determinan yang perlu diperhatikan, karena semakin besar produktivitas tenaga kerja berdampak positif pada semakin besarnya nilai PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

4.6.4.7. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh semakin menurunnya kualitas air, udara, tutupan hutan, dan semakin besarnya volume pencemaran sampah, terutama dari sektor perdagangan. Tingginya laju deforestasi akibat alih fungsi lahan dengan metode pembakaran berakibat pada semakin menurunnya kualitas udara dan tutupan hutan. Belum adanya sistem pengelolaan sampah terpadu menyebabkan semakin besarnya volume pencemaran sampah.

4.6.4.8. Belum Optimalnya Konektivitas Antar Wilayah

Pembangunan infrastruktur dasar dihadapkan pada permasalahan utama yaitu belum optimalnya konektivitas antar wilayah. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya ketersediaan dan kualitas transportasi. Kondisi ini membatasi keterhubungan antar pusat-pusat kegiatan yang menyebabkan mobilisasi barang/jasa/orang menjadi terbatas sehingga upaya pembangunan menjadi tidak optimal.

4.6.4.9. Belum Optimalnya Akses Pemukiman Layak Huni

Isu strategis ini dibentuk oleh beberapa persoalan. Minimnya akses rumah layak huni serta belum optimalnya ketersediaan utilitas pemukiman menjadi penyebab utama munculnya permasalahan tersebut. Persoalan lain adalah belum optimalnya akses masyarakat terhadap air bersih di kawasan-kawasan tertentu. Selain itu, ketaatan terhadap tata ruang yang belum optimal dan kualitas bangunan yang belum memadai juga cukup berpengaruh terhadap pemenuhan akses pemukiman layak huni.

4.6.4.10. Masih Rendahnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan dapat dilihat dari masih rendahnya profesionalisme dan integritas pegawai, masih rendahnya kualitas perencanaan pembangunan daerah, belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, belum optimalnya kualitas pembangunan desa, belum optimalnya keterbukaan informasi publik, masih rendahnya kualitas pelayanan publik, dan belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut harus disikapi secara serius oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Baik buruknya kualitas tata kelola pemerintahan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan menjadi fondasi atau dasar bagi keberhasilan pelaksanaan urusan wajib pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, sosial, dan sebagainya. Oleh karena itu, perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar periode 2016–2021 berpedoman pada nilai yang berkembang di masyarakat, visi, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjar periode 2005-2025, capaian kondisi pembangunan daerah, serta proyeksi pembangunan lima tahun mendatang. Visi Kabupaten Banjar pada RPJPD 2005-2025 adalah “Kabupaten Banjar yang berbudaya, religius, mandiri dan berdaya saing tahun 2025”. Pokok-pokok visi “Berbudaya” meliputi: tertib, terbuka, teratur, disiplin, taat hukum, setia kawan, dan gotong royong. Pokok-pokok “Religius” meliputi: iman, takwa, saling menghormati, rukun, damai, dan setara. Sementara itu, pokok-pokok visi “Mandiri dan Berdaya saing” meliputi: mandiri, professional, makmur, sejahtera, akuntabilitas, transparan, maju, dan unggul.

Pada periode 2016-2021, Kabupaten Banjar berada dalam tahapan pembangunan yang ke-3 sesuai dengan RPJPD Kabupaten Banjar. Tahapan ke-3 memiliki tema pembangunan yaitu: “Pemantapan perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera yang didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas menuju agro industri”. Tema tersebut mengharapkan pemerintah daerah maupun masyarakat berperan aktif dalam mengoptimalkan potensi lokal untuk mencapai kemajuan pembangunan daerah. Pada kondisi ini, pemerintah dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

guna mengoptimalkan potensi daerah.

5.1. Visi Daerah

Visi daerah merupakan kondisi yang diharapkan tercapai di akhir periode perencanaan jangka menengah daerah. Visi RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANJAR
YANG SEJAHTERA DAN BAROKAH”**

Visi RPJMD Banjar mengandung rumusan kondisi yang diharapkan dapat tercapai dalam periode pembangunan 2016 - 2021. Rumusan kondisi yang diharapkan adalah sejahtera dan barokah. Penjelasan masing-masing kondisi tersebut adalah sebagai berikut:

Sejahtera:

Sejahtera adalah kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai. Dimensi material merupakan kondisi masyarakat yang mampu mewujudkan kehidupan yang layak dan sederajat dengan masyarakat lain yang telah maju. Komponen dimensi material didukung dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, ketergantungan pembiayaan pembangunan yang bersumber dari internal daerah.

Dimensi spiritual merupakan salah satu dimensi upaya membangun manusia Banjar seutuhnya. Dimensi spiritual merupakan keadaan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya, pengamalan agama secara konsisten, dan menjaga kerukunan hidup antar dan atau intra umat beragama. Masyarakat yang religius menjadikan nilai-nilai luhur agama sebagai landasan

moral, etika hidup, pedoman dan pendorong dalam mencapai prestasi-prestasi hidup.

Barokah:

Kondisi “Barokah” merupakan sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak. Kondisi ini merupakan perwujudan pembangunan Kabupaten Banjar yang komprehensif, yaitu membangun sarana dan prasarana fisik sekaligus membangun manusia Banjar seutuhnya. Perwujudan kondisi tersebut diupayakan sejalan dengan penerapan nilai luhur budaya Banjar di tengah masyarakat dalam segala aspek kehidupan. Budaya Banjar sebagai payung kebudayaan daerah merupakan alat pemersatu untuk meningkatkan toleransi, kerjasama, dan menjadi sinergi yang serasi untuk mendukung pembangunan.

5.2. Misi Daerah

Misi merupakan upaya yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar periode 2016-2021. Misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Visi dan misi menjadi rumusan tujuan dan sasaran. Rumusan tujuan memperlihatkan operasionalisasi upaya dari misi, sedangkan sasaran merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pelaksanaan tujuan. Selain itu, rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Banjar 2016-2021 juga mengacu pada sasaran pokok RPJPD Kabupaten Banjar tahun 2005-2025 dan indikator makro RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016-2021. Adapun rumusan tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Misi 1 (Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama)

Sesuai dengan visi Kabupaten Banjar yang ingin mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan barokah, maka akan diwujudkan dengan misi keagamaan ini. Harapannya, dengan meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat terwujud kondisi masyarakat yang barokah.

Nilai-nilai keagamaan apabila benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dapat menciptakan situasi kondusif pada seluruh wilayah dan seluruh golongan masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun pusat kajian agama dan budaya, mendorong pemenuhan sarana-prasarana dan fasilitas penyelenggaraan ibadah; memperkuat peran agama sebagai sumber motivasi, inspirasi dan nilai utama dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Suasana keagamaan yang telah secara turun temurun dilestarikan di lingkungan Kabupaten Banjar menjadi faktor pendukung

tercapainya misi keagamaan ini. Kegiatan-kegiatan keagamaan banyak dilaksanakan, mulai dari level masyarakat bahkan OPD daerah yang rutin dilaksanakan setiap minggu atau setiap bulan. Selain itu peringatan hari besar keagamaan juga rutin dilaksanakan, mulai dari *haul* ulama, hari raya keagamaan, dan lain sebagainya. Harapannya seiring dengan meningkatnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dapat menjadi pedoman masyarakat dalam bertingkah laku, sehingga terwujud iklim kehidupan yang damai, sejahtera, dan barokah.

Lingkungan kehidupan yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama juga perlu dibiasakan sejak dini, mulai dari tingkat sekolah dasar seharusnya nilai-nilai agama sudah mulai diajarkan. Perlu adanya wadah yang tepat untuk dapat mempermudah masyarakat Kabupaten Banjar dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam keseharian. Misalkan, adanya lembaga keagamaan yang bisa mempermudah masyarakat dalam beramal dan lembaga pesantren yang bisa mewadahi masyarakat belajar ilmu keagamaan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan misi keagamaan, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai panduan lima tahun ke depan. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar:

Tabel 5. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama	Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari		Indikator tujuan: Angka kriminalitas	11,16			10,17	9,40	8,44	
		Pelestarian budaya keagamaan	Indikator sasaran: Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	50%			66,66%	83,33%	83,33%	
		Pemberdayaan lembaga keagamaan	Indikator sasaran: Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan				2,92%	10,21%	11,13%	
			Indikator sasaran: Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	NA			40%	50%	60%	
		Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Indikator sasaran: Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum	NA			3%	2%	2%	

Misi 2 (Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial)

Salah satu faktor penting dalam pencapaian tujuan pembangunan bagi Pemerintah Kabupaten Banjar adalah sumber daya manusia (SDM). Faktor SDM dinilai penting karena membutuhkan pengelolaan yang baik dalam rangka peningkatan mutu kinerja pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Banjar. Berdasarkan kondisi tersebut, Misi 2 dari Pemerintah Kabupaten Banjar adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.

Perwujudan misi SDM ini akan memberikan ruang bagi percepatan pembangunan SDM yang berkualitas di Kabupaten Banjar. Misi ini menyentuh beberapa urusan yaitu: pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kesejahteraan sosial. Pendidikan merupakan salah satu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dalam meningkatkan kualitas SDM. Intervensi pendidikan dilakukan melalui dua aspek yaitu akses pendidikan dan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan layanan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas dinilai dapat menghasilkan lulusan yang kompeten sehingga dapat meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Banjar.

Pembangunan kesehatan berkontribusi pada kualitas SDM di Kabupaten Banjar. Kesehatan merupakan salah satu sektor layanan dasar yang wajib diberikan Pemerintah Kabupaten Banjar kepada masyarakat. Melalui misi kedua ini, pemerintah Kabupaten Banjar berusaha untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu sektor yang akan ditingkatkan di Kabupaten Banjar. Sektor ketenagakerjaan memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar. Produk dari sektor ini adalah

angkatan kerja. Angkatan kerja yang besar dengan kualitas yang baik merupakan salah satu modal besar bagi pembangunan ekonomi Kabupaten Banjar di masa mendatang.

Pemerintah Kabupaten Banjar juga berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Sektor besar ini ditopang oleh sektor sosial dan penanggulangan bencana. Salah satu sebab pentingnya peningkatan kesejahteraan sosial adalah kondisi PMKS di Kabupaten Banjar masih relatif besar. Mayoritas penyebab munculnya PMKS di Kabupaten Banjar adalah lanjut usia terlantar, wanita rawan sosial ekonomi, dan keluarga berumah tidak layak huni.

Berdasarkan paparan pentingnya peranan SDM tersebut, maka perwujudan misi terkait SDM di Kabupaten Banjar sangat penting terlaksana dengan baik. Beberapa rumusan tujuan strategis. Beberapa poin tujuan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia
- b. Menurunnya tingkat pengangguran
- c. Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial
- d. Menurunnya risiko bencana

Dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan tersebut, dibutuhkan kondisi sasaran yang akan dicapai di Kabupaten Banjar. Sasaran merupakan panduan pembangunan lima tahun daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indikator tujuan: Indeks Pembangunan Manusia	66,87	67,77	66,99				
		Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indikator sasaran: Indeks Pendidikan				57.71	58.18	58.66	
		Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Indikator sasaran: Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk				4.52	4.70	4.87	

		Meningkatnya pelestarian budaya	Indikator sasaran: Persentase budaya yang dilestarikan				70.73 %	75.61%	75.61 %	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indikator sasaran: Usia Harapan Hidup				66.66	66.80	66.94	
		Mantapnya ketahanan pangan daerah	Indikator sasaran: Indeks Ketahanan Pangan				50.90 %	51.00%	51.10 %	

		Meningkatnya kesehatan reproduksi	Indikator sasaran: Tingkat Pertumbuhan penduduk							
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Indikator sasaran: Indeks kebugaran				0.500	0.600	0.700	
	Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	Indikator tujuan: Angka Pengangguran				3.08	3.06	3.04	
			Indikator sasaran: Tingkat kesempatan kerja							
		Membaiknya hubungan industrial	Indikator sasaran: Persentase penyelesaian Sengketa Industrial				0.06	0.70	0.80	
	Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan	Indikator tujuan: Angka Kemiskinan				2.66	2.50	2.45	

		masalah sosial	Indikator sasaran: Persentase penurunan PMKS	0.86	1.86	1.64	1.51	2.05	2.33	
		Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indikator sasaran: Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				77	77,5	77,8	
	Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif	Indikator tujuan: Indeks Risiko Bencana	173	170	167	164	161	158	
			Indikator sasaran: Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha							
			Indikator sasaran: Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekonstruksi)				20%	25%	30%	

Misi 3 (Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan)

Kabupaten Banjar memiliki potensi ekonomi yang besar di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kondisi geografis Banjar yang terletak di Kalimantan Selatan dengan kontur tanah yang rata, diikuti oleh kekayaan akan sumber daya air menyebabkan sektor pertanian tumbuh pesat, walaupun masih diperlukan optimalisasi pengelolaan agar mampu mendukung progresivitas laju pertumbuhan ekonomi. Pada sektor pertanian Kabupaten Banjar memiliki potensi yang baik untuk pengembangan tanaman padi, jagung, jeruk, pisang, durian dan kedelai.

Pada sektor perkebunan Kabupaten Banjar memiliki potensi yang besar dalam pengembangan budidaya karet, kopi, kelapa dalam, atsiri dan kakao. Beberapa jenis tanaman perkebunan tersebut mampu menjadi komoditas utama jika dikembangkan dengan baik. Standarisasi produk dan kontinuitas produksi menjadi determinan yang perlu ditingkatkan untuk menjaga volume permintaan pasar terhadap produk-produk komoditas pertanian dan perkebunan Kabupaten Banjar.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar yang relatif menurun dari tahun 2012 hingga 2016. Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi harus diantisipasi oleh kebijakan preventif, seperti penguatan fondasi perekonomian pada sektor penyumbang PDRB terbesar. Upaya tersebut harus diikuti oleh pengembangan sektor-sektor potensial penopang usaha agribisnis di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian yang besar terhadap kelestarian lingkungan dan inklusivitas pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan utama yang harus ditekankan dalam pembangunan daerah.

Potensi masuknya para pedagang dan pelaku industri dari luar

daerah ke Kabupaten Banjar sangat terbuka lebar. Sektor perdagangan mayoritas digerakkan perdagangan di sektor pertanian dalam arti luas dan makanan. Jenis perdagangan yang dijalankan umumnya berupa perdagangan kecil dan menengah. Barang yang dijual dapat berupa bahan makanan kebutuhan pokok, sayur, buah dan berbagai hasil pertanian lainnya. Di perkotaan barang yang dijual pada umumnya berupa peralatan rumah tangga dan perangkat elektronik. Jalur sungai yang membentang di sepanjang Kabupaten Banjar menjadi jalur distribusi utama bagi pergerakan barang dan jasa serta pengembangan sektor pariwisata. Peran moda transportasi air sangat berpengaruh besar bagi perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata Kabupaten Banjar.

Kabupaten Banjar juga memiliki potensi yang baik dalam pengembangan industri pariwisata. Terdapat destinasi wisata perdagangan pasar terapung dan berbagai destinasi lainnya yang mampu menjadi stimulan bagi pertumbuhan sektor industri dalam daerah. Pada sektor pariwisata, potensi air dan sungai yang melimpah mampu menjadi sumber daya tarik wisata air yang bagus. Diperlukan kerjasama antar berbagai stakeholder untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wisata air tersebut. Dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah di berbagai sektor potensial tersebut, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai panduan pembangunan lima tahun ke depan. Berikut adalah tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar:

Tabel 5. 3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri	Meningkatnya Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah		Indikator Tujuan: Laju Pertumbuhan ekonomi	4,66		5,21	6,11	6,32	6,52	
			Indikator Tujuan Indeks Gini	0,34		0,287	0,34	0,33	0,32	
			Indikator Tujuan: Laju Inflasi	3,82		3,8	3,8	3,77	3,75	
		Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan	Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian	1,10			2,05	2,08	3,01	

		ekonomi	Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	7,68			4,6	4,70	4,80	
		Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Indikator Sasaran: Pertumbuhan omzet koperasi	- 19,18%			4%	4%	4%	
			Indikator Sasaran: Pertumbuhan omzet usaha mikro kecil	5			5,20%	5,20%	5,20%	
			Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,72			7,1	7,50	7,60	
			Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	5,92			6,1	6,50	6,50	

			Indikator Sasaran: Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,10			6,51	6,71	6,74	
		Meningkatnya nilai invetsasi	Indikator Sasaran: Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	NA			1,00	1,00	1,00	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indikator tujuan: IKLH	68,28			69,7	70,9	72,1	
		Meningkatnya kualitas air	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Air (IKA)	36	tercemar	Tidak tercemar	39	41	43	
		Meningkatnya kualitas udara	Indikator Sasaran: Indeks Kualitas Udara (IKU)	103	Tidak tercemar	Tidak tercemar	106	108	110	

		Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indikator Sasaran: Indeks Tutupan Lahan	65,54			65,64	66,54	67,46	

Misi 4 (Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur)

Kabupaten Banjar masih menghadapi persoalan mendasar terkait rendahnya akses dan kualitas infrastruktur dasar. Hal tersebut menjadi salah satu prioritas dalam perwujudan pembangunan berkeadilan di daerah dengan semangat ‘barokah’ ini. Persoalan tersebut mengacu pada belum optimalnya ketersediaan serta kualitas jalan dan jembatan, perhubungan, tata ruang dan bangunan, serta perumahan dan pemukiman.

Beberapa wilayah belum terhubung jalur darat dengan baik, sehingga konektivitas antar wilayah menjadi tugas utama demi memperlancar mobilitas orang, barang dan jasa. Konteks yang sama terjadi pada sektor perhubungan sungai. Rendahnya infrastruktur menyebabkan konektivitas antar wilayah di pinggiran sungai belum terjalin dengan baik.

Penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan pemukiman juga masih menghadapi persoalan krusial. Rendahnya kelayakhunian mengindikasikan bahwa pemenuhan kebutuhan papan dasar masyarakat masih problematis. Persoalan ini juga dipengaruhi oleh belum optimalnya penataan ruang dan bangunan. Oleh karena itu, memberikan akses rumah yang baik, air bersih yang memadai, lingkungan perumahan yang bersih dan sehat serta penataan ruang dan bangunan yang sesuai peraturan perundang-undangan merupakan tugas utama yang harus diselesaikan.

Beberapa persoalan di atas melatarbelakangi dirumuskannya misi yang secara eksklusif memprioritaskan infrastruktur dasar sebagai objek utama pembangunan. Perwujudan misi ini yang sekaligus ditopang dengan beberapa tujuan dan indikator tujuan diharapkan mampu mempercepat optimalisasi potensi ekonomi, memperbaiki pelayanan publik di semua wilayah serta pada akhirnya mewujudkan cita-cita kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

Tabel 5. 4 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 4: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah		Indikator Tujuan: Rasio Konektivitas	NA			73,67%	76,33 %	78,73 %	
		Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	Indikator Sasaran: Rasio Prasarana transportasi	NA			61,34%	63,46 %	65,14 %	
		Meningkatnya akses dan kualitas saranatransportasi	Indikator Sasaran: Rasio Sarana transportasi	NA			85,99%	89,20 %	92,33 %	
	Meningkatnya Kelayakhunian		Indikator Tujuan: Rasio Permukiman Layak Huni	NA			70,49%	75,19 %	79,00 %	
		Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	Indikator Sasaran: Rasio Rumah Layak Huni	NA			97,71%	97,86 %	98,00 %	
			Indikator Sasaran: Rasio Lingkungan Pemukiman yang Nyaman	NA			48,41%	53,05 %	57,49 %	
		Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Indikator Sasaran: Persentase Pemanfaatan Tata Ruang dan Bangunan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	NA			56,28%	67,12 %	75,18 %	

Misi 5 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Amanah)

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Banjar. Prinsip-prinsip pokok dalam tata kelola pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi sangat diperlukan dalam setiap aktivitas pemerintahan. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam dua bagian yaitu, akuntabilitas administratif dan sosial. Akuntabilitas administratif cenderung bersifat internal, yaitu melalui perbaikan kualitas tata kelola keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat sebagai warga negara yang berhak menikmati hasil pembangunan. Dalam prinsip ini, menandakan ada upaya untuk mengawal proses pembangunan hingga dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat.

Perbaikan tata kelola pemerintahan juga dapat ditempuh melalui upaya mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Hal ini terkait kondisi aparatur pemerintahan khususnya pemerintah Kabupaten Banjar yang belum menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi secara optimal. Terbukti dari kondisi kelembagaan dan ketatalaksanaan yang belum memadai. Adanya prinsip tersebut, mendorong pula peningkatan profesionalisme aparatur daerah.

Upaya perbaikan kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus berupaya memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Diharapkan ruang partisipasi masyarakat dapat tersedia sampai ditingkat kelurahan atau desa. Pembangunan pedesaan yang baik akan mencerminkan pembangunan daerah yang baik pula, karena keberhasilan pembangunan daerah merupakan akumulasi dari keberhasilan pembangunan di desa. Di samping itu, seiring keterbukaan pemerintah daerah, juga berdampak pada terbukanya akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan aduan terkait kinerja pemerintah daerah.

Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, maka harus disusun tujuan dan sasaran sebagai pedoman pembangunan daerah 5 (lima) tahun ke depan. Berikut ini adalah tujuan dan sasaran misi 5 yang akan dicapai oleh Kabupaten Banjar.

Tabel 5. 5 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjar Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan amanah	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan		Indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66.67			65,00	67,50	70,00	
		Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal	Indikator sasaran: Indeks profesionalitas ASN	55			59,49	65,00	70,00	
		Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Indikator sasaran: Indeks Kepatuhan	NA			88,38	89,25	90,13	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Indikator sasaran: Nilai Sakip	62.62			70,01	72,05	75,30	
		Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indikator sasaran: Persentase Partisipasi masyarakat dalam pemilu	67.39			73%	73%	.	
		Meningkatnya kualitas	Indikator sasaran: Skor evaluasi	386			416	431	446	

		pembangunan desa	perkembangan desa							
		Meningkatnya keterbukaan informasi publik	Indikator sasaran: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA			2,3	2,5	2,8	
			Indikator sasaran: Indeks keterbukaan informasi	NA			40	70	100	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indikator sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat	NA			81,9	82	82	
		Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Indikator sasaran: Opini BPK	WTP=1			WTP:1	WTP:1	WTP:1	
			Indikator sasaran: Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah	11.36%		10.90 %	11,25 %	11,50 %	11,75%	
			Indikator sasaran: Nilai/skor EKPPD	3.1797			3,18	3,19	3,2	

BAB VI

STRATEGI, ARAH

KEBIJAKAN DAN PROGRAM

PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Banjar disusun berdasarkan pemetaan masalah dan akar masalah yang telah dijabarkan di Bab IV. Strategi dan arah kebijakan disusun sebagai dasar untuk menentukan kebijakan umum dan program pembangunan daerah. Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah telah disertai dengan perumusan indikator kinerja sasaran. Hal ini agar terdapat sinergi antara indikator pada level *impact* (sasaran) dengan upaya pencapaiannya melalui strategi, arah kebijakan, dan program. Berikut adalah strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah masing-masing misi:

6.1. Misi 1:

Meningkatkan Pengamalan Ajaran Agama Dan Suasana Kehidupan Beragama.

Nilai-nilai keagamaan berperan dalam membentuk masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Masyarakat dengan ketaqwaan beragama yang tinggi akan semakin kuat dalam membentengi dirinya dari dekadensi moral yang merusak nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai keagamaan, budaya, dan adat merupakan landasan keyakinan serta ajaran moral bagi masyarakat dalam menggerakkan pembangunan daerah, sebagai landasan perilaku yang diwujudkan dalam seluruh sendi-sendi

kehidupan masyarakat. Nilai keagamaan dapat ditempatkan sebagai sumber inspirasi dan motivasi serta basis nilai utama dalam kehidupan. Strategi dan arah kebijakan yang disusun harus dapat mengakomodir tercapainya tujuan, sehingga harus meliputi pengamalan nilai-nilai agama di semua sektor yang ada di Kabupaten Banjar, diantaranya sektor kebudayaan, kelembagaan, keamanan, dan ketertiban. Jika semua sektor tersebut telah terakomodir dengan pengamalan nilai agama, maka kehidupan masyarakat yang sejahtera dan barokah akan tercapai. Strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah:

Tabel 6. 1 Visi, Misi, tujuan, Sasaran dan Strategi Kabupaten Banjar

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah”			
Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya a nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Pelestarian budaya keagamaan	Meningkatkan ekspresi budaya	Peningkatan even festival budaya yang bernuansa religi
		Perayaan hari besar keagamaan	Peningkatan keselarasan pengamalam agama, seni dan budaya
	Pemberdayaan lembaga keagamaan	Meningkatkan manajemen lembaga zakat	Peningkatan kapasitas lembaga zakat
		Integrasi pendidikan agama di sekolah formal	Menyelenggarakan pendidikan baca tulis Al-qur’an
			Pemberian insentif bagi guru baca tulis al-quran dan madrasah
			Peningkatan kapasitas pendidik
	Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Meningkatkan kepatuhan terhadap perda	Pembinaan kelompok masyarakat
			Pengawasan pelaksanaan perda
		Meningkatkan peran serta Pemuda dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Peningkatan kapasitas pemuda
		Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan	Penguatan masyarakat sipil

		ketertiban	
		Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan
			Peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum

Tabel 6. 2 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Kabupaten Banjar

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir periode RPJMD		Pemangku Urusan
				2017		2018		2019		2020		2021				
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1 : Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama																
	Tujuan Meningkatnya nuansa kehidupan beragama masyarakat dalam kehidupan sehari-hari	Angka Kriminalitas	11,16					10,17		9,40		8,44				
	Sasaran Pelestarian budaya keagamaan	Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	50%					66,66%		83,33%		83,33%				
	Program Pembangunan Daerah: Program pelestarian nilai budaya lokal	Persentase budaya lokal yang terkelola dengan baik	36,36%					45,45%		54,55%		54,55%				Dinas Budpar
	Sasaran Pemberdayaan lembaga keagamaan	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	NA					2,92%		10,21%		11,13%				
		Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	NA					40%		50%		60%				

	Program Pembangunan Daerah: Program pembinaan manajemen lembaga keagamaan	presentase lembaga zakat yang terbina	NA					20,23		23,12		26,01				Setda
	Sasaran Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum	NA					3%		2%		2%				
	Program Pembangunan Daerah: Program peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Persentase penurunan kasus kriminal														Satpol PP
		Angka toleransi beragama														

6.2. Misi 2:

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.

Pada bagian ini dijelaskan terkait strategi dan arah kebijakan untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran misi 2 Kabupaten Banjar. Secara kontekstual, strategi dan arah kebijakan didasarkan pada masalah dan akar masalah yang mempengaruhi terjadinya masalah pokok. Tujuan dan sasaran misi 2 memiliki sejumlah masalah pokok yang harus ditangani pada bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial.

Masalah pokok pada bidang pendidikan adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat, serta belum optimalnya pelestarian budaya. Masalah pokok pada bidang kesehatan adalah tingginya risiko kematian, tingginya tingkat kesakitan masyarakat, memburuknya gizi balita, rendahnya kesehatan reproduksi, dan rendahnya partisipasi masyarakat berolahraga. Masalah pokok pada bidang ketenagakerjaan adalah rendahnya kesempatan/lapangan kerja dan memburuknya hubungan industrial. Masalah pokok pada bidang kesejahteraan sosial adalah rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial, rendahnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan perempuan dan anak, dan rendahnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif. Berdasarkan paparan kondisi masalah pokok yang dihadapi, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 3 Strategi Dan Arah Kebijakan Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial

Visi: Terwujudnya masyarakat Banjar yang sejahtera dan barokah			
Misi : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan kuantitas sekolah PAUD di kecamatan
			Peningkatan kuantitas sekolah penyelenggara pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kecamatan
		Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan	Peningkatan pembangunan sekolah pada wilayah terpencil
			Penyediaan moda transportasi menuju sekolah pada wilayah terpencil
			Perbaikan fasilitas pendidikan
		Pemberdayaan madrasah dan pesantren	Meningkatkan bantuan teknis dan non teknis kepada madrasah swasta dan pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket
			Peningkatan tunjangan kesejahteraan guru-guru agama TKA/TPA dan madrasah Diniyah
		Meningkatkan pelayanan sekolah inklusi	Meningkatkan jumlah sekolah inklusi di kecamatan
		Pemerataan kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik SD dan SMP
			Meningkatkan ketersediaan tenaga kependidikan non guru SD dan SMP
			Peningkatan internalisasi nilai agama dalam kegiatan belajar mengajar

			Meningkatkan pembinaan dinas terkait dalam pelaksanaan penyesuaian kurikulum untuk mendukung proses KBM yang efektif
	Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Meningkatkan jangkauan pelayanan perpustakaan	Peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan
	Meningkatnya pelestarian budaya	Meningkatkan penghargaan/apresiasi terhadap seni dan budaya	Peningkatan pemahaman, kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pengembangan seni dan budaya
			Peningkatan kajian sejarah lokal
		Meningkatkan perlindungan benda, situs dan kawasan cagar budaya	Peningkatan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya.
			Peningkatan kajian warisan/cagar budaya
			Peningkatan ketersediaan data kebudayaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi kesehatan ibu	Mengintegrasikan penanganan masalah kematian ibu melahirkan dari hulu sampai ke hilir
		Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Peningkatan fasilitas sarana pelayanan ibu hamil di Puskesmas dan jaringannya
		Meningkatkan pelayanan PONEK	Peningkatan redistribusi tenaga medis dan tenaga keperawatan di RSUD

			Peningkatan Sarana dan Prasarana pelayanan Ponek di RSUD sesuai standard klasifikasi rumah sakit
		Meningkatkan kesehatan bayi dan balita	Pendampingan dan pemantauan gizi bayi dan balita
		Meningkatkan pelayanan PICU/NICU di RSUD	Peningkatan kompetensi tenaga perawat dalam pelayanan PICU/NICU di RSUD
			Peningkatan kualitas sarana prasarana kesehatan terkait pelayanan PICU/NICU di RSUD
		Pengembangan sistem kewaspadaan dini, surveilans kesehatan dan pengendalian penyakit	Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan penyakit menular (PM)
			Peningkatan pengembangan sistem kewaspadaan dini dan surveilans kesehatan PTM
		Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang penerapan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	Meningkatkan upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, pola makan sehat dan berobat ketika sakit
		Peningkatan penerapan hidup sehat	Meningkatkan gizi masyarakat
		Peningkatan Kinerja dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di puskesmas
			Meningkatnya kinerja dan mutu Instalasi Farmasi
			Meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda)

	Mantapnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketersediaan pangan utama	Optimalisasi pengelolaan komoditas produksi tanaman pangan
			Peningkatan Promosi Ketahanan Pangan Daerah
		Peningkatan akses pangan	Optimalisasi suplai pangan daerah
		Peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan	Pengembangan diversifikasi pangan non-beras
			Pengembangan sertifikasi layak konsumsi pangan dari dalam daerah
	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Peningkatan akses pelayanan KB	Peningkatan jumlah PUS menggunakan alat kontrasepsi (alkon)
			Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung program KKBPK (Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga)
			Meningkatkan advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang KB dan kesehatan reproduksi
			Meningkatkan kapasitas keluarga melalui kelompok Bina ketahanan dan Kesejahteraan keluarga
	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga	Peningkatan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Peningkatan Aktivitas Fisik massal
Meningkatkan Sarana dan Prasana Olahraga		Meningkatkan kuantitas Sarana dan Prasana Olahraga	
Menurunnya tingkat pengangguran	Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	Peningkatan kerjasama dengan penyedia lapangan kerja	Pelaksanaan bursa kerja
			Fasilitasi penyediaan lapangan kerja

		Peningkatan kapasitas dan kompetensi pencari kerja	Peningkatan Keahlian sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui pendidikan vokasi
	Membaiknya hubungan industrial	Perlindungan dan advokasi kepentingan tenaga kerja	Fasilitasi penyelesaian sengketa hubungan industrial
Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Meningkatkan pembinaan dan penanggulangan masalah sosial	Meningkatkan Penanganan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya
		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatkan pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
		Meningkatkan pelayanan Penanganan PMKS	Meningkatkan fasilitasi program keluarga harapan
			Meningkatkan Pembinaan Para Penyandang Cacat & Trauma
			Meningkatkan Pembinaan Anak/Orang yang terlantar
			Meningkatkan penanganan dan pemberian bantuan orang terlantar, gelandangan, dan gelandangan psikotik (kelainan jiwa yang masih dapat disembuhkan)
		Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Meningkatkan verifikasi dan bantuan bagi keluarga tidak mampu
			Meningkatkan penanggulangan bencana Alam
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas kelompok perempuan dalam kegiatan ekonomi	Meningkatkan kapasitas SDM perempuan Meningkatkan kecakapan hidup perempuan

		Meningkatkan pendampingan, perlindungan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kapasitas SDM lembaga yang bergerak di perlindungan perempuan dan anak
		Meningkatkan kelembagaan Kabupaten layak anak	Meningkatkan koordinasi antara masyarakat, dunia usaha, dan media
Menurunnya Risiko Bencana	Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif	Meningkatkan masyarakat yang tangguh bencana.	Meningkatkan pencegahan bencana
		Meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan pemahaman masyarakat tanggap bencana
			Peningkatan kerjasama penyiapan logistik
		Meningkatkan kemampuan kedaruratan	Peningkatan koordinasi lembaga tanggap bencana
		Meningkatkan pencegahan bencana	Peningkatan ketersediaan bangunan pengendali banjir
		Meningkatkan pemulihan masyarakat dan sarana prasarana yang lebih baik.	Meningkatkan kesiapsiagaan logistik
			Meningkatkan rehabilitasi pasca bencana
		Meningkatkan perencanaan penanggulangan bencana	Meningkatkan rekonstruksi pasca bencana
			Meningkatkan efektifitas perencanaan penanggulangan PB

Tabel 6. 4 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 2

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pemangku urusan
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 2 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial																
	Tujuan: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	66,87	67,77		66,99		67.31		67.63		67.95				
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan						57.71		58.18		58.66				
	Program Pembangunan Daerah: Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,76	11,78		11,8		11.85		11.90		11.95				
		Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,28	7,38		7,48		7,58		7,68		7.78				
		Angka Putus Sekolah SD		0,28%		0.26%		0.25%		0.24%		0.23%				
		Angka Putus Sekolah SMP		0.35%		0.76%		0.68%		0.60%		0.52%				
		Angka kelulusan siswa SD/MI		99.89%		99.90%		99.91%		99.92%		99.93%				
		Angka kelulusan siswa SMP/MTs		99.79%		96.60%		97.73%		98.87%		99.87%				
		Rata-rata nilai UN SD		57.9		59.3		60		60.50		61.0				

		Rata-rata nilai UN SMP		55.5		53.16		54		54.3		54.4				
		Angka Melek Huruf						98%		100%		100%				
	Sasaran: Meningkatnya budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat	Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk						4.52		4.7		4.87				
	Program Pembangunan Daerah: Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase pemanfaat layanan perpustakaan														
	Sasaran: Meningkatnya pelestarian budaya	Persentase budaya yang dilestarikan						70.73%		75.61%		75.61%				
	Program Pembangunan Daerah: Program Pelestarian Budaya	Persentase budaya yang dikelola dengan baik						54.55%		63.64%		63.64%				
	Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup						<u>66.66</u>		66.80		66.94				
	Program Pembangunan Daerah: Program Penurunan Risiko Kematian	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	210.5	187.9		158		<u>137.7</u>		110.4		110.4				
		Persentase kematian ibu						0.05		0.04		0.03				

		melahirkan risiko tinggi di rumah sakit														
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	13.8	13		12.2		<u>11.3</u>		10.7		10.7				
		Persentase kematian BBLR (bayi Berat Lahir Rendah) (1000 -2500 gr)						0.07		0.05		0.03				
	Program Pembangunan Daerah: Program Penurunan tingkat kesakitan masyarakat	Persentase Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular						85		90		95				
		Persentase pelayanan dan penanggulangan penyakit tidak menular						85		90		95				
	Program Pembangunan Daerah: Program Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi stunting						20.56		17		17				
	Sasaran: Mantapnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan						50.90%		51.00%		51.10%				
	Program Pembangunan Daerah: Program Penguatan ketahanan pangan	Tingkat ketersediaan pangan														
	Sasaran:	Tingkat						1		1		1				

	Meningkatnya kesehatan reproduksi	Pertumbuhan penduduk														
	Program Pembangunan Daerah: Program Keluarga Berencana	Persentase kelahiran pada usia ideal (20-40 tahun)						60%		65%		70%				
	Sasaran: Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga	Indeks kebugaran						0.5		0.6		0.7				
	Program Pembangunan Daerah: Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga						60%		80%		100%				
	Tujuan: Menurunnya tingkat pengangguran	Angka Pengangguran						<u>3.08</u>		3.06		3.04				
	Sasaran: Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja	Tingkat kesempatan kerja (TKK)						0.01		0.02		0.03				
	Program Pembangunan Daerah: Program Perluasan Kesempatan Kerja dan perbaikan hubungan industrial	Persentase Tenaga kerja yang terserap Pada dunia kerja						5%		5%		5%				

	Sasaran: Membaiknya hubungan industrial	Persentase Penurunan Sengketa Industrial						6		7		8				
	Program Pembangunan Daerah: Program Perluasan Kesempatan Kerja dan perbaikan hubungan industrial	Angka Sengketa pengusaha-pekerja yang ditangani						12		11		10				
	Tujuan: Meningkatnya derajat kesejahteraan sosial	Angka Kemiskinan						2.66		2.50		2.45				
	Sasaran: Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial	Persentase penurunan PMKS	0.86	1.86		1.64		<u>1.51</u>		2.05		2.33				
	Program Pembangunan Daerah: Pemberdayaan PMKS	Persentase PMKS terbina						52.17		53.64		67.38				
	Sasaran: Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)														

	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Persentase kelompok perempuan yang berdaya ekonomi						50.95%		51%		51.05%				
		Persentase penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak						70.00%		75.00%		80.00%				
	Tujuan: Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	173	170		167		<u>164</u>		161		158				
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif	Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha						70%		75%		80%				
		Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekontruksi)						20%		25%		30%				
	Program Pembangunan Daerah: Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.	Persentase desa tangguh bencana														

6.3. Misi 3:

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan pertumbuhan pendapatan, namun juga berhubungan dengan kohesivitas sosial dan kelestarian lingkungan. Kabupaten Banjar memiliki potensi yang baik di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Potensi di berbagai sektor tersebut didukung oleh pertumbuhan sektor agribisnis yang relatif baik. Konsep pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar harus dijalankan dengan mengedepankan pembangunan ekonomi yang mengedepankan inklusifitas pertumbuhan dan kelestarian lingkungan. Semua strategi dan arah kebijakan yang disusun harus mengakomodasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang berdampak langsung pada penguatan kapasitas masyarakat pada berbagai sektor potensial. Merespon berbagai amanah pembangunan nasional, dokumen SDGs dan isu-isu strategis di tingkat lokal, maka strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan oleh Kabupaten Banjar selama lima tahun ke depan adalah:

Tabel 6. 5 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah			
Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Inklusifitas Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Peningkatan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan komoditas unggulan perkebunan	Meningkatkan luas tanam/panen tanaman pangan dan hortikultura
			Meningkatkan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura
			Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan petani dan penyuluh
			Meningkatkan pelayanan irigasi pertanian
			Pengembangan sentra-sentra produksi dan penerapan IPTEK tepat guna
			Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh pertanian
		Meningkatkan pemasaran produk dan pengolahan hasil pertanian	Meningkatkan produk olahan hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura
			Meningkatkan penanganan pasca panen dan pengolahan perkebunan berbasis teknologi
			Meningkatkan mutu olahan dan jaminan keamanan produk olahan asal ternak
		Peningkatan kapasitas produksi hasil peternakan	Meningkatkan kelahiran ternak
			Menekan angka kematian ternak
		Peningkatan kapasitas produksi perikanan budidaya dan tangkap	Peningkatan kapasitas dan jumlah penyuluh peternakan
			Peningkatan kualitas SDM masyarakat perikanan dalam pemanfaatan dan perlindungan SDA dan SDI
			Pengembangan daya dukung lahan dan sumberdaya alam pendukung usaha perikanan

		Peningkatan kapasitas pemasaran produk perikanan	Meningkatkan mutu produk olahan hasil perikanan
Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Revitalisasi Koperasi		Peningkatan kapasitas manajemen usaha koperasi
			Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan koperasi
	Peningkatan daya saing usaha koperasi		Peningkatan kapasitas SDM pengelola koperasi
	Penguatan kapasitas manajerial usaha mikro		Peningkatan kapasitas manajemen usaha dan keuangan UKM
			Peningkatan akses bantuan permodalan UKM
			Peningkatan kualitas tenaga pendamping pengembangan UKM
			Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran UKM
	Memperkuat pasar lokal dan mengembangkan pasar regional, nasional maupun internasional		Peningkatan sarana dan prasarana perdagangan
			Peningkatan kualitas SDM pedagang kecil dan menengah
			Peningkatan standarisasi ekspor produk-produk perdagangan
	Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Menjaga keseimbangan koefisien harga barang kebutuhan pokok dan penting
	Meningkatkan pertumbuhan sektor usaha industri kecil menengah		Pengembangan sektor industri Logam, Mesin Elektronika, dan alat angkut (ILMEASA)
			Pengembangan sektor industri Kimia, Hasil Perkebunan, dan bahan bangunan (AGROKIM)
			Pengembangan kawasan industri
	Meningkatkan kunjungan wisata		Meningkatkan daya tarik destinasi pariwisata
			Meningkatkan keterlibatan stakeholder pariwisata
			Meningkatkan pemasaran pariwisata
Meningkatnya nilai investasi	Peningkatan kondusifitas iklim investasi		Perbaikan kualitas kelembagaan dan perizinan

		Optimalisasi promosi investasi	Peningkatan sinergi kerjasama promosi dan perizinan investasi
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya kualitas air	Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan air	Meningkatkan pemantauan sumber pencemar institusi dan non institusi
			Meningkatkan pengelolaan laboratorium lingkungan
			Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian kerusakan Lingkungan Hidup
	Meningkatnya kualitas udara	Meningkatkan pengendalian kebakaran hutan dan lahan	Fokus di wilayah perkotaan dan hutan
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan dan perlindungan SDA	Peningkatan luas RTH	Penanaman RTH baru dan revitalisasi RTH lama
		Meningkatkan perlindungan pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Meningkatkan perlindungan Sumber Daya Alam
			Meningkatkan pembinaan dan penataan Lingkungan Hidup

Tabel 6. 6 Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif Misi 3

Kode	Misi/ Tujuan/ Sasaran / Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran, Program Pembangunan Daerah)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pemangku Urusan
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan																
	Tujuan: Meningkatnya inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah inklusifitas pertumbuhan ekonomi daerah	LPE	4,70	4,66		5,21		6,11		6,32		6,52				
		Gini		0,35		0,2		0,34		0,33		0,32				
		Laju Inflasi	3,68	3,82		3,8		3,80		3,77		3,75				
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian	5,13%	1,10				2,05		2,08		3,01				
		Program Pembangunan Daerah: Peningkatan produksi pertanian	Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai)		Padi 250.388				Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99%		Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00%		Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19%			Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, Dinas Peternakan dan Perkebunan
			* hortikultura (jeruk, pisang, durian)													
		Persentase peningkatan produksi karet	15980,81	17419,08		19160,99		21268,69		23608,25		26205,16				Dinas Peternakan dan

																Perkebunan
		Persentase peningkatan produksi hasil ternak	1,5%	1,60%		1,80%		2,00%		2,50%		3,00%				Dinas Peternakan dan Perkebunan
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	7,68					4,6		4,70		4,80				
	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan produksi perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (ton)						58000 >>> 63985		60000 >>> 67525		62500 >>> 70761				Dinas Perikanan
		Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton)						10050		10262		10474				Dinas Perikanan
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan omzet koperasi	-19,18					4%		4%		4%				
	Program Pembangunan Daerah: Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi aktif	62,5%	63,5%		64,5%		65,5%		66,5%		67,5%				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap	Pertumbuhan omzet usaha mikro	5%					5,20%		5,20%		5,20%				

	pertumbuhan ekonomi															
	Program Pembangunan Daerah: Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	UM Bankable	3.823	4.523		2.595		500		500		500				Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,72					7,1		7,50		7,60				
	Program Pembangunan Daerah: Pengendalian perdagangan dalam negeri	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	9%					9%		9%		12%				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	5,92					6,1		6,50		6,50				
	Program Pembangunan Daerah: peningkatan pertumbuhan Industri	Persentase pertumbuhan industri	1%					2%		2%		2%				Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	Sasaran: Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM,	Pertumbuhan PDRB sektor	6,10					6,51		6,71		6,74				

	perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi	pariwisata														
	Program Pembangunan Daerah: Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase peningkatan kunjungan wisatawan	1.918.415	1.919.428		1.920.415		1.921.415		1.922.415		1.923.415				Dinas Budaya dan Pariwisata
	Sasaran: Meningkatnya nilai investasi	Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	NA					1,00		1,00		1,00				
	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan investasi daerah	Pertumbuhan investor	70					30		60		90				Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Air	tercemar	Tidak tercemar				39		41		43				
	Program Pembangunan Daerah: Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Status baku mutu pencemaran air														Dinas Lingkungan Hidup
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Udara	Tidak tercemar	Tidak tercemar				106		108		110				
	Program Pembangunan Daerah: Pengendalian	Indeks pencemar SO2	NA													Dinas Lingkungan Hidup

	Pencemaran Lingkungan Hidup	Indeks pencemar NO2	NA													
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam	Indeks Kualitas Tutupan Lahan						65,64		66,54		67,46				
	Program Pembangunan Daerah: Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan luas RTH	1,57	1,58		1,59		1,60		1,61		1,63				Dinas Lingkungan Hidup

6.4. Misi 4:

Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur.

Tujuan utama pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar adalah meningkatnya konektivitas antar wilayah serta semakin baiknya akses masyarakat terhadap pemukiman layak huni. Oleh karena itu, strategi dan arah kebijakan telah dirumuskan secara kontekstual agar prioritas tersebut dapat tercapai secara efektif. Selain itu, strategi dan arah kebijakan telah disesuaikan dengan konteks penyebab isu strategis yang secara faktual terjadi di lapangan.

Peningkatan konektivitas diwujudkan melalui peningkatan akses serta kualitas infrastruktur jalan dan jembatan serta perhubungan. Belum optimalnya konektivitas dipengaruhi oleh rendahnya ketersediaan jalan dan jembatan. Beberapa wilayah belum terhubung ruas jalan. Terlebih lagi, sebagian ruas jalan dan panjang jembatan yang sudah terbangun belum sesuai standar atau mengalami kerusakan. Pola yang sama terjadi pada sektor perhubungan. Ketersediaan serta kualitas perhubungan darat dan sungai belum memadai. Gejala-gejala tersebut menyebabkan mobilitas orang dan barang antar wilayah belum optimal.

Pada sektor perumahan dan pemukiman, persoalan-persoalan muncul mulai dari rendahnya backlog perumahan hingga belum optimalnya kualitas rumah dan lingkungan pemukiman. Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada peningkatan kepemilikan rumah layak huni, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni serta peningkatan PSU lingkungan pemukiman. Intervensi-intervensi tersebut diharapkan mampu menyelesaikan akar masalah sehingga tingkat kelayakhunian di Kabupaten Banjar dapat dioptimalkan.

Tabel 6. 7 Strategi dan Arah Kebijakan Misi 4: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur

Visi: Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar yang Sejahtera dan Barokah			
Misi: Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Meningkatnya akses dan kualitas prasarana transportasi	Peningkatan jaringan jalan dan jembatan	Pembangunan dan perbaikan jaringan Jalan Kabupaten
			Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan poros desa
		Peningkatan simpul jaringan perhubungan	Meningkatkan keterpenuhan dan kelayakan prasarana perhubungan
			Meningkatkan pengelolaan dan pengoperasian prasarana perhubungan
			Meningkatkan ketersediaan fasilitas keselamatan
		Meningkatnya akses dan kualitas sarana transportasi	Peningkatan sistem jaringan transportasi
	Peningkatan keselamatan transportasi		Peningkatan kelayakan kendaraan bermotor
			Peningkatan kapasitas pengguna transportasi
	Meningkatnya Kelayakhunian	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	Peningkatan ketersediaan rumah
Peningkatan tertib penyelenggaraa n perizinan perumahan			Peningkatan Fasilitasi penerbitan perizinan perumahan (rumah umum, rumah khusus, rumah susun)
			Peningkatan koordinasi

			penerbitan dan sosialisasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan
		Peningkatan akses air bersih	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih perpipaan
			Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana air bersih non perpipaan
		Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah	Peningkatan pengelolaan air limbah individual
			Peningkatan pengelolaan air limbah komunal
			Peningkatan pengelolaan air limbah kawasan
			Peningkatan pengelolaan air limbah IPLT
		Peningkatan pengelolaan persampahan	Peningkatan upaya pengurangan volume sampah
			Peningkatan upaya pengelolaan sampah terintegrasi
			Peningkatan pengelolaan B3 dan limbah B3
			Pengelolaan dan pemeliharaan prasarana TPA
			Pengembangan bank sampah
		Peningkatan Luasan RTH	Meningkatkan penyediaan dan pemeliharaan RTH publik
		Pengembangan sistem drainase	Pengembangan sistem drainase skala lingkungan
			Pengembangan sistem drainase skala kawasan

		Peningkatan akses jalan lingkungan	Peningkatan ketersediaan jalan lingkungan skala perumahan, pemukiman, perkotaan dan kawasan strategis
		Peningkatan Penerangan Jalan	Peningkatan penerangan jalan
			Peningkatan penerangan jalan umum
		Peningkatan ketersediaan dan pengelolaan RTH	Peningkatan ketersediaan dan pemeliharaan RTH publik
		Peningkatan proteksi kebakaran	Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala lingkungan
			Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana proteksi kebakaran skala kawasan
		Peningkatan infrastruktur di kawasan strategis	Peningkatan tata bangunan dan lingkungan di kawasan strategis
		Pengendalian dan pencegahan kawasan kumuh	Pengendalian dan peningkatan kualitas di kawasan permukiman kumuh
	Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Peningkatan ketertiban tata ruang	Peningkatan perencanaan tata ruang
			Peningkatan pengendalian pemanfaatan tata ruang
		Peningkatan bangunan gedung	Penyediaan NSPK bangunan gedung
			Penyediaan bangunan sesuai standar
		Peningkatan ketertiban konstruksi	Peningkatan pembinaan konstruksi

			Peningkatan kualitas penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten
			Peningkatan kualitas pelayanan ijin usaha konstruksi
			Peningkatan pengawasan dan penertiban penyelenggaraan konstruksi

Tabel 6. 8 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 4

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ <i>impact</i> / <i>outcome</i>)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pemangku Urusan
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 1 : Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur																
	Tujuan: Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Rasio Konektivitas	NA					73,67%		76,33%		78,73%				Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas transportasi	Rasio Prasarana transportasi	NA					61,34%		63,46%		65,14%				Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan
	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan jaringan jalan	Cakupan kawasan strategis terhubung jaringan jalan dalam kondisi mantap	NA													Dinas PUPR
	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan keselamatan transportasi	Persentase ketersediaan fasilitas keselamatan transportasi	NA													Dinas Perhubungan
	Sasaran: Meningkatnya akses dan kualitas sarana	Rasio sarana transportasi	NA					85,99%		89,20%		92,33%				Dinas Perhubungan

	transportasi															
	Program Pembangunan Daerah: Peningkatan sarana angkutan	Rasio angkutan umum (darat, laut, SDP) layak terhadap jumlah penduduk	0,000583					0,000611		0,000636		0,000659				Dinas Perhubungan
	Sasaran: Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang nyaman	Rasio rumah layak huni (40%)	NA					97,71%		97,86%		98,00%				Dinas Permukiman
		Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman (30%)	NA					48,41%		53,05%		57,49%				
	Tujuan Meningkatnya kelayakhunian	Persentase permukiman layak huni	NA					70,49%		75,19%		79,00%				
	Pembangunan Daerah: Peningkatan rumah layak huni	Persentase peningkatan rumah layak huni	NA													Dinas Permukiman
	Pembangunan Daerah: Peningkatan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman	Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman	NA													Dinas Permukima, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP

	Sasaran: Meningkatnya ketertiban ruang dan bangunan	Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang (30%)	NA					56,28%		67,12%		75,18%				Dinas PUPR
	Pembangunan Daerah: Peningkatan ketertiban tata ruang	Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	NA													Dinas PUPR
	Pembangunan Daerah: Peningkatan ketertiban bangunan	Persentase pemanfaatan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang	NA													Dinas PUPR

6.5. Misi 5:

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah.

Tata kelola pemerintahan yang berkualitas menjadi penggerak pembangunan di berbagai bidang. Persoalan yang selama ini terjadi di Kabupaten Banjar adalah belum optimalnya peran aparatur pemerintahan untuk menggerakkan pembangunan. Hal ini ditambah dengan persoalan akuntabilitas internal dan eksternal pemerintah daerah. Adanya persoalan tersebut membutuhkan cara yang tepat sekaligus fokus untuk menangani persoalan, sehingga visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD dapat terwujud. Upaya tersebut perlu ditopang dengan berbagai strategi dan arah kebijakan yang berkaitan. Adapun strategi dan arah kebijakan untuk menjalankan Misi 5 adalah sebagai berikut:

Tabel 6. 9 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi : Terwujudnya Masyarakat Banjar Yang Sejahtera dan Barokah			
Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur daerah yang profesional dan handal	Peningkatan kompetensi ASN	Pemenuhan Formasi sesuai dengan kebutuhan
			Pelaksanaan uji kompetensi bagi ASN
			Pengembangan pola karir aparatur
		Peningkatan kinerja ASN	Penilaian prestasi kinerja
			Pelayanan administrasi kepegawaian
		Peningkatan disiplin ASN	Peningkatan reward dan punishment bagi ASN
		Peningkatan kesejahteraan ASN	Meningkatkan Pemenuhan hak-hak Kepegawaian ASN
	Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan APH terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi
			Fasilitasi penyampaian laporan kekayaan dan pelaporan gratifikasi
			Pendampingan bagi perangkat daerah untuk menuju zona integritas
		Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa	Peningkatan efektifitas tindak lanjut hasil pengawasan
			Penyempurnaan sistem dan prosedur pengawasan
			Peningkatan kemudahan penyampaian pengaduan masyarakat
		Meningkatkan kompetensi aparatur pengawasan	Mengikutsertakan aparatur pengawasan dalam kegiatan diklat, pelatihan mandiri
	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan konsistensi perencanaan
			Meningkatkan koordinasi dalam proses perencanaan

			pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas aparatur perencana
		Meningkatkan kualitas data, penelitian dan pengembangan	Meningkatkan pemanfaat data informasi pembangunan
			Meningkatkan updating data pembangunan melalui SIPD
			Meningkatkan kualitas data dan Penelitian
			Meningkatkan penerapan inovasi daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan ekonomi	Meningkatkan efektifitas perencanaan sumber daya alam
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan perindustrian dan dunia usaha
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sumber daya manusia
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan sosial budaya dan kependudukan
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan pemerintahan
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang dan pertanahan
			Meningkatkan efektifitas perencanaan pembangunan lingkup urusan lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika
	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemilu	Peningkatan fasilitasi kelembagaan partai politik dan pemilu
			Peningkatan pendidikan politik masyarakat
	Meningkatnya kualitas	Meningkatkan pembinaan bidang	Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah

	pembangunan desa	pemerintahan	desa dalam bidang manajemen pemerintahan desa
			Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa
			Peningkatan pembinaan pengelolaan keuangan dan aset desa
		Peningkatan pembinaan bidang kewilayahan dan pemberdayaan masyarakat desa	Peningkatan pembinaan usaha ekonomi di desa
			Peningkatan kerjasama kawasan ekonomi perdesaan
		Meningkatkan pembinaan bidang kemasyarakatan	Peningkatan penataan dan perkembangan desa
			Peningkatan pembinaan pemberdayaan dan kelembagaan masyarakat
			Peningkatan pembinaan pemberdayaan kesejahteraan keluarga
		Meningkatnya keterbukaan informasi public	Peningkatan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik
	Peningkatan transparansi melalui pelaksanaan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE)		
	Peningkatan layanan informasi pembangunan dan pemerintahan		Peningkatan penyebaran capaian pembangunan melalui berbagai media
			Peningkatan kualitas layanan informasi kearsipan
Meningkatnya kualitas pelayanan public	Peningkatan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil secara universal dan inklusif	Peningkatan sarana parasaran kependudukan dan pencatatan sipil	
		Peningkatan akses masyarakat terhadap administrasi kependudukan	
		Peningkatan kerjasama dengan pihak ketiga dan instansi klain terkait administrasi kependudukan	

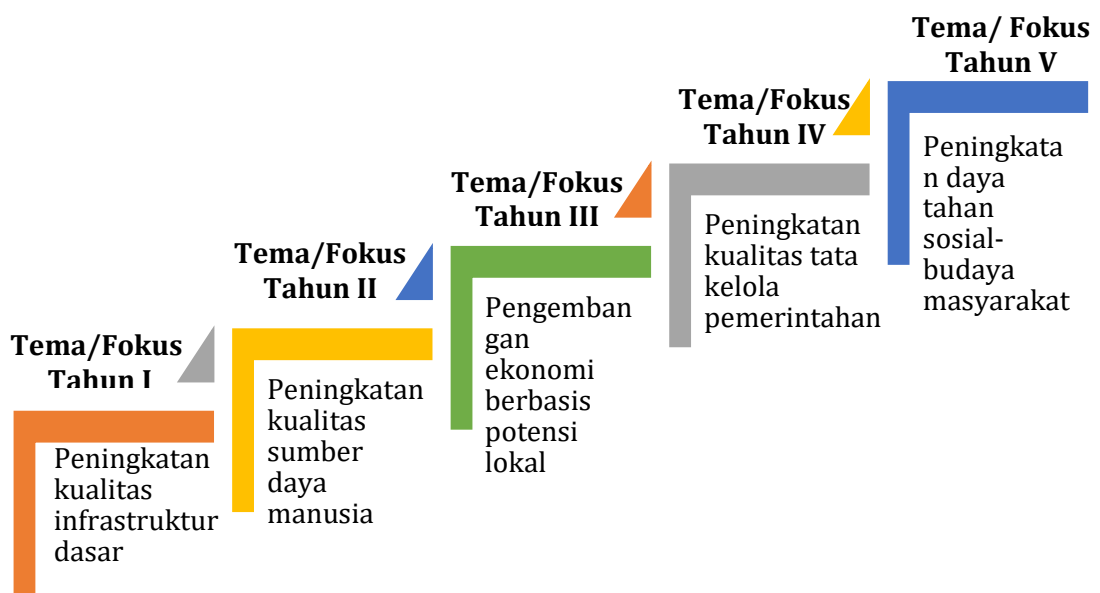
			Peningkatan kualitas kearsipan dokumen pencatatan sipil
			Peningkatan kualitas dan pemutakhiran data kependudukan
			Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan
		Peningkatan pelayanan keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat	Peningkatan pemahaman dan kepatuhan aparat tentang hukum
			Peningkatan pemahaman dan kepatuhan masyarakat tentang hukum
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat
		Peningkatan tertib administrasi pertanahan	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pertanahan
			Fasilitasi Penanganan sengketa pertanahan
			Pembuatan sistem informasi pertanahan
			Sertifikasi Aset Tanah Pemda
			Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
		Peningkatan pelayanan rumah sakit	Peningkatan tata kelola rumah sakit
			Peningkatan fasilitas rumah sakit
			Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
			Fasilitasi dan koordinasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik
		Peningkatan Pelayanan PATEN	Peningkatan sistem pelayanan perizinan
	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Peningkatan akuntabilitas keuangan dan aset daerah	Peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah
			Peningkatan akuntabilitas laporan kinerja SKPD
			Peningkatan legalisasi aset daerah

		Peningkatan kapasitas keuangan daerah	Peningkatan kepatuhan wajib pajak
			Peningkatan akurasi data Pajak daerah
			Penyesuaian harga jual tanah sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT)
			Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah berbasis potensi lokal
		Peningkatan pengendalian pembangunan daerah	Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pengambil kebijaka
			Peningkatan pencapaian indikator kinerja kunci tataran pelaksanaan kebijakan
			Peningkatan Kualitas BUMD
			Peningkatan koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah
			Penyusunan dokumen informasi perekonomian daerah
			Fasilitasi dan koordinasi lingkup perekonomian
		Peningkatan kerjasama pembangunan	Peningkatan kerjasama antar daerah
			Peningkatan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan hari-hari besar nasional
			Peningkatan penyelesaian batas wilayah
			Peningkatan fasilitasi penyusunan rancangan produk hukum daerah
			Peningkatan Fasilitasi Bantuan Hukum
			Fasilitasi dan koordinasi HAM
			Peningkatan fasilitas kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyerap aspirasi masyarakat
		Peningkatan kapasitas kelembagaan perwakilan rakyat	Peningkatan frekuensi hearing/dialog antara DPRD dengan masyarakat

6.6. Tema dan Fokus Pembangunan

Penentuan tema/fokus pembangunan tahunan merupakan bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Tema/fokus pembangunan daerah memberikan panduan dan arahan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam mencapai tujuan pembangunan pada akhir periode lima tahun. Fokus/tema pembangunan tahunan Kabupaten Banjar dalam pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Gambar 6. 1 Tema/ Fokus Pembangunan Per Tahun



6.6.1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tema pembangunan tahun pertama fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur dasar. Hal tersebut mengacu pada pemenuhan infrastruktur transportasi, perumahan dan pemukiman, air bersih, telekomunikasi, ketenagalistrikan serta sarana dan prasarana pelayanan publik dasar. Sektor-sektor tersebut harus terus dibenahi.

Memberikan perhatian utama pada pemenuhan akses infrastruktur dasar merupakan langkah penting yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik merupakan prasyarat utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain itu, infrastruktur yang berkualitas akan berpengaruh signifikan dalam

mengembangkan perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar.

6.6.2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kohesivitas sosial masyarakat. Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh akses masyarakat terhadap pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan. Kedua aspek tersebut berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, karena aspek-aspek dalam penyelenggaraan pelayanan dasar merupakan instrumentasi dari kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek terutama terkait dengan pendidikan, kesehatan, perumahan dan permukiman, serta sosial.

Tema pembangunan ke 2 disusun untuk mengatasi persoalan tersebut. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dijalankan dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan memastikan distribusi pelayanan dasar dapat dirasakan oleh seluruh penduduk Kabupaten Banjar tanpa ada perbedaan yang berarti, serta dengan mengintervensi pelaksana, pengawas, dan pembuat sistem pelayanan dasar di Kabupaten Banjar. Pelayanan dasar yang semakin membaik sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas dan kontribusi penduduk terhadap agenda dan aktivitas pembangunan.

6.6.3. Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal

Kabupaten Banjar memiliki potensi pertanian, perkebunan dan peternakan sebagai penggerak ekonomi. Berbagai sektor potensial tersebut harus dikembangkan secara optimal secara berkelanjutan. Tema pembangunan ke 3 disusun untuk mengatasi persoalan tersebut. Pengembangan sektor pertanian dijalankan dengan peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Upaya ini harus diikuti dengan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian/ perkebunan dan standarisasi produk pertanian, perkebunan dan peternakan agar dapat terserap pasar. Berbagai upaya tersebut harus diikuti

dengan peningkatan kapasitas produksi UKM dan IKM agar produk pertanian dapat diolah secara optimal, sehingga berimplikasi positif pada peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Sektor lain yang harus diperhatikan adalah peningkatan kontribusi perdagangan dan jasa terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Penyederhanaan rantai distribusi dan revitalisasi pasar tradisional menjadi upaya utama yang harus segera dijalankan. Upaya ini tentu harus diikuti oleh peningkatan kapasitas pedagang pasar tradisional. Pengembangan sektor produktif harus menjadi perhatian utama. Peningkatan produktivitas sektor potensial dapat memicu peningkatan kesempatan kerja yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan dan pengeluaran per kapita masyarakat.

6.6.4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan sangat penting bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Prinsip-prinsip pokok dalam tata kelola pemerintahan seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi harus menjadi fondasi dalam aktivitas Pemerintah Kabupaten Banjar. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terbagi dalam dua bagian, yaitu, akuntabilitas administratif dan sosial. Akuntabilitas administratif cenderung bersifat internal, yaitu melalui perbaikan kualitas tata kelola keuangan dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, sedangkan akuntabilitas sosial merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah pada masyarakat sebagai warga negara yang berhak menikmati hasil pembangunan. Selain itu, penerapan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga sangat penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan prinsip ini sebagai bentuk keterbukaan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan daerah. Hal ini dilakukan agar tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat. Prinsip efektifitas

dan efisiensi juga harus digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan biaya yang tidak tinggi. Begitu juga dengan prinsip partisipasi, di mana prinsip ini menjadi cerminan bagi pemerintahan yang demokratis karena setiap masyarakat diikutsertakan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini merupakan salah satu bentuk kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Banjar.

6.6.5. Peningkatan Daya Tahan Sosial-Budaya Masyarakat

Fokus pembangunan pada tahun ke-5 diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan budaya masyarakat Kabupaten Banjar. Peningkatan ketahanan sosial budaya artinya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengatasi perubahan sosial, ekonomi maupun politik dengan tetap memperhatikan kearifan budaya lokal dan nilai-nilai agama. Masyarakat yang memiliki daya tahan sosial berarti mampu mengelola konflik dan mampu mengembangkan kearifan lokal dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Peningkatan daya tahan sosial-budaya masyarakat dapat dijalankan dengan peningkatan pengamalan nilai-nilai agam dan keberdayaan masyarakat Kabupaten Banjar. Upaya ini merupakan cikal bakal dari tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Salah satu kunci utama dari keberhasilan sebuah pembangunan adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi juga bertindak sebagai subjek atau pelaku pembangunan yang memiliki peran aktif. Daya tahan sosial-budaya yang dilandasi oleh pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan tersebut.

Tabel 6. 10 Program Pembangunan Daerah yang Disertai Pagu Indikatif Misi 5

Kode	Misi/Tujuan /Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (tujuan/ impact/ outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2016)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Pemangku urusan
				2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Misi 5 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah																
	Tujuan: Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	66.67					65.00		67.50		70.00				
	Sasaran: Meningkatnya sumber daya aparatur daerah yang profesional dan handal	Indeks profesionalisme ASN	55					59.49		65.00		70.00				
	Program Pembangunan Daerah: Pelayanan administrasi kepegawaian	IKP (Indeks Kepuasan Pengguna) administrasi kepegawaian	86%					86.50%		87.00%		87.50%				BKD
	Sasaran: Meningkatnya integritas aparatur pemerintah daerah	Indeks Kepatuhan	NA					88.38		89.35		90.13				
	Program Pembangunan Daerah: pencegahan dan pemberantasan korupsi	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM	NA					5 %		6 %		6 %				Inspektorat

	(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)														
Sasaran: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Sakip	62.62					70.01 %		72.05 %		75.30 %				
Program Pembangunan Daerah: Peningkatan kinerja pembangunan daerah	Persentase capaian indicator RPJMD	NA													Bapelitbang
Sasaran: Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	67.39					73 %		73 %						
Program Pembangunan Daerah: Pengembangan kelembagaan demokrasi daerah	Persentase lembaga politik yang terbina	100%					100%		100%		100%				Kesbangpol
Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Skor evaluasi perkembangan desa	386					416		431		446				
Program Pembangunan Daerah:	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan	127					137		142		147				DPMD

	Pembinaan bidang pemerintahan dan keuangan dan aset desa	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik	30%					60 %		80 %		100 %				
	Sasaran: Meningkatnya keterbukaan informasi public	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) skor	NA					2.3		2.5		2.8				
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	NA					40		70		100				
	Program Pembangunan Daerah: Pengembangan komunikasi dan informasi	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (indeks)	NA					2.29		2.35		2.41				Diskominfo
		Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (indeks)	NA													
		Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE (indeks)	NA													
		Cakupan jumlah informasi yang terpublikasikan	NA					92.12		95.54		97.24				
	Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA					81.9		82		82				
	Program Pembangunan Daerah:	Persentase perangkat daerah yang telah menjalankan SOP	NA													Seluruh OPD

Pengembangan sistem pelayanan publik	dan SPP														
Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Opini BPK	WTP:1					WTP:1		WTP:1		WTP:1				
	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	11.36 %			10.90%		11.25 %		11.50 %		11.75 %				
	Nilai/skor EKPPD	3.1797					3.18		3.19		3.20				
Program Pembangunan Daerah: Pelaporan pertanggungjawaban keuangan	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	NA					100 %		100 %		100 %				Seluruh OPD
Program pembangunan daerah: Peningkatan retribusi dan pajak daerah	Jumlah peningkatan pajak daerah	NA	66.632.374.971		66.809.462.645		63.611.192.647		57.091.192.647		71.091.192.647				
	Jumlah peningkatan retribusi daerah	NA	7.183.346.364		3.738.287.564		7.583.205.174		7.877.101.274		7.877.101.274				
Peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai/skor EKPPD	3.1797					3.1800		3.1900		3.2000				

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN

PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

Kerangka pendanaan dan program perangkat daerah disusun berdasarkan program pembangunan daerah pada BAB VI. Berbagai program yang dirumuskan dalam Bab 7 ini berbasiskan urusan pemerintahan yang dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah yang bertanggungjawab sesuai tugas dan fungsinya. Berikut kerangka pendanaan dan program perangkat daerah pada masing-masing misi RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021:

7.1. Misi 1 :

Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama.

Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi keagamaan dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi. Sasaran dan strategi tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas “Misi 1: Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama” di Kabupaten Banjar antara lain adalah:

1. Sasaran dan Program Proritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
 - a. Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
 - Penegakan Perda Bernuansa Kearifan Lokal
 - Pembinaan Peran Serta Kepemudaan
 - Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda
 - Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat
 - Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)
 - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
 - Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kebudayaan
 - a. Pelestarian budaya keagamaan
 - Program Pengembangan Nilai Budaya
 - Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
 - a. Pemberdayaan lembaga keagamaan
 - Program Peningkatan Pengelolaan Lembaga Zakat
 - Program Pendidikan Non Formal

Selama lima tahun ke depan peningkatan pengamalan ajaran keagamaan di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada berbagai program pada tabel berikut:

Tabel 7. 1 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 1

Kode Rekening			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Pemangku Urusan
						2017		2018		2019		2020		2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																		
1	19		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	100%	100%		100%	949.830.000	100%	1.201.950.000	100%	1.026.148.200	1.077.455.000			Satpol PP	
1	19		Peningkatan Peran serta Kepemudaan	Persentase organisasi Pemuda yang dibina	NA					30%	1.600.000.000	40%	1.800.000.000	2.000.000.000			Dinas Pemuda & OR	
1	19		Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ	NA					0,21%	550.000.000	0,24%	600.000.000	0,27%	650.000.000			Dinas Pemuda & OR

1	19		Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan	100 orang	450 orang		450 orang		450 orang	18 8.6 03. 84 0	450 orang	50 3. 34 5. 00 0	450 orang	533 .32 9.5 00			Badan Kesbangpol
1	19		Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan masyarakat	Kasus terkait isu SARA	0 kasus	0 kasus		0 kasus		0 kasus	45 2.1 53. 84 0	0 kasus	73 2. 05 0. 00 0	0 kasus	805 .25 5.0 00			Badan Kesbangpol
1	19		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase ormas yang terdaftar	12, 17%	10%		15%		15%	16 4.2 10. 10 3	15%	43 2. 00 0. 00 0	15%	432 .00 0.0 00			Badan Kesbangpol
1	19		Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT)	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba	-14,08%	2%		2%		2%	65 7.0 74. 43 7	2%	1. 67 0. 00 0. 00 0	2%	1.8 60. 000 .00 0			Badan Kesbangpol

1	19		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	100%	100%		100%		100%	1.201.950.00	100%	1.026.148.200	1.077.455.000			Badan Kesbangpol
1	19		Program Penegakan Perda bernuansa kearifan lokal	Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	100%			100%		100%	189.000.000	100%	189.000.000	189.000.000			
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan																	
1	17		Program Pengembangan Nilai Budaya	Presentase even budaya yang bernilai religi	50%		2.220.000.000		2.242.000.000	57,14%	2.467.755.000	64,29%	2.517.130.500	64,29%	2.517.130.500		Dinas Budpar
1	17		Program Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati	100%				100%	1.963.118.640	100%	2.257.586.400	100%	2.596.224.350			Setda

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial

1	13		Program Peningkatan pengelolaan lembaga zakat	Jumlah ZIS yang terkumpul	485.978.246					583.200.000	92.306.000	641.520.000	14.465.100.000	699.840.000	16.840.000			Setda
1	13		Program Pendidikan Non Formal	Persentase sekolah formal yang menyelenggara kan program baca tulis al-quran sesuai standar	66%	66%		66%		70%	56.000.000	75%		80%	56.000.000			Dinas Pendidikan

7.2. Misi 2 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan social.

Penjabaran misi SDM dalam tujuan pembangunan jangka menengah dituangkan dalam sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Banjar antara lain adalah:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan
 - a. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan
 - Program Pendidikan Anak usia Dini (PAUD)
 - Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun
 - Program Pendidikan Non Formal
 - Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
 - Program manajemen pelayanan pendidikan
 - b. Meningkatkan budaya baca di kalangan pelajar dan masyarakat
 - Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan
 - c. Meningkatkan pelestarian budaya
 - Program Pengelolaan Keragaman Budaya
 - Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
 - Program Pengelolaan Informasi Budaya
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan
 - a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas

- Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras puskesmas/ pustu dan jaringannya
 - Program Peningkatan Pelayanan PONEK
 - Program Kesehatan Keluarga
 - Program Peningkatan Pelayanan PICU/NICU
 - Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
 - Program obat dan perbekalan kesehatan
 - Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
 - Program pengendalian penyakit tidak menular
 - Program Upaya Kesehatan Tradisional
 - Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
 - Program upaya kesehatan masyarakat
 - Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - Program Perbaikan gizi masyarakat
 - Program standarisasi pelayanan kesehatan
- b. Mantapnya ketahanan pangan daerah
- Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)
- c. Meningkatnya kesehatan reproduksi
- Program Keluarga Berencana (KB)
 - Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
- d. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga
- Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
 - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tenaga Kerja
- a. Meningkatnya kesempatan/ lapangan kerja
- Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja
 - Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja
- b. Membaiknya hubungan industrial

- Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Kesejahteraan Sosial
- a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan masalah sosial
- Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya
 - Program Panti Asuhan/Panti Jompo
 - Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
 - Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Taruma
 - Program Pembinaan Anak Terlantar
 - Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)
 - Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak
- Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender
 - Program Perlindungan Perempuan dan Anak
- c. Meningkatnya kualitas pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan dan pemulihan bencana secara komprehensif
- Program Pencegahan dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam.
 - Program Tanggap Darurat.
 - Program Pengendalian Daya Rusak Air
 - Program Pasca Bencana
 - Program Perencanaan penanggulangan bencana

Selama lima tahun kedepan pembangunan SDM di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada beberapa program yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 7. 2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 2

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Pemangku Urusan
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan																	
1	01	Program Pendidikan Anak usia Dini	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini					45%	3.879.400.333	50%	4.267.340.366	65%	4.694.074.402			Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD		67,80%		68,50%		69,00%		70,00%		71,00%			Dinas Pendidikan	
1	01	Program Wajib Belajar pendidikan dasar 9 tahun	Persentase pencapaian SPM Pendidikan					86,20%	69.908.694.000	88,34%	76.899.563.400	90,07%	84.589.519.740			Dinas Pendidikan	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	89,41%	89,50%		90,00%		92,00%		93,00%		94,00%				

			Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	100%	102,78 %		102%		101,50 %		101%		100%			
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	57,45%	58,69%		65,66%		67,86%		70,06%		70,06%			
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	77,62%	77,66%		90,02%		92,78%		95,35%		95,35%			
1	01	Program Pendidikan Non Formal	Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup	60%	70%	14.3 90.8 81.0 50	80%	15.1 10.4 25.1 03	80%	12.1 06.6 04.1 00	90%	13.31 7.264. 510	90%	13.5 59.3 96.5 92		
			Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar	60%	70%		80%		80%		90%		90%			
1	01	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga	Persentase guru yang bersertifikasi		60%		60%		60%	4.90 1.19 5.00	60%	5.391. 314.5 00	60%	5.48 9.33 8.40		

		kependidikan							0				0			
			Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih		44%		44%		45%		49%		51%			
1	01	Manajemen pelayanan pendidikan	Persentase sekolah yang terbina						853.668.200		939.035.020		956.108.384			
			- PAUD					85,61%		85,61%		85,61%				
			- SD					76,00%		79,00%		81,00%				
			- SMP					100,00 %		100,00 %		100,00 %				
1	01	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Persentase peningkatan jumlah Pengunjung					2,02	772.661.000	2,03	849.927.100	2,05	934.919.810			Dinas Perpustakaan dan arsip
1	01	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina					86%	365.000.000	90%	372.300.000	90%	372.300.000			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

1	01	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya					47,22%	667.451.300	48,65%	698.897.000	48,65%	698.897.000			
1	01	Program Pengelolaan Informasi Budaya	Persentase ketersediaan data kebudayaan					72,73%	116.972.000	74,29%	180.924.000	74,29%	180.924.000			

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan

1	02	Program Kesehatan Keluarga	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan					60,00%	473.192.000	62,50%	567.831.000	65,00%	681.397.000			Dinas Kesehatan
1	02	Program upaya pelayanan kesehatan di Puskesmas	Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas					100%	17.065.713.000	100%	20.479.200.000	100%	24.479.200.000			
1	02	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarpras	Persentase Puskesmas dan jaringannya					77,49%	1.350.000.000	90,22%	4.676.442.000	90,22%	6.026.442.000			

		puskesmas/ pustu dan jaringannya	dengan kondisi baik						0		00		0			
1	02	Peningkatan Pelayanan PONEK	Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu					75%	10.0 00.0 00	80%	10.00 0.000	85%	12.0 00.0 00			RSUD
1	02	Program Kesehatan Keluarga	Cakupan kunjungan neonatal					100%	80.7 90.0 00	100%	96.94 8.000	100%	116. 338. 000			Dinas Kesehatan
			Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS					75%	246. 546. 000	80%	295.8 54.00 0	85%	35.5 04.0 00			
			Cakupan imunisasi lengkap					97%	126. 295. 000	98%	138.9 25.00 0	100%	152. 817. 000			
1	02	Peningkatan Pelayanan PICU/NICU	Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Unit Perawatan Bayi					75%	6.00 0.00 0	80%	6.000. 000	85%	8.00 0.00 0			RSUD
1	02	Program pencegahan dan penanggulangan	Angka penemuan Kasus penyakit					1,80%	329. 125.	1,75%	378.4 90.00	1,70%	435. 263.			Dinas Kesehatan

		penyakit menular	menular						000		0		000			
1	02	Program obat dan perbekalan kesehatan	Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas					85,00%	145.350.000	90,00%	167.152.000	90,00%	192.250.000			
			Persentase Puskesmas yang Memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan vaksin					90,00%	3.232.616.000	95,00%	3.555.874.000	100,00 %	3.911.461.000			
			Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar					63,00%	145.350.000	75,00%	167.155.000	83,00%	192.225.000			
1	02	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif					95,00%	288.362.000	95,00%	317.198.000	95,00%	348.917.000			
1	02	Program pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM					45,80%	313.331.000	50,00%	375.998.000	54,16%	451.197.000			

			Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA					100,00 %	73.910.000	100,00 %	81.310.000	100,00 %	88.692.000			
1	02	Program Upaya Kesehatan Tradisional	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional					45,00%	42.000.000	60,00%	48.300.000	70,00%	55.545.000			
1	02	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase masyarakat miskin yang dilayani					na	-	1,0%	75.000.000	1,5%	100.000.000			
1	02	Program upaya kesehatan masyarakat	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standart					60,00%	296.658.000	70,00%	355.990.000	80,00%	427.188.000			

		Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)						55,00%	296.500.000	65,00%	326.150.000	65,00%	375.075.000		
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja						50,00%	33.600.000	60,00%	38.640.000	60,00%	44.500.000		
		Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga						25,00%	49.000.000	35,00%	53.900.000	50,00%	59.300.000		
		Persentase Pelayanan Penanggulangan Masalah Kesehatan						100,00 %	100.000.000	100,00 %	125.000.000	100,00 %	160.000.000		
		Persentase masyarakat yang memperoleh Rujukan						100,00 %	24.262.000	100,00 %	27.900.000	100,00 %	32.086.000		
		Persentase pemeriksaan						100,00 %	373.500.	100,00 %	410.850.00	100,00 %	451.935.		

			Laboratorium yang terstandarisasi						000		0		000			
1	02	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan					60,00%	549.275.000	70,00%	631.663.000	70,00%	694.830.000			
1	02	Perbaikan gizi masyarakat	Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB)					10,25%	422.100.000	10,15%	464.310.000	10,00%	510.741.000			
			Persentase Status gizi balita: * gizi kurang * gizi buruk		15,2 5,20	15,15 5,10		15 5,0		14,9 4,9		14,9 4,9				
1	02	Program standarisasi pelayanan kesehatan	Persentase Puskesmas yang terakreditasi					100%	56.313.000	100%	61.944.000	100%	68.137.000			
2	01	Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita					100%	1.166.100.000	100%	1.359.405.000	100%	1.420.625.250			Dinas Ketahanan Pangan

			Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan utama						< 25 Persen		< 25 Persen		< 25 Persen				
			Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.						91%		92%		93%				
			Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP)						67%		74%		80%				
1	12	Program Keluarga Berencana (KB)	Presentase Akseptor KB Aktif						70%	383.620.000	72%	459.344.000	75%	551.032.000			Dinas pengendalian penduduk
			persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun						15%	331.404.000	14%	513.670.000	13,75%	672.826.000			, KB, pemberdayaan perempuan
1	12	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Persentase Kelompok bina ketahanan yang aktif						50%	110.000.000	53%	121.000.000	55%	133.100.000			n dan perlindungan anak
			Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk						80%	98.698.000	81%	128.307.000	83%	167.799.000			

1	18	Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Persentase FASUM yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal					60%	1.30 4.71 6.30 0	80%	6.408. 610.0 00	100%	6.40 8.65 0.00 0			Dinas Pemuda dan Olahraga
1	18	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik					10%	13.7 02.7 47.6 00	15%	30.89 8.500. 000	20%	30.8 98.5 50.0 00			

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja

1	14	Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase Peningkatan peluang kerja baru					5%	363. 619. 920	5%	450.0 00.00 0	5%	550. 000. 000			Dinas Tenaga kerja
1	14	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga kerja	Persentase Pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi					1%	750. 000. 000	1%	900.0 00.00 0	1%	1.00 0.00 0.00 0			
1	14	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan					6%	385. 000. 000	8%	450.0 00.00 0	10%	550. 000. 000			

Urusan Wajib Dasar social

1	13	Program Penanganan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Persentase PMKS mendapatkan Pelayanan Sosial		22,64		50,49		52,17	500.000.000	53,64	650.000.000 0	67,38	750.000.000			Dinas Sosial
1	13	Program Panti Asuhan/Panti Jompo	Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina		22,06		25,74		29,41	153.000.000	33,09	250.000.000 0	36,76	380.000.000			
1	13	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan						100	520.000.000	100	600.000.000 0	100	650.000.000			
		Program Pembinaan Para Penyandang Cacat & Taruma	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan pembinaan		21,47		25,05		28,63	250.000.000	32,21	300.000.000 0	35,79	370.000.000			

	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase anak/orang terlantar luar panti yang dibina		21,78		23,59		29,04	140.000.000	32,67	170.000.000 0	36,30	250.000.000		
	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK,Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani		25,97		30,30		34,63	260.000.000	38,96	350.000.000 0	43,29	430.000.000		
	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase pengaduan PMKS yang terfasilitasi pada SLRT						100%	400.000.000	100%	540.000.000 0	100%	650.000.000		
		Persentase korban terdampak bencana alam yang tertangani						100%	660.780.000	100%	675.000.000 0	100%	700.000.000		
		Persentase data kemiskinan yang terverifikasi dan		100%		100%		100%		100%		100%			

			tervalidasi dengan tepat dan akurat													
			Persentase Tertanganinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin		15		13		20	1.60 0.00 0.00 0	25	1.750. 000.0 00	27	1.90 0.00 0.00 0		
1	11	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina					15%	346. 965. 000, 00	25%	693.9 30.00 0,00	35%	1.04 0.89 5.00 0,00			Dinas Pengendal ian penduduk , KB,
1	11	Perlindungan Perempuan dan Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi					85%	142. 445. 000	85%	250.0 00.00 0	90%	300. 000. 000			pemberda yaan perempua n dan perlindun gan anak
			Kategori Kabupaten Layak Anak					Madya	183. 375. 000	Madya	250.0 00.00 0	Nindya	300. 000. 000			
1	19	Program Pencegahan dini dan Penanggulangan	Pencegahan dini mitigasi bencana					70%	1.36 3.70 0.00 0	75%	1.461. 107.0 00	80%	1.55 8.51 4.00 0			BPBD

		Korban Bencana Alam														
1	19	Pengendalian Daya Rusak Air	Luasan Kawasan Banjir yang Terlindungi					0,96	510.650.000	1,04	600.000.000	1,5	750.000.000			
1	19	Program Tanggap Darurat	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi					100%	1.665.500.000	100%	1.721.830.000	100%	1.894.013.000			
1	19	Program Pengendalian Daya Rusak Air	Luasan kawasan banjir yang terlindungi					0,96	510.650.000	1,04	600.000.000	1,50	750.000.000			
1	19	Program Pasca Bencana	Persentase rehab rekon pasca bencana.					20%	880.040.000	25%	968.080.000	30%	997.370.000			
1	19	Program Perencanaan penanggulangan bencana	Persentase implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana					4 Dokum en	3.000.000	4 Dokum en	3.000.000	4 Dokum en	3.000.000			

7.3. Misi 3 :

Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan.

Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi ekonomi dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 3: Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan” di Kabupaten Banjar antara lain adalah:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Pilihan Pertanian, Urusan Pilihan Kelautan Dan Perikanan
 - a. Meningkatnya kontribusi sektor pertanian (dalam arti luas) dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan ketahanan pangan;
 - Peningkatan produktivitas pertanian;
 - Peningkatan penyuluhan pertanian;
 - Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa;
 - Penanganan Jaringan Perairan;
 - Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;

- Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak;
- Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan;
- Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan;
- Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan;
- Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan;
- Pengembangan Budidaya Perikanan;
- Pengembangan Perikanan Tangkap;
- Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan;
- Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Koperasi dan UKM, Urusan Pilihan Perdagangan, Urusan Pilihan Perindustrian dan Urusan Pilihan Pariwisata

- a. Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM, perdagangan, perindustrian dan pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi
 - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi;
 - Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;

- Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif;
- Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha kecil dan menengah;
- Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah;
- Pengendalian perdagangan dalam negeri;
- Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan;
- Bina usaha dan pelaku distribusi;
- Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- Peningkatan dan pengembangan ekspor;
- Peningkatan pemasaran produk dalam negeri;
- Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA;
- Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM;
- Penataan struktur industri;
- Pengembangan destinasi wisata;
- Pengembangan kemitraan;
- Pengembangan pemasaran pariwisata.

3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal

a. Meningkatnya nilai investasi

- Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi;

- Peningkatan promosi dan kerjasama investasi.

4. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup

- Pengendalian pencemaran lingkungan hidup
- Pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- Pengembangan Sistem Informasi dan Instrumen Lingkungan Hidup;
- Penataan SDA, Lingkungan dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim;
- Penegakan Hukum Lingkungan;
- Pembinaan dan Pemaatan di Bidang Lingkungan.

Selama lima tahun ke depan pembangunan ekonomi di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada berbagai program pada tabel berikut:

Tabel 7. 3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 3

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir RPJMD		Pemangku Urusan
				2017		2018		2019		2020		2021		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Urusan Pilihan Pertanian																
	Peningkatan ketahanan pangan	Pertumbuhan luas tanam (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian)	Padi sawah - 12,32% Padi Ladang 6,67% Jagung 87,23% Kedelai - 98,76% Jeruk :- 45,88% Pisang: - 28,62% durian: - 13,07%					Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99% Jeruk :2,10% Pisang: 2,02% durian: 2,04%	1.09 6.57 3.86 0	Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00% Jeruk :2,11% Pisang: 2,07% durian: 2,09%	1.20 6.23 1.24 6	Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19% Jeruk : 2,12% Pisang: 2,08% durian: 2,14%	1.3 26. 854 .37 1			Dinas TPH

Peningkatan produktivitas pertanian	Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian)	Padi Sawah 2,23% Padi Ladang - 15,44% Jagung 21,80% Kedelai - 13,52% Jeruk :0,27% Pisang: 43,48% Durian:- 73,42%					Padi Sawah 2,25% Padi Ladang 2,18 Jagung 1,89% Kedelai 2,01% Jeruk :2,00% Pisang: 2,31% Durian: 2,00%	1.52 8.29 2.48 0	Padi Sawah 2,26% Padi Ladang 2,20% Jagung 1,90% Kedelai 2,02% Jeruk :2,24% Pisang: 2,44% Durian: 2,08%	1.68 1.12 1.72 8	Padi Sawah 2,27% Padi Ladang 2,22% Jagung 1,91% Kedelai 2,03% Jeruk :2,47% Pisang: 2,,57% Durian: 2,16%	1.8 49. 233 .90 1			Dinas TPH
Peningkatan penyuluhan pertanian	* Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) * Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik	42 % 100%					30 % 100%	2.10 3.67 1.66 0	35% 100%	4.01 4.03 8.82 6	40% 100%	2.7 15. 442 .70 9			Dinas TPH

Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Rawa	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi	81,89%	80%		80%		82%	2.93 5.91 7.00 0	83%	3.00 0.00 0.00 0	83%	3.0 00. 000 .00 0			Dinas PU SDA
Penanganan Jaringan Perairan	Rasio jaringan irigasi	18,51					18,51	1.23 8.90 0.00 0	18,51	1.25 0.00 0.00 0	18,51	1.2 50. 000 .00 0			Dinas PU SDA
Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan	0,64%	1,17%		1,29%		1,32%	269. 100. 000	1,96%	400. 959. 000	2,45%	597 .42 8.0 00			Dinas Nakbun
Peningkatan Produksi Hasil Peternakan.	Persentase peningkatan kelahiran ternak	1,37%	1,52%		1,81%		2,62%	230. 272. 000	2,97%	393. 766. 000	3,31%	523 .70 0.0 00			Dinas Nakbun
Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	Persentase menurunnya angka kematian ternak : - ternak besar - unggas	0,34 7,00	< 0,34% < 6,40%		< 0,33% < 6,30%		<0,33% <5,70%	372. 729. 000	<0,32% <5,50%	410. 000. 000	<0,32% <5,50%	452 .00 0.0 00			Dinas Nakbun

Peningkatan Kesejahteraan Petani	Presentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan	0,5%	0,86%		0,98%		1,00%	80.000.00	1,50%	150.000.000	2,00%	175.000.00			Dinas Nakbun
Pemberdayaan Penyuluh Peternakan/ Perkebunan Lapangan	Presentase penyuluh yang bersertifikat	9,60%	20,00%		21,00%		22,00%	532.000.000	23,00%	702.240.000	24,00%	926.956.00			Dinas Nakbun
Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	Pertumbuhan produksi olahan hasil pertanian TPH * komoditas olahan * jenis produk olahan	NA					Komoditas olahan 33,33% Jenis produk olahan 28,57%	230.365.100	Komoditas olahan 37,50% Jenis produk olahan 33,33%	253.401.610	Komoditas olahan 45,55% Jenis produk olahan 41,66%	278.741.71			Dinas TPH
Peningkatan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan	Persentase peningkatan produksi karet Sit yang dihasilkan UPPB	0,06%	1,60%		1,80%		2,00%	147.000.000	2,50%	220.500.000	3,00%	330.750.00			Dinas Nakbun

	Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	Persentase peningkatan produksi hasil ternak	1,00%	1,28%		1,37%		1,41%	770.297.000	1,47%	816.515.000	1,51%	849.176.000			Dinas Nakbun
Urusan Pilihan Perikanan																
	Pengembangan Budidaya Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	58.105 (2017)	50.000		55.000		58000 >>> 63985	600.189.750	60000 >>> 67525	750.237.000	62500 >>> 70761	937.796.250			Dinas Perikanan
	Pengembangan Perikanan Tangkap	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	10,182	11.182		11.492		10.050	1.320.732.000	10.262	1.650.915.000	10.474	1.981.098.000			Dinas Perikanan
	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan, Pengendalian dan penegakan hukum Sumberdaya Perikanan	Penurunan kasus ilegal fishing	Na	na		na		1	73.936.000	1	92.420.000	1	115.525.000			Dinas Perikanan
	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi	Produksi produk olahan hasil perikanan (ton)	715	710 51		720 51		730 52	456.446.250	740 53	570.557.800	745 54	713.197.250			Dinas Perikanan

	Perikanan	Angka konsumsi ikan													
Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Koperasi dan UKM															
	Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Persentase koperasi aktif.	63,9	63,5		64,5		65,5	515. 993. 000	66,5	568. 000. 000	67,5	621 .04 0.0 00		Dinas Koperasi UM
	Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	Persentase koperasi yang sehat	14%	14,00%		20,00%		26,00%	385. 000. 000	32,00%	638. 500. 000	38,00%	714 .75 0.0 00		Dinas Koperasi UM
	Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang konduusif	Persentase UM terdata yang memiliki IUMK	14,63%	21,93%		26,84%		29,78%	219. 100. 000	32,73%	238. 300. 000	35,67%	258 .88 0.0 00		Dinas Koperasi UM
	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah	UM Bankable	347	4523		2595		500 UM	296. 400. 000	500 UM	326. 070. 000	500 UM	357 .67 7.0 00		Dinas Koperasi UM

	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar	10					50 UM	220.500.000	60 UM	244.950.000	65 UM	270.920.000			Dinas Koperasi UM
Urusan Pilihan Perdagangan																
	Pengendalian perdagangan dalam negeri	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	9%					9%	250.000.000	9%	262.500.000	12%	275.625.000			Dinas Perindag
	Peningkatan Sarana dan Distribusi perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	10%					33%	1.513.542.500	40%	1.589.219.000	40%	1.668.680.000			Dinas Perindag
	Bina usaha dan pelaku usaha/distribusi	Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL	20%					33%	261.000.000	35%	274.050.000	40%	287.752.000			Dinas Perindag

		serta asongan yang dibina													
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase pelaku tertib niaga	16%					25%	750.680.000	30%	788.214.000	30%	827.624.000		Dinas Perindag
	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet						10%	270.000.000	10%	283.500.000	12%	297.675.000		Dinas Perindag
	Peningkatan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Presentase Produk/Komoditi yang dipasarkan	52.181.067 USD					36%	719.500.000	36%	755.475.000	40%	793.248.000		Dinas Perindag
Urusan Pilihan Perindustrian															
	Pengembangan Industri Berbasis Sektor ILMEASA	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	1%					2%	1.977.292.100	2%	2.175.021.000	2%	2.392.523.000		Dinas Perindag

	Pengembangan Industri Berbasis Sektor AGROKIM	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	1%					2%	954.050.000	2%	1.001.752.000	2%	1.051.840.000			Dinas Perindag
	Penataan Struktur Industri	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri	50%					75%	35.750.000	80%	39.325.000	85%	43.257.500			Dinas Perindag
Urusan Pilihan Pariwisata																
	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Prosentase destinasi wisata yang telah dikembangkan	48,08%					75%	1.988.296.650	80,77%	2.028.062.000	80,77%	2.028.062.000			Dinas Budpar
	Pengembangan Kemitraan	Prosentase pelaku pariwisata yang aktif	36,74%					67,05%	1.437.502.300	83,33%	1.520.530.000	83,33%	1.520.530.000			Dinas Budpar
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah inovasi pemasaran pariwisata	NA					3 inovasi	2.342.174.400	4 inovasi	2.389.017.000	5 inovasi	2.389.017.000			Dinas Budpar

		Peningkatan jenis paket wisata	NA					3 paket		5 paket		5 paket				Dinas Budpar
Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Penanaman Modal																
	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Peningkatan realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	2400489405608			1.700.000.000,00	1.717.000.000,00	1.734.170.000.000	419.128.760	544.867.388			708.327.604			Dinas PMPTPS
	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Pertumbuhan investor	70					30 investor	291.896.000	60 investor	379.464.800	90 investor	493.304.240			Dinas PMPTPS
Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup																
	Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah	NA					25% 15%	827.311.000	35% 25%	1.654.000.000	45% 35%	2.068.000.000			Dinas LH

	dilakukan Pembinaan dan Pemantauan														
Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	NA					35%	325. 000. 000	50%	650. 000. 000	60%	812 .00 0.0 00			Dinas LH
Pengembangan Sistem Informasi dan Instrumen Lingkungan Hidup	Persentase Database Informasi Lingkungan yang Valid/update	NA					25%	332. 919. 000	28%	665. 000. 000	30%	832 .00 0.0 00			Dinas LH
	Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen	NA					80%		82%		85%				Dinas LH

		Lingkungan														
	Program Penataan SDA, Lingkungan dan Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati	NA					20%	325.191.300	28%	650.000.000	30%	812.000.000			Dinas LH
		Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri	NA					20%		28%		30%				Dinas LH

Penegakan Hukum Lingkungan	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	NA					50%	540.249.500	53%	1.080.000.000	55%	1.350.000.000			Dinas LH
	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	NA					70%		73%		75%				Dinas LH
Pembinaan dan Penaatan di Bidang Lingkungan	Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan	NA					20%	524.801.200	40%	1.049.000.000	60%	1.312.000.000			Dinas LH
	Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata	NA					20%		40%		60%				Dinas LH

7.4. Misi 4 :

Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur.

Program-program berkaitan dengan Misi Mewujudkan Pemerataan dan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur dirumuskan dengan memperhatikan strategi-strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pelaksanaan program nantinya diharapkan mampu mencapai tujuan utama sekaligus menyelesaikan isu-isu strategis yang berkaitan dengan infrastruktur dasar. Adapun beberapa program pembangunan yang dipilih sesuai dengan sasaran pokok adalah sebagai berikut:

1. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Prasarana Transportasi
 - Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - Penanganan Jalan Kabupaten;
 - Penanganan Jembatan Kabupaten;
 - Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan;
 - Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan;
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
 - Penanganan Jalan Poros Desa;
 - Penanganan Jembatan Desa.
 - b. Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak
 - Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum;
 - Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku;
 - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah;
 - Penanganan Drainase;
 - c. Meningkatnya Ketertiban Ruang dan Bangunan
 - Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang;
 - Perencanaan Rencana Rinci Tata Ruang
 - Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
 - Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan;
 - Pengendalian dan Pengawasan Bangunan;

- Pengembangan Kawasan Strategis;
 - Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi;
 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten;
 - Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional;
 - Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi.
2. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- a. Meningkatnya Akses Perumahan Layak
- Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Peningkatan Rehabilitasi Perumahan;
 - Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman.
- b. Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak
- Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh;
 - Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
 - Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman;
 - Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman;
 - Pengelolaan Penerangan Jalan Umum.
3. Sasaran dan Program Prioritas Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- a. Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak
- Peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran;
 - Pencegahan Dini Bahaya Kebakaran.
4. Sasaran dan Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan
- a. Meningkatnya Akses dan Kualitas Transportasi
- Pemenuhan Prasarana Perhubungan;
 - Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan.
 - Peningkatan pelayanan angkutan;

- Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor;
- Pembinaan keselamatan berlalu lintas;
- Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat.

5. Sasaran dan Prioritas Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup

a. Meningkatnya Akses Lingkungan Perumahan Layak.

- Pengelolaan Sampah;
- Pengelolaan RTH.

Selama lima tahun kedepan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada beberapa program yang dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 7. 4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 4

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode		Pemangku Urusan
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																	
4	1	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun	22,26%					40,35%	1.672.947.000	43,97%	1.700.000.000	45,78%	1.700.000.000			Dinas PUPR
4	1	Penanganan Jalan Kabupaten	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	68,85%					70,13%	14.667.856.640	70,62%	15.000.000.000	70,87%	15.000.000.000			
4	1	Penanganan Jembatan Kabupaten	Persentase Panjang Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	89,08%					91,13%	9.970.835.784	92,15%	9.950.000.000	92,66%	9.950.000.000			
4	1	Pembangunan Sistem Informasi/ Data Base Jalan Dan Jembatan	Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date	100%					100%	544.400.000.000	100%	215.000.000.000	100%	215.000.000.000			
4	1	Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat	NA					5,58%	1.502.580.000	8,10%	1.500.000.000	9%	1.500.000.000			

4	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan	NA					1,70%	67.59 5.000	1,82%	70.0 00.0 00	1,90%	73.0 00.0 00			
4	2	Penanganan Jalan Poros Desa	Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	70,12%					75,11%	25.27 5.982 .960	75,92%	25.2 50.0 00.0 00	76,33%	25.2 50.0 00.0 00			
4	2	Penanganan Jembatan Desa	Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik	63,64%					66,84%	5.922 .618. 200	67,85%	5.90 0.00 0.00 0	68,36%	5.90 0.00 0.00 0			
4	2	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	67,19%					71,10%	6.189 .194. 904	78,13%	22.5 00.0 00.0 00	81,77%	15.0 00.0 00.0 00			
4	2	Penanganan dan Pengelolaan Jaringan Air Baku	Persentase Ketersediaan/Kapasitas tampung air baku	NA					71,4%	175.0 00.00 0	71,6%	175. 000. 000	71,92%	175. 000. 000			
4	2	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah	44,185%					45,57%	4.984 .743. 000	53,57%	15.0 00.0 00.0 00	61,57%	17.7 50.0 00.0 00			
4	2	Penanganan Drainase	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan drainase	16,44%					37,72%	1.657 .500. 000	38,07%	1.70 0.00 0.00 0	39,01%	1.95 0.00 0.00 0			
			Persentase Pengurangan Genangan	54,72%					60%	898.9 83.35 4	65%	1.00 0.00 0.00	70%	1.20 0.00 0.00 0			

											0					
4	2	Perencanaan Rencana Umum Tata Ruang	Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan	45%					60%	645.2 37.14 2	70%	677. 603. 000	80%	745. 365. 000		
4	2	Perencanaan Rinci Tata Ruang	Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang	35%					40%	1.061 .625. 000	80%	1.11 4.70 6.25 0	100%	1.10 0.00 0.00 0		
4	2	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	89,5%					92,1%	312.4 81.96 0	92,1%	406. 227. 000	92,2%	446. 850. 000		
4	2	Penataan Bangunan Dan Tata Lingkungan	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	59%					64%	1.316 .334. 000	82%	1.10 0.00 0.00 0	100%	1.10 0.00 0.00 0		
4	2	Pengendalian dan Pengawasan Bangunan	Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang	7%					8,33%	881.7 52.16 0	9,15%	1.19 0.36 5.00 0	10,20%	1.30 9.40 2.00 0		
4	2	Pengembangan Kawasan Strategis	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	74,93%					79,47%	6.127 .185. 920	80,00%	6.20 0.00 0.00 0	80,52%	6.20 0.00 0.00 0		
4	2	Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Tenaga Terampil Konstruksi Yang Memenuhi Persyaratan Kompetensi	70%					80%	392.9 36.92 0	85%	610. 334. 920	87%	700. 340. 920		

4	2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	85%					90%	259.8 29.08 0	90%	360. 729. 080	90%	411. 899. 080			
4	2	Penerbitan Ijin Usaha jasa Konstruksi Nasional	Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	100%					100%	182.9 83.00 0	100%	182. 983. 000	100%	236. 626. 000			
4	2	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	Prosentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha,Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	45%					54%	138.7 99.00 0	57%	176. 264. 920	60%	176. 264. 920			
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Pemukiman																	
4	2	Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan/Peningkatan Rehabilitasi Perumahan	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani	NA					93,14%	1.186. 158.85 0	93,58%	2.00 0.00 0.00 0	94,01%	2.00 0.00 0.00 0			Dinas Permukiman
4	2	Penyelenggaraan Perizinan Di Bidang Perumahan Dan Permukiman	Persentase perizinan yang difasilitasi	NA					100%	1.110. 231.72 0	100%	8.96 9.56 1.36 0	100%	9.30 6.03 0.00 0			

4	2	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	NA					0,19%	1.124.665.120	1,59%	8.135.000	3,00%	8.135.000			
4	2	Perencanaan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh	NA					20,00%	385.000.000	60,00%	8.220.000	100,00%	8.220.000			
4	2	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan	NA					100%	261.935.000	100%	476.235.000	100%	584.935.000			
4	2	Penanganan Jalan Lingkungan Permukiman	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	68,07%					83,27%	5.330.180.000	91,63%	5.300.000	100%	5.300.000			
4	2	Pengembangan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan	NA					12,00%	609.250.000	17,07%	700.000.000	21,95%	800.000.000			
4	2	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum	NA					81,5%	14.135.400.000	83,0%	15.495.100.000	85,0%	16.805.100.000			Satpol PP
44	22	Peningkatan kesiapsiagaan bahaya kebakaran	Persentase bangunan gedung fasilitas publik milik pemerintah yang aparnya dalam kondisi baik	NA					54,3%	572.800.000	65,2%	601.440.000	69,6%	631.512.000			

			Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	NA					70,0%		73,0%		75,0%				
4	2	Pencegahan dini bahaya kebakaran	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	NA					18,0%	167.44 5.850	35,3%	175. 818. 000	52,9%	184. 609. 000			
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Perhubungan																	
4	1	Pemenuhan Prasarana Perhubungan	Persentase Ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	54,55%					70%	230.85 0.000	75%	350. 000. 000	80%	450.0 00.00 0			Dinas Perhubungan
4	1	Pengelolaan dan Pengoperasian Prasarana Perhubungan	Persentase angkutan umum yang masuk terminal	73,00%					83,95%	312.38 5.000	87,60%	450. 000. 000	91,25%	550.0 00.00 0			
4	1	Program Pembangunan dan Pengelolaan Lalu Lintas Perhubungan Darat	Persentase Ketersediaan rambu yang layak	53%					70%	944.90 0.000	75%	1.40 0.00 0.00 0	80%	1.800 .000. 000			
4	1	Peningkatan pelayanan angkutan	Persentase angkutan umum yang beroperasi	73,75%					80%	307.71 0.000	85%	450. 000. 000	90%	550.0 00.00 0			
4	1	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang lolos PKB	71,94%					94,96%	727.46 0.000	97,60%	2.00 0.00 0.00 0	100%	2.500 .000. 000			

4	1	Pembinaan keselamatan berlalu lintas	Persentase ketaatan berlalu-lintas	80,56%					83,00%	671.110.000	85,00%	800.000.000	87,00%	900.000.000				
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup																		
4	2	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengurangan Sampah	NA					20%	15.953.060.600	22%	31.906.000.000	24%	39.882.530.300			Dinas Lingkungan Hidup	
			Persentase Penanganan Sampah	NA					80%		75%		74%					
			Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	NA					30%		40%		50%					
			Persentase sampah yang terkelola di TPA	NA					100%		100%		100%					
4	2	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	NA					2%	3.338.502.200	3,5%	6.677.000.000	5%	8.346.000.000				

7.5. Misi 5 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Amanah.

Tujuan pembangunan jangka menengah pada misi tata kelola pemerintahan dijabarkan dalam berbagai sasaran dan strategi pembangunan. Sasaran dan strategi pembangunan tersebut diuraikan lebih spesifik dalam arah kebijakan dan program prioritas masing-masing urusan pembangunan. Sasaran dan program prioritas pembangunan “Misi 3: Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan” di Kabupaten Banjar antara lain adalah:

1. Urusan wajib pelayanan dasar Kesehatan
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Peningkatan pelayanan BLUD
 - Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
 - Peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
 - Pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
 - Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Urusan wajib pelayanan dasar ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal
 - Penegakan peraturan daerah
 - Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
 - b. Sasaran meningkatnya partisipasi politik masyarakat dicapai melalui program:
 - Pendidikan politik masyarakat
3. Urusan wajib non pelayanan dasar pertanahan

- a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Penyelesaian permasalahan pertanahan
 - Penatausahaan pertanahan
 - Pengaturan bidang pertanahan
4. Urusan wajib non pelayanan dasar administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil
 - Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk
 - Pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 - Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan
5. Urusan wajib non-pelayanan dasar pemberdayaan masyarakat dan desa
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan desa dicapai melalui program:
 - Pembinaan bidang kewilayahan desa
 - Pembinaan bidang kemasyarakatan desa
6. Urusan wajib non-pelayanan dasar komunikasi dan informatika
 - a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program:
 - Pengembangan teknologi, komunikasi dan informasi
7. Urusan wajib non pelayanan dasar penanaman modal
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:
 - Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi
8. Urusan wajib non-pelayanan dasar statistik
 - a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program:
 - Pengembangan data/informasi/statistik daerah
9. Urusan wajib non-pelayanan dasar persandian
 - a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program:

- Pengamanan informasi
10. Urusan wajib non-pelayanan dasar kearsipan
 - a. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program:
 - Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
 - Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
 - Perbaikan sistem administrasi kearsipan
 - Peningkatan kualitas pelayanan informasi
 11. Menunjang urusan pemerintahan perencanaan
 - a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program:
 - Perencanaan pembangunan daerah
 - Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah
 - Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah
 - Perencanaan pembangunan ekonomi
 - Perencanaan pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya dan pemerintahan
 - Perencanaan pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
 12. Penunjang urusan pemerintahan keuangan
 - a. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah dicapai melalui program:
 - Penatausahaan keuangan daerah
 - Penyusunan anggaran keuangan daerah
 - Penatausahaan, pemanfaatan dan penghapusan aset daerah
 - Peningkatan kepatuhan membayar pajak daerah
 - Pemutakhiran data BPHTB
 - Sinkronisasi data pendapatan daerah
 13. Penunjang urusan pemerintahan pengawasan
 - a. Sasaran meningkatnya integritas aparatur sipil negara dicapai melalui program:
 - Penanganan pengaduan masyarakat

- Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawas
 - Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah
14. Penunjang urusan pemerintahan kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan
- a. Sasaran meningkatnya sumberdaya aparaturng daerah yang profesional dan handal
- Penataan aparaturng daerah
 - Peningkatan kapasitas sumberdaya aparaturng
 - Pengembangan aparaturng
 - Pembinaan aparaturng
 - Peningkatan disiplin aparaturng
 - Peningkatan kesejahteraan aparaturng
15. Penunjang urusan penelitian dan pengembangan
- a. Sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dicapai melalui program:
- Penelitian dan pengembangan daerah
16. Penunjang urusan pemerintahan umum/sekretariat
- a. Sasaran meningkatnya akuntabilitas pemerintah dicapai melalui program:
- Penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
 - Koordinasi dan fasilitasi perekonomian dan invesatasi daerah
 - Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar
 - Kerjasama pembangunan
 - Penegasan batas daerah
 - Penataan peraturan perundang-undangan
 - Peningkatan pelayanan kedinasan kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
 - Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Sasaran meningkatnya keterbukaan informasi publik dicapai melalui program:
- Pengadaan barang dan jasa

c. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dicapai melalui program:

- Penunjang penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan
- Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan pembinaan kelembagaan

Selama lima tahun ke depan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar akan diprioritaskan pada program-program pada tabel berikut:

Tabel 7. 5 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Misi 5

Kode		Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Kondisi Kinerja Awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Pemangku Urusan
					2017		2018		2019		2020		2021				
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan																	
1	02	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi						80 %	78,000,000	82 %	80,000,000	84 %	80,000,000			Rumah Sakit
1	02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dalam						81 %	2,000,000	82 %	2,500,000	82 %	3,000,000			

			kondisi baik														
1	02	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit						100 %	8,150,000,000	100 %	8,450,000,000	100 %	9,500,000,000			
1	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi						80 %	1,000,000,000	81 %	1,000,000,000	82 %	1,000,000,000			
1	02	Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit						81 %	810,000,000	82 %	560,000,000	83 %	560,000,000			
			Akreditasi Rumah sakit						Paripurna		Paripurna		Paripurna				
Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat																	
1	19	Pemeliharaan ketentraman dan	Tingkat penyelesaian						95 %	398,758,	100 %	418,695,0	100 %	439,630,00			Satuan Polisi Pamong

		ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal	pelanggaran K3							000		00		0			Praja
1	19	Penegakan peraturan daerah	Persentase perda yang ditegakkan						95 %	339,815,000	98 %	356,805,000	100 %	374,646,000			
1	19	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rasio jumlah satuan linmas per RT						1:1 Rasio	984,426,000	1:2 Rasio	1,033,647,000	1:2 Rasio	1,085,329,000			
1	19	Pendidikan politik masyarakat	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden						73 %	390,215,200	73 %	2,373,000,000	73 %	450,000,000			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase partisipasi masyarakat dalam pilkada provinsi						73 %		73 %		73 %				

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pertanian

1	09	Penyelesaian permasalahan pertanahan	Persentase konflik tanah yang difasilitasi						100 %	545,000,000	100 %	550,000,000	100 %	550,000,000			Dinas Pertanahan
1	09	Penatausahaan pertanahan	Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi						17.69 %	737,700,000	19.82 %	950,000,000	21.94 %	975,000,000			
1	09	Pengaturan bidang pertanahan	Raperda						100 %	100,000,000							

Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1	10	Pelayanan dan penataan administrasi pencatatan sipil	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th						70 %	684,815,680	75 %	787,538,000	80 %	866,291,000			Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
			Persentase perkawinan penduduk yang didata						1 %		1 %		1 %				
			Persentase perceraian penduduk yang						1 %		1 %		1 %				

			didata														
			Cakupan penerbitan akte kematian					30 %		35 %		40 %					
			Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola					50 %		60 %		65 %					
1	10	Pelayanan dan penataan administrasi pendaftaran penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP-el					97 %	419,178,800	98 %	544,932,500	98 %	570,100,000				
			Cakupan kepemilikan KK					98 %		98 %		98 %					
			Cakupan Kepemilikan KIA					5 %		9 %		18 %					
			Persentase pendataan penduduk pindah dating					3%		3%		3%					

1	10	Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan						75 %	1,08 4,81 5,00 0	77 %	1,1 93, 300 ,00 0	79 %	757,0 46,00 0			
1	10	Pengelolaan pemanfaatan data dan peningkatan pelayanan publik bidang kependudukan	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna						44 %	312, 652, 000	72 %	406 ,50 0,0 00	100 %	447,1 50,00 0			
			Persentase inovasi yg dilaksanakan						80 %		85 %		90 %				
Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																	
1	22	Pembinaan bidang kewilayahan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan						104	830, 973, 250	109	914 ,07 0,5 75	114	1,005 ,477, 632			Dinas Pemberdayaan an Masyarakat

1	22	Pembinaan bidang kemasyarakatan desa	Nilai Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakatan						175	1,390,179,500	180	1,529,197,450	185	1,682,117,195			dan Desa
Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informasi																	
1	25	Pengembangan teknologi komunikasi dan informasi	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE						2.57	5,669,350,000	2.86	10,000,000	3.00	6,000,000			Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistic;
			Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE						2.15		2.39		2.79			Setiap SKPD	
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Penanaman Modal																	
1	16	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (untuk SKPD terkait)						82.0	646,863,400	82.1	840,922,420	82.2	1,093,199,146			Dinas Penanaman Modal dana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Statistik																	

1	23	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase kelengkapan data statistik sektoral						33 %	600,000,000	66 %	780,000,000	100 %	1,014,000,000			Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistik; Setiap perangkat daerah
Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Persandian																	
		Pengamanan informasi	Pemeringkatan level keamanan informasi						272	350,000,000	315	367,500,000	374	385,875,000			Dinas komunikasi, informasi, statistik, dan statistik
Urusan Wajib non-Pelayanan Dasar Kearsipan																	
1	24	15	Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Persentase capaian kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan					100 %	83,275,000	100 %	91,602,500	100 %	100,762,750			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Setiap SKPD

1	24	18	Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Respon layanan Informasi kearsipan						10 menit		7 menit		5 menit			
1	24	16	Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah						100 %	468,050,000	100 %	514,855,000	100 %	566,340,500		
				Persentase unit Pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku						100 %		100 %		100 %			
1	24	17	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan						66 %	47,500,000	83 %	52,250,000	100 %	57,475,000		

Peunjang Urusan Pemerintahan: Perencanaan Pembangunan

1	06	15	Pengembangan data perencanaan pembangunan daerah	Persentase elemen data pembangunan yang termutakhir						50 %	1,08 3,00 0,00 0	50 %	1,1 15, 000 ,00 0	50 %	1,170 ,750, 000			Bapelitbang
				Presentase jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan						50 %		70 %		70 %				
1	06	20	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase ASN Bappelitbang yang mampu mengerjakan tupoksi						50 %	750, 000, 000	55 %	750 ,00 0,0 00	55 %	787,5 00,00 0			
1	06	21	Perencanaan pembangunan daerah	Persentase ketepatan waktu perencanaan						100 %	2,32 1,86 6,70 0	100 %	2,3 21, 866 ,70 0	100 %	2,437 ,960, 000			
1	06	22	Perencanaan pembangunan ekonomi	Nilai rata-rata sakip SKPD lingkup						71.78 %	1,48 1,20 9,20 0	76.13 %	1,4 81, 209 ,20	79. 38 %	155,5 26,00 0			

				ekonomi								0					
1	06	23	Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sosial Budaya & Pemerintahan	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia					65 %	3,280,000,000	67 %	3,580,000,000	69 %	3,759,000,000			
1	06	24	Perencanaan pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah					70 %	2,300,000,000	72 %	1,900,000,000	74 %	1,995,000,000			
Penunjang Urusan Pemerintahan: Keuangan																	
1	20		Penatausahaan Keuangan Daerah	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu					100 %	3,397,290,000	100 %	3,906,883,500	100 %	4,688,260,200			Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
1	20		Penyusunan Anggaran Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang					100 %	3,361,887,700	100 %	3,866,170,855	100 %	4,639,405,026			

			Tepat Waktu													
1	20	Penatausahaan, Pemanfaatan dan Penghapusan Aset Daerah	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik					100 %	1,44 4,40 0,00 0	100 %	1,6 61, 060 ,00 0	100 %	1,993 ,272, 000			
			Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah					100 %		100 %		100 %				
1	20	Peningkatan kepatuhan membayar pajak	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah					90 %	696, 277, 000	92 %	825 ,00 0,0 00	95 %	1,000 ,000, 000			Badan Pendapatan Daerah
1	20	Pemutakhiran data BPHTB	Persentase capaian penerimaan BPHTB					100 %	431, 958, 800	100 %	515 ,00 0,0 00	100 %	615,0 00,00 0			

1	20	Sinkronisasi data pendapatan daerah	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron						80 %	564,465,100	80 %	670,000,000	85 %	800,000,000		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; Badan Pendapatan Daerah
---	----	-------------------------------------	---	--	--	--	--	--	------	-------------	------	-------------	------	-------------	--	---

Penunjang Urusan Pemerintahan: Pengawasan																
1	20	20	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal pelaksanaan kebijakan KDH	Tingkat Maturitas SPIP						Level 3	2,876,500,000	Level 3	3,164,150,000	Level 3	3,322,357,000	Inspektorat
1	20	21	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Tingkat kapabilitas APIP						Level 3	502,050,000	Level 3	552,255,000	Level 3	579,867,000	
1	20	24	Penanganan pengaduan	Persentase pengaduan						80 %	213,750,	80 %	235,12	80 %	246,881,00	

			masyarakat	masyarakat yang terselesaikan						000		5,000		0		
Penunjang Urusan Pemerintahan: Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan																
1	21		Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur SKPD	Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan					31 %	3,593,977,500	32 %	8,218,982,000	33 %	8,629,931,000		Badan Kepegawaian Daerah
			Penataan aparatur daerah	Persentase distribusi ASN sesuai kompetensi					82.96 %	1,239,056,700	85.05	3,800,000,000	90 %	4,000,000,000		
1	21		Pengembangan aparatur	Persentasi jabatan yang sesuai komptensi					76.50 %	656,042,000	83 %	1,200,000,000	90 %	1,250,000,000		
1	21		Pembinaan Aparatur	Nilai SKP					88 %	252,294,800	89 %	400,000,000	90 %	420,000,000		

													00				
1	21		Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin						99.25 %	267,013,400	99.40 %	515,000,000	99.55 %	540,750,000		
1	21		Peningkatan kesejahteraan aparatur	Persentase terfasilitasinya kesejahteraan ASN						100 %	292,320,000	100 %	454,000,000	100 %	476,000,000		
Penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan																	
1	20		Penelitian dan pengembangan daerah	Persentase hasil litbang yang ditindaklanjuti						50 %	2,250,000,000	60 %	2,000,000,000	60 %	2,100,000,000		Badan
				Persentase usulan inovasi yang diterapkan						50 %		70 %		80 %			
Penunjang Urusan Pemerintahan: Umum/Sekretariat																	

1	20		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Rata-rata IKM Kecamatan					82	518, 751, 400	83	596 ,56 4,0 00	84	686,0 48,70 0		Sekertariat Daerah
				Persentase keterisian data IKK					100 %	249, 826, 800	100 %	287 ,30 0,8 00	100 %	351,8 47,00 0		
1	20		Koordinasi dan Fasilitasi Perekonomian dan Invesatasi Daerah	Persentase BUMD yang sehat					100 %	222, 066, 200	100 %	298 ,66 6,2 00	100 %	328,6 66,20 0		
				Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana					100 %		100 %		100 %			
1	20		Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Pembinaan Kelembagaan	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi					100 %	1,40 7,84 9,20 0	100 %	1,6 89, 419 ,20 0	100 %	2,027 ,303, 000		

				birokrasi													
1	20	15	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Legislasi (Persentase Raperda yang disetujui)					100 %	23,519,475,000	100 %	24,695,448,000	100 %	25,930,221,000			Sekretariat DPRD
				Anggaran (Persentase penyelesaian Dokumen Anggaran tepat waktu (KUA PPAS, APBD dan PAPBD)					100 %		100 %		100 %				
				Pengawasan (persentase Pembahasan pertanggungja waaban tepat waktu (LKPJ dan LKD)					100 %		100 %		100 %				
1	20	16	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala	Persentase pelayanan keprotokolan					90 %	1,008,771,20	95 %	1,059,209,76	99 %	1,112,170,248			Sekretariat Daerah

			daerah/wakil kepala daerah	dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah						0		0				
				Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH					100 %	3,45 1,98 6,00 0	100 %	3,9 96, 453 ,20 0	100 %	4,635 ,220, 800		
				Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/K etua DPRD					100 %	939, 440, 000	100 %	1,1 27, 328 ,00 0	100 %	1,352 ,793, 600		
1	20	26	Penataan peraturan perundang- undangan	Persentase peraturan yang disahkan					100 %	410, 497, 800	100 %	533 ,71 7,2 00	100 %	693,7 41,30 0		
				Persentase dokumen					100 %	355, 120,	100 %	660 ,00 0,0	100 %	825,0 00,00		

				peraturan perundang- undangan yang dipublikasikan						000		00		0		
				Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani					100 %	369, 180, 000	100 %	461 ,47 5,0 00	100 %	576,8 43,75 0		
1	20	27	Penegasan batas wilayah	Persentase permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan					42.25 %	407, 002, 000	52.25 %	513 ,63 2,7 00	62.25 %	621,4 44,30 0		
			Penunjang Penyelenggaraan Hari-Hari Besar	Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati					100 %	607, 723, 000	100 %	698 ,88 1,4 50	100 %	803,7 13,66 8		
1	20	31	Pengadaan barang dan jasa	Persentase Pengadaan Barang dan Jasa Yang dilaksanakan Dengan Tuntas					90 %	1,54 5,27 1,30 0	91 %	1,7 58, 519 ,00 0	92 %	2,093 ,775, 650		Bagian Pengadaan Barang dan (ULP)

BAB VIII

KINERJA

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Bab VIII ini memuat penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Banjar. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah menggambarkan target capaian indikator kinerja kunci yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK). Berbagai indikator tersebut adalah target capaian pada berbagai aspek dan fokus pembangunan jangka menengah Kabupaten Banjar tahun 2016-2021. Berbagai indikator tersebut mengacu pada aspek-aspek pembangunan sebagai berikut:

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

- a. Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi
- b. Kesejahteraan sosial

B. Aspek Pelayanan Umum

- a. Pelayanan Urusan Wajib
- b. Pelayanan Urusan Pilihan
- c. Pelayanan urusan penunjang

C. Aspek Daya Saing Daerah

8.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah Kabupaten Banjar adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjar

Indikator	Kondisi Awal	Capaian Kinerja					Kondisi Akhir
		2017	2018	2019	2020	2021	
Angka Kriminalitas	11,16			10,17	9,40	8,44	
Indeks Pendidikan	56,93			57,71	58,18	58,66	
Usia Harapan Hidup (UHH)	66,38			66,66	66,80	66,94	
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,11			3,08	3,06	3,04	
Persentase penurunan Angka Kemiskinan	2,96			2,66	2,50	2,45	
Indeks Resiko Bencana	176,4 (2015)			164	161	158	
Laju pertumbuhan ekonomi	4,66			6,11	6,32	6,52	
Indeks Gini	0,35			0,34	0,33	0,32	
Laju Inflasi	3,82			3,80	3,77	3,75	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,28			69,7	70,9	72,1	
Rasio konektivitas	NA			76,24%	78,90%	81,31%	
Rasio pemukiman layak huni	NA			70,45%	75,12%	78,72%	
Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	64,61			65,00	67,50	70,00	
Pertumbuhan Penduduk	1,55			1,5	1,5	1,5	

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (IKK)

Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan

Kabupaten Banjar yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah sebagai berikut:

Tabel 8. 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjar

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
{1}	{2}	{3}	{4}	{5}	{6}	{7}	{8}	{9}
1	Persentase budaya keagamaan yang dilestarikan	50%	.	.	66,66%	83,33%	83,33%	
1.1	Persentase even budaya yang bernilai religi	50%	.	.	57,14%	64,29%	64,29%	
1.2	Persentase hari-hari besar dan kegiatan keagamaan yang diperingati	100%	.	.	100%	100%	100%	
2	Persentase peningkatan dana zakat yang tersalurkan	374.281.000 (2017)			2,92%	10,21%	11,13%	
2.1	Jumlah ZIS yang terkumpul	485.978.246	.	.	583.200.000	641.520.000	699.840.000	
3	Persentase pesantren yang mendapatkan pembinaan	NA	.	.	40,00%	50,00%	60,00%	
3.1	Persentase sekolah formal yang menyelenggarakan program baca tulis al-quran sesuai standar	2015 = 60% 2016 = 66% 2017 = 66%	66%	66%	70%	75%	80%	
4	Persentase Penurunan Kasus Ketrentaman dan Ketertiban umum	NA	.	.	3%	2%	2%	
4.1	Persentase kasus pelanggaran perda bernuansa agama diselesaikan	100	.		100%	100%	100%	

4.2	Persentase organisasi pemuda yang dibina	NA	.	.	30%	40%	50%	
4.3	Persentase Pemuda yang berpotensi dikembangkan IMTAQ	NA	.	.	0,21%	0,24%	0,27%	
4.4	Pemangku kepentingan yang mengikuti seminar talk show, diskusi dan peningkatan wawasan kebangsaan	100 orang (2017)	450 orang	450 orang	450 Orang	450 orang	450 orang	
4.5	Kasus terkait isu SARA	0 kasus (2015)	0 kasus	0 kasus	0 Kasus	0 kasus	0 kasus	
4.6	Persentase ormas yang terdaftar	12.17% (2017)	15%	15%	15%	15%	15%	
4.7	Persentase penurunan PEKAT (judi, miras,sajam) dan narkoba (2015: 213 kasus, 2016: 243 kasus), (2017: 201 kasus)	-14,08% (penurunan 2015-2016)	2%	2%	2%	2%	2%	
4.8	Persentase mediasi/fasilitasi penyampaian aspirasi oleh sekelompok masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Indeks Pendidikan	56,93			57,71	58,18	58,66	
5.1	Persentase anak usia 4-6 tahun yang terlayani Pendidikan Anak Usia Dini	2016 = 25% 2017 = 27,5% 2018 = ...			45%	50%	65%	
5.2	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	60,92%	67,80%	68,50%	69,00%	70,00%	71,00%	
5.3	Persentase capaian SPM Pendidikan	2016 = ...% 2017 = 84,75.% 2018 = ...			86,20%	88,34%	90,07%	

5.4	<i>Angka Partisipasi Murni (APM) :</i>		.	.	.	.	.	
	- SD/MI	89,01%	89,50%	90,00%	92,00%	93,00%	94,00%	
	- SMP/MTs	56,55%	58,69%	65,66%	67,86%	70,06%	70,06%	
5.5	<i>Angka Partisipasi Kasar (APK) :</i>							
	- SD/MI	100%	102,78%	102%	101,50%	101%	100%	
	- SMP/MTs	76,50%	77,66%	90,02%	92,78%	95,35%	95,35%	
5.6	* Persentase pesantren dalam penyelenggaraan kejar paket sesuai standar * Persentase masyarakat yang terlayani pendidikan kesetaraan, keaksaraan dan kecakapan hidup	55%	70%	80%	80%	90%	90%	
5.7	Persentase guru yang bersertifikasi	48%	60%	60%	60%	60%	60%	
5.8	Persentase tenaga kependidikan non guru terlatih (tidak tercantum pada IKK)	40%	44%	44%	45%	49%	51%	
5.9	Persentase sekolah yang terbina (tidak tercantum pada IKK)							
	- PAUD	84,00%	.	.	85,61%	85,61%	85,61%	
	- SD	75,30%	.	.	76,00%	79,00%	81,00%	
	- SMP	98,00%	.	.	100,00%	100,00%	100,00%	
6	Persentase pemustaka terhadap jumlah penduduk	NA			4,52%	4,70%	4,87%	
6.1	Persentase peningkatan jumlah pengunjung	6,73%			2,02	2,03	2,05	
7	Persentase budaya yang dilestarikan	65,85%			70,73%	75,61%	75,61%	

7.1	Persentase kelompok seni dan budaya yang dibina	80,00%			86,00%	90,00%	90,00%	
7.2	Persentase benda warisan budaya yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya	42,42%			47,22%	48,65%	48,65%	
7.3	Persentase ketersediaan data kebudayaan	66,67%			72,73%	74,29%	74,29%	
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	66,38			66,66	66,80	66,94	
8.1	Persentase keluarga yang memenuhi 12 Indikator kesehatan	NA			60,00%	62,50%	65,00%	
8.2	Persentase pencapaian indikator SPM di Puskesmas	NA			100%	100%	100%	
8.3	Persentase Puskesmas dan jaringannya dengan kondisi baik	NA			77,49%	90,22%	90,22%	
8.4	Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Kesehatan Ibu	NA			75%	80%	85%	
8.5	Cakupan kunjungan neonatal	NA			100%	100%	100%	
8.6	Cakupan Penanganan Kasus Baru Pneumonia Pada Balita melalui MTBS	NA			75%	80%	85%	
8.7	Cakupan imunisasi lengkap	NA			97%	98%	100%	
8.8	Persentase pencapaian Indikator Mutu Pelayanan Unit Perawatan Bayi	NA			75%	80%	85%	
8.9	Angka penemuan Kasus penyakit menular	NA			1,80%	1,75%	1,70%	
8.10	Persentase penggunaan obat tradisional di Puskesmas	NA			85,00%	90,00%	90,00%	
8.11	Persentase Puskesmas yang	NA			90,00%	95,00%	100,00%	

	Memiliki ketersediaan obat, BAKHP, BMHP dan vaksin							
8.12	Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	NA			63,00%	75,00%	83,00%	
8.13	Persentase pengendalian penyakit berbasis kolaboratif	NA			95,00%	95,00%	95,00%	
8.14	Persentase Puskesmas dengan Pandu PTM	NA			45,80%	50,00%	54,16%	
8.15	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA	NA			100,00%	100,00%	100,00%	
8.16	Persentase Puskesmas dan Rumah Sakit yang melaksanakan Kesehatan Tradisional	NA			45,00%	60,00%	70,00%	
8.17	Persentase masyarakat miskin yang dilayani	NA			na	1,0%	1,5%	
8.18	Persentase Puskesmas yang melaksanakan manajemen puskesmas sesuai standart	NA			60,00%	70,00%	80,00%	
8.19	Persentase Kecamatan Yang Melaksanakan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)	NA			55,00%	65,00%	65,00%	
8.20	Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Kerja	NA			50,00%	60,00%	60,00%	
8.21	Persentase Puskesmas Melaksanakan Kegiatan Kesehatan Olahraga	NA			25,00%	35,00%	50,00%	
8.22	Persentase Pelayanan	NA			100,00%	100,00%	100,00%	

	Penanggulangan Masalah Kesehatan							
8.23	Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan Rujukan	NA			100,00%	100,00%	100,00%	
8.24	Persentase pemeriksaan Laboratorium yang terstandarisasi	NA			100,00%	100,00%	100,00%	
8.25	Persentase desa/kelurahan yang memiliki kebijakan berwawasan kesehatan	NA			60,00%	70,00%	70,00%	
8.26	Prevalensi status gizi balita kurus (BB/TB)	NA			10,25%	10,15%	10,00%	
8.27	Persentase Status gizi balita : * gizi kurang * gizi buruk	NA	15,2 5,20	15,15 5,10	15 5,0	14,9 4,9	14,9 4,9	
8.28	Persentase puskesmas yang terakreditasi	NA			100%	100%	100%	
9	Indeks Ketahanan Pangan	NA	.	.	50,90%	51,00%	51,10%	
9.1	Tingkat ketersediaan energi dan protein perkapita	171%			100%	110%	115%	
9.2	Stabilitas harga dan pasokan pangan utama	9,17%			< 25%	< 15%	< 10%	
9.3	Nilai/Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	89,1			91,3	91,9	92,5	
9.4	Kategori/ Skor Keamanan Pangan (SKP)	41,67%			73%	74%	80%	
10	Tingkat pertumbuhan penduduk	1,55 (2015)	.	.	1,00	1,00	1,00	

10.1	Persentase akseptor KB aktif	69,17%	.	.	70%	72%	75%	
10.2	Persentase PUS dengan Usia Isteri di bawah usia 20 tahun	23,81%	.	.	15%	14%	13,75%	
10.3	Persentase Kelompok bina ketahanan yang aktif	47,30%	.	.	50%	53%	55%	
10.4	Persentase Kelompok Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja yang terbentuk	66,20%	.	.	80%	81%	83%	
11	Indeks kebugaran	NA			0,5	0,6	0,7	
11.1	Persentase fasum yang dimanfaatkan untuk aktivitas olahraga massal	NA			60%	80%	100%	
11.2	Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	NA			10%	15%	20%	
12	Persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan	NA			0,01	0,02	0,03	
12.1	Persentase peningkatan peluang kerja baru	1,5% (2017)			5%	5%	5%	
12.2	Persentase pencari kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	0,30%			1%	1%	1%	
13	Persentase Penurunan Sengketa Industrial	NA			6	7	8	
13.1	Persentase sengketa industrial yang diselesaikan	100%			100%	100%	100%	
14	Persentase penurunan PMKS	1,86			1,51	2,05	2,33	
14.1	Persentase PMKS mendapatkan Pelayanan Sosial	20,00	22,64	50,49	52,17	53,64	67,38	
14.2	Persentase anak terlantar dalam panti yang terbina	0,00	22,06	25,74	29,41	33,09	36,76	

14.3	Persentase Keluarga miskin (PKH) yang mendapatkan bantuan	80,00	100	100	100	100	100	
14.4	Persentase Para Penyandang Cacat dan Trauma yang mendapatkan pembinaan	10,00	21,47	25,05	28,63	32,21	35,79	
14.5	Persentase anak/orang terlantar luar panti yang dibina	10,00	21,78	23,59	29,04	32,67	36,30	
14.6	Persentase Eks Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani	15,00	25,97	30,30	34,63	38,96	43,29	
14.7	Persentase pengaduan PMKS yang terfasilitasi pada SLRT	0	100%	100%	100%	100%	100%	
14.8	Persentase korban terdampak bencana alam yang tertangani	80,00	100%	100%	100%	100%	100%	
14.9	Persentase data kemiskinan yang terverifikasi dan tervalidasi dengan tepat dan akurat	50,00	100%	100%	100%	100%		
14.10	Persentase Tertanganinya Rumah Layak Huni Bagi Keluarga Miskin	0,00	15	13	20	25	27	
15	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,68 (2015)	.	.	.	.	.	
15.1	Persentase kelompok perempuan dalam usaha ekonomi terbina	10%	.	.	15%	25%	35%	
15.2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi	81%	.	.	85%	85%	90%	
15.3	Kategori kabupaten layak anak	NA	.	.	Madya	Madya	Nindya	

16	Persentase peningkatan pemahaman & kemampuan tentang kebencanaan daerah rawan bencana >>> Persentase peningkatan kapasitas pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha	NA	.	.	70,0%	75,0%	80,0%	
16.1	Pencegahan dini mitigasi bencana.	NA	.	.	70%	75%	80%	
16.2	Persentase kejadian bencana yang ditanggulangi.	100	.	.	100%	100%	100%	
16.3	Luasan kawasan banjir yang terlindungi	NA			0,96	1,04	1,50	
17	Persentase penanganan RR (rehabilitasi dan rekontruksi)	NA	.	.	20%	25%	30%	
17.1	Persentase rehab rekon pasca bencana.	NA	.	.	20%	25%	30%	
17.2	Persentase implementasi dokumen perencanaan penanggulangan bencana	NA	.	.	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
18	Pertumbuhan PDRB sektor pertanian, peternakan dan jasa pertanian	(1,10)	.	.	2,05	2,08	3,01	

18.1	Pertumbuhan luas tanam (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian)	Padi sawah - 12,32% Padi Ladang 6,67% Jagung 87,23% Kedelai - 98,76% Jeruk :- 45,88% Pisang: - 28,62% durian: - 13,07%			Padi sawah 2,31% Padi Ladang 2,31% Jagung 2,03% Kedelai 1,99% Jeruk :2,10% Pisang: 2,02% durian:2,04%	Padi Sawah 2,32% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,04% Kedelai 2,00% Jeruk :2,11% Pisang: 2,07% durian:2,09%	Padi Sawah 2,34% Padi Ladang 2,32% Jagung 2,08% Kedelai 2,19% Jeruk : 2,12% Pisang: 2,08% durian:2,14%	
18.2	Pertumbuhan produktivitas (%) : * tanaman pangan (padi, jagung, kedelai) * hortikultura (jeruk, pisang, durian)	Padi Sawah 2,23% Padi Ladang - 15,44% Jagung 21,80% Kedelai - 13,52% Jeruk :0,27% Pisang: 43,48% Durian:- 73,42%			Padi Sawah 2,25% Padi Ladang 2,18% Jagung 1,89% Kedelai 2,01% Jeruk :2,00% Pisang: 2,31% Durian:2,00%	Padi Sawah 2,26% Padi Ladang 2,20% Jagung 1,90% Kedelai 2,02% Jeruk :2,24% Pisang: 2,44% Durian:2,08%	Padi Sawah 2,27% Padi Ladang 2,22% Jagung 1,91% Kedelai 2,03% Jeruk :2,47% Pisang: 2,,57% Durian:2,16%	

18.3	Persentase peningkatan nilai kelas kelompok tani (%) Persentase penyuluh yang lulus diklat dengan predikat baik	42 % 100%			30 % 100%	35% 100%	40% 100%	
18.4	Luasan lahan pertanian yang terlayani air irigasi	NA	80%	80%	82%	83%	83%	
18.5	Rasio jaringan irigasi	NA	.	.	18,51	18,51	18,51	
18.6	Persentase peningkatan produktifitas tanaman perkebunan	0,64%	1,29%	1,32%	1,47%	1,96%	2,45%	
18.7	Persentase peningkatan kelahiran ternak	1,37%	1,81%	2,23%	2,62%	2,97%	3,31%	
18.8	Persentase menurunnya angka kematian ternak : ternak besar unggas	0,34 7,00	< 0,34% < 6,40%	< 0,33% < 6,30%	<0,33% <5,70%	<0,32% <5,50%	<0,32% <5,50%	
18.9	Persentase kelompok tani yang teridentifikasi dan difasilitasi bantuan	0,50%	0,86%	0,98%	1,00%	1,50%	2,00%	
18.10	Persentase penyuluh yang bersertifikat	9,60%	20,00%	21,00%	22%	23%	24%	
18.11	Pertumbuhan produksi olahan hasil pertanian TPH : * komoditas olahan * jenis produk olahan	NA			Komoditas olahan 33,33% Jenis produk olahan 28,57 %	Komoditas olahan 37,50% Jenis produk olahan 33,33 %	Komoditas olahan 45,55% Jenis produk olahan 41,66 %	
18.12	Persentase peningkatan produksi karet Sit yang	0,06%	1,60%	1,80%	2,0%	2,5%	3,0%	

	dihasilkan UPPB							
18.13	Persentase peningkatan produksi pengolahan hasil ternak	1,00%	1,28%	1,37%	1,41%	1,47%	1,51%	
19	Pertumbuhan PDRB sektor perikanan	7,68			4,6	4,7	4,8	
19.1	Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (ton)	58.105 (2017)	50.000	55.000	63.985	67.525	70.761	
19.2	Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap (ton)	10,182	11.182	11.492	10.050	10.262	10.474	
19.3	Penurunan kasus ilegal fishing	baru	na	na	1	1	1	
19.4	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	690	710	720	730	740	745	
	Angka konsumsi ikan		51	51	52	53	54	
20	Pertumbuhan omzet koperasi	-19,18%			4	4	4	
20.1	Persentase koperasi aktif.	49%	63,50%	64,50%	65,50%	66,50%	67,50%	
20.2	Persentase koperasi yang sehat	14% (2017)			26%	32%	38%	
21	Pertumbuhan omzet usaha mikro	5			5,2	5,2	5,2	
21.1	Persentase UM terdata yang memiliki IUMK	14,63%	21,93%	26,84%	29,78%	32,73%	35,67%	
21.2	UM Bankable.	347 (2015)	4.523	2.595	500	500	500	
21.3	Perkembangan UM yang bermitra dengan pengusaha besar	10 (2017)			50	60	65	
22	Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	6,72			7,10	7,50	7,60	

22.1	Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dipantau dan dikendalikan	9%			9%	9%	12%	
22.2	Persentase sarana dan prasarana perdagangan yang ditingkatkan dan dikembangkan	10%			33%	40%	40%	
22.3	Persentase pelaku usaha kecil menengah, besar dan PKL serta asongan yang dibina	20%			33%	35%	40%	
22.4	Persentase pelaku tertib niaga	16%	.	.	25%	30%	30%	
22.5	Persentase Peningkatan Nilai Ekspor Komoditi Karet	499877690,3 5 USD	504447929, 32 USD	509018168, 29 USD	10%	10%	12%	
22.6	Persentasi produk/komoditi yang dipasarkan	8%	.	.	36%	36%	40%	
23	Pertumbuhan PDRB sektor perindustrian pengolahan	5,92			6,10	6,50	6,50	
23.1	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri ILMEASA	1%			2%	2%	2%	
23.2	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri AGROKIM	1%			2%	2%	2%	
23.3	Persentase Cakupan Pengembangan Sentra Indutri	50%			75%	80%	85%	
24	Pertumbuhan PDRB sektor pariwisata	6,10	.	.	6,51	6,71	6,74	
24.1	Persentase destinasi wisata yang telah dikembangkan.	48,08%	.	.	75,0%	80,8%	80,8%	
24.2	Persentase pelaku pariwisata yang aktif	36,74%	.	.	67,05%	83,33%	83,33%	
24.3	Jumlah inovasi pemasaran	NA	.	.	3	4	5	

	pariwisata							
24.4	Peningkatan jenis paket wisata yang dikembangkan	NA	.	.	3	5	5	
25	Persentase pertumbuhan investasi (PMDN dan PMA)	NA	.	.	1	1	1	
25.1	Peningkatan realisasi nilai investasi (dalam rupiah)	2.400.489.40 5.608,00			1.700.000.000. 000	1.717.000.000. 000	1.734.170.000. 000	
25.2	Pertumbuhan investor	70			30	60	90	
26	Indeks kualitas air (IKA)	36	tercemar	tidak tercemar	39,00	41,00	43,00	
26.1	1. Persentasi Perusahaan Yang Telah Melaksanakan Kewajiban Dalam Ijin Lingkungan 2. Persentasi Jumlah Pencemar Institusi dan Non Institusi Yang Telah dilakukan Pembinaan dan Pemantauan	NA			25% 15%	35% 25%	45% 35%	
27	indeks kualitas udara	103	tidak tercemar	tidak tercemar	106	108	110	
28	indeks kualitas tutupan lahan	65,54			65,64	66,54	67,46	
28.1	Presentase menurunnya tingkat kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Banjar	NA			35%	50%	60%	
28.2	Persentase Data base Informasi Lingkungan yang Valid/update	NA			25%	28%	30%	
28.3	Presentase Perusahaan yang memiliki Dokumen Lingkungan	NA			80%	82%	85%	

28.4	Presentasi kawasan yang lestari, hijau, indah nyaman sejahtera dan barokah serta terpeliharanya hutan, lahan dan keanekaragaman hayati	NA			20%	28%	30%	
28.5	Presentase kawasan yang telah dibina dan dikembangkan untuk menjadi kawasan yang hijau, hemat energi dan mandiri	NA			20%	28%	30%	
28.6	Persentase Ketaatan perusahaan terhadap pengelolaan lingkungan hidup	NA			50%	53%	55%	
28.7	Persentase pelayanan pengaduan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan kasus sengketa lingkungan yang terselesaikan	NA			70%	73%	75%	
28.8	Persentase Kepala Keluarga yang peduli lingkungan	NA			20%	40%	60%	
28.9	Persentase sekolah yg mendapatkan penghargaan adiwiyata	NA			20%	40%	60%	
30	Rasio prasarana transportasi	NA	.	.	63,16%	65,28%	66,95%	
30.1	Persentase Panjang Jaringan Jalan yang Dibangun	NA			40,35%	43,97%	45,78%	
30.2	Persentase Panjang Jaringan Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	NA			70,13%	70,62%	70,87%	
30.3	Persentase Jembatan Kabupaten dalam Kondisi Baik	NA			91,13%	92,15%	92,66%	

30.4	Persentase Tersedianya Database Jaringan Jalan yang Up to Date	NA			100%	100%	100%	
30.5	Persentase Penilaian Kemampuan penanganan jalan dan jembatan dalam kondisi darurat	NA			5,58%	8,10%	9%	
30.6	Persentase penilaian kemampuan alat berat dalam menunjang kegiatan kebinamargaan	NA			1,70%	1,82%	1,90%	
30.7	Persentase Panjang Jaringan Jalan Poros Desa dalam Kondisi Mantap	NA			75,11%	75,92%	76,33%	
30.8	Persentase Jembatan Desa dalam Kondisi Baik	NA			66,84%	67,85%	68,36%	
30.9	Persentase Ketersediaan prasarana perhubungan dalam kondisi baik	NA			80%	85%	90%	
30.10	Persentase angkutan umum yang masuk terminal	NA			83,95%	87,60%	91,25%	
30.11	Persentase Ketersediaan rambu yang layak	NA			80%	85%	90%	
31	Rasio sarana transportasi	NA			89,32%	92,53%	95,67%	
31.1	Persentase angkutan umum yang beroperasi	NA			90%	95%	100%	
31.2	Persentase Kendaraan wajib uji yang lolos PKB	NA			94,96%	97,60%	100%	
31.3	Persentase ketaatan berlalu-lintas	NA			83,00%	85,00%	87,00%	

32	Rasio rumah layak huni	NA			97,71%	97,86%	98,00%	
32.1	Persentase cakupan rumah layak huni yang ditangani	NA			93,14%	93,58%	94,01%	
32.2	Persentase perizinan yang difasilitasi	NA			100%	100%	100%	
32.3	Persentase ketersediaan kebijakan di bidang perumahan	NA			100%	100%	100%	
33	Rasio lingkungan pemukiman yang nyaman	NA			48,26%	52,79%	56,56%	
33.1	Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Akses Air Minum yang Aman	NA			71,10%	78,13%	81,77%	
33.2	Persentase Ketersediaan/Kapasitas tampung air baku	NA			71,4%	71,6%	71,92%	
33.3	Persentase Penduduk yang Mendapatkan Layanan Limbah	NA			45,57%	53,57%	61,57%	
33.4	Persentase Pengurangan Sampah	NA			20,0%	22,0%	24,0%	
33.5	Persentase Penanganan Sampah	NA			80%	75%	74%	
33.6	Persentase pelaku usaha yang memiliki izin pengelolaan limbah B3	NA			30%	40%	50%	
33.7	Persentase sampah yang terkelola di TPA	NA			100%	100%	100%	
33.8	Persentase Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Di Perkotaan	NA			2,00%	3,50%	5,00%	
33.9	Persentase Peningkatan Luasan Kawasan perkotaan yang terlayani sistem jaringan	NA			37,72%	38,07%	39,01%	

	drainase							
33.10	Persentase Pengurangan genangan	NA			60%	65%	70%	
33.11	Persentase Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang	NA			83,27%	91,63%	100%	
33.12	Persentase jalan lingkungan yang terlayani penerangan	NA			12,00%	17,07%	21,95%	
33.13	Persentase penerangan jalan yang dilalui angkutan umum	NA			81,5%	83,0%	85,0%	
33.14	Persentase peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran dan bencana lainnnya	NA	.	.	18,0%	35,3%	52,9%	
33.15	Persentase bangunan gedung fasilitas publik milik pemerintah yang aparnya dalam kondisi baik	NA	.	.	54,3%	65,2%	69,6%	
33.16	Persentase kasus kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang tertangani	NA	.	.	70,0%	73,0%	75,0%	
33.17	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis	NA			79,47%	80,00%	80,52%	
33.18	Persentase kawasan kumuh yang ditangani	NA			0,19%	1,59%	3,00%	
33.19	Cakupan pelayanan peningkatan kualitas/pencegahan kumuh	NA			11,11%	44,44%	44,44%	
34	Persentase pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang	NA			56,28%	67,12%	75,18%	

34.1	Persentase penilaian kesesuaian RUTR terhadap dinamika pembangunan	NA			60%	70%	80%	
34.2	Persentase penyusunan rencana rinci tata ruang	NA			40%	80%	100%	
34.3	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	NA	55%	57,50%	92,1%	92,1%	92,2%	
34.4	Persentase Tersedianya Tata Bangunan dan Lingkungan	NA			64%	82%	100%	
34.5	Persentase Kesesuaian Bangunan terhadap Tata Ruang	NA			8,33%	9,15%	10,20%	
34.6	Persentase pemenuhan kebutuhan tenaga terampil konstruksi yang memenuhi persyaratan kompetensi	NA			80%	85%	87%	
34.7	Prosentase Tersedianya 7 (tujuh) Layanan Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi	NA			90%	90%	90%	
34.8	Prosentase Tersedianya Layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan Waktu Penerbitan 10 (sepuluh) Hari Kerja Setelah Persyaratan Lengkap	NA			100%	100%	100%	
34.9	Prosentase Terlaksananya Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Konstruksi	NA			54%	57%	60%	
35	Indeks profesionalisme ASN	NA	.	.	59,49	65,00	70,00	

35.1	Persentase Distribusi ASN Sesuai kompetensi	NA	.	.	82,96	85,05	90,00	
35.2	Persentase jumlah rata - rata aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan	NA	29%	30%	31%	32%	33%	
35.3	Persentasi jabatan sesuai kompetensi	NA	.	49,5	76,50	83,00	90,00	
35.4	Nilai SKP	86%	86%	87%	88%	89%	90%	
35.5	IKP (Indek Kepuasan Penguna) administrasi kepegawaian	NA	.	86,50%	87,00%	87,50%	88,00%	
35.6	Persentase ASN yang tidak melanggar peraturan disiplin	NA	.	99,10%	99,25%	99,40%	99,55%	
35.7	Terfasilitasinya kesejahteraan ASN	NA	.	100%	100%	100%	100%	
36	Indeks kepatuhan	NA			88,38	89,25	90,13	
36.1	Persentase SKPD yang telah menjalankan WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani)	NA			5%	6%	6%	
36.2	Tingkat maturitas SPIP	3			3 Level	3 Level	3 Level	
36.3	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	81,40%			80%	80%	80%	
36.4	Tingkat kapabilitas APIP	3			3 Level	3 Level	3 Level	
37	Nilai Sakip	62,62	.	.	70,01	72,05	75,30	
37.1	Persentase ketepatan waktu perencanaan Persentase capaian indikator	100%			100%	100%	100%	

	RPJMD							
37.2	Persentase ASN Bappelitbang yang mampu mengerjakan tupoksi	NA			50%	55%	55%	
37.3	Peningkatan jumlah penerima manfaat data informasi pembangunan	NA			50%	70%	70%	
37.4	Persentase elemen data pembangunan termutakhirkan	NA			50%	50%	50%	
37.5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	NA			50%	60%	60%	
37.6	Persentase usulan inovasi yang diterapkan	NA			50%	70%	80%	
37.7	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang perekonomian				71,78%	76,13%	79,38%	
37.8	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang sosial budaya dan sumber daya manusia				65%	67%	69%	
37.9	Nilai rata-rata SAKIP SKPD lingkup bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah				70%	72%	74%	
38	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu	NA	.	.	73%	73%	.	
38.1	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif dan presiden	70,14% (Pileg : 74.41% & Pilpres : 65.87%)			73%	73%	73%	
38.2	Persentase partisipasi	61,89%			73%	73%	73%	

	masyarakat dalam pilkada provinsi							
39	Skor evaluasi perkembangan desa	386	.	.	416	431	446	
39.1	Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Pemerintahan	NA	.	.	137	142	147	
39.2	Persentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang baik	45,13%	.	.	60%	80%	100%	
39.3	Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kewilayahan	NA			104	109	114	
39.4	Skor Evaluasi Perkembangan Desa Bidang Kemasyarakatan	NA	.	.	175	180	185	
40	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA			2,3	2,5	2,8	
40.1	Tingkat Kematangan Domain Kebijakan Internal SPBE (indeks)	NA			2,29	2,35	2,41	
40.2	Tingkat Kematangan Domain Tata Kelola SPBE (indeks)	NA			2,57	2,86	3,00	
40.3	Tingkat Kematangan Domain Layanan SPBE (indeks)	NA			2,15	2,39	2,79	
40.4	Persentase pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan dengan tepat waktu	76,51%			90%	91%	92%	
41	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	NA			40 >>>	70 >>>	100 >>>	
41.1	Cakupan jumlah informasi yang terpublikasikan	NA			92,12%	95,54%	97,24%	
41.2	Persentase kelengkapan data statistik sektoral	NA			33%	66%	100%	

41.3	Peningkatan level keamanan Informasi	NA			272	315	374	
41.4	Persentase capaian kinerja pelaksanaan Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah	100			100%	100%	100%	
41.5	Persentase unit Pengelola kearsipan yang menyusun arsip secara baku	100			100,0%	100,0%	100%	
41.6	Cakupan Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	100			100%	100%	100%	
41.7	Persentase Capaian Kinerja perbaikan sistem administrasi kearsipan	NA			66%	83%	100%	
41.8	Respon layanan Informasi kearsipan	NA			10 Menit	7 Menit	5 Menit	
42	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NA			81,9	82	82	
42.1	Cakupan Kepemilikan Akte Kelahiran usia 0 -18 th	62	62%	63%	70%	75%	80%	
42.2	Persentase perkawinan penduduk yang didata	NA	-	1%	1%	1%	1%	
42.3	Persentase perceraian penduduk yang didata	NA	-	1%	1%	1%	1%	
42.4	Cakupan penerbitan akte kematian	NA	20%	25%	30%	35%	40%	
42.5	Persentase dokumen/arsip pencatatan sipil yang dikelola	NA	30%	40%	50%	60%	65%	
42.6	Cakupan Kepemilikan KTP-el	NA	95%	96%	97%	98%	98%	

42.7	Cakupan kepemilikan KK	NA	97%	97%	98%	98%	98%	
42.8	Cakupan Kepemilikan KIA	NA	–	–	5%	9%	18%	
42.9	Persentase pendataan penduduk pindah datang	NA	–	3%	3%	3%	3%	
42.10	Persentase database kependudukan dengan data SIAK Pelayanan	NA	-	70%	75%	77%	79%	
42.11	Persentase data dan informasi kependudukan yang dimanfaatkan oleh pengguna	NA	NA	20%	44%	72%	100%	
42.12	Persentase inovasi yg dilaksanakan	NA	NA	NA	80%	85%	90%	
42.13	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	NA			95%	100%	100%	
42.14	Persentase perda yang ditegakkan	NA			95%	98%	100%	
42.15	Rasio jumlah satuan linmas per RT	NA			1:1 Rasio	1:2 Rasio	1:2 Rasio	
42.16	Persentase konflik tanah yang difasilitasi	NA			100%	100%	100%	
42.17	Persentase aset tanah pemkab yang tersertifikasi	NA			17,69	19,82	21,94	
42.18	Raperda	NA			100%			
42.19	Persentase Pelayanan BLUD yang terpenuhi	NA			80%	82%	84%	
42.20	Persentase capaian indikator SPM Rumah Sakit	NA			81%	82%	83%	
42.21	Akreditasi Rumah sakit	NA			Paripurna	Paripurna	Paripurna	
42.22	Persentase sarana dan prasarana umah Sakit/Rumah	NA			81%	82%	82%	

	Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata dalam kondisi baik							
42.23	Cakupan pemeliharaan alat kesehatan, sarana dan prasarana berdasarkan jenis pelayanan Rumah sakit	NA			100%	100%	100%	
42.24	Persentase SDM pelayanan kesehatan berdasarkan kualifikasi	NA			80%	81%	82%	
42.25	IKM pelayanan perijinan	80,34			82,0%	82,1%	82,2%	
42.26	Persentase program yang telah dilaksanakan dalam dokumentasi road map reformasi birokrasi	85,71			100%	100%	100%	
42.27	Rata-rata IKM Kecamatan	76,83%			82	83	84	
43	Opini BPK	WTP =1			1	1	1	
43.1	Persentase Penyaluran Belanja Daerah Tepat Waktu	89,14%			100%	100%	100%	
43.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang Tepat Waktu	100%			100%	100%	100%	
43.3	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun laporan keuangan sesuai SAP	100%			100%	100%	100%	
43.4	Persentase Penyampaian Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) secara baik	100%			100%	100%	100%	
43.5	Persentase Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset	100%			100%	100%	100%	

	Daerah							
44	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	11,36% (2017)			11,25%	11,50%	11,75%	
44.1	Persentase Kepatuhan Membayar Pajak Daerah	NA	.	.	90%	92%	95%	
44.2	Persentase capaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan	100%	.	.	100%	100%	100%	
44.3	Persentase capaian penerimaan BPHTB	100%	.	.	100%	100%	100%	
44.4	Persentase SKPD Pemungut yang Mencapai Target Retribusi Daerah	NA	.	.	100%	100%	100%	
44.5	Persentase data target pendapatan daerah yang sinkron	NA	.	.	80%	80%	85%	
45	Nilai/Skor EKPPD	3,1797			3,1800	3,1900	3,2000	
45.1	Persentase keterisian data IKK	100%			100%	100%	100%	
45.2	Persentase BUMD yang sehat	100%			100%	100%	100%	
45.3	Persentase kebijakan lingkup urusan perekonomian yang terlaksana	100%			100%	100%	100%	
45.4	Persentase kerjasama pemerintah daerah dengan pihak terkait yang ditindaklanjuti	100%			100%	100%	100%	
45.5	Persentase hari-hari besar nasional yang diperingati	100%			100%	100%	100%	
45.6	Persentase Permasalahan Segmen Batas Wilayah Yang Diselesaikan	25,53%			42,25%	52,25%	62,25%	
45.7	Persentase Peraturan Yang	100%			100%	100%	100%	

	Disahkan							
45.8	Persentase Dokumen Peraturan Perundang-undangan Yang Dipublikasikan	100%			100%	100%	100%	
45.9	Persentase Terfasilitasi Permasalahan Hukum Yang Tertangani	100%			100%	100%	100%	
45.10	Persentase pelayanan kedinasan KDH dan WKDH	100%			100%	100%	100%	
45.11	Persentase pelayanan keprotokolan dan kehumasan atas kegiatan pemerintah daerah	90%			90%	95%	99%	
45.12	Persentase Pelayanan Kantor Perwakilan terhadap KDH/WKDH/Ketua DPRD	100%			100%	100%	100%	
45.13	Legislasi (Persentase Raperda yang disetujui)	NA			100%	100%	100%	
45.14	Anggaran (Persentase penyelesaian Dokumen Anggaran tepat waktu (KUA PPAS, APBD dan PAPBD)	100%			100%	100%	100%	
45.15	Pengawasan (persentase pembahasan pertanggungjawaban tepat waktu (LKPJ dan LKD)	100%			100%	100%	100%	

BAB IX

PENUTUP

Dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi para aktor pembangunan, khususnya pemerintah kabupaten. Dokumen ini mengakomodasi visi dan misi bupati serta wakil bupati yang kemudian diterjemahkan secara operasional dalam bentuk program-program prioritas. Penetapan berbagai prioritas pembangunan dilakukan secara sistematis dan rinci melalui logika perencanaan yang sinergis.

Pada tahapan substantif, visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah diturunkan ke beberapa tujuan dan sasaran. Pada tahapan yang lebih operasional, beberapa tujuan dan sasaran diterjemahkan ke beberapa strategi dan arah kebijakan yang kemudian ditetapkan secara formal menjadi program-program prioritas. Dalam rangka memastikan konsistensi antar tahapan pelaksanaan pembangunan tersebut, maka perlu ditetapkan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

Perubahan RPJMD Kabupaten Banjar tahun 2016-2021 ini merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD. Substansi dalam dokumen Perubahan RPJMD akan menjadi acuan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun pertama bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih pada periode selanjutnya. Rencana pembangunan pada RPJMD Periode 2016-2021 diupayakan secara optimal untuk memenuhi target.

Perubnahan RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 merupakan pedoman bagi setiap kepala perangkat daerah dalam menyusun Renstra-PD dan pedoman untuk menyusun Renja-PD. Dalam rangka memastikan sinergi antar dokumen perencanaan,

hendaknya RPJMD ini dilaksanakan dengan memenuhi beberapa kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, dunia usaha serta masyarakat dituntut untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen ini;
2. Perubahan Dokumen RPJMD Kabupaten Banjar Tahun 2016-2021 ini selanjutnya dijabarkan dalam RKPD;
3. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar wajib menyusun Renstra-PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja masing-masing, yang berpedoman pada RPJMD ini. Dokumen ini juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja (Renja- PD);
4. Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja dan Pemerintah Kabupaten Banjar harus memastikan konsistensi antara dokumen Perubahan RPJMD dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah berupa Badan/Dinas/Unit Satuan Kerja;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjar wajib melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD ke Renstra-PD.

BUPATI BANJAR,

TTD

KHALILURRAHMAN